BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

BUPATI CIANJUR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah mempunyai peran dan fungsi penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah secara bertahap guna mempercapat perwujudan Indonesia emas 2045;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka agar kegiatan pembangunan di daerah dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran perlu ditetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
11. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program pembangunan daerah periode tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.

Pasal 3

(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat yang memuat visi, sasaran visi, misi dan arah pembangunan dan arah kebijakan transformasi Daerah.

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati.

(3) Periodesasi pembangunan jangka panjang Daerah dibagi dalam tahapan pembangunan jangka menengah dengan tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan Bupati.

Pasal 4

(1) Dalam rangka kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode jabatan Bupati berikutnya.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD tahun pertama periode jabatan Bupati selanjutnya.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika RPJPD adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

BAB VI : PENUTUP

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD;

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan;

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
Pada Tanggal 30 Agustus 2024
BUPATI CIANJUR

ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR SUGIH MUKTI SEKRETARIAT DAERAH

ENCEP SUHERLAN ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 66
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT (9/145/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau yang disebut RPJPD merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, serta sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah:

1. pendekatan teknokratik;
2. pendekatan partisipatif;
3. pendekatan politis;
4. pendekatan atas-bawah dan bawah-atas;
5. pendekatan holistik-tematik;
6. pendekatan integrative; dan
7. pendekatan spasial.

RPJPD dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok yang menjadi acuan bagi para calon kepala daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Tahapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan melalui berbagai dialog sektoral maupun lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024 NOMOR 66

KATA PENGANTAR

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN CIANJUR 2025-2045

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 merupakan landasan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang memuat rumusan visi dan misi Kabupaten Cianjur dua puluh tahun ke depan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah.

RPJPD Kabupaten Cianjur tahun 2025 – 2045 ini disusun berdasarkan kajian akademis serta jaring aspirasi salah satunya melalui *Focus Group Discussion* antara pemerintah daerah dengan *stakeholder* dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok yang menjadi acuan bagi para calon kepala daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Akhirnya, kami menyampaikan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 dan semoga dapat mendorong partisipasi seluruh pihak untuk turut aktif mewujudkan Cianjur Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan Berbasis Budaya.

Cianjur, 30 Agustus 2024

BUPATI CIANJUR

ttd/cap.

H. HERMAN SUHERMAN

DAFTAR ISI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN CIANJUR 2025-2045

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum I-5
1.3. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-7
1.4. Maksud Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 ..... I-9
1.5. Tujuan Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 ..... I-9
1.6. Sistematika Penulisan I-10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II-1**
2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Aspek Geografi II-1
2.1.2 Aspek Demografi II-47
2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya II-54
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi II-54
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya II-60
2.3. Aspek Daya Saing II-75
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah II-75
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) II-83

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah II-87
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi II-91
2.4. Aspek Pelayanan Umum II-96
2.5. Evaluasi RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 ..... II-105
2.5.1 Indeks Pembangunan Manusia II-106
2.5.2 Angka Kemiskinan II-106
2.5.3 Angka Pengangguran II-107
2.5.4 Pertumbuhan Ekonomi II-108
2.5.5 Ketimpangan Pendapatan II-108
2.5.6 PDRB Per Kapita II-109
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana II-112
2.6.1 Tren Demografi II-112
2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana II-117
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah II-163
2.7.1 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044 ..... II-163
2.7.2 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) II-178
2.7.3 Penelaahan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 . II-180
2.7.4 Penelaahan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 ..... II-186
2.7.5 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 ..... II-187
2.7.6 Penelahaan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur II-196
2.7.7 Penelahaan Peraturan Presiden (PERP RES) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan II-199
2.7.8 Penelahaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta II-200
2.7.9 Penelahaan Rancangan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kawasan Sekitarnya II-200

BAB III PERMASALAH DAN ISU STATEGIS DAERAH III-1
3.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Cianjur..... III-2
3.2. Isu Strategis..... III-27

BAB IV VISI DAN MISI IV-1
4.1. Visi IV-1
4.1.1 Visi Indonesia Emas 2045 ..... IV-1
4.1.2 Visi Provinsi Jawa Barat 2045 ..... IV-2
4.1.3 Visi Kabupaten Cianjur 2045 ..... IV-3
4.2. Misi IV-8

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK V-1
5.1. Arah Kebijakan V-1
5.1.1 Periode I Tahun 2025-2029 ..... V-2
5.1.2 Periode II Tahun 2030-2034 ..... V-6
5.1.3 Periode III Tahun 2035-2039 ..... V-8
5.1.4 Periode IV Tahun 2040-2045 ..... V-11
5.2. Sasaran Pokok V-23

BAB VI PENUTUP VI-1
6.1. Pedoman Transisi VI-1
6.2. Kaidah Pelaksanaan VI-2
6.3. Pembiayaan VI-2
6.4. Proses Pelaksanaan Manajemen Risiko VI-3
6.5. Ketentuan Insentif VI-3

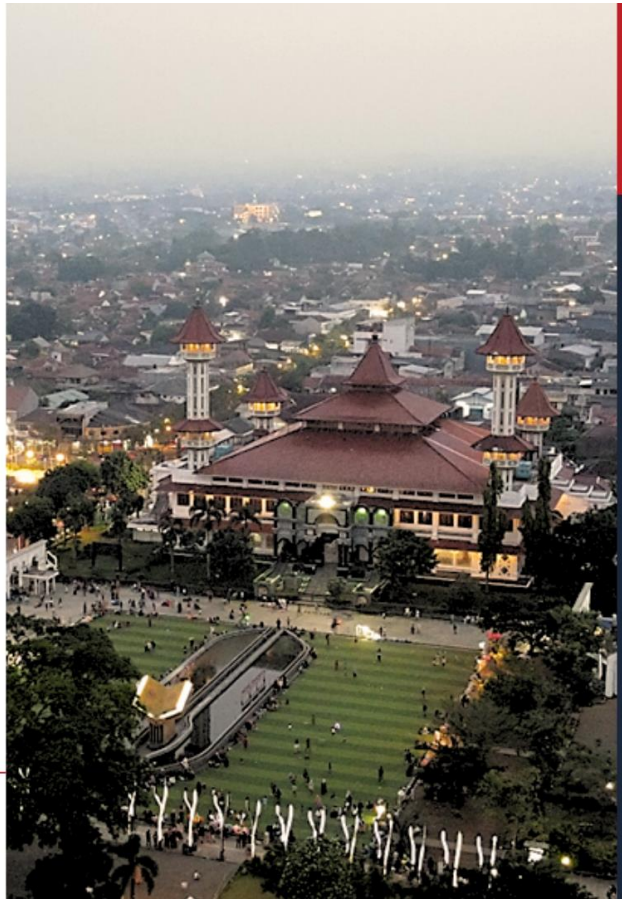

DAFTAR TABEL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN CIANJUR 2025-2045

Tabel 2.1. Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Cianjur II-2
Tabel 2.2. Elevasi Topografi Kabupaten Cianjur Menurut Kecamatan II-4
Tabel 2.3. Kemiringan Lerengan Kabupaten Cianjur Menurut Kecamatan II-6
Tabel 2.4. Jenis Geologi di Kabupaten Cianjur II-9
Tabel 2.5. Jenis Tanah di Kabupaten Cianjur..... II-11
Tabel 2.6. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Cianjur II-14
Tabel 2.7. Cekungan Air Tanah di Kabupaten Cianjur..... II-16
Tabel 2.8. Curah Hujan Kabupaten Cianjur Menurut Kecamatan... II-19
Tabel 2.9. Penggunaan Lahan di Kabupaten Cianjur II-23
Tabel 2.10. Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian..... II-25
Tabel 2.11. Prioritas Potensi Kawasan Pariwisata Kabupaten Cianjur II-30
Tabel 2.12. Nilai Bobot Jenis Bahaya II-34
Tabel 2.13. Kerentanan Bencana Kabupaten Cianjur II-35
Tabel 2.14. Rekapitulasi Kapasitas Bencana di Kabupaten Cianjur .. II-36
Tabel 2.15. Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Cianjur II-37
Tabel 2.16. Rekapitulasi Indeks Multibahaya di Kabupaten Cianjur. II-38
Tabel 2.17. Nilai Bobot Modifikasi Jenis Bahaya berdasarkan Perka BNPB..... II-38
Tabel 2.18. Potensi Multibahaya Per-Kecamatan di Kabupaten Cianjur II-39

Tabel 2.19. Kerentanan Multibahaya Per-Kecamatan di Kabupaten Cianjur II-40
Tabel 2.20. Capaian Target IKLH Kabupaten Cianjur II-43
Tabel 2.21. Tingkat Kerentanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2024 ..... II-44
Tabel 2.22. Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2023 ..... II-49
Tabel 2.23. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Cianjur Tahun 2023 ..... II-50
Tabel 2.24. Jumlah Penduduk Menurut Umur Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2023 ..... II-51
Tabel 2.25. Luas Wilayah, Persentase Penduduk, dan Kepadatan Menurut Kecamatan Tahun 2023 ..... II-52
Tabel 2.26. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2023 ..... II-53
Tabel 2.27. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten yang Berbatasan, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2014-2023 ..... II-55
Tabel 2.28. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten yang Berbatasan Tahun 2014-2023 ..... II-56
Tabel 2.29. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten yang Berbatasan Tahun 2014-2023 ..... II-57
Tabel 2.30. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten yang Berbatasan, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2014-2023 ..... II-58
Tabel 2.31. Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Cianjur dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 (%) II-61
Tabel 2.32. Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023 ..... II-62
Tabel 2.33. Jumlah Kematian Bayi dan Ibu di Kabupaten Cianjur Periode 2019–2023 ..... II-65
Tabel 2.34. Capaian Kinerja Layanan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023 .. II-71
Tabel 2.35. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2023 ..... II-73
Tabel 2.36. Indikator Kebudayaan Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2023 ..... II-73
Tabel 2.37. Capaian Kinerja Layanan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023 ..... II-74

Tabel 2.38. Capaian Kinerja Layanan Bidang Pengawasan Tahun 2019-2023 ..... II-74
Tabel 2.39. Capaian Kinerja Layanan Bidang Transmigrasi Tahun 2019-2023 ..... II-75
Tabel 2.40. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 ..... II-75
Tabel 2.41. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 ..... II-76
Tabel 2.42. Persentase Literasi dan Numerisasi Kabupaten Cianjur . II-86
Tabel 2.43. Kondisi Jalan Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023..... II-88
Tabel 2.44. Area Irigasi Terairi Tahun 2019-2023 ..... II-88
Tabel 2.45. Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2019-2023 ..... II-88
Tabel 2.46. Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Akses Air Minum Tahun 2019-2023 ..... II-89
Tabel 2.47. Kategori Indeks Infrastruktur II-90
Tabel 2.48. Indeks Infrastruktur Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023 ..... II-90
Tabel 2.49. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum II-91
Tabel 2.50. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 ..... II-93
Tabel 2.51. Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2022 - 2023 ..... II-93
Tabel 2.52. Capaian Kinerja Layanan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023 ..... II-94
Tabel 2.53. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Cianjur II-95
Tabel 2.54. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 ..... II-96
Tabel 2.55. Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Tahun 2019-2023 ..... II-98
Tabel 2.56. Hasil Antara Area pada Indesk Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2023 ..... II-99
Tabel 2.57. Hasil Antara Area pada Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Tahun 2021-2023 ..... II-99
Tabel 2.58. Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023 ..... II-102
Tabel 2.59. Hasil Evaluasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2019-2023 ..... II-104
Tabel 2.60. Indeks Keamanan Informasi Kabupaten Cianjur II-104

Tabel 2.61. Uraian Evaluasi Pencapaian RPJPD Tahun 2005 – 2025 Kabupaten Cianjur II-110
Tabel 2.62. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 ..... II-116
Tabel 2.63. Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 ..... II-117
Tabel 2.64. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 ..... II-118
Tabel 2.65. Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Kabupaten Cianjur II-119
Tabel 2.66. Proyeksi Kebutuhan Listrik Domestik Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 ..... II-120
Tabel 2.67. Proyeksi Kebutuhan Listrik Non-Domestik Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 ..... II-121
Tabel 2.68. Proyeksi Kebutuhan Prasarana Gardu Listrik Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045..... II-122
Tabel 2.69. Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Gardu Listrik Kabupaten Cianjur II-123
Tabel 2.70. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045..... II-124
Tabel 2.71. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 ..... II-132
Tabel 2.72. Proyeksi Selisih Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 ..... II-144
Tabel 2.73. Proyeksi Penduduk Usia Belajar Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 ..... II-151
Tabel 2.74. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 ..... II-154
Tabel 2.75. Proyeksi Selisih Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 ..... II-160
Tabel 2.76. Tahapan dan Fokus Pembangunan RPJP Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045..... II-182
Tabel 2.77. Persandingan Visi RPJPD Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sekitarnya II-201
Tabel 3. 1. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pendidikan III-2
Tabel 3. 2. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kesehatan..... III-4
Tabel 3. 3. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang III-6
Tabel 3. 4. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman III-9

Tabel 3. 5. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat III-11
Tabel 3. 6. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Sosial III-11
Tabel 3. 7. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Tenaga Kerja..... III-12
Tabel 3. 8. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak III-13
Tabel 3. 9. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pangan III-14
Tabel 3.10. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pertanahan..... III-14
Tabel 3.11. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Lingkungan Hidup..... III-15
Tabel 3.12. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... III-16
Tabel 3.13. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... III-17
Tabel 3.14. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... III-17
Tabel 3.15. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perhubungan..... III-18
Tabel 3.16. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Komunikasi dan Informatika..... III-18
Tabel 3.17. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah..... III-19
Tabel 3.18. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Penanaman Modal III-19
Tabel 3.19. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kepemudaan dan Olahraga..... III-20
Tabel 3.20. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Statistik..... III-21
Tabel 3.21. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perdandian III-21
Tabel 3.22. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kebudayaan..... III-22
Tabel 3.23. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perpustakaan III-22
Tabel 3.24. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kearsipan III-23
Tabel 3.25. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perikanan dan Kelautan III-23

Tabel 3.26. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pariwisata III-24
Tabel 3.27. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pertanian III-24
Tabel 3.28. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perdagangan III-25
Tabel 3.29. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perindustrian III-26
Tabel 3.30. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Transmigrasi III-26
Tabel 3.31. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik III-26
Tabel 3.32. Keterkaitan Permasalahan Kabupaten Cianjur dengan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Cianjur III-28
Tabel 3.33. Pembobotan Isu Strategis Kabupaten Cianjur III-33
Tabel 3.34. Hasil Telaah Isu Strategis Tingkat Internasional, Nasional, dan Provinsi Dalam Perumusan Isu Strategi .. III-35
Tabel 4. 1. Pertimbangan Visi RPJPN dan RPJPD Prov. Jawa Barat Tahun 2025-2045 ..... IV-3
Tabel 4. 2. Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 ..... IV-4
Tabel 4. 3. Makna Visi Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 ..... IV-5
Tabel 4. 4. Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 ..... IV-7
Tabel 4. 5. Perumusan Misi RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 ..... IV-9
Tabel 5. 1. Arah Kebijakan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 ... V-13
Tabel 5. 2. Penyelarasan Arah Pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 ..... V-24
Tabel 5. 3. Perumusan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 ..... V-25
Tabel 5. 4. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 ..... V-40

DAFTAR GAMBAR

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN CIANJUR 2025-2045

Gambar 1.1. Tantangan Kabupaten Cianjur Tahun 2045 ..... I-3
Gambar 1.2. Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya I-8
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Cianjur II-3
Gambar 2.2. Peta Topografi Kabupaten Cianjur II-7
Gambar 2.3. Peta Satuan Geologi Kabupaten Cianjur II-10
Gambar 2.4. Peta Jenis Tanah Kabupaten Cianjur II-12
Gambar 2.5. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Cianjur II-15
Gambar 2.6. Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Cianjur II-17
Gambar 2.7. Peta Curah Hujan Kabupaten Cianjur II-21
Gambar 2.8. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Cianjur II-24
Gambar 2.9. Peta Potensi Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Cianjur II-26
Gambar 2.10. Peta Potensi Kawasan Perkebunan Kabupaten Cianjur .. II-27
Gambar 2.11. Peta Potensi Kawasan Industri Kabupaten Cianjur II-28
Gambar 2.12. Peta Potensi Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur . II-29
Gambar 2.13. Potensi Kawasan Pariwisata Kabupaten Cianjur II-33
Gambar 2.14. Diagram Rekapitulasi Luasan Zona Bencana di Kabupaten Cianjur II-35
Gambar 2.15. Diagram Rekapitulasi Kerentanan Bencana di Kabupaten Cianjur II-36
Gambar 2.16. Diagram Rekapitulasi Kapasitas Bencana di Kabupaten Cianjur II-37
Gambar 2.17. Diagram Rekapitulasi Risiko di Kabupaten Cianjur II-38

Gambar 2.18. Diagram Potensi Multibahaya Per-Kecamatan di Kabupaten Cianjur II-40
Gambar 2.19. Diagram Kerentanan Multibahaya Per-Kecamatan di Kabupaten Cianjur II-41
Gambar 2.20. Peta Indeks Risiko Multibahaya Kabupaten Cianjur II-42
Gambar 2.21. Target IKLH dan IKL Kabupaten Cianjur 2025-2028 ..... II-43
Gambar 2.22. Peta Indikasi Ancaman Perubahan Iklim Kabupaten Cianjur II-45
Gambar 2.23. Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2023 ..... II-48
Gambar 2.24. Piramida Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2023 ..... II-51
Gambar 2.25. Posisi Relatif Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2023 ..... II-54
Gambar 2.26. Grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur Dengan Kabupaten yang Berbatasan, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2014-2023 ..... II-55
Gambar 2.27. Grafik Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Cianjur Dengan Kabupaten yang Berbatasan, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2014-2023 ..... II-57
Gambar 2.28. Grafik Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten yang Berbatasan Tahun 2014-2023 ..... II-58
Gambar 2.29. Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten yang Berbatasan, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2014-2023 ..... II-59
Gambar 2.30. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2023 .. II-60
Gambar 2.31. Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Cianjur 2019-2023 ..... II-61
Gambar 2.32. Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019-2023 ..... II-62
Gambar 2.33. Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cianjur, Kabupaten yang Berbatasan dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 ..... II-62
Gambar 2.34. Grafik Indeks Kesehatan Kabupaten Cianjur Tahun 2014-2023 ..... II-63
Gambar 2.35. Grafik Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Cianjur Tahun 2020-2023 ..... II-64
Gambar 2.36. Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Cianjur, Kabupaten yang Berbatasan dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 ..... II-65

Gambar 2.37. Grafik Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Cianjur Tahun 2020-2023..... II-66
Gambar 2.38. Grafik Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Cianjur 2019-2023..... II-67
Gambar 2.39. Grafik Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata sekolah Kabupaten Cianjur, Kabupaten yang berbatasan dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 ..... II-67
Gambar 2.40. Jumlah Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten Cianjur Tahun 2014-2023..... II-68
Gambar 2.41. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Cianjur Tahun 2014-2023..... II-69
Gambar 2.42. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Cianjur Tahun 2014-2023..... II-69
Gambar 2.43. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022..... II-71
Gambar 2.44. Trend Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023..... II-76
Gambar 2.45. Trend Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023..... II-77
Gambar 2.46. PDRB Per Kapita (ADHB) (Juta)..... II-78
Gambar 2.47. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023..... II-81
Gambar 2.48. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2023 ..... II-82
Gambar 2.49. Indeks Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2014 – 2023 ..... II-84
Gambar 2.50. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Cianjur Tahun 2014-2023..... II-84
Gambar 2.51. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2023 ..... II-85
Gambar 2.52. Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2019-2023 ..... II-89
Gambar 2.53. Grafik Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Tahun 2019-2023..... II-89
Gambar 2.54. Grafik Indeks Infrastruktur Kabupaten Cianjur II-91
Gambar 2.55. Angka Kriminalitas yang Tertangani Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023..... II-92
Gambar 2.56. Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Kabupaten Cianjur Tahun 2007-2023..... II-96
Gambar 2.57. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023..... II-98

Gambar 2.58. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023 ..... II-100
Gambar 2.59. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023 ..... II-103
Gambar 2.60. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2023 ..... II-106
Gambar 2.61. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2023 ..... II-107
Gambar 2.62. Tingkat Penganggruan Terbuka Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2023 ..... II-107
Gambar 2.63. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur Tahun 2013-2023 ..... II-108
Gambar 2.64. Gini Rasio Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2023..... II-109
Gambar 2.65. PDRB per Kapita Kabupaten Cianjur Tahun 2010-2023 II-109
Gambar 2.66. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 ..... II-112
Gambar 2.67. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045 ..... II-113
Gambar 2.68. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045..... II-114
Gambar 2.69. Angka Ketergantungan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 ..... II-115
Gambar 2.70. Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten Cianjur II-172
Gambar 2.71. Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Cianjur II-177
Gambar 2.72. Rencana Kawasan Strategis RTRW Kabupaten Cianjur II-178
Gambar 2.73. Persentase Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Cianjur..... II-179
Gambar 2.74. Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Jawa Barat..... II-191
Gambar 2.75. Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Jawa Barat..... II-193
Gambar 2.76. Peta Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat II-195
Gambar 2.77. Peta Pola Ruang Kabupaten Cianjur Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 ..... II-198
Gambar 4.1. Visi Indonesia Emas 2045..... IV-2
Gambar 4.2. Visi RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2045 ..... IV-5
Gambar 4.3. Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Cianjur dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2045..... IV-6
Gambar 4.4. Delapan Misi (Agenda) Pembangunan Tahun 2045..... IV-8
Gambar 4.5. Penyelarasan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Barat dengan Misi RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2045 .... IV-17
Gambar 5.1. Tema Pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 ..... V-2

BAB I
PENDAHULUAN

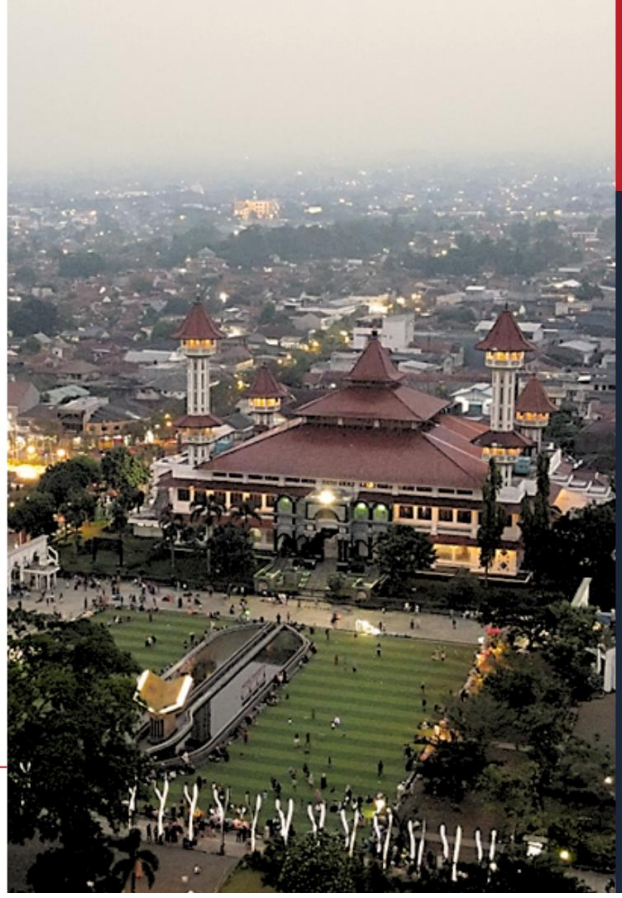

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN CIANJUR 2025-2045

1.1. Latar Belakang

Kota Cianjur adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. dan dikelilingi oleh Pegunungan Puncak dan Gunung Gede. Sejarah Kota Cianjur memiliki akar yang cukup dalam, dalam perkembangan sejarah Jawa Barat. Asal usul nama "Cianjur" sendiri berasal dari kata "Ci" yang berarti sungai dan "Hujur" yang berarti jauh. Jadi, Cianjur berarti "sungai yang jauh". Nama ini konon berasal dari legenda bahwa kota ini dulunya dikenal sebagai wilayah yang jauh dari ibu kota Kerajaan Sunda di Pakuan Pajajaran (sekarang Kota Bogor).

Pada masa Kerajaan Sunda, Cianjur merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Namun, setelah Kerajaan Pajajaran runtuh akibat penaklukan oleh Kesultanan Banten pada awal abad ke-16, Cianjur berada di bawah pengaruh Kesultanan Banten. Pada abad ke-18, Cianjur menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Mataram. Pada masa ini, Cianjur mengalami perkembangan signifikan dalam bidang pertanian dan perdagangan. Pada akhir abad ke-18, VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) mendirikan kantor administratif di Cianjur untuk mengatur perdagangan dengan wilayah tersebut.

Pada masa penjajahan Belanda, Cianjur menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Pemerintahan Belanda membentuk sistem pemerintahan yang baru di Cianjur, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan gedung-gedung pemerintahan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Cianjur menjadi bagian dari Provinsi Jawa

Barat. Pada tanggal 15 Desember 2007, Cianjur resmi ditetapkan sebagai kota otonom melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Cianjur. Pada 1967 pernah dibentuk panitia yang bertugas untuk meneliti sebenarnya kapan Cianjur berdiri. Setelah 15 tahun kemudian, pada tahun 1982 penetapan Hari Jadi Kabupaten Cianjur pada tanggal 12 Juli 1677 ditetapkan pada masa kepemimpinan Bupati Cianjur Ir. H. Adjat Sudradjat setelah melalui mekanisme yang ditetapkan saat itu. Diawali rapat paripurna DPRD Cianjur pada 10 Juli 1982, lalu diterbitkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 1982 lembar daerah Nomor 4. Adapun sejarah penetapan hari jadi Cianjur pada tanggal 12 Juli 1677 dengan memperhatikan hasil kajian dari panitia yang menemukan fakta sejarah pada abad ke-16 berdiri satu kerajaan di Jawa Tengah bernama Mataram yang dipimpin Kiayi Gede Pamanahan. Pada jaman kejayaan Mataram, waktu itu dipimpin Sultan Agung (1613-1645), menguasai sepanjang pulau Jawa, termasuk Cianjur. Sempat terjadi permasalahan kebijakan yang tidak disukai kadaleman atau daerah sewaktu kerajaan Mataram dipimpin Amangkurat 1 (Sunan Tegal Wangi 1645-1677). Kemudian tepat pada 2 Juli 1677, sejumlah kerajaan melepaskan diri dari kekuasaan Mataram, termasuk Cianjur. Berdasarkan perhitungan, perjalanan berkuda dari Mataram ke Cianjur sekitar 10 hari, maka ditetapkan 12 Juli 1677 sebagai berdirinya Cianjur[1)].

Pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan dilaksanakan untuk memanfaatkan potensi, memecahkan permasalahan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat menuju kesejahteraan yang lebih baik. Guna mencapai tujuan pembangunan yang baik dan berkesinambungan, perencanaan jangka panjang yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan adalah suatu keniscayaan.

Perencanaan pembangunan itu sendiri pada prinsipnya merupakan kegiatan sinergitas berbagai kepentingan dari *stakeholder* atau pelaku pembangunan daerah yang digolongkan menjadi 3 (tiga) domain yaitu *state* atau lembaga pemerintahan yang terdiri dari eksekutif dan legislatif daerah, *private* atau swasta yaitu pelaku dunia usaha dan *society* atau masyarakat. Selama dua dekade terakhir melalui pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, Kabupaten Cianjur telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang pembangunan baik fisik maupun sumberdaya manusia di tengah dinamika global maupun lokal yang begitu tinggi. Melalui berbagai kebijakan strategis kabupaten Cianjur mampu mewujudkan pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1) Cianjur dari Masa Ke Masa (Fakta Sejarah dan Cerita Rakyat), Dewan Pendidikan Kab. Cianjur Kerjasama dengan Yayasan Aria cikondang Cianjur, Tahun 2020

Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten serta pemerataan penyediaan infrastruktur yang memadai sehingga pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan maupun kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Di sisi lain tekanan terhadap kelestarian lingkungan juga muncul seiring dengan pesatnya pembangunan. Peningkatan kerusakan lingkungan, polusi, peningkatan kebutuhan pangan, peningkatan industri, peningkatan kebutuhan lahan hunian serta peningkatan konsumsi energi akan sangat berpengaruh pada ketersediaan sumberdaya alam.

Kebutuhan akan sumberdaya alam guna menunjang proses pembanguan tersebut pada suatu saat akan mencapai titik jenuh akibat melebihi daya dukung lingkungan. Karenanya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, pengendalian jumlah populasi, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang baik, optimalisasi pengunaan teknologi serta perencanaan pembangunan maupun perekonomian yang terukur, efektif dan efisien mutlak diperlukan. Berbagai tantangan tersebut akan dihadapi oleh Kabupaten Cianjur seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1. 1. Tantangan Kabupaten Cianjur Tahun 2045

Sumber: Hasil analisis Bapperida Kabupaten Cianjur, 2024

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan baik di tingkat lokal, provinsi maupun di tingkat nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, dijelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pasal 263 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Sedangkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Pengaturan tentang penyusunan RPJPD bagi daerah lebih detail dimuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Dalam Inmendagri menjelaskan bahwa RPJPD harus disusun dengan berbagai tahapan. Tahapan pertama dimulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi peraturan daerah. Penyusunan dokumen RPJPD yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah nantinya disusun dengan memperhatikan 7 (tujuh) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *bottom-up* dengan *top-down planning,* pendekatan holistic-tematik, pendekatan integrative dan pendekatan spasial.

Kabupaten Cianjur sejatinya telah memiliki dokumen Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dokumen tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37). Namun jika dilihat dari periode berlakunya, maka tahun 2025 dokumen RPJPD Kabupaten Cianjur akan habis masa berlakunya. Oleh karena itu perlu segera dilakukan persiapan penyusunan RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045. Sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 86/ 2017 pasal 18 ayat 1, dimana setiap daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen Rancangan Awal RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD daerah tersebut.

Secara substansi, penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan beberapa hal, antara lain: 1) penyelarasan visi, misi, arah pembangunan, dan indikator kinerja utama nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045, 2) keberlanjutan dari isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RPJPD Tahun 2005--2025 yang dinilai

masih relevan di Kabupaten Cianjur hingga tahun 2045, 3) hasil evaluasi capaian indikator kinerja RPJPD Tahun 2005-2025, 4) isu-isu strategis yang berkembang, dan 5) regulasi yang berlaku saat ini. Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 harus juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta memperhatikan rekomendasi KLHS RPJPD.

Penyusunan RPJPD 2025-2045 Kabupaten Cianjur dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cianjur yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan, disamping sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat lebih jauh juga untuk mendukung pembangunan Nasional dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

1.2. Dasar Hukum

RPJPD Kabupaten Cianjur disusun atas dasar landasan idiil Pancasila serta landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) Merevisi UU Perimbangan Keuangan;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembar Negara Nomor 6866);

7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembar Daerah Nomor 9 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262)
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembar Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembar Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 45 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembar Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembar Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044 (Lembar Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 64);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
29. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.2/1570/SJ Tanggal 15 Maret 2023 Tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

1.3. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJPD Kabupaten Cianjur disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten di sekitar Kabupaten Cianjur. Acuan RPJPN dan RPJPD provinsi dilakukan

melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Cianjur dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Penyusunan RPJPD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Barat. RPJPN dipedomani dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 untuk menyelaraskan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dengan nasional dan provinsi. Sesuai dengan amanat pada pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada penyusunan RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 juga harus berpedoman pada RTRW Kabupaten Cianjur melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah. Diperlukan juga pengintegrasian sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dengan RPPLH Kabupaten Cianjur.

Selain itu, RPJPD daerah lain juga perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJPD dengan cara menyelaraskan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Cianjur dengan daerah lainnya (Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut serta Daerah Khusus Jakarta). Adapun keterkaitan RPJPD dengan dokumen perencanaan Pembangunan dan sektor lainnya disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1. 2. Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

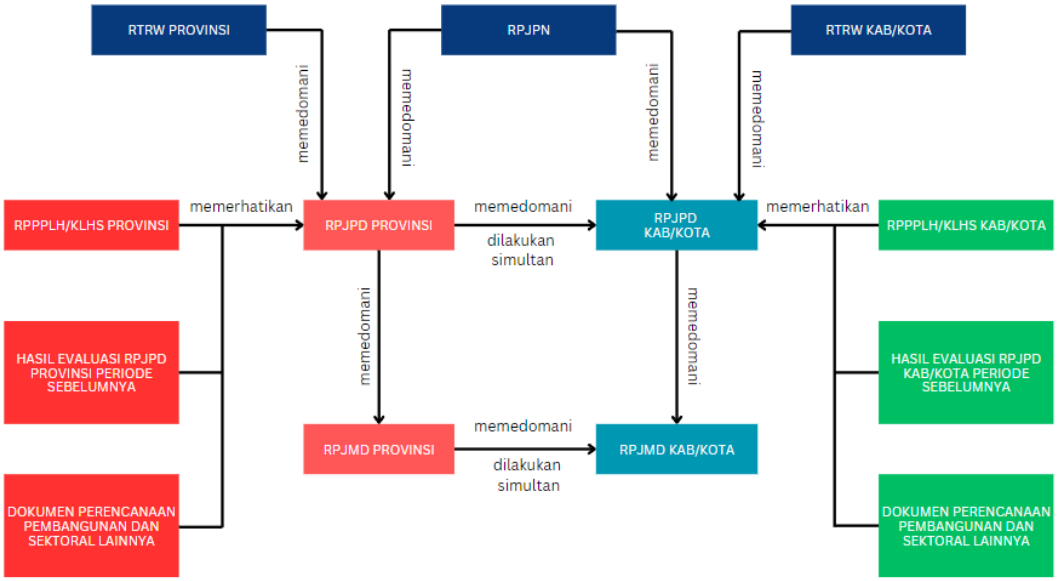

Sumber: Inmendagri 1/2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD

Sebagai bagian dari suatu sistem perencanaan, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 perlu ditelaah, baik dari tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Adapun beberapa dokumen yang akan ditelaah dalam penyusunan RPJPD ini antara lain:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat (RPJPD) Tahun 2025-2045;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031;
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044; dan
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.4. Maksud Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 diharapkan dapat memberikan gambaran umum kondisi dan dinamika Kabupaten Cianjur maupun sebagai pedoman dan acuan bagi pemerintah calon kepala daerah periode berkenaan, seluruh instansi/ SKPD pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, masyarakat, akademisi maupun dunia usaha dalam mewujudkan visi, misi serta arah pembangunan yang telah disepakati bersama selama rentang waktu periode RPJPD.

1.5. Tujuan Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

Tujuan penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 antara lain:

1. Mengidentifikasi dan menganalisa gambaran umum kondisi daerah berdasarkan aspek geografis dan demografis, kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing;
2. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan pembangunan daerah melalui dokumen rencana pembangunan nasional, provinsi maupu kabupaten lainnya di sekitar Kabupaten Cianjur;
3. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan dan isu strategis kondisi terkini berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

4. Merumuskan visi dan misi Kabupaten Cianjur untuk tahun 2025-2045;
5. Merumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah;
6. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar SKPD, antar pemerintahan, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan;
7. Mendorong terciptanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
8. Mewujudkan rencana pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat, dan kabupaten di sekitar Kabupaten Cianjur;
9. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

1.6. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045, terdiri dari 6 bab, masing-masing bab tersebut memiliki kerterkaitan satu sama lain dengan susunan penulisan terdiri atas:

Bab I **Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum, hubungan antar dokumen (RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJPD sekitar, RTRWN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, RTRW sekitar), sistematika penulisan dokumen (Pasal 20 Permendagri No. 86 Tahun 2017) serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten.

Bab II **Gambaran Umum Kondisi Umum Daerah**

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi kabupaten sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang meliputi gambaran umum aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Bab III **Permasalahan dan Isu Strategis Daerah**

Memuat permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah yang merupakan hasil analisis dari gambaran umum kondisi daerah dengan memperhatikan kondisi tantangan pembangunan serta hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah periode sebelumnya.

Bab IV **Visi dan Misi Daerah**

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis secara terukur dan spesifik selama masa periode pembangunan daerah. Visi dibuat dengan tolak ukur yang jelas agar dapat diwujudkan. Isi

berisikan uraian agar visi dapat dicapai. Visi dan misi daerah disinkronkan dengan visi dan misi provinsi maupun nasional.

Bab V **Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah**

Menjelaskan tentang arah kebijakan pembangunan dalam jangka panjang dengan sasaran pokok yang hendak dicapai dalam setiap pentahapan pembangunan (4 periode, 5 tahun dalam 1 periode). Sasaran pokok merupakan kuantifikasi target dan indikator kinerja pencapaian visi dan misi pada akhir periode perencanaan pembangunan (tahun 2045).

Bab VI **Penutup**

Menjelaskan tentang ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan RPJPD serta menjelaskan kaidah pelaksanaan RPRJPD dalam RPJMD selama 4 periode kedepan hingga pada akhir periode perencanaan pembangunan (tahun 2045).

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN CIANJUR 2025-2045

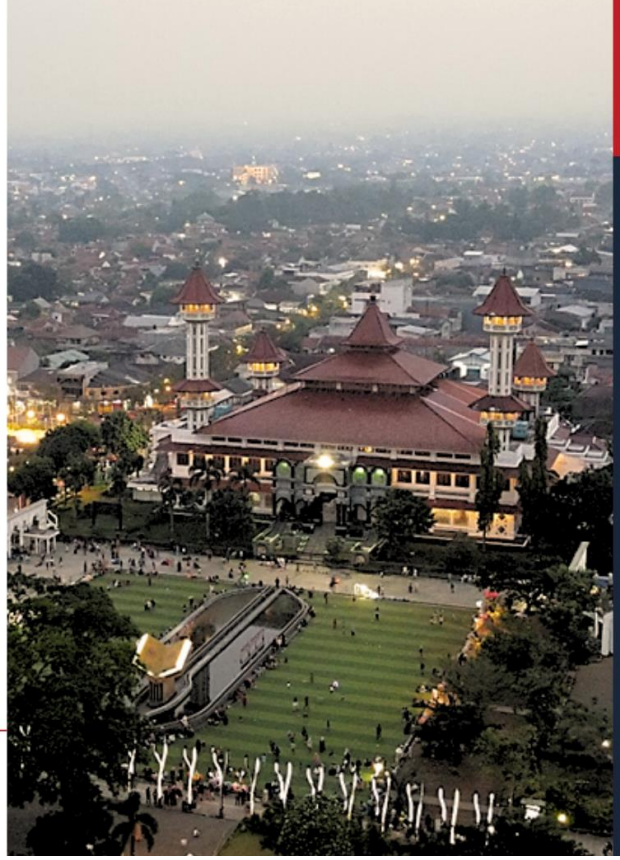

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

Kabupaten Cianjur berada di tengah Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 65 Km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 Km dari Ibu Kota Negara (Jakarta). Secara geografis Kabupaten Cianjur terletak pada koordinat 106º 42' – 107º 25' Bujur Timur dan 6º 21' – 7º 25' Lintang Selatan, dengan rentang ketinggian 7 – 2.962 mdpl dan kemiringan rata-rata 0 – 40%. Batas-batas wilayah meliputi:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta;
- Sebelah Timur : Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut;
- Sebelah Selatan :Samudera Hindia;
- Sebelah Barat :Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor;

Secara administrasi pemerintahan, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Cianjur tercatat sebanyak 32 Kecamatan, 354 desa dan 6 kelurahan, serta mencakup 2.751 Rukun Warga (RW) dan 10.402 Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah 363.192 ha. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Cidaun dengan luas 29.773,77 ha (8,20%), sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Cianjur dengan luas 2.646,48 ha (0,73%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Cianjur

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Presentase (%)
1	Agrabinta	19.635,28	5,41
2	Bojongpicung	8.954,02	2,47
3	Campaka	14.163,06	3,90
4	Campakamulya	7.435,83	2,05
5	Cianjur	2.646,48	0,73
6	Cibeber	12.334,59	3,40
7	Cibinong	24.027,15	6,62
8	Cidaun	29.773,77	8,20
9	Cijati	4.869,58	1,34
10	Cikadu	19.500,36	5,37
11	Cikalongkulon	14.317,13	3,94
12	Cilaku	5.288,48	1,46
13	Cipanas	6.819,12	1,88
14	Ciranjang	3.409,62	0,94
15	Cugenang	7.647,78	2,11
16	Gekbrong	5.030,39	1,39
17	Haurwangi	4.590,97	1,26
18	Kadupandak	10.427,90	2,87
19	Karangtengah	4.847,71	1,33
20	Leles	11.478,69	3,16
21	Mande	9.431,73	2,60
22	Naringgul	28.763,80	7,92
23	Pacet	4.167,32	1,15
24	Pagelaran	20.139,59	5,55
25	Pasirkuda	10.517,72	2,90
26	Sindangbarang	15.859,59	4,37
27	Sukaluyu	4.776,75	1,32
28	Sukanagara	17.016,37	4,69
29	Sukaresmi	9.605,04	2,64
30	Takokak	14.549,86	4,01
31	Tanggeung	6.596,09	1,82
32	Warungkondang	4.569,77	1,26
Kabupaten Cianjur		**363.192**	**100**

Sumber: RTRW Kabupaten Cianjur 2024-2044

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Cianjur

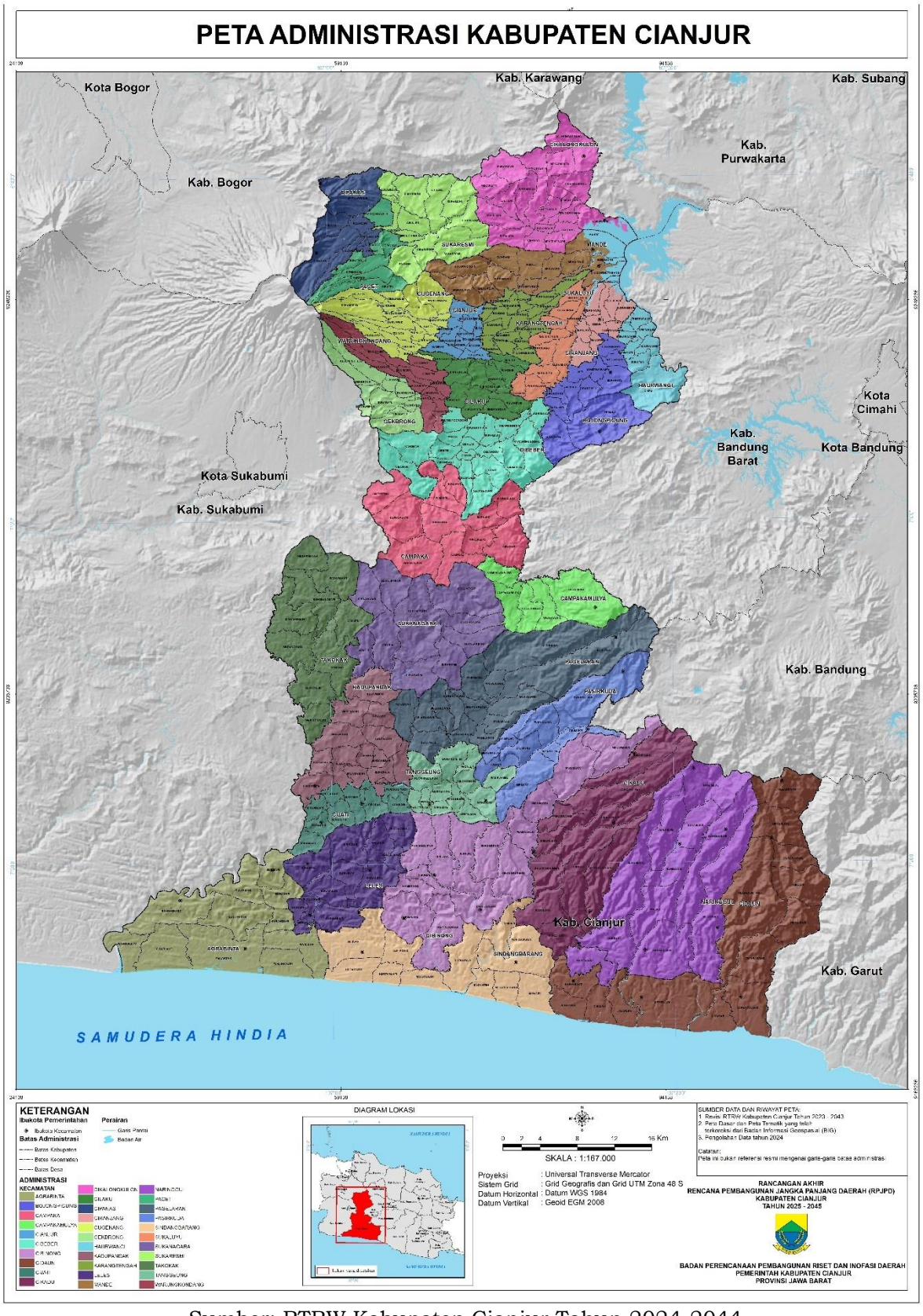

Sumber: RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044

1. Topografi

a. Elevasi

Elevasi (ketinggian) adalah beda tinggi suatu objek terhadap satu titik tertentu (*datum*). Datum ketinggian umumnya mengacu pada permukaan laut maupun permukaan geoid WGS-84 yang digunakan pada GPS (*Global Positioning System*). Dalam menggambarkan perbedaan ketinggian topografi di Kabupaten Cianjur, nilai elevasi dibagi ke dalam 5 kelas, yaitu: 0 – 200 meter; 200 – 500 meter; 500 – 1500 meter; 1500 – 3000 meter; dan >3000 meter. Berdasarkan pengklasifikasian tersebut, Kabupaten Cianjur didominasi ketinggian 0-200 meter, terkait topografi Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.2. Elevasi Topografi Kabupaten Cianjur Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	< 200 m	200-500 m	500-1500 m	1500-3000 m	> 3000 m
1	Agrabinta	9.369,46	5.140,16	4.192,44	928,46	4,77
2	Bojongpicung	3.319,52	807,87	2.668,83	2.153,57	4,24
3	Campaka	2.451,21	4.488,80	5.067,35	2.114,85	40,85
4	Campakamulya	884,69	2.811,05	3.030,08	707,88	2,13
5	Cianjur	2.342,28	277,16	27,04		
6	Cibeber	4.548,13	2.562,18	3.631,51	1.584,30	8,47
7	Cibinong	4.420,58	8.118,36	7.665,13	3.562,19	260,90
8	Cidaun	8.215,57	6.027,53	8.645,39	6.579,53	305,74
9	Cijati	2.934,89	1.327,09	467,92	136,62	3,07
10	Cikadu	2.334,18	4.947,03	6.607,39	5.117,08	494,67
11	Cikalongkulon	4.442,92	4.440,98	4.151,18	1.254,97	27,07
12	Cilaku	4.715,42	478,58	91,56	2,93	
13	Cipanas	1.401,01	1.688,02	1.839,21	1.741,12	149,76
14	Ciranjang	3.299,65	98,23	11,69	0,05	
15	Cugenang	2.949,23	1.688,57	1.516,54	1.455,31	38,13
16	Gekbrong	2.114,44	883,18	1.032,66	979,63	20,47
17	Haurwangi	2.478,67	640,26	785,37	639,80	46,88
18	Kadupandak	4.359,66	4.014,60	1.802,83	250,66	0,16
19	Karangtengah	4.828,49	18,58	0,64		
20	Leles	1.627,73	3.958,40	4.283,00	1.591,77	17,79
21	Mande	5.056,49	1.540,31	1.816,29	1.017,73	0,91
22	Naringgul	2.160,05	6.365,67	10.909,33	8.338,94	989,81
23	Pacet	1.874,65	893,96	714,14	665,20	19,37
24	Pagelaran	4.352,91	6.298,99	6.670,98	2.742,49	74,22
25	Pasirkuda	1.309,18	3.096,76	3.957,05	1.973,92	180,82
26	Sindangbarang	11.364,42	2.625,57	1.408,34	458,12	3,14
27	Sukaluyu	4.300,57	405,06	71,05	0,06	
28	Sukanagara	2.754,97	7.740,46	5.852,34	658,53	10,07
29	Sukaresmi	2.507,40	3.911,22	2.385,84	789,91	10,67
30	Takokak	2.485,66	7.730,57	4.064,05	269,56	0,01
31	Tanggeung	2.317,61	2.269,30	1.348,38	576,78	84,01
32	Warungkondang	2.905,86	519,77	547,19	585,01	11,94
Kabupaten Cianjur		**116.427,49**	**97.814,28**	**97.262,76**	**48.876,96**	**2.810,06**
Persentase (%)		**32,06**	**26,93**	**26,78**	**13,46**	**0,77**

Sumber: RTRW Kabupaten Cianjur 2024-2044

b. Kemiringan Lereng

Pada umumnya daerah di Kabupaten Cianjur berada di lereng kurang dari 8% seluas 116.411,57 hektar. Setelah itu daerah yang berada pada lereng 8 % - 15 % seluas 97.820,96 hektar. Daerah yang memiliki lereng antara 16 % - 25 % seluas 97.265,57 hektar. Sementara daerah yang lerengnya lebih dari 40 % sekitar 2.809,93 hektar pada Tabel dan Gambar berikut. Adapun karakteristik kelerengan yang terdapat di Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:

a. Dataran
   Merupakan daerah dengan kemiringan lereng yang berkisar antara 0 – 8 % yang menempati daerah pantai, daerah alluvial sungai dan dataran lahar. Daerah yang termasuk satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi yang rendah yang terdistribusi pada daerah Sukaresmi, Cikalongkulon, Cianjur, Ciranjang, Bojong Picung, sebelah Utara Cibeber, Pagelaran, Tanggeung, Kadupandak, dan sepanjang Pantai Selatan mulai dari Agrabinta sampai Cidaun.
b. Perbukitan Berelief Halus
   Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang halus dengan kemiringan lereng 8 – 15% yang terdapat pada daerah Utara Pacet, Warungkondang, Takokak sebelah Barat, Cidaun, dan sebelah Timur Sindangbarang.
c. Perbukitan Berelief Sedang
   Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sedang dengan kemiringan lereng 15 – 25% yang tersebar pada daerah Utara Mande, sebelah selatan Kadupandak, dan sebelah selatan Cibeber.
d. Perbukitan Berelief Agak Kasar
   Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang agak kasar dengan kemiringan lereng 24 – 40% yang terdapat pada daerah Takokak, bagian Utara dan Selatan Kadupandak, Bagian Utara Sukanagara, Agrabinta, Sebelah Utara Cidaun, Sebelah Selatan Pagelaran, dan Sebelah Barat Tanggeung.
e. Perbukitan Berelief Kasar
   Bentuk permukaan pada bagian ini adalah bergelombang kasar – sangat kasar dengan kemiringan lereng > 40% yang terdistribusi pada daerah Selatan Sukaresmi, sebelah selatan Bojongpicung, Sukanagara, Gunung Buleud, sebelah timur Takokak dan Gunung Sambul. Timur Pagelaran, bagian Selatan dan Utara Kadupandak serta Karangtengah yang membentuk gawir gerakan tanah yang hampir tegak lurus. Daerah lain yang memiliki bentuk permukaan seperti ini adalah daerah Gunung Pangrango, Pasir Besar, Pasir Taman sampai Pasir Gambir, Pasir Negrok, Gunung Pondokcabang,

Gunung Berenuk, dan Pasir Gook. Dilihat dari ketinggian yang ada di Kabupaten Cianjur, pada umumnya ketinggiannya berada di angka < 200 meter dengan luas sebesar 116.422,26 hektar.

Tabel 2.3. Kemiringan Lerengan Kabupaten Cianjur Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	< 8%	8-15%	16-25%	26-40%	> 40%
1	Agrabinta	9.366,43	5.141,77	4.193,78	928,54	4,77
2	Bojongpicung	3.321,06	808,69	2.667,38	2.152,65	4,24
3	Campaka	2.452,07	4.487,93	5.066,84	2.115,37	40,85
4	Campakamulya	885,73	2.812,21	3.028,52	707,28	2,09
5	Cianjur	2.341,70	277,47	27,31		
6	Cibeber	4.549,43	2.561,95	3.631,15	1.583,60	8,47
7	Cibinong	4.419,54	8.119,61	7.665,12	3.561,47	261,41
8	Cidaun	8.209,38	6.029,68	8.648,63	6.580,48	305,61
9	Cijati	2.938,62	1.326,90	466,88	134,16	3,02
10	Cikadu	2.333,27	4.946,36	6.606,99	5.118,49	495,26
11	Cikalongkulon	4.440,86	4.441,19	4.152,18	1.255,76	27,14
12	Cilaku	4.715,47	478,53	91,56	2,93	
13	Cipanas	1.400,33	1.688,12	1.839,67	1.741,27	149,73
14	Ciranjang	3.299,07	98,74	11,76	0,05	
15	Cugenang	2.947,28	1.688,76	1.517,35	1.456,22	38,17
16	Gekbrong	2.115,15	882,87	1.032,04	979,77	20,55
17	Haurwangi	2.480,19	640,11	784,65	639,21	46,82
18	Kadupandak	4.357,89	4.015,95	1.803,20	250,70	0,16
19	Karangtengah	4.828,43	18,63	0,66		
20	Leles	1.626,34	3.957,51	4.283,40	1.593,60	17,84
21	Mande	5.055,27	1.541,40	1.816,40	1.017,75	0,91
22	Naringgul	2.160,39	6.364,80	10.909,12	8.339,67	989,83
23	Pacet	1.874,87	894,19	714,35	664,55	19,37
24	Pagelaran	4.352,63	6.299,85	6.671,14	2.741,71	74,26
25	Pasirkuda	1.308,73	3.095,28	3.957,89	1.975,08	180,75
26	Sindangbarang	11.360,49	2.626,73	1.410,06	459,16	3,15
27	Sukaluyu	4.302,58	403,83	70,28	0,05	
28	Sukanagara	2.754,51	7.740,32	5.853,37	658,10	10,07
29	Sukaresmi	2.508,84	3.910,97	2.385,26	789,30	10,67
30	Takokak	2.485,28	7.730,76	4.063,64	270,17	0,01
31	Tanggeung	2.319,07	2.270,32	1.348,20	575,55	82,95
32	Warungkondang	2.905,95	519,53	546,78	585,64	11,86
Kabupaten Cianjur		**116.416,80**	**97.820,96**	**97.265,57**	**48.878,28**	**2.809,93**
Persentase (%)		**32,05**	**26,93**	**26,78**	**13,46**	**0,77**

Sumber: RTRW Kabupaten Cianjur 2024-2044

Gambar 2.2. Peta Topografi Kabupaten Cianjur

Sumber: RTRW Kabupaten Cianjur 2024-2044

2. Geologi

a. Geologi

Wilayah Kabupaten Cianjur pada umumnya terdiri dari sistem dataran, sistem perbukitan, dan sistem volkan. Sistem dataran dijumpai di sekitar Kecamatan Cianjur dan Kecamatan Ciranjang serta di sepanjang jalur aliran sungai. Sistem perbukitan umumnya terdapat diwilayah bagian tengah dan selatan, sedangkan sistem volkan terutama di bagian utara Kabupaten Cianjur yang merupakan lereng timur Gunung Gede. Sistem dataran terdiri dari dataran volkan yang cukup luas di sebelah barat sampai Ciranjang serta dataran aluvial berupa cekungan dan teras sungai di sepanjang aliran Sungai Citarum, Sungai Cikundul, Sungai Cisokan, dan Sungai Cibuni. Dataran terbentuk dari bahan endapan sungai, breksi, dan lahar Gunung Gede yang bersifat basal dan intermediet. Sistem perbukitan terbentuk dari batuan sedimen tua tersier dari Formasi Bentang Atas dan Bentang Bawah, tersusun terutama atas batu pasir bertufa dan batu liat.

Formasi Bentang Atas tersusun atas batu pasir bertufa berlapis, breksi tufa batu apung dan breksi tufa andesit, sedangkan Formasi Bentang Bawah tersusun atas batu pasir tufa berlapis, tufa batu apung dengan sisipan liat bernapal dan breksi andesit. Sistem volkan terutama terdapat Kabupaten Cianjur bagian barat yang merupakan bagian timur Gunung Gede dan di sekitar Gunung Wayang. Lereng atas Gunung Gede terbentuk dari bahan volkan muda yang tersusun dari lava breksi dan lahar bersifat andesitik dari Gunung Gede. Luasan satuan geologi yang mendominasi di Kabupaten Cianjur yaitu jenis batuan Sedimen Neogen (Mio-Plio) dengan luas 105.447,9 hektar tersebar di 12 Kecamatan. Jenis batuan Gunung Api Kuarter dan batuan gunung api plio-plistosen yang tersebar di 20 kecamatan dengan luas 69.580,3 hektar dan 82.664,2 hektar. Jenis batu Gamping Oligo-Miosen hanya tersebar di Kecamatan Campaka, Cijati dan Takokak dengan luas 498,9 hektar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.4. Jenis Geologi di Kabupaten Cianjur

Kecamatan	Aluvial dan Endapan Kuarter	Batu Gamping Neogen (Mio - Plio)	Batu Gamping Oligo - Miosen	Batuan Gunungapi Kuarter	Batuan Gunungapi Neogen (Mio - Plio)	Batuan Gunungapi Plio - Plistosen	Batuan Sedimen Neogen (Mio - Plio)	Batuan Sedimen Oligo - Miosen	Batuan Sedimen Plio - Plistosen	Batuan Terobosan Neogen	Danau/ Waduk/Situ	Total
Agrabinta	4.153,78	4.159,30			39,14		11.283,06					19.635,28
Bojongpicung				3.862,06				3.748,32	1.343,63			8.954,02
Campaka			103,94		9.205,10	3.140,01			1.219,44	494,57		14.163,06
Campakamulya					1.455,65	3.174,45		2.805,73				7.435,83
Cianjur				1.808,87		837,60						2.646,48
Cibeber				5.133,34	522,99	4.336,39		952,95	1.388,91			12.334,59
Cibinong	0,47	1,03		2.817,95		6.266,27	14.941,43					24.027,15
Cidaun	5.115,09					11.623,75	13.034,93					29.773,77
Cijati		1.311,70	86,89		159,70		3.311,29					4.869,58
Cikadu				4.591,83		5.390,74	9.517,78					19.500,36
Cikalongkulon				1.391,66		5.931,45		6.041,07		349,37	603,58	14.317,13
Cilaku				5.288,48								5.288,48
Cipanas				6.075,63				743,49				6.819,12
Ciranjang				3.089,90		15,69				4,24	299,80	3.409,62
Cugenang				5.688,80		1.958,99						7.647,78
Gekbrong				4.511,16		519,22						5.030,39
Haurwangi		99,81		2.068,31		179,72		2.063,98		152,08	27,06	4.590,97
Kadupandak		2.209,32			4.015,66		4.202,93					10.427,90
Karangtengah				4.807,84		39,88						4.847,71
Leles		5.287,12					6.191,58					11.478,69
Mande				2.197,56		6.232,51					1.001,66	9.431,73
Naringgul				2.499,34		10.335,80	15.928,66					28.763,80
Pacet				3.449,68		595,61		122,03				4.167,32
Pagelaran		94,08			4.387,36	9.942,22	5.715,93					20.139,59
Pasirkuda				28,31		9.097,08	1.392,34					10.517,72
Sindangbarang	1.977,55	243,28					13.638,76					15.859,59
Sukaluyu				4.625,57							151,18	4.776,75
Sukanagara					15.133,32			963,63		919,41		17.016,37
Sukaresmi				1.074,25		2.739,27		5.277,33		514,19		9.605,04
Takokak		764,04	308,10		12.807,34				226,68	443,68		14.549,86
Tanggeung						307,54	6.288,55					6.596,09
Warungkondang				4.569,77								4.569,77
Total	**11.246,89**	**14.169,69**	**498,93**	**69.580,31**	**47.726,26**	**82.664,20**	**105.447,24**	**22.718,55**	**4.178,67**	**2.877,54**	**2.083,28**	**363.191,55**

Sumber: RTRW Kabupaten Cianjur 2024-2044

Gambar 2.3. Peta Satuan Geologi Kabupaten Cianjur

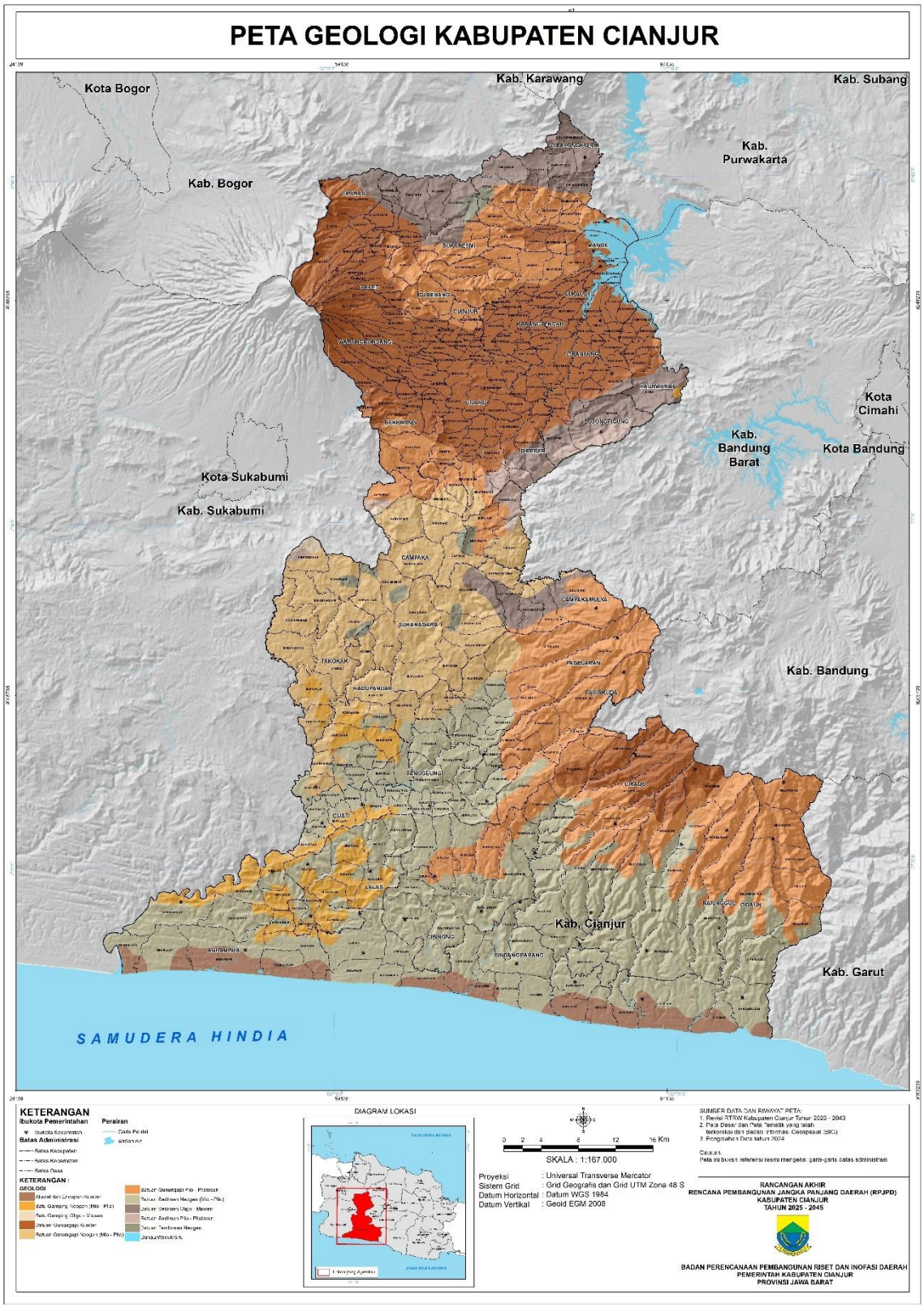

Sumber: RTRW Kabupaten Cianjur 2024-2044

b. Jenis Tanah

Permukaan tanah di Kabupaten Cianjur sebagian besar tanahnya tertutup oleh batuan sedimen, terutama di wilayah Cianjur bagian selatan, sedangkan di wilayah Cianjur bagian utara banyak mengandung vulkanik. Jenis batuan lainnya adalah batuan aluvial yang tersebar di sepanjang pantai selatan, dan Kecamatan Cibeber bagian timur serta Kecamatan Bojongpicung yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.5. Jenis Tanah di Kabupaten Cianjur

No.	Kecamatan	Jenis Tanah							Jumlah
		Alluvial	Andosol	Grumosol	Latosol	Mediteran	Podsol Merah Kuning	Regosol	
1	Agrabinta	0,80			14.240,29	2.408,74	2.985,44		
2	Bojong Picung			1.339,75	7.614,27				
3	Campaka				14.156,97		6,09		
4	Campakamulya		2.132,20		1.242,96		4.060,67		
5	Cianjur	232,33			2.414,15				
6	Cibeber	442,68		95,61	11.796,30				
7	Cibinong		404,74		4.397,42		19.224,98		
8	Cidaun		1.119,83		12.097,56		16.556,37		
9	Cijati				4.595,07		274,51		
10	Cikadu		1.618,16		1.235,61		16.646,58		
11	Cikalongkulon	175,17		1.175,92	12.361,54				604,50
12	Cilaku	2.810,11		16,38	2.461,99				
13	Cipanas		951,31		2.300,23			3.567,58	
14	Ciranjang			3.086,76			24,06		298,81
15	Cugenang		2.053,79		4.732,00			861,99	
16	Gekbrong		1.189,66		3.731,94			108,78	
17	Haurwangi			1.530,76	2.856,07		177,39		26,75
18	Kadupandak			5.841,28	4.586,63				
19	Karangtengah	3.173,54			1.674,17				
20	Leles				1.852,69		9.626,00		
21	Mande	2.894,30		361,54	5.098,97		75,03		1.001,89
22	Naringgul				1.674,00		27.089,80		
23	Pacet		1.827,66		511,55			1.828,11	
24	Pagelaran		4.552,33	1.656,66	5.222,76		8.707,84		
25	Pasirkuda		122,99		670,53		9.724,21		
26	Sindangbarang				15.367,65		491,94		
27	Sukaluyu	456,83		2.475,07	1.693,48				151,37
28	Sukanagara			924,01	15.655,29		437,07		
29	Sukaresmi		51,58		8.910,55			642,91	
30	Takokak			3.144,34	11.405,52				
31	Tanggeung			206,25	5.824,28		565,56		
32	Warungkondang	492,07	995,95		2.787,86			293,89	
Jumlah		**10.677,83**	**17.020,20**	**21.854,32**	**185.170,33**	**2.408,74**	**116.673,56**	**7.303,26**	**2.083,31**
Presentase (%)		**2,96**	**4,71**	**6,05**	**51,28**	**0,67**	**32,31**	**2,02**	**100,00**

Sumber: RTRW Kabupaten Cianjur 2024-2044

Gambar 2.4. Peta Jenis Tanah Kabupaten Cianjur

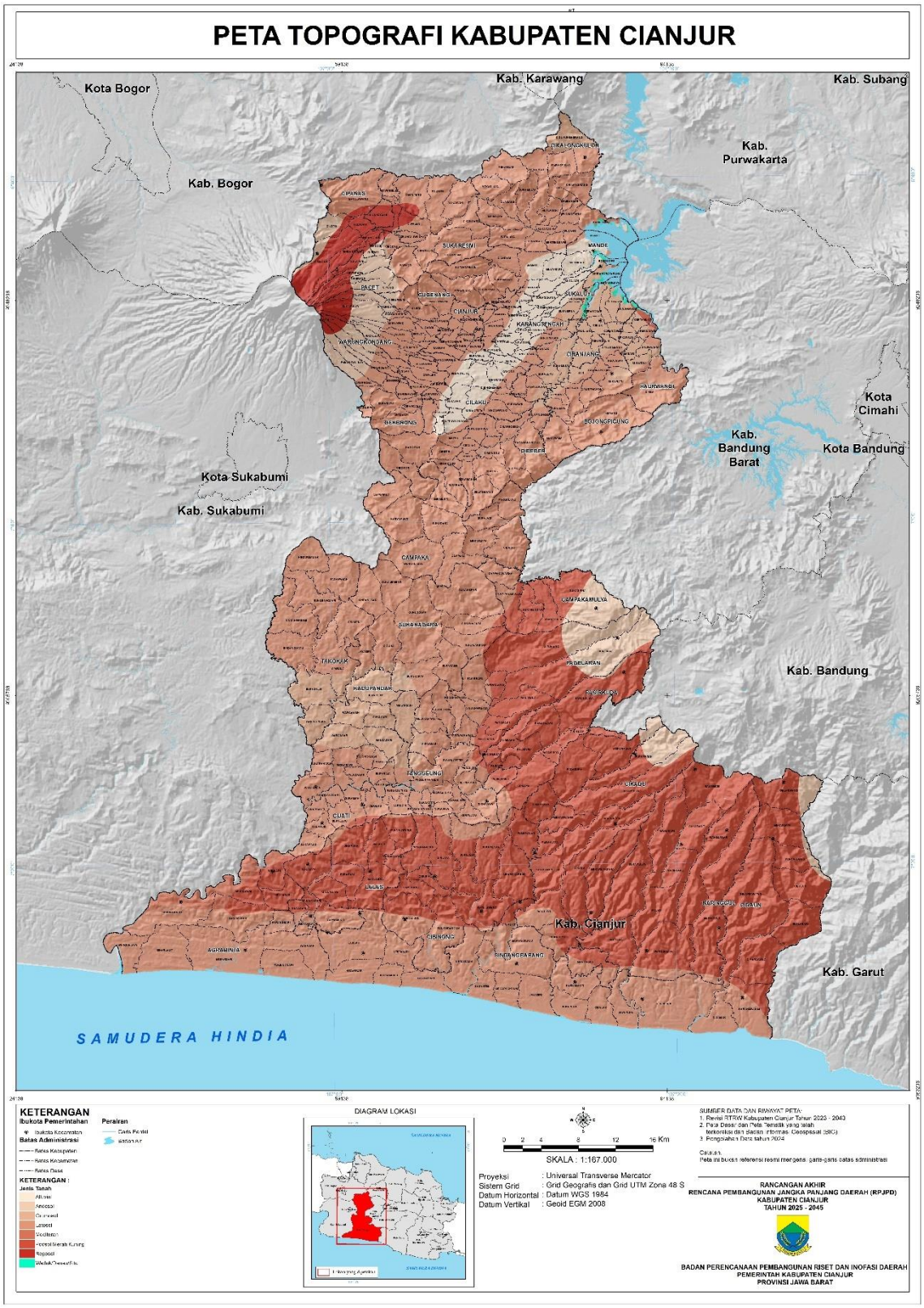

Sumber: RTRW Kabupaten Cianjur 2024-2044

3. Hidrologi

Sumber daya air yang terdapat di Kabupaten Cianjur meliputi air permukaan (sungai-sungai), mata air, dan air tanah. Sumber daya air tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri, dan lain-lain.

a. Mata Air

Zona mata air yang sangat vital atau berpotensi di Kabupaten Cianjur terutama berada pada kawasan lereng bagian timur Gunung Gede. Air yang berasal dari mata air dalam zona ini terutama ditampung oleh sungai Cilaku, Cisarua, Cicaringin, dan Cikundul. Sumber air bersih ini terutama dimanfaatkan untuk kepentingan domestik (rumah tangga), pertanian, dan waduk Cirata. Zona mata air yang berada pada lereng bukit di dataran tinggi Sukanagara-Campaka bagian utara selain untuk kepentingan domestik dan pertanian juga dimanfaatkan untuk waduk Cirata yang disalurkan melalui Sungai Cikondang dan Cisokan.

b. Air Tanah

Potensi air tanah di Kabupaten Cianjur meliputi air tanah bebas dangkal, air tanah bebas dalam, dan air tanah pantai. Air tanah bebas dangkal umumnya merupakan daerah pedataran lembah dan pantai serta daerah depresi (Depresi Cianjur, Depresi Pagelaran, Depresi Kadupandak, dan lain-lain). Air tanah bebas dangkal tersebut terdapat hampir di semua pedataran dan sudah banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik. Air tanah bebas dalam (TMA lebih dari 10 meter) terutama pada daerah perbukitan yang berada diantara wilayah mata air. Air tanah dangkal pantai meliputi pedataran sekitar pantai laut Samudera Indonesia dan Waduk Cirata.

c. Air Permukaan

Air permukaan di Kabupaten Cianjur merupakan daerah aliran sungai (DAS) dengan Sungai Citarum sebagai sungai utama yang mengalir ke bagian utara dengan beberapa anak sungainya di Kabupaten Cianjur antara lain Sungai Cibeet, Sungai Cikundul, Sungai Cibalagung, dan Sungai Cisokan. Sungai-sungai tersebut membentuk sub-DAS yang merupakan bagian dari DAS Citarum yang bermuara di Laut Jawa. Di bagian selatan terdapat Sungai Cibuni, Sungai Cisokan, Sungai Cisadea, Sungai Ciujung, dan Sungai Cilaki yang merupakan sub-DAS Cibuni - Cilaku yang bermuara di Samudera Indonesia.

Terdapat 2 (dua) buah waduk yang memanfaatkan aliran Sungai Citarum yaitu Cirata, dan Saguling. Waduk Cirata mempunyai luas genangan 6.400 ha, dimana ±3.400 ha menggenangi wilayah Kabupaten Cianjur. Genangan tersebut merupakan sumber air permukaan / penampung air yang dapat dimanfaatkan sebagai pengairan persawahan, pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas sekitar 550 MW jam/tahun serta pengembangan budidaya perikanan darat dan

pariwisata. Selain sungai, potensi air permukaan di Kabupaten Cianjur adalah adanya situ/ rawa yang terdapat di Kecamatan Pagelaran, Tanggeung, Cibinong dan Kadupandak. Terdapat sekitar 16 situ/rawa mencakup luas ±33,50 Ha dengan perkiraan volume air 594.300 m^3 dan mampu mengairi sawah ±1.431 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.6. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Cianjur

No.	Kecamatan	Daerah Aliran Sungai								Jumlah
		Cibuni	Cilaki	Cimandiri	Cipandak	Cisadea	Cisokan	Citarum	Ciujung	
1	Agrabinta	8.617,22					11.018,07			19.635,28
2	Bojong picung							8.954,02		8.954,02
3	Campaka	1.965,12		1.126,00				11.071,95		14.163,06
4	Campaka mulya	2,17						7.433,66		7.435,83
5	Cianjur							2.646,48		2.646,48
6	Cibeber							12.334,59		12.334,59
7	Cibinong	664,13				22.794,64	568,38			24.027,15
8	Cidaun		24.141,46		2.113,85				3.518,45	29.773,77
9	Cijati	4.809,47					60,11			4.869,58
10	Cikadu				32,44	12.945,61			6.522,31	19.500,36
11	Cikalong kulon							14.317,13		14.317,13
12	Cilaku							5.288,48		5.288,48
13	Cipanas							6.819,12		6.819,12
14	Ciranjang							3.409,62		3.409,62
15	Cugenang							7.647,78		7.647,78
16	Gekbrong							5.030,39		5.030,39
17	Haurwangi							4.590,97		4.590,97
18	Kadupandak	10.427,90								10.427,90
19	Karang tengah							4.847,71		4.847,71
20	Leles	427,83				374,05	10.676,81			11.478,69
21	Mande							9.431,73		9.431,73
22	Naringgul		12.153,87		10.895,90	641,28			5.072,77	28.763,80
23	Pacet							4.167,32		4.167,32
24	Pagelaran	18.590,63						1.548,96		20.139,59
25	Pasirkuda	10.167,55				350,17				10.517,72
26	Sindang barang					10.599,20	2.084,08		3.176,31	15.859,59
27	Sukaluyu							4.776,75		4.776,75
28	Sukanagara	16.388,36						628,01		17.016,37
29	Sukaresmi							9.605,04		9.605,04
30	Takokak	14.549,86								14.549,86
31	Tanggeung	6.573,75				22,02	0,32			6.596,09
32	Warungkondang							4.569,77		4.569,77
Jumlah		**93.183,99**	**36.295,33**	**1.126,00**	**13.042,19**	**47.726,97**	**24.407,77**	**129.119,46**	**18.289,83**	**363.191,55**

Sumber: RTRW Kabupaten Cianjur 2024-2044

Gambar 2.5. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Cianjur

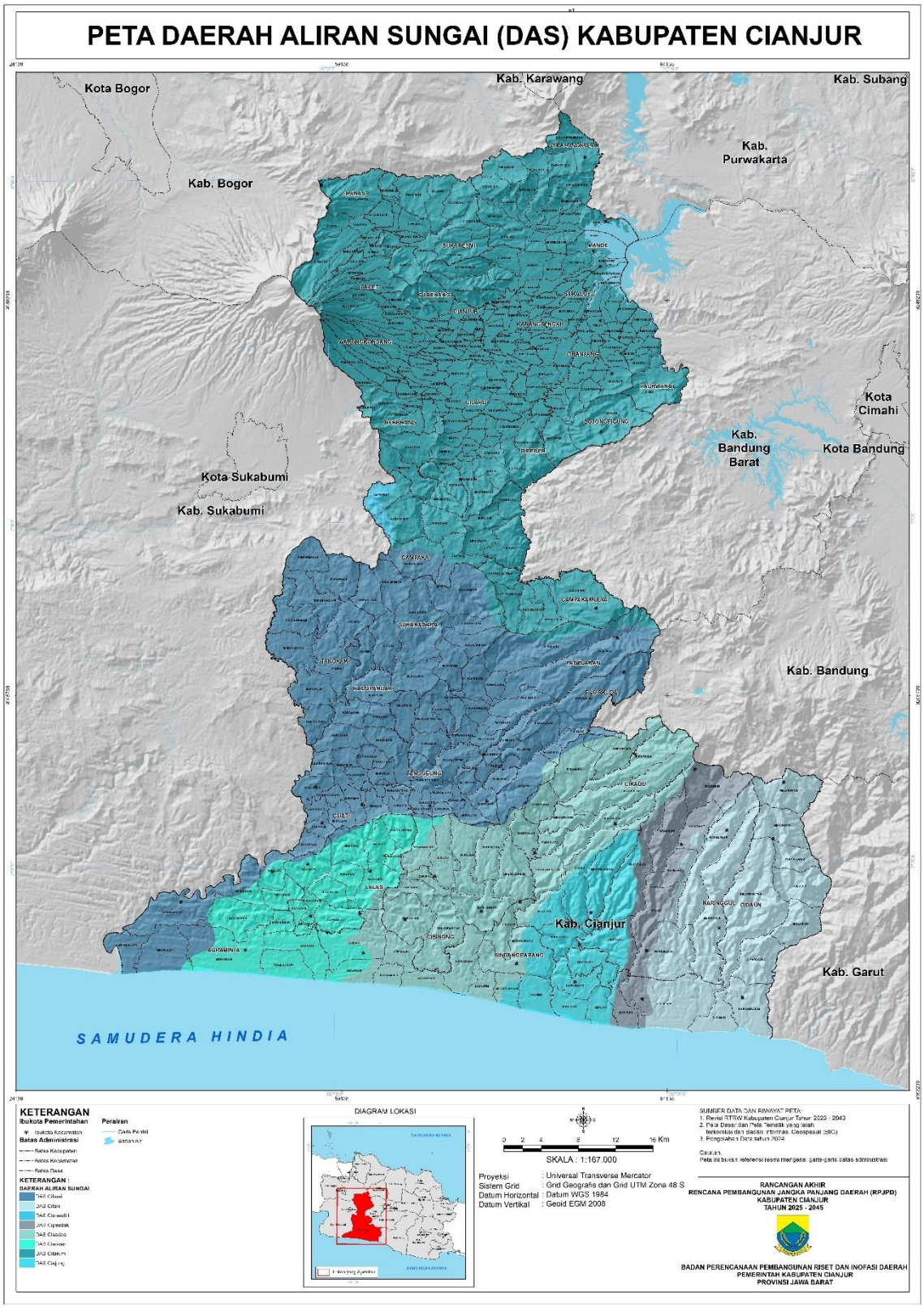

Sumber: RTRW Kabupaten Cianjur 2024-2044

d. Cekungan Air Tanah (CAT)

Cekungan air tanah (CAT) yang terdapat di Kabupaten Cianjur antara lain CAT Banjarsari, Bogor, Cianjur, Cibuni, dan Sukabumi, seluas 85.344,13 Ha. CAT Cianjur merupakan CAT yang paling luas sekitar 44.232,29 Ha dan CAT Bogor adalah CAT yang paling kecil luasannya yaitu sekitar 85,75 Ha, lihat Tabel dan Gambar gambar.

Tabel 2.7. Cekungan Air Tanah di Kabupaten Cianjur

No.	Kecamatan	Cekungan Air Tanah					Jumlah
		Banjarsari	Bogor	Cianjur	Cibuni	Sukabumi	
1	Bojongpicung	0	0	37,04	0	0	37,04
2	Campakamulya	0	0	0	513,13	0	513,13
3	Cianjur	0	0	2.244,75	0	0	2.244,75
4	Cibeber	0	0	2.531,98	0	0	2.531,98
5	Cibinong	0	0	0	4.079,30	0	4.079,30
6	Cidaun	191,44	0	0	6.214,90	0	6.406,33
7	Cikadu	0	0	0	6.228,79	0	6.228,79
8	Cikalongkulon	0	0	133,16	0	0	133,16
9	Cilaku	0	0	5.285,92	0	0	5.285,92
10	Cipanas	0	85,75	3.500,80	0	79,22	3.665,77
11	Ciranjang	0	0	9,34	0	0	9,34
12	Cugenang	0	0	6.181,43	0	0	6.181,43
13	Gekbrong	0	0	2.916,65	0	32,96	2.949,61
14	Karangtengah	0	0	4.847,71	0	0	4.847,71
15	Mande	0	0	3.584,52	0	0	3.584,52
16	Naringgul	0	0	0	6.877,95	0	6.877,95
17	Pacet	0	0	3.520,97	0	7,52	3.528,48
18	Pagelaran	0	0	0	8.357,51	0	8.357,51
19	Pasirkuda	0	0	0	8.284,29	0	8.284,29
20	Sukaluyu	0	0	4.326,68	0	0	4.326,68
21	Sukaresmi	0	0	996,73	0	0	996,73
22	Tanggeung	0	0	0	159,09	0	159,09
23	Warungkondang	0	0	4.114,61	0	0	4.114,61
Jumlah		**191,44**	**85,75**	**44.232,29**	**40.714,96**	**119,70**	**85.344,13**

Sumber: RTRW Kabupaten Cianjur 2024-2044

Gambar 2.6. Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Cianjur

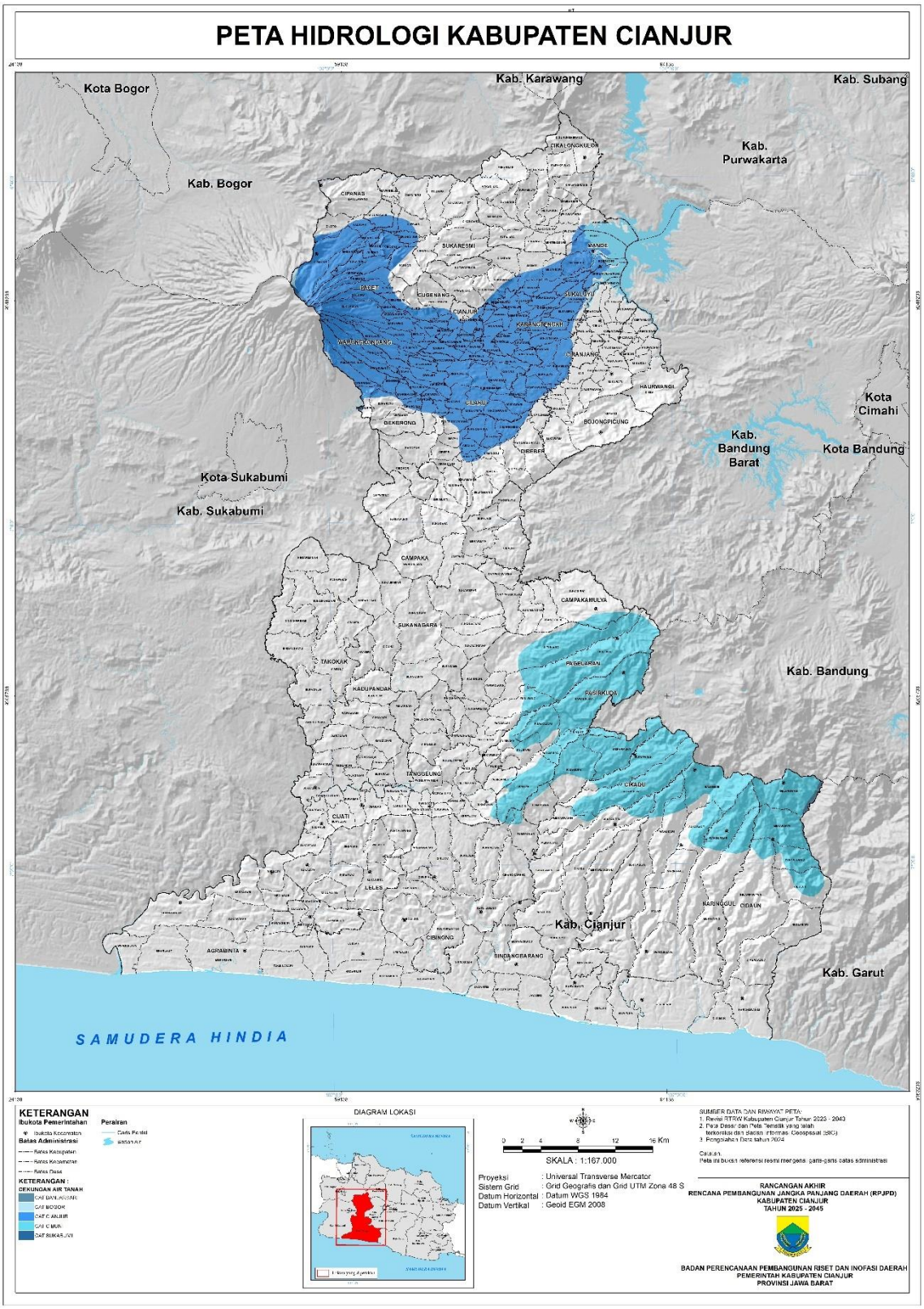

Sumber: RTRW Kabupaten Cianjur 2024-2044

4. Klimatologi

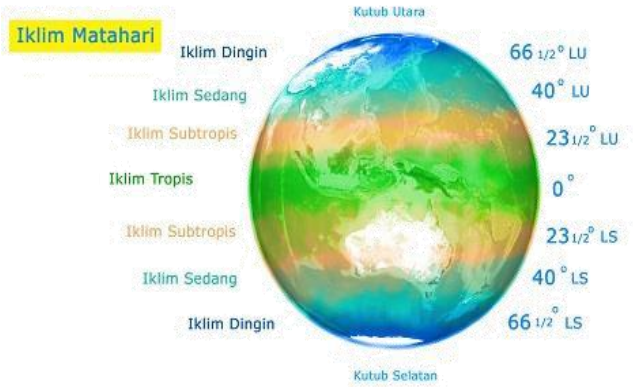

Kabupaten Cianjur beriklim tropis, wilayah yang termasuk iklim tropis dapat dibedakan menjadi daerah tropis kering yang meliputi stepa, savanna kering, dan gurun pasir dan daerah tropis lembab yang meliputi hutan hujan tropis. Kabupaten Cianjur merupakan daerah tropis lembab yang meliputi hutan hujan tropis. Kondisi ini menjadikan kondisi alam Kabupaten Cianjur subur dan mengandung keanekaragaman kekayaan sumber daya alam yang potensial sebagai modal dasar pembangunan dan potensi investasi yang menjanjikan.

Tropis digunakan dalam arti umum untuk iklim tropis yang berarti hangat hingga panas dan lembab sepanjang tahun, sering kali dengan perasaan vegetasi yang subur. Banyak daerah tropis memiliki musim kemarau dan musim hujan. Di bawah klasifikasi iklim Köppen, untuk iklim tropis, bulan musim hujan didefinisikan sebagai bulan di mana curah hujan rata-rata adalah 60 milimeter (2,4 in) atau lebih. Hutan hujan tropis secara teknis tidak memiliki musim kemarau atau hujan, karena curah hujannya terdistribusi secara merata sepanjang tahun. Berdasarkan klasifikasi Junghuhn, Kabupaten Cianjur terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu:

a. Zona iklim panas: Ketinggian 0-700 meter, suhu rata-rata tahunan lebih 220 celsius;
b. Zona iklim sedang: Ketinggian 700-1.500 meter, suhu rata-rata tahunan antara 15-220 celsius;
c. Zona iklim sejuk: Ketinggian 1.500-2.500 meter, suhu rata-rata tahunan 11-150 celsius;
d. Zona iklim dingin: Ketinggian 2.500-4000 meter, suhu rata-rata tahunan 110.

Cuaca di Indonesia maupun Kabupaten Cianjur khususnya sangat sulit diprediksi. Hal ini disebabkan oleh pemanasan global *(global warming)* yang semakin terasa. Pemanasan global kini menjadi isu yang diisyaratkan dan dipertimbangkan dalam pengembangan dan pembangunan wilayah di seluruh dunia. Dampak pemanasan global di Kabupaten Cianjur umumnya akan terasa di seluruh wilayah kabupaten namun wilayah Kabupaten Cianjur bagian selatan yang berbatasan dengan Samudra Indonesia akan mengalami dampak yang paling signifikan.

Dampak terbesar perubahan iklim di tersebut berupa peningkatan muka air laut serta cuaca yang tidak menentu. Hak ini tentunya akan berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem serta kehidupan para nelayan. Di bagian selatan dan utara, dampak pemanasan global berupa cuaca ekstrim akan berdampak pada dan petani dalam menentukan musim tanam.

Secara umum Kabupaten Cianjur beriklim tropis lembab dengan suhu udara minimum 18 derajat yang biasanya terjadi pada bulan Maret – April, sedangkan suhu maksimal adalah 24 derajat yang biasanya terjadi pada bulan Oktober – November dengan kelembaban nisbi berkisar antara 80-90%. Pada bulan November – Maret angin bertiup ke arah tenggara yang biasanya berkaitan dengan musim kemarau. Adapun puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus sedangkan puncak musim hujan terjadi pada bulan Desember- Januari.

Kondisi curah hujan di Kabupaten Cianjur sangat bervariasi. Curah hujan rata-rata di mayoritas berada di kelompok 3000-3500 mm yaitu 3.156,23 mm/tahun. Beberapa wilayah seperti Kecamatan Agrabinta memiliki curah hujan lebih tinggi, yakni 19.587,07 mm/tahun. Lihat Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.8. Curah Hujan Kabupaten Cianjur Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Curah Hujan (mm/ Tahun)					Total
		2000-2500	2500-3000	3000-3500	3500-4000	4000-4500	
1	Agrabinta			19.593,39	41,90		19.635,28
2	Bojong Picung	3.200,38	5.753,65				8.954,02
3	Campaka		11.860,01	2.303,05			14.163,06
4	Campakamulya			7.359,24	76,59		7.435,83
5	Cianjur	188,78	2.457,70				2.646,48
6	Cibeber	26,49	12.308,10				12.334,59
7	Cibinong			1.887,26	17.215,28	4.924,61	24.027,15
8	Cidaun		12.782,28	3.108,61	5.936,56	7.946,31	29.773,77
9	Cijati			592,76	4.276,82		4.869,58
10	Cikadu			2.609,03	5.700,90	11.190,43	19.500,36
11	Cikalongkulon	979,31	10.925,04	1.807,28			14.317,13
12	Cilaku	704,52	4.583,96				5.288,48
13	Cipanas			1.654,29	5.164,83		6.819,12
14	Ciranjang	2.235,96	875,84				3.409,62
15	Cugenang		3.858,67	3.354,56	434,55		7.647,78
16	Gekbrong		2.498,57	1.469,83	1.061,99		5.030,39
17	Haurwangi	1.819,31	2.745,23				4.590,97
18	Kadupandak			434,26	9.990,75	2,89	10.427,90
19	Karangtengah	4.775,29	72,42				4.847,71
20	Leles			3.971,18	7.507,52		11.478,69
21	Mande	2.978,54	5.450,97				9.431,73
22	Naringgul		1.547,67	8.015,49	7.131,68	12.068,97	28.763,80
23	Pacet		1.093,97	2.543,75	529,60		4.167,32
24	Pagelaran			5.705,21	7.746,58	6.687,80	20.139,59
25	Pasirkuda			1.041,66	9.476,07		10.517,72
26	Sindangbarang		2.989,27	11.879,67	990,65		15.859,59

No.	Kecamatan	Curah Hujan (mm/ Tahun)					Total
		2000-2500	2500-3000	3000-3500	3500-4000	4000-4500	
27	Sukaluyu	4.336,47	288,73				4.776,75
28	Sukanagara		578,35	6.303,74	7.083,45	3.050,82	17.016,37
29	Sukaresmi		5.836,68	3.055,48	712,87		9.605,04
30	Takokak		2.099,51	10.879,80	1.570,55		14.549,86
31	Tanggeung				6.595,92	0,17	6.596,09
32	Warungkondang		2.705,18	1.436,26	428,33		4.569,77
Total		**21.245,04**	**93.311,79**	**101.005,81**	**99.673,38**	**45.872,00**	**363.191,55**

Sumber: RTRW Kabupaten Cianjur 2024-2044

Gambar 2.7. Peta Curah Hujan Kabupaten Cianjur

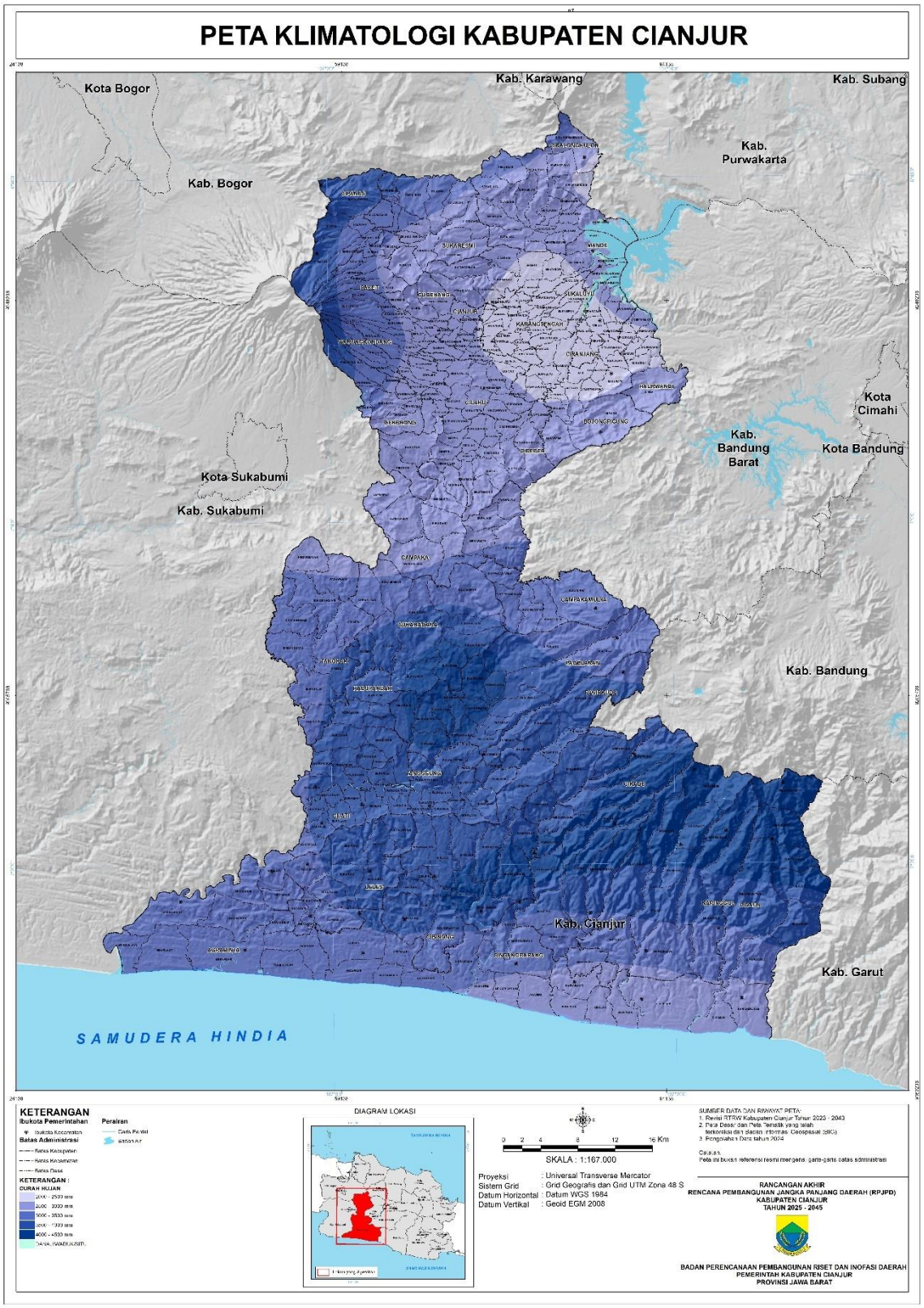

Sumber: RTRW Kabupaten Cianjur 2024-2044

5. Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Cianjur didominasi oleh hutan seluas 94.067,6 Ha (30,90%), kebun/perkebunan seluas 76.683,4 Ha (25,19%), kebun campuran seluas 63.854,9 Ha (20,98%), sawah irigasi teknis seluas 43.440,5 Ha (14,27%) pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.9. Penggunaan Lahan di Kabupaten Cianjur

No.	Kecamatan	Penggunaan Lahan											
		Danau	Gosong Sungai	Hutan	Kebun Campuran	Kebun/ Perkebunan	Kolam	Lahan Terbuka	Pasir	Pasir Pantai	Permukiman	Pertambangan	Sawah
1	Agrabinta	17,64	6,14	0	333,16	14.170,80	0	2,90	0	45,21	716,61	0	0
2	Bojong Picung	0	0	5.189,64	153,06	17,82	0	0	0	0	772,58	0	0
3	Campaka	0	0,07	1.660,67	6.474,80	492,96	0	0	0	0	913,90	0	0
4	Campakamulya	0	0,44	2.327,28	1.157,72	2.012,15	0	0	0	0	400,06	0	0
5	Cianjur	0	0	0	89,48	264,23	5,35	0,02	0	0	1.140,97	0	0
6	Cibeber	0,32	0	3.594,64	2.396,15	287,11	0	11,28	0	0	1.578,10	0	0
7	Cibinong	0	0	2.931,18	1.536,97	14.584,72	0	0	0	0	700,46	0	0
8	Cidaun	14,70	7,00	15.961,99	2.290,16	2.197,64	0	0	15,75	178,77	1.230,75	0	33,82
9	Cijati	0	0,23	0	0	2.516,51	0	0	0	0	499,28	0	0
10	Cikadu	0	0,16	14.059,23	265,76	1.086,49	0	0	0	0	497,62	0	0
11	Cikalongkulon	0	0,97	0	7.595,58	131,41	4,68	35,95	0	0	991,22	25,25	0
12	Cilaku	0	0	0	1.499,07	89,06	0,33	124,66	0	0	1.038,50	0	0
13	Cipanas	0	0	2.908,56	1.573,18	117,24	4,13	0	0	0	1.429,46	0	0
14	Ciranjang	0	0	0	462,53	3,17	0	0,47	0	0	769,74	0	0
15	Cugenang	0	0	2.105,88	342,03	1.631,32	0,68	0	0	0	843,48	0	0,19
16	Gekbrong	6,48	0	1.630,52	133,78	1.046,36	0	57,65	0	0	533,94	0	0
17	Haurwangi	0	1,40	1.750,56	440,04	387,95	0	0	0	0	557,14	0	0
18	Kadupandak	0	1,48	0	5.051,97	74,23	0	0	0	0	610,94	0	121,74
19	Karangtengah	0	0	16,65	310,52	6,44	8,97	27,90	0	0	1.278,62	0	0
20	Leles	0	0	0	7,65	8.414,90	0	0	0	0	637,58	0	0
21	Mande	0	0	1.802,50	312,05	241,58	0,28	9,44	0	0	767,92	0	0
22	Naringgul	0	3,23	20.776,32	1.154,49	1.768,90	0	0	0	0	673,24	0	0
23	Pacet	0	0	772,71	465,69	215,61	0	0,48	0	0	1.094,77	0	0
24	Pagelaran	1,85	0,81	8.047,41	6.060,38	1.290,05	0	7,39	0	0	836,15	0	0
25	Pasirkuda	0	2,41	2.851,13	1.544,25	3.823,48	0	10,72	0	0	426,76	0	0
26	Sindangbarang	0	0	354,13	3.627,02	6.117,60	0	36,61	0,69	99,19	819,91	0	0
27	Sukaluyu	0	0,43	0	1.023,16	21,39	0	8,30	0	0	957,64	0	0
28	Sukanagara	3,76	0	2.416,02	7.050,68	5.396,20	0	0	0	0	549,98	0	0
29	Sukaresmi	0	3,68	479,39	3.263,74	121,81	0,26	14,86	0	0	796,00	0	0
30	Takokak	0	0,55	854,84	5.121,24	6.111,24	0	0	0	0	561,55	0	0
31	Tanggeung	3,84	9,72	700,80	1.517,29	1.610,68	0	0	0	0	636,98	0	0
32	Warungkondang	0	0	838,14	556,01	396,33	0,08	2,87	0	0	521,47	0	0
Presentase (%)		**0,01**	**0,01**	**25,89**	**17,57**	**21,10**	**0,01**	**0,10**	**0,00**	**0,09**	**7,10**	**0,01**	**0,04**

Sumber: RTRW Kabupaten Cianjur 2024-2044

Gambar 2.8. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Cianjur

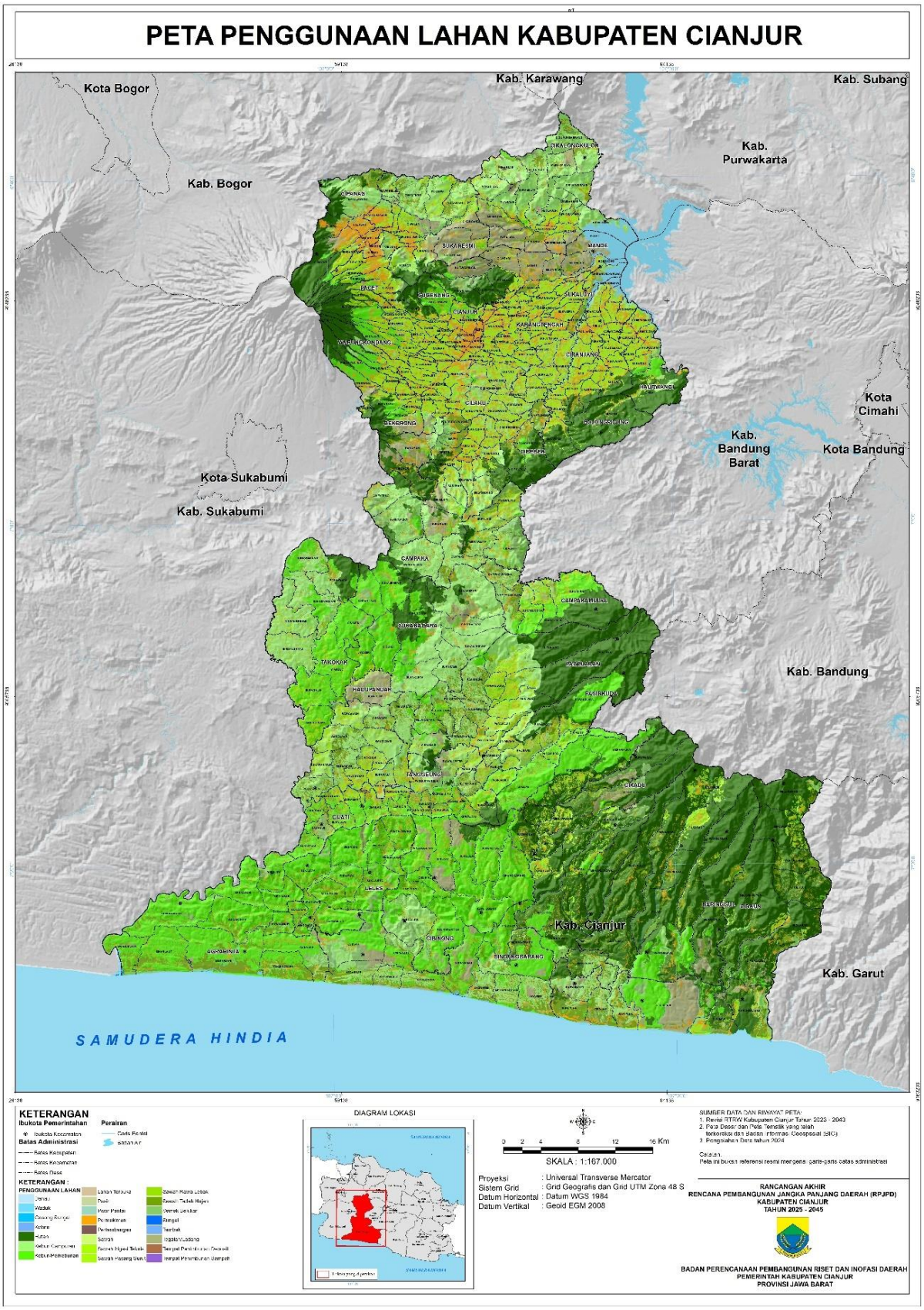

Sumber: RTRW Kabupaten Cianjur 2024-2044

6. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan atau perubahan penggunaan lahan pada dasarnya merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan, karena pertumbuhan penduduk yang pesat serta bertambahnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan lahan menjadi faktor pendorong dalam terjadinya alih fungsi lahan. Selain itu juga terdapat faktor eksternal berupa kebutuhan industri yang ikut mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Disamping itu adanya tuntutan pembangunan infrastruktur juga berperan dalam mendorong munculnya kegiatan-kegiatan pertambangan pasir, batuan, dan mineral lainnya yang akan dimanfaatkan sebagai bahan baku pembangunan infrastruktur dalam jumlah yang besar.

Tabel 2.10. Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian

No	Jenis Penggunaan Baru	Luas Guna Lahan 2022	Luas Guna Lahan 2024	Persentase Perubahan (%)
1	Permukiman	24.478,14	25.783,31	5,06
2	Perkebunan	34.586,80	76.647,39	54,88
3	Semak Belukar	31.383,15	63.809,61	50,82
4	Perairan/ Kolam	30,464	24,76	18,72

Sumber: RTRW Kabupaten Cianjur 2024-2044

Berdasarkan tabel diatas, terlihat perubahan yang cukup siginifikan adalah semak belukar mencapai 50,82% yang untuk kemudian dimanfaatkan sebagai perumahan. Besarnya trend transmigrasi yang dilakukan penduduk di Kabupaten Cianjur ke wilayah perkotaan, menyebabkan beberapa wilayah mengalami perubahan yang cukup siginfikan. Fakta semakin luasnya lahan yang digunakan untuk kawasan terbangun, juga diiringi dengan semakin mengecilnya wilayah perairan/kolam yang digunakan sebagai media penyerapan air tanah.

7. Potensi Sumberdaya

Identifikasi potensi sumberdaya prioritas bagi investasi dilakukan dengan melihat hasil identifikasi sektor potensial, PDRB potensial dan hasil overlay peta kesesuaian lahan dan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2042 untuk pengembangan potensi investasi Kabupaten Cianjur. Berdasarkan ke 3 (tiga) hasil identifikasi tersebut, maka diperoleh prioritas di Kabupaten Cianjur yang terdiri dari 5 (lima) kawasan yaitu kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan peruntukan industri, kawasan permukiman dan kawasan pariwisata. Adapun lebih jelasnya untuk hasil identifikasi potensi prioritas Kabupaten Cianjur dijelaskan sebagai berikut.

a. Potensi Tanaman Pangan

Potensi kawasan tanaman pangan merupakan hasil dari *overlay* peta kesesuaian lahan dan pola ruang RT RW Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2042 dengan hasil identifikasi sektor potensial dan PDRB potensial. Lokasi potensi kawasan tanaman pangan di Kabupaten

Cianjur dari 32 kecamatan, hanya 13 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas potensi investasi, yaitu:

1. Desa Sinarlaut Kecamatan Agrabinta
2. Desa Hegarmanah Kecamatan Bojongpicung
3. Desa Peuteuycondong Kecamatan Cibeber
4. Desa Sukapura Kecamatan Cidaun
5. Desa Sukakerta Kecamatan Cilaku
6. Desa Nanggamekar Kecamatan Ciranjang
7. Desa Ramasari Kecamatan Haurwangi
8. Desa Wargasari Kecamatan Kadupandak
9. Desa Babakancaringin Kecamatan Karangtengah
10. Desa Jayagiri Kecamatan Sindangbarang
11. Desa Sindangraja Kecamatan Sukaluyu
12. Desa Kubang Kecamatan Sukaresmi
13. Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang

Untuk lebih jelasnya prioritas potensi kawasan tanaman pangan Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.9. Peta Potensi Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Cianjur

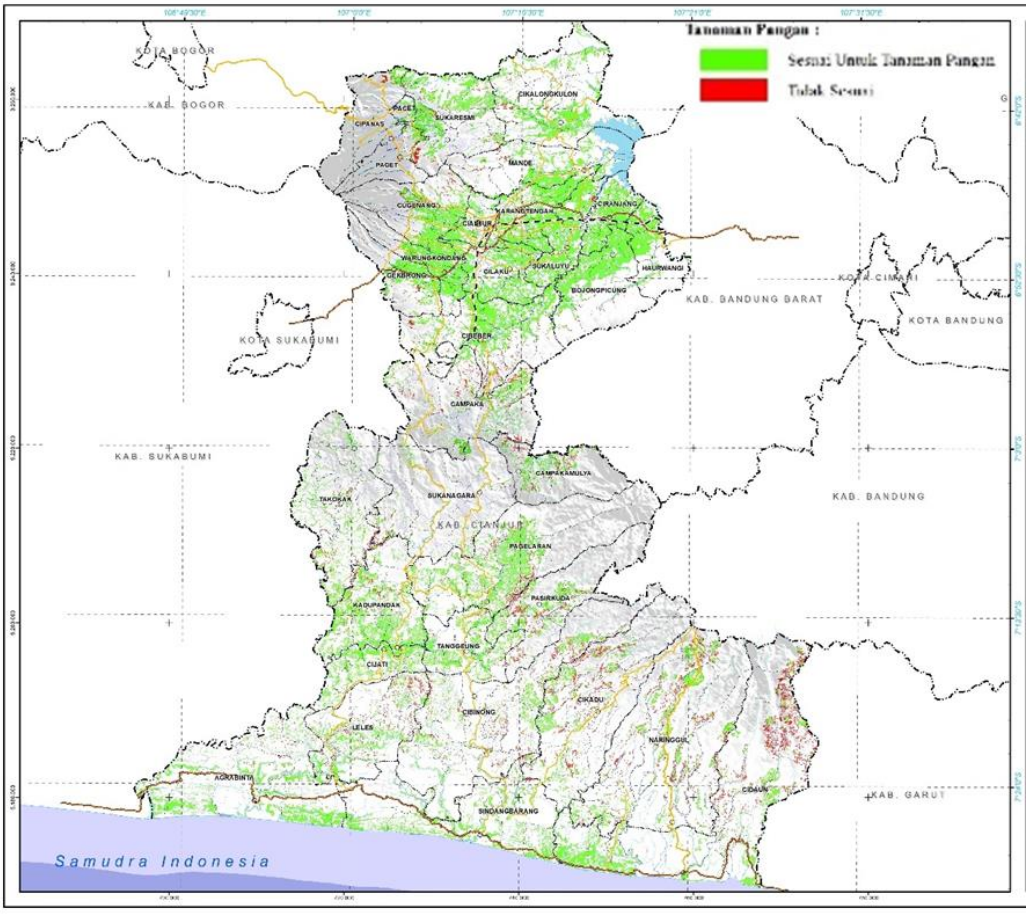

Sumber: Kajian Identifikasi Potensi Investasi Kabupaten Cianjur

b. Perkebunan

Potensi kawasan perkebunan merupakan hasil dari *overlay* peta kesesuaian lahan dan pola ruang RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2042 dengan hasil identifikasi sektor potensial dan PDRB potensial. Lokasi potensi kawasan perkebunan di Kabupaten Cianjur dari 32 kecamatan, hanya 6 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas potensi investasi, yaitu:

1. Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta
2. Desa Mekarmukti Kecamatan Cibinong
3. Desa Cimaragang Kecamatan Cidaun
4. Desa Cikadu Kecamatan Cikadu
5. Desa Mekarsari Kecamatan Naringgul
6. Desa Simpang Kecamatan Takokak

Gambar 2.10. Peta Potensi Kawasan Perkebunan Kabupaten Cianjur

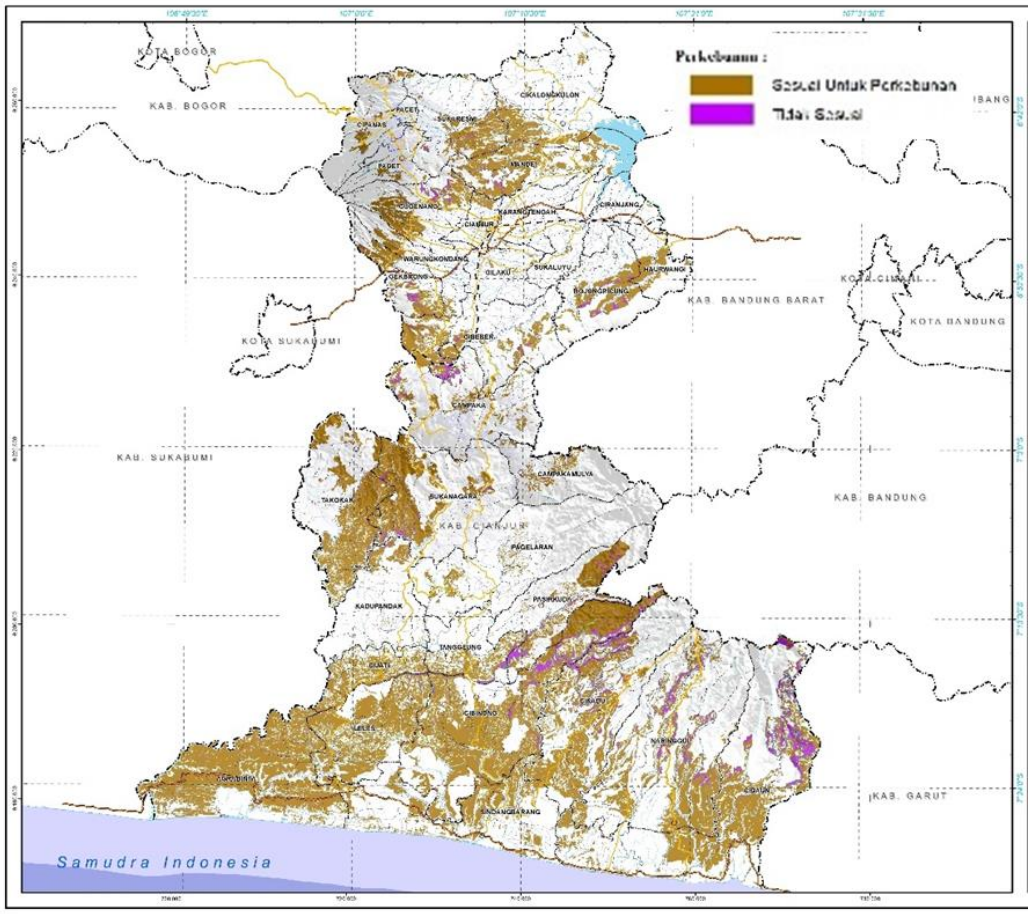

Sumber: Kajian Identifikasi Potensi Investasi Kabupaten Cianjur

c. Potensi Industri

Potensi kawasan peruntukan industri merupakan hasil dari *overlay* peta kesesuaian lahan dan pola ruang RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2042 dengan hasil identifikasi sektor potensial
dan PDRB potensial. Lokasi potensi kawasan peruntukan industri di Kabupaten Cianjur dari 9 kecamatan, hanya 2 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas, yaitu Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon dan Desa Mulyasari Kecamatan Mande. Untuk lebih jelasnya prioritas potensi investasi kawasan peruntukan industri Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.11. Peta Potensi Kawasan Industri Kabupaten Cianjur

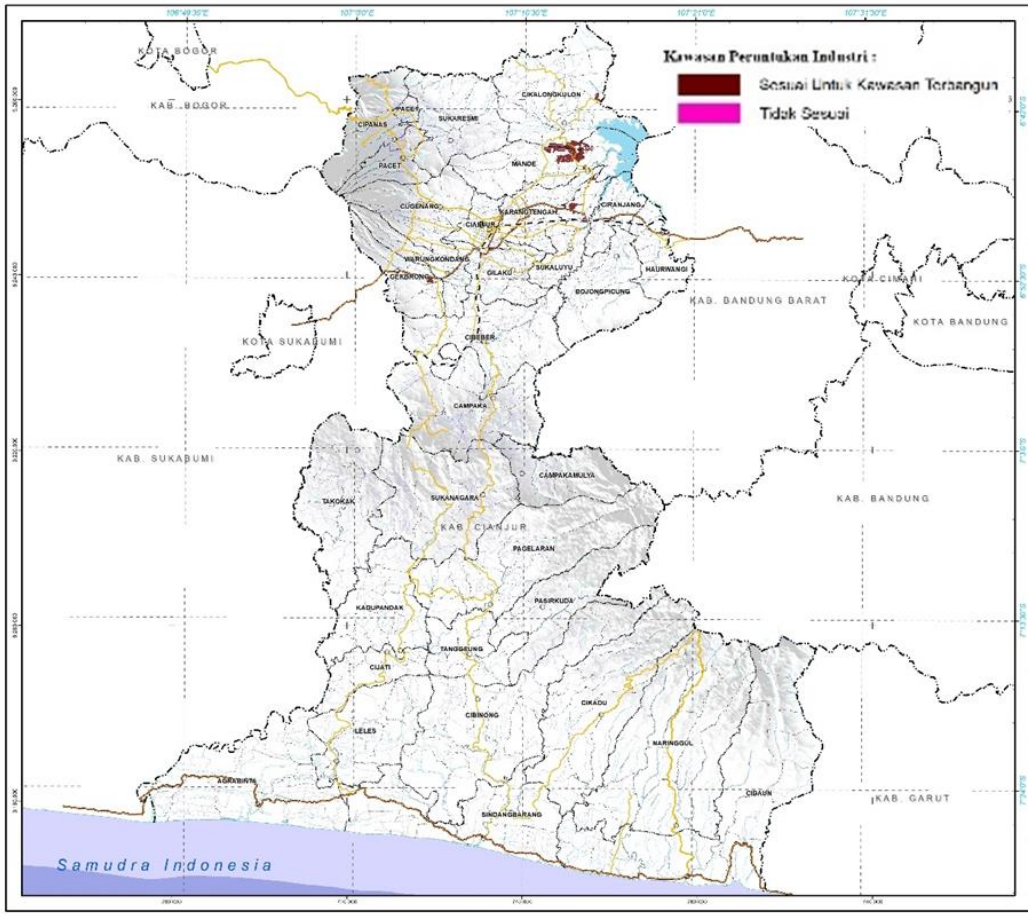

Sumber: Kajian Identifikasi Potensi Investasi Kabupaten Cianjur

d. Potensi Pengembangan Permukiman

Potensi pengembangan kawasan permukiman merupakan hasil dari *overlay* peta kesesuaian lahan dan pola ruang RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2042 dengan hasil identifikasi sektor potensial dan PDRB potensial. Lokasi potensi pengembangan kawasan kawasan permukiman

di Kabupaten Cianjur dari 32 kecamatan, hanya 9 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas potensi pengembangan permukiman, yaitu:

1. Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur
2. Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun
3. Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku
4. Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas
5. Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang
6. Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah
7. Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet
8. Desa Sirnagalih, Kecamatan Sindangbarang
9. Desa Gungungsari, Kecamatan Sukanagara

Untuk lebih jelasnya prioritas potensi pengembangan kawasan permukiman Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.12. Peta Potensi Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur

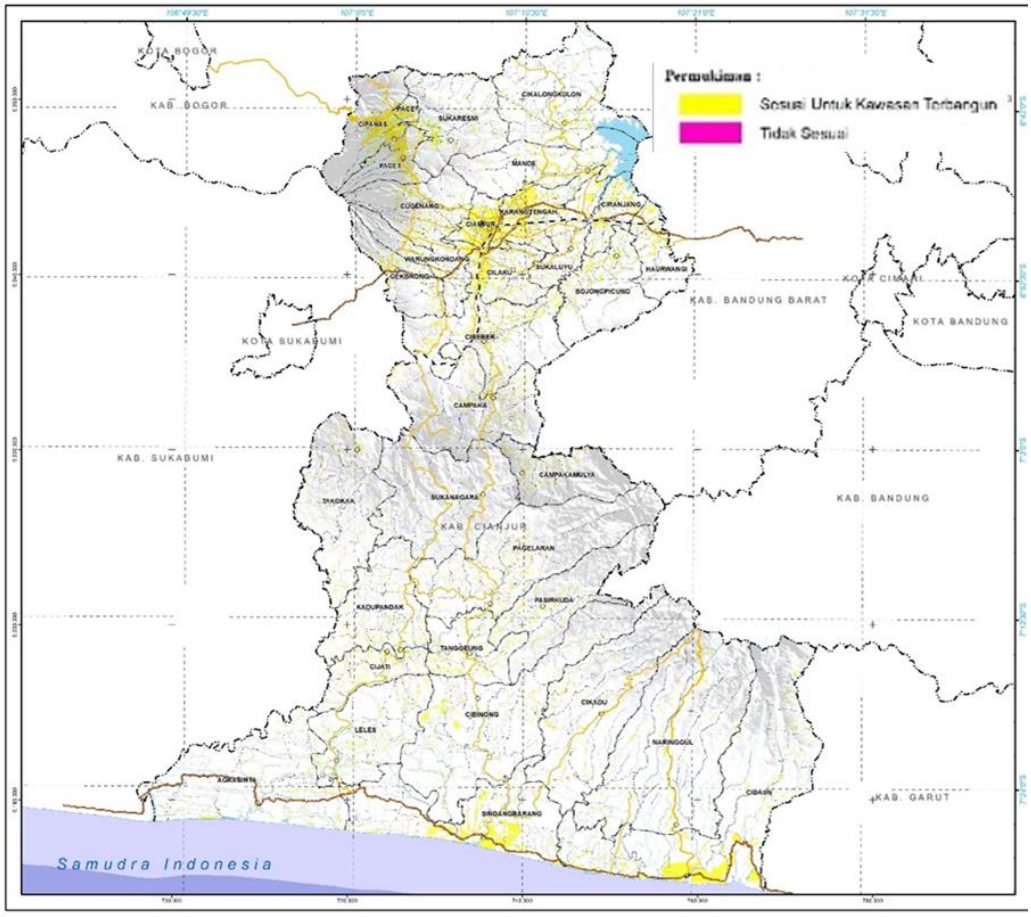

Sumber: Kajian Identifikasi Potensi Investasi Kabupaten Cianjur

e. Potensi Pariwisata

Potensi kawasan pariwisata merupakan hasil dari *overlay* peta kesesuaian lahan dan pola ruang RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2042 dengan hasil identifikasi sektor potensial dan PDRB potensial.

Lokasi prioritas potensi kawasan pariwisata berada di 12 lokasi/ kecamatan yang tersebar di wilayah bagian utara, wilayah bagian tengah dan wilayah bagian selatan Kabupaten Cianjur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.11. Prioritas Potensi Kawasan Pariwisata Kabupaten Cianjur

Objek Wisata	Kecamatan	Desa	Foto
Pantai Cemara	Cidaun	Cidamar	
Pantai Sinar Laut	Agrabinta	Sinarlaut	
Curug Cikondang	Campaka	Sukadana	
Situs Megalitikum Gunung Padang	Campaka	Karyamukti	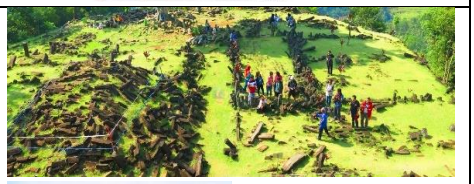

Objek Wisata	Kecamatan	Desa	Foto
Pantai Rest Area Cilaki	Cidaun	Karangwangi	
Pantai Batu Kukumbung	Cidaun	Karangwangi	
Pantai Jayanti	Cidaun	Cidamar	
Pantai Ciwidig	Cidaun	Kertajadi	
Kebun Raya Cibodas	Cipanas	Cimacan	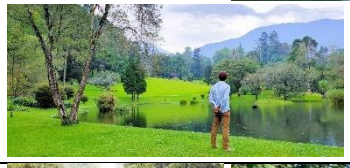
Cipanas Sukasirna	Leles	Sukasirna	

Objek Wisata	Kecamatan	Desa	Foto
Kampung Adat Miduana	Naringgul	Balegede	
Kota Bunga	Pacet	Sukanagalih	
Curug Citambur	Pasirkuda	Karangjaya	
Pantai Apra	Sindangbarang	Saganten	
Taman Bunga Nusantara	Sukaresmi	Kawungluwuk	
Kampung Budaya Padi Pandanwangi	Warungkondang	Tegallega	

Sumber: Hasil Analisis, 2022.

Untuk lebih jelasnya prioritas potensi Kawasan Pariwisata Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.13. Potensi Kawasan Pariwisata Kabupaten Cianjur

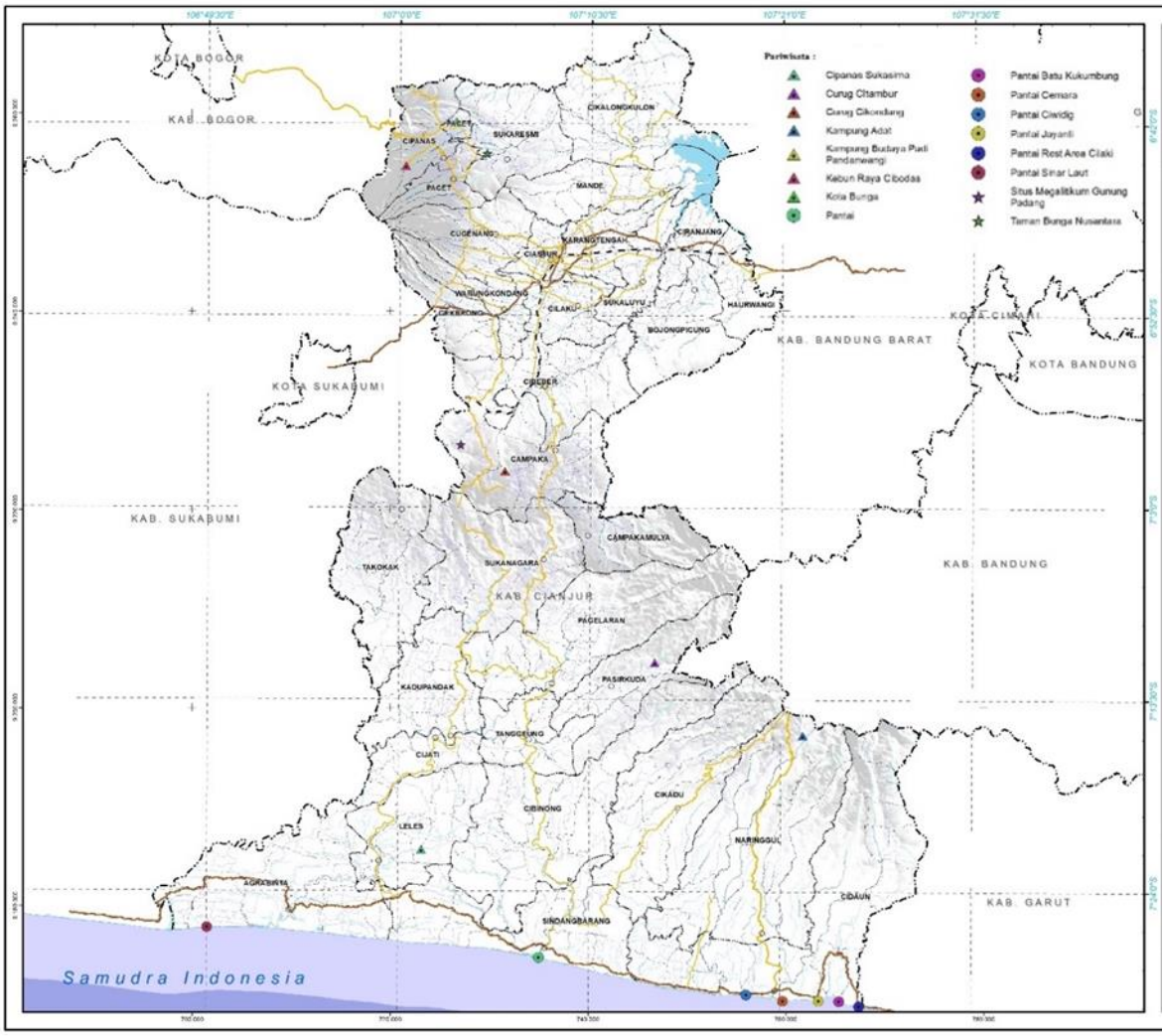

Sumber: Kajian Identifikasi Potensi Investasi Kabupaten Cianjur

8. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu wilayah yang memiliki kerentanan terhadap bencana alam. Daerah rawan bencana terbagi atas empat jenis bencana, yaitu Tsunami, Banjir Bandang, tanah Longsor, Erupsi Gunungapi, Gempa Bumi, dan Banjir.

Dari 6 (enam) jenis bahaya yang dikaji dalam dokumen ini, diketahui bahwa Gempa Bumi merupakan jenis bahaya yang paling luas potensi paparannya, yaitu meliputi satu Kabupaten Cianjur. Namun demikian hanya 20.69% saja yang termasuk ke dalam area dengan kategori bahaya gempa bumi tinggi.

Tanah Longsor juga merupakan jenis bahaya yang proporsi luas paparannya tergolong besar, yaitu mencakup 69% dari wilayah Kabupaten Cianjur. Hal itu dipengaruhi oleh kondisi morfologi wilayah yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan bergelombang dengan kemiringan lereng yang curam.

Sementara untuk Banjir, Tsunami, Banjir Bandang, dan Letusan Gunungapi area paparannya cenderung bersifat lokal, yaitu di area sepanjang aliran Sungai, pesisir Pantai, atau di perimeter gunung api saja. Sehingga luasan wilayah yang potensial terpapar bahaya relatif tidak begitu besar.

Merujuk pada metode penentuan klasifikasi yang tercantum dalam Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana BNPB (2019), maka kelas bahaya untuk tiap-tiap jenis bencana pada satu kabupaten ditentukan oleh kelas tertinggi dari kecamatan yang ada di kabupaten tersebut. Dengan demikian kelas bahaya untuk Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Tanah Longsor dan Banjir Bandang di Kabupaten Cianjur digolongkan ke dalam kategori Tinggi. Sedangkan untuk bahaya Erupsi Gunungapi masuk dalam kelas bahaya Sedang.

a. Risiko Bencana

Dari 6 (enam) jenis bahaya yang dikaji dalam dokumen ini, diketahui bahwa Gempa Bumi merupakan jenis bahaya yang paling luas potensi paparannya, yaitu meliputi satu Kabupaten Cianjur. Namun demikian hanya 20.69% saja yang termasuk ke dalam area dengan kategori bahaya gempa bumi tinggi.

Tanah Longsor juga merupakan jenis bahaya yang proporsi luas paparannya tergolong besar, yaitu mencakup 69% dari wilayah Kabupaten Cianjur. Hal itu dipengaruhi oleh kondisi morfologi wilayah yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan bergelombang dengan kemiringan lereng yang curam.

Sementara untuk Banjir, Tsunami, Banjir Bandang, dan Letusan Gunungapi area paparannya cenderung bersifat lokal, yaitu di area sepanjang aliran Sungai, pesisir Pantai, atau di perimeter gunung api saja. Sehingga luasan wilayah yang potensial terpapar bahaya relatif tidak begitu besar.

Tabel 2.12. Nilai Bobot Jenis Bahaya

No	Jenis Bencana	Luas Zona Bencana (Ha)			Jumlah (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjir	2,042	2,636	13,358	18,036	Tinggi
2	Gempabumi	91,664	155,383	116,066	363,113	Tinggi
3	Erupsi Gunungapi	12,229	2,615	389	15,233	Sedang
4	Tanah Longsor	138,652	26,037	86,221	250,910	Tinggi
5	Banjir Bandang	1,947	8,122	12,592	22,661	Tinggi
6	Tsunami	33,822	11,319	3,721	48,862	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Cianjur, 2023

Gambar 2.14. Diagram Rekapitulasi Luasan Zona Bencana di Kabupaten Cianjur

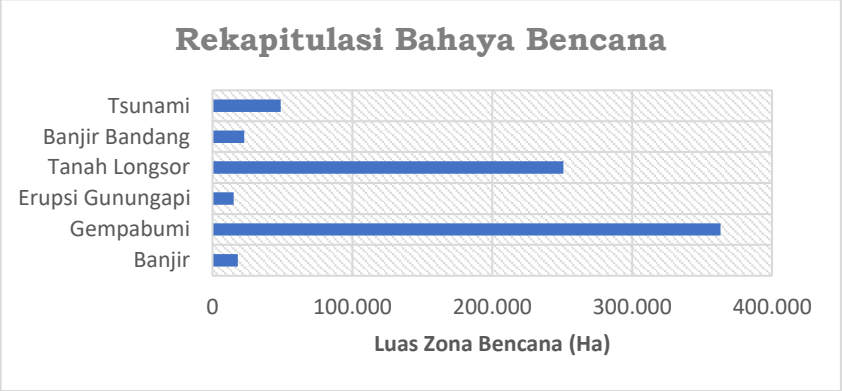

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Cianjur, 2023

Merujuk pada metode penentuan klasifikasi yang tercantum dalam Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana BNPB (2019), maka kelas bahaya untuk tiap-tiap jenis bencana pada satu kabupaten ditentukan oleh kelas tertinggi dari kecamatan yang ada di kabupaten tersebut. Dengan demikian kelas bahaya untuk Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Tanah Longsor dan Banjir Bandang di Kabupaten Cianjur digolongkan ke dalam kategori Tinggi. Sedangkan untuk bahaya Erupsi Gunungapi masuk dalam kelas bahaya Sedang.

b. Kerentanan Bencana

Dari 6 bencana yang terdapat di Kabupaten Cianjur dapat diketahui bahwa bencana gempa bumi merupakan bencana yang memiliki luas potensi bencana terbesar jika di bandingkan dengan bencana lainnya. Secara tidak langsung maka potensi terhadap penduduk terpapar serta kerugian fisik, ekonomi dan lingkungan juga akan berdampak besar.

Hal tersebut berbanding lurus dengan jumlah penduduk terpapar pada bencana gempa bumi, adapun jumlah penduduk terpapar dari bencana gempa bumi yaitu 2.147.350 jiwa. Selain jumlah penduduk terpapar yang memiliki nilai terbesar jika di bandingkan bencana lainnya. Bencana gempa bumi juga memiliki total kerugian fisik dan ekonomi yang besar

Tabel 2.13. Kerentanan Bencana Kabupaten Cianjur

No	Jenis Bencana	Kerentanan Bencana				Indeks	Kelas
		Sosial (Jiwa)	Fisik (Juta Rupiah)	Ekonomi (Juta Rupiah)	Lingkungan (Ha)		
1	Banjir	144,128	353,532,387	3,485	706	0.083	Rendah
2	Gempabumi	91,664	155,383	146,020	-	0.118	Rendah
3	Erupsi Gunungapi	262,152	45,011,271	53	3,990	0.034	Rendah
4	Tanah Longsor	702,456	563,488,504	14,010	318,047	0.101	Rendah
5	Banjir Bandang	192,525	609,364,852	3,701	1,064	0.074	Rendah

No	Jenis Bencana	Kerentanan Bencana				Indeks	Kelas
		Sosial (Jiwa)	Fisik (Juta Rupiah)	Ekonomi (Juta Rupiah)	Lingkungan (Ha)		
6	Tsunami	33,822	746,797,601	10,667	7,521	0.188	Rendah

Sumber : *Kajian Resiko Bencana Kabupaten Cianjur, 2023*

Gambar 2.15. Diagram Rekapitulasi Kerentanan Bencana di Kabupaten Cianjur

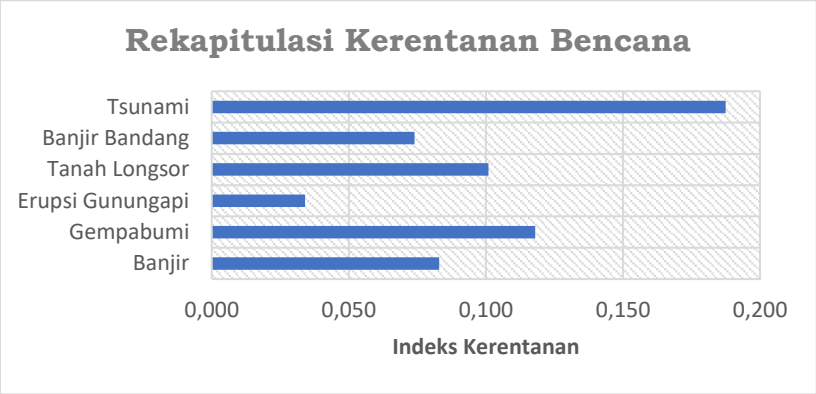

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Cianjur, 2023

c. Kapasitas Bencana

Indeks kapasitas 6 bencana di Kabupaten Cianjur dilihat dari 2 parameter yaitu Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM), kedua indeks tersebut nantinya akan menghasilkan nilai Indeks Kapasitas Bencana. Dari hasil analisa yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kabupaten Cianjur memiliki nilai 0,75 yang masuk kedalam klasifikasi sedang, lalu untuk Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM) Kabupaten Cianjur untuk setiap jenis bencana memiliki nilai yang berbeda-beda. Adapun jenis bencana yang memiliki nilai Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM) terbesar yaitu pada jenis bencana banjir, tsunami, dan banjir bandang dengan nilai indeks 0,15

Tabel 2.14. Rekapitulasi Kapasitas Bencana di Kabupaten Cianjur

No	Jenis Bencana	Kapasitas Bencana		Indeks	Kelas
		Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM)		
1	Banjir	0.75	0.15	0.380	Sedang
2	Gempabumi	0.75	0.14	0.380	Sedang
3	Erupsi Gunungapi	0.75	0.13	0.370	Sedang
4	Tanah Longsor	0.75	0.14	0.380	Sedang
5	Banjir Bandang	0.75	0.15	0.380	Sedang
6	Tsunami	0.75	0.15	0.380	Sedang
Kabupaten Cianjur		**0.75**	**0.14**	**0.38**	**Sedang**

Sumber : *Kajian Resiko Bencana Kabupaten Cianjur, 2023*

Gambar 2.16. Diagram Rekapitulasi Kapasitas Bencana Kabupaten Cianjur

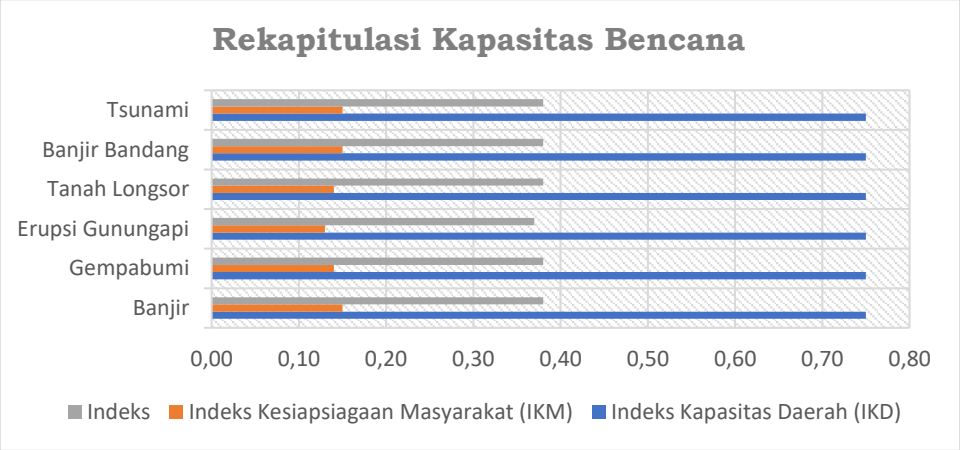

Sumber : *Kajian Resiko Bencana Kabupaten Cianjur, 2023*

Untuk Indeks Kapasitas Bencana di Kabupaten Cianjur masuk kedalam klasifikasi sedang untuk setiap bencana, dengan nilai pada 5 jenis bencana yaitu banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor dan banjir bandang memiliki nilai 0,38 dan 1 jenis bencana lainnya memiliki nilai 0,37 dengan selisih nilai indeks yang tidak terlampau jauh dari bencana lainnya.

d. Indeks Risiko Bencana

Risiko bencana merupakan gabungan analisa dari indeks bahaya, indeks kerentanan dan indeks kapasitas. seperti yang diketahui bahwa indeks risiko masing-masing jenis bencana di Kabupaten Cianjur masuk kedalam klasifikasi rendah dengan nilai indeks risiko bencana terbesar terdapat pada bencana tanah longsor dengan nilai indeks 0,160.

Tabel 2.15. Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Cianjur

No	Jenis Bencana	Indeks Bahaya	Indeks Kerentanan	Indeks Kapasitas	Indeks Risiko	Kelas
1	Banjir	0.840	0.083	0.380	0.109	Rendah
2	Gempabumi	0.730	0.118	0.380	0.113	Rendah
3	Erupsi Gunungapi	0.380	0.034	0.370	0.028	Rendah
4	Tanah Longsor	0.820	0.101	0.380	0.160	Rendah
5	Banjir Bandang	1.000	0.074	0.380	0.103	Rendah
6	Tsunami	0.670	0.188	0.380	0.098	Rendah

Sumber : *Kajian Resiko Bencana Kabupaten Cianjur, 2023*

Gambar 2.17. Diagram Rekapitulasi Risiko di Kabupaten Cianjur

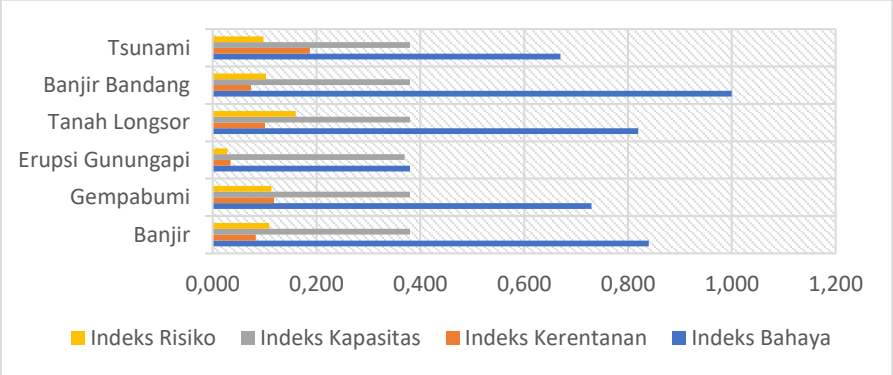

Sumber : *Kajian Resiko Bencana Kabupaten Cianjur, 2023*

e. Indeks Multibahaya Bencana

Pemetaan indeks multibahaya dilakukan dengan cara menggabungkan semua peta jenis bahaya dengan teknik tumpang susun terbobot (weighted overlay). Mengacu pada Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 setiap jenis bencana diberi bobot masing-masing sebagai berikut.

Tabel 2.16. Rekapitulasi Indeks Multibahaya di Kabupaten Cianjur

No	Jenis Bahaya	Bobot (%)
1	Banjir	0,1064
2	Gempa Bumi	0,1064
3	Tsunami	0,0638
4	Kebakaran gedung dan Permukiman	0,0638
5	Kekeringan	0,0638
6	Cuaca Ekstrim	0,0638
7	Tanah Longsor	0,1064
8	Letusan Gunung Api	0,1064
9	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0,0638
10	Kebakaran Hutan dan Lahan	0,0638
11	Kegagalan Teknologi	0,0638
12	Konflik Sosial	0,0638
13	Epidemi dan Wabah Penyakit	0,0638

Sumber : *Perka BNPB No 2 Tahun 2012*

Mengingat pada kajian ini jenis bencana yang dianalisis hanya 6 (enam) saja, maka dilakukan penyesuaian terhadap nilai bobot. Dengan asumsi bahwa untuk bahaya banjir, gempa bumi, tanah longsor, gempabumi, dan letusan gunungapi, tingkat signifikansinya untuk satu sama lain adalah 1 (satu), sedangkan banjir bandang ½ (setengah) kali dari jenis bahaya lainnya. Penjumlahan bobot dari seluruh jenis bahaya adalah sama dengan 1 atau 100%.

Tabel 2.17. Nilai Bobot Modifikasi Jenis Bahaya berdasarkan Perka BNPB

No	Jenis Bahaya/Ancaman	Bobot
1	Banjir	0.182
2	Gempabumi	0.182
3	Erupsi Gunungapi	0.182
4	Tanah Longsor	0.182
5	Banjir Bandang	0.090
6	Tsunami	0.182

Sumber : Kajian Resiko Bencana Kabupaten Cianjur, 2023

Hasil analisis tumpang susun untuk bahaya banjir, banjir bandang, gempa bumi, erupsi gunungapi, tsunami, dan tanah longsor di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.18. Potensi Multibahaya Per-Kecamatan di Kabupaten Cianjur

No	Kabupaten	Luas Zona Bencana (Ha)			Jumlah (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Agrabinta	19,292	17,218	9,431	19,630	Rendah
2	Bojongpicung	3,608	5,588	3,535	8,954	Rendah
3	Campaka	6,677	6,218	13,851	14,163	Rendah
4	Campakamulya	8,664	3,708	6,361	7,436	Rendah
5	Cianjur	893	907	2,164	2,646	Rendah
6	Cibeber	4,632	5,033	12,204	12,335	Rendah
7	Cibinong	27,745	9,440	10,824	24,027	Rendah
8	Cidaun	23,546	20,487	20,963	29,774	Rendah
9	Cijati	3,092	3,842	1,291	4,870	Rendah
10	Cikadu	20,266	6,889	11,334	19,500	Rendah
11	Cikalongkulon	7,703	11,557	6,759	14,317	Rendah
12	Cilaku	699	1,469	4,182	5,288	Rendah
13	Cipanas	5,659	3,985	6,909	6,819	Rendah
14	Ciranjang	1,425	2,099	1,138	3,410	Rendah
15	Cugenang	3,131	2,946	7,686	7,648	Rendah
16	Gekbrong	1,895	1,674	5,039	5,030	Rendah
17	Haurwangi	2,473	3,470	1,636	4,591	Rendah
18	Kadupandak	6,644	7,214	3,514	10,428	Rendah
19	Karangtengah	581	3,354	2,036	4,848	Rendah
20	Leles	13,154	4,044	4,997	11,479	Rendah
21	Mande	4,774	6,434	2,900	9,432	Rendah
22	Naringgul	29,311	10,231	19,040	28,764	Rendah
23	Pacet	3,910	1,856	4,128	4,167	Rendah
24	Pagelaran	13,452	14,224	9,355	20,140	Rendah
25	Pasirkuda	7,977	8,112	4,038	10,518	Rendah
26	Sindangbarang	16,916	13,003	7,951	15,860	Rendah
27	Sukaluyu	1,564	3,421	1,950	4,777	Rendah
28	Sukanagara	12,835	4,878	13,823	17,016	Rendah
29	Sukaresmi	5,491	9,183	3,368	9,605	Rendah
30	Takokak	9,918	4,407	11,938	14,550	Rendah
31	Tanggeung	3,738	4,642	923	6,596	Rendah
32	Warungkondang	1,819	1,879	4,218	4,570	Rendah
Kabupaten Cianjur		**273,487**	**203,410**	**219,486**	**363,186**	**Rendah**

Sumber : Kajian Resiko Bencana Kabupaten Cianjur, 2023

Berdasarkan tabel di atas, potensi multibahaya untuk wilayah Kabupaten Cianjur secara umum tergolong rendah. Hanya sedikit lokasi yang berada pada kondisi di mana 6 jenis bahaya kategori tinggi sekaligus mengancam suatu daerah atau kawasan. Hal itu bisa dipahami mengingat dalam metode analisis BNPB semua jenis bencana dikalikan dengan persentase bobot (dalam kajian ini 0.2451 atau 24.51% dan 0.1420 atau 14.20%) yang jika dijumlahkan seluruhnya bernilai 100%. Itu artinya, dalam peta multibahaya jika suatu area hanya terdapat 1 jenis bahaya saja, maka nilai indeks bahayanya bernilai 24.51% (atau sekitar seperempat) saja dari nilai indeks dalam peta bahaya per- satu jenis bencana.

Gambar 2.18. Diagram Potensi Multibahaya Per-Kecamatan di Kabupaten Cianjur

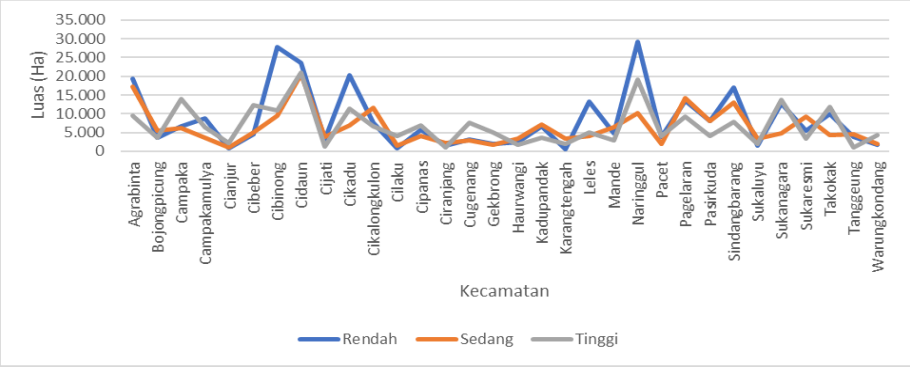

Sumber : Kajian Resiko Bencana Kabupaten Cianjur, 2023

Pemetaan kerentanan multibahaya dilakukan dengan cara yang sama untuk mengetahui nilai multibahaya, yaitu dilakukan dengan cara menggabungkan semua peta jenis kerentanan dengan teknik tumpang susun terbobot (weighted overlay). Hasil analisis tumpang susun untuk kerentanan banjir, banjir bandang, gempa bumi, erupsi gunungapi, tsunami, dan tanah longsor di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19. Kerentanan Multibahaya Per-Kecamatan di Kabupaten Cianjur

No	Kecamatan	Indeks Kerentanan	Kelas
1	Agrabinta	0.075	Rendah
2	Bojongpicung	0.076	Rendah
3	Campaka	0.085	Rendah
4	Campakamulya	0.069	Rendah
5	Cianjur	0.367	Sedang
6	Cibeber	0.091	Rendah
7	Cibinong	0.093	Rendah
8	Cidaun	0.115	Rendah
9	Cijati	0.056	Rendah
10	Cikadu	0.114	Rendah
11	Cikalongkulon	0.079	Rendah
12	Cilaku	0.096	Rendah
13	Cipanas	0.341	Sedang
14	Ciranjang	0.080	Rendah
15	Cugenang	0.102	Rendah
16	Gekbrong	0.109	Rendah
17	Haurwangi	0.070	Rendah
18	Kadupandak	0.051	Rendah
19	Karangtengah	0.120	Rendah
20	Leles	0.076	Rendah
21	Mande	0.086	Rendah
22	Naringgul	0.110	Rendah
23	Pacet	0.188	Rendah
24	Pagelaran	0.066	Rendah
25	Pasirkuda	0.096	Rendah
26	Sindangbarang	0.102	Rendah
27	Sukaluyu	0.081	Rendah
28	Sukanagara	0.100	Rendah
29	Sukaresmi	0.104	Rendah
30	Takokak	0.063	Rendah
31	Tanggeung	0.049	Rendah
32	Warungkondang	0.111	Rendah
Kabupaten Cianjur		**0.099**	**Rendah**

Sumber : Kajian Resiko Bencana Kabupaten Cianjur, 2023

Dapat diketahui untuk indeks kerentanan multi bahaya di Kabupaten Cianjur memiliki kecenderungan nilai indeks yang sama dengan kerentanan untuk masing-masing bencana. Dapat dilihat pada tabel bahwa hanya satu kecamatan yang memiliki nilai kerentanan multibahaya sedang yaitu terdapat pada Kecamatan Cianjur dan Kecamatan Cipanas dengan nilai indeks 0,367 dan 0,341. Sedangkan untuk kecamatan lainnya masuk kedalam kelas kerentanan multibahaya rendah. Dan untuk nilai indeks kerentanan multibahaya Kabupaten Cianjur yaitu 0,099.

Gambar 2.19. Diagram Kerentanan Multibahaya Per-Kecamatan di Kabupaten Cianjur

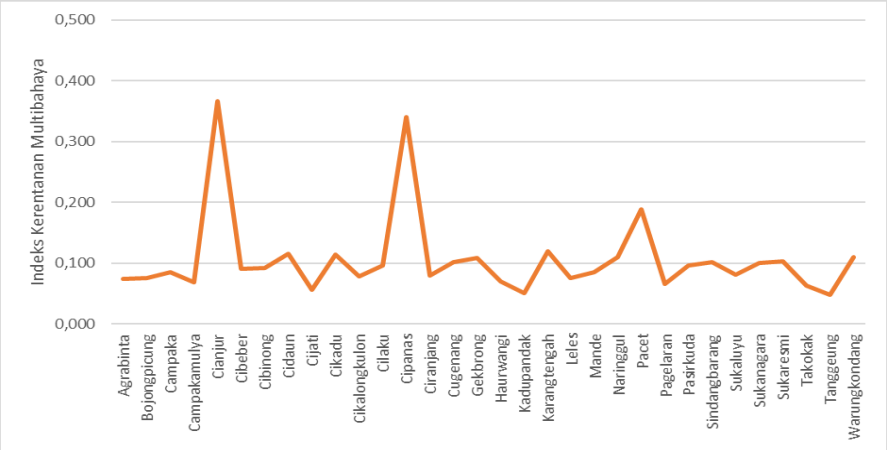

Sumber : Kajian Resiko Bencana Kabupaten Cianjur, 2023

Gambar 2.20. Peta Indeks Risiko Multibahaya Kabupaten Cianjur

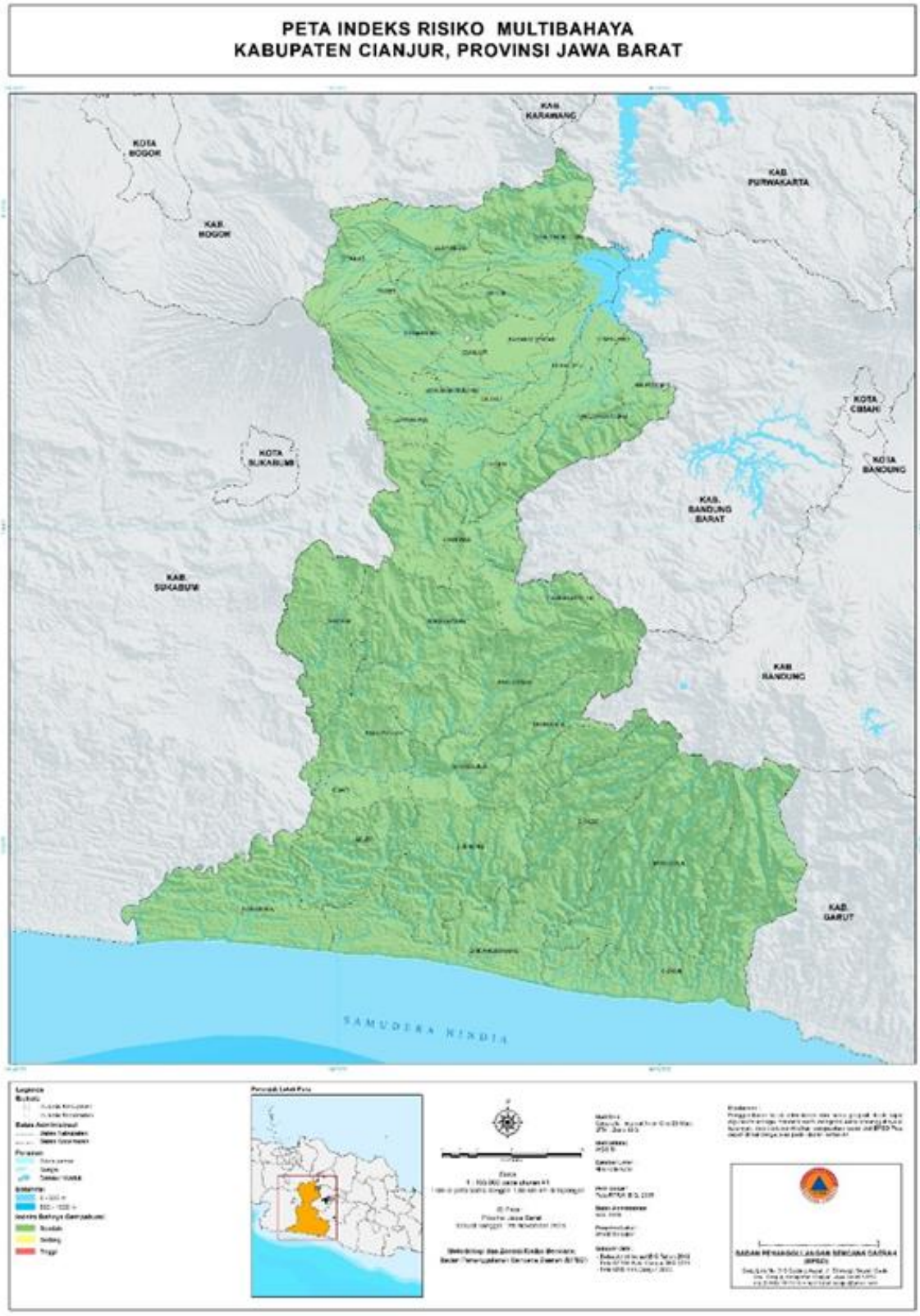

Sumber : Kajian Resiko Bencana Kabupaten Cianjur, 2023

9. Kualitas Lingkungan Hidup

Pada tahun 2023, Kabupaten Cianjur mengalami penurunan IKLH dari tahun 2022 dimana hanya memperoleh nilai 67,86 dari sebelumnya 68,64, nilai tersebut belum memenuhi target IKLH pada tahun 2023 yakni sebesar 73,47. Dengan didapatnya nilai tersebut, Kabupaten Cianjur masuk dalam katagori "Sedang". Salah satu faktor penurunan IKLH diantaranya adanya kontribusi dari penurunan nilai IKL/IKTL dimana pada tahun 2023 mengalami penurunan dari semula 54,7 pada tahun 2022 menjadi 47,46 pada tahun 2023. Penurunan IKL diakibatkan dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan pertanian.

Tabel 2.20. Capaian Target IKLH Kabupaten Cianjur

Indeks	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
IKA	36,67	59,91	56,06	60,16	52,42	60,41
IKU	88,62	94,01	87,86	94,26	93,22	94,51
IKL	54,69	63,13	54,7	67,49	47,46	67,49
IKLH	61,65	73,17	68,64	73,32	67,86	73,47

Sumber : DIKPLHD Kabupaten Cianjur, 2024

Target IKLH yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2024 berdasarkan RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2021-2026 yakni sebesar 73,62 hal ini sangat berat dicapai mengingat kondisi IKLH eksisting pada tahun 2023 hanya mencapai 67,86. Sehingga pada tahun 2025 hingga 2028, target IKLH kemudian diturunkan sehingga memungkinkan tercapainya nilai IKLH dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin timbul dari aspek yang mendukung nilai tercapainya IKLH.

Gambar 2.21. Target IKLH dan IKL Kabupaten Cianjur 2025-2028

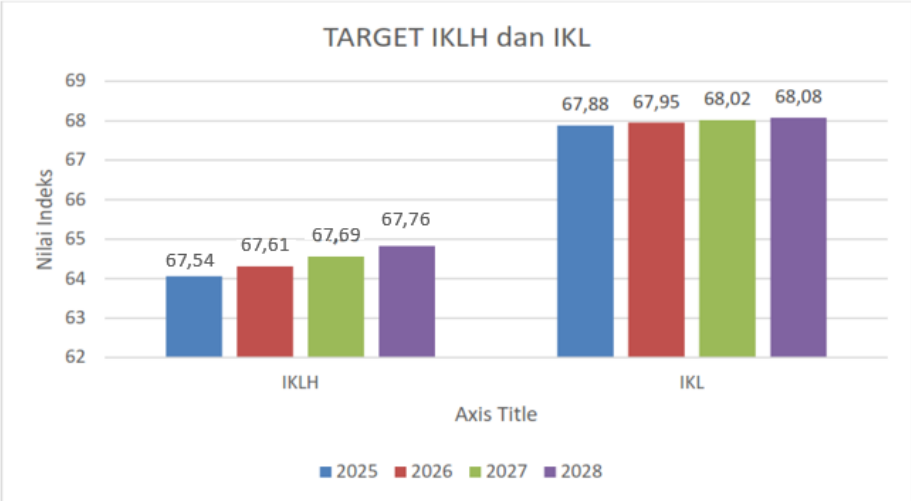

Sumber : DIKPLHD Kabupaten Cianjur, 2024

Kenaikan IKTL didukung oleh akumulasi berbagai data pemetaan poligon, inventarisir RTH dan penanaman pohon. Nilai IKTL Kabupaten

Cianjur ini sebenarnya dapat lebih ditingkatkan karena kurangnya inventarisir data RTH di masing-masing RT, RW dan beberapa hutan atau taman kota di Kabupaten Cianjur. Selain itu, meningkatnya nilai IKTL/IKL

Kabupaten Cianjur didukung dengan kegiatan penanaman pohon. Dengan meningkatkanya tutupan lahan di Kabupaten Cianjur secara tidak langsung juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan suatu ekosistem. Kondisi kesehatan suatu ekosistem dapat dilihat dari keadaaan biodiversitas atau keanekaragaman hayati.

10. Ancaman Perubahan Iklim

Berdasarkan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, teridentifikasi bahwa Kabupaten Cianjur memiliki nilai tingkat kerentanan 4 untuk seluruh desa. Nilai IKA tertinggi berada di Desa Mangunkerta Kecamatan Cugenang senilai 0,71 dan nilai IKS tertinggi berada di Desa Cidadap Kecamatan Campaka senilai 0,74. Bahaya kerentanan iklim di Kabupaten Cianjur dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.21. Tingkat Kerentanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Desa						Total
	1 (Sangat Rendah)	2 (Rendah)	3 (Cukup Rendah)	4 (Sedang)	6 (Tinggi)	7 (Sangat Tinggi)	
Agrabinta				11			11
Bojongpicung				10		1	11
Campaka		1	1	6		3	11
Campakamulya				4	1		5
Cianjur			1	10			11
Cibeber		1		15		2	18
Cibinong				12		2	14
Cidaun				10	1	3	14
Cijati				8		2	10
Cikadu				4	4	2	10
Cikalongkulon			1	13	1	3	18
Cilaku		1	3	5		1	10
Cipanas			1	4		2	7
Ciranjang			2	6		1	9
Cugenang	1		3	11		1	16
Gekbrong			1	6		1	8
Haurwangi			1	6		1	8
Kadupandak		1	1	11		1	14
Karangtengah			3	13			16
Leles				7		5	12
Mande				12			12
Naringgul				11			11
Pacet			2	3		2	7
Pagelaran			3	11			14
Pasirkuda				9			9
Sindangbarang				8		3	11
Sukaluyu				9		1	10
Sukanagara			1	9			10
Sukaresmi			1	8		2	11
Takokak				9			9

Kecamatan	Jumlah Desa						Total
	1 (Sangat Rendah)	2 (Rendah)	3 (Cukup Rendah)	4 (Sedang)	6 (Tinggi)	7 (Sangat Tinggi)	
Tanggeung			1	8		3	12
Warungkondang		1		9		1	11
Total	**1**	**5**	**26**	**278**	**7**	**43**	**360**

Sumber : RPPLH Kabupaten Cianjur , Tahun 2023

Gambar 2.22. Peta Indikasi Ancaman Perubahan Iklim Kabupaten Cianjur

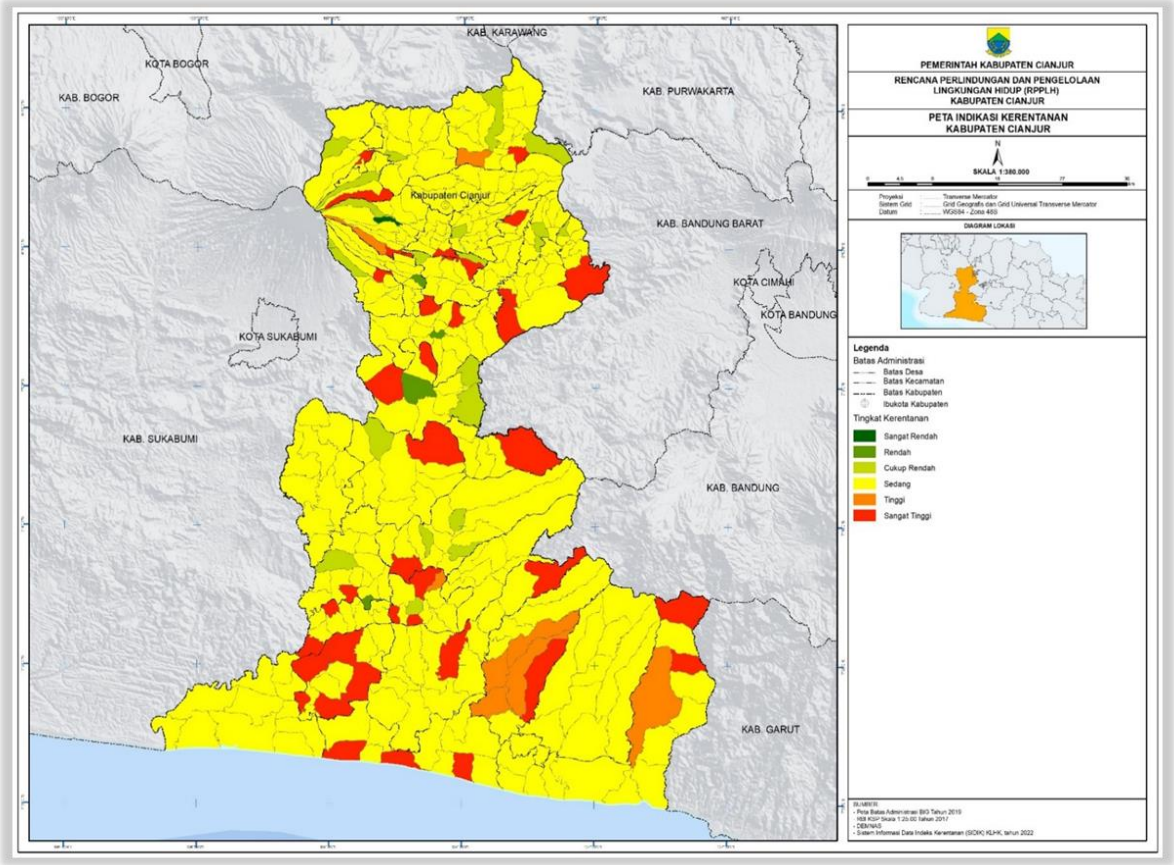

Sumber RPPLH Kabupaten Cianjur, Tahun 2023

11. Pemanfaatan Ruang Darat, Ruang Laut dan Ruang Udara

a. Pemanfaatan Ruang Darat

Pemanfaatan ruang darat di Kabupaten Cianjur merupakan bagian daratan yang saat ini secara pemanfaatan difungsikan sebagai kawasan perkotaan. Untuk mengetahui pemanfaatan ruang darat, maka setelah melihat penggunaan lahan, penggunaan lahan berkaitan erat dengan aktivitas manusia yang mencakup pengelolaan dan pemanfaatan lahan serta dapat menimbulkan dampak terhadap lahan tersebut.

Berdasarkan hasil analisa penggunaan lahan pada sub bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa daratan di Kabupaten Cianjur didominasi oleh fungsi permukiman dan aktivitas pendukung

permukiman, sedangkan sisanya merupakan lahan terbuka/kosong berupa lahan sawah, hutan, semak belukar, dan lain sebagainya.

Perkembangan suatu wilayah akan terus terjadi dari hari ke hari secara dinamis bersamaan dengan perkembangan jumlah penduduk dan aktivitas penduduk di dalamnya, akan mengakibatkan meningkatnya permintaan lahan yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan. Sebagai dampak dari perkembangan kota yang secepat ini, terjadilah perubahan penggunaan lahan, dampak ini juga dirasakan di Kabupaten Cianjur.

Untuk mengantisipasi dampak perkembangan tersebut, maka direncanakan kebutuhan pengembangan kawasan terbangun sebagian besar akan dimanfaatkan sebagai ruang permukiman dan aktivitas pendukungnya seperti perdagangan jasa, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya.

Untuk memenuhi aspek keberlanjutan sesuai dengan undang-undang penataan ruang, pemerintah wajib menyediakan alokasi ruang terbuka hijau publik sebesar 20%. Dengan alokasi ruang yang ada, Kabupaten Cianjur juga telah mengakomodir kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik tersebut.

Selain itu, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan pangan, telah dikeluarkan kebijakan penetapan lahan sawah yang dilindungi (LSD) berdasarkan Kepmen ATR/Ka BPN No. 1589/SK-HK.02.01 /XII/2021. Dengan adanya kebijakan tersebut maka dalam revisi RTRW juga akan mempertimbangkan fungsi lahan sawah yang dilindungi.

b. Pemanfaatan Ruang Laut

Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengelolaan wilayah laut, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut oleh Pemerintah Provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 0- 12 mil. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya mencakup:

- Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota,
- Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan
- Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Sarana dan prasarana peruntukan perikanan di Kabupaten Cianjur meliputi :

- Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Jayanti di Kecamatan Cidaun dan Kecamatan Sindangbarang;
- Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jayanti di Kecamatan Cidaun, TPI Apra di Kecamatan Sindangbarang, dan TPI Cikakap di Kecamatan Agrabinta;
- Pusat Benih Ikan di Kecamatan Karangtengah;
- Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Bojongpicung;

- Unit pembenihan rakyat dengan potensi seluas kurang lebih 283 (dua ratus delapan puluh tiga) hektar meliputi : Kecamatan Cianjur; Kecamatan Sukaluyu; Kecamatan Ciranjang; Kecamatan Mande; Kecamatan Cikalongkulon; Kecamatan Cilaku; Kecamatan Cugenang.

12. Ketahanan Energi

Kabupaten Cianjur telah lama mendukung ketahanan energi nasional melalui system pembangkit di PLTA Cirata yang mengandalkan sumber dari Waduk Cirata yang merupakan rangkaian waduk cascade pada Wilayah Sungai Citarum ynag terdiri mulai Waduk dan PLTA Saguling, Waduk dan PLTA Cirata serta Waduk dan PLTA Jatiluhur, serta yang terbaru adalah PLTA Rajamandala yang juga mengandalkan aliran air dari Sungai Citarum. Selain PLTA besar, di wilayah Kabupaten Cianjur sendiri sudah berdiri belasan PLTMH terutama di wilayah Tengah dan Selatan. Ini artinya bahwa masih ada potensi besar bagi pemanfaatan energi dari aliran Sungai. Selain itu terdapat pula PLTMH Cijedil yang sudah beroperasi sejak jaman Belanda dan masih beroperasi untuk menjaga keandalan energi di wilayah Cianjur. juga terdapat rencana Pembangunan PLTA UCPS Cisokan yang berada di perbatasan CIanjur – Bandung Barat yang direncanakan untuk memasok energi Listrik sampai dengan 1.000 MW. Untuk potensi sumber EBT lain seperti tenaga surya dan tenaga angin dalam skala besar sebagai sumber cazdangan energi dimasa yang akan datang dapat dikembangkan sesuai dengan kajian potensi yang ada.

Ketahanan energi didaerah dapat diwujudkan selain melalui pencarian potensi sumber-sumber energi baru dan terbarukan, juga dengan menjaga keandalan energi dan system transmisi serta distribusinya. Walaupun Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Cianjur sudah mencapai > 90% namun sebarannya belum merata dan masih belum didukung oleh keandalan system distribusi. Untuk itu didorong rencana pembangunan Gardu Induk Tanggeung untuk menjaga keandalan energi terumata untuk wilayah Tengah dan Selatan Kabupaten Cianjur. Rencana pembangunan Gardu Induk Tanggeung ini akan ditopang melalui Pembangunan baru jalur SUTT kapasitas 70 kV dari yang tersambung dari wilayah perbatasan yaitu Kabupaten Sukabumi. Selain itu mnegantisipasi pertumbuhan dan perkembnagan yang di wilayah utara maka telah dibangun Gardu Induk Cianjur Baru di SUkaluyu yang akan rencanaya akan tersambung dengan jalur SUTT kapasitas 150 kV yang juga dari wilayah perbatasan yaitu Padalarang, Bandung Barat.

2.1.2 Aspek Demografi

Peninjauan kependudukan dalam perencanaan pembangunan merupakan hal yang sangat penting, karena kependudukan sangat

berperan dan menjadi subjek berikut objek daripada pembangunan. Kondisi kependudukan meliputi jumlah, penyebaran, perkembangan, dan kepadatan penduduk. Penduduk Kabupaten Cianjur terus mengalami peningkatan dari tahun 2012-2023. Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur menurut data BPS pada tahun 2012 mencapai 2.210.267 jiwa, jumlah tersebut meningkat hingga tahun 2023 yang mencapai 2.535.002 jiwa. Adanya penurunan jumlah penduduk pada tahun 2023 disebabkan oleh penyesuaian satu data Indonesia dimana pada tahun 2012-2022 menggunakan proyeksi dari Badan Pusat Statistik sedangkan pada tahun 2023 menggunakan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur.

Adapun grafik pertambahan penduduk Kabupaten Cianjur periode tahun 2012-2023 disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 2.23. Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2023

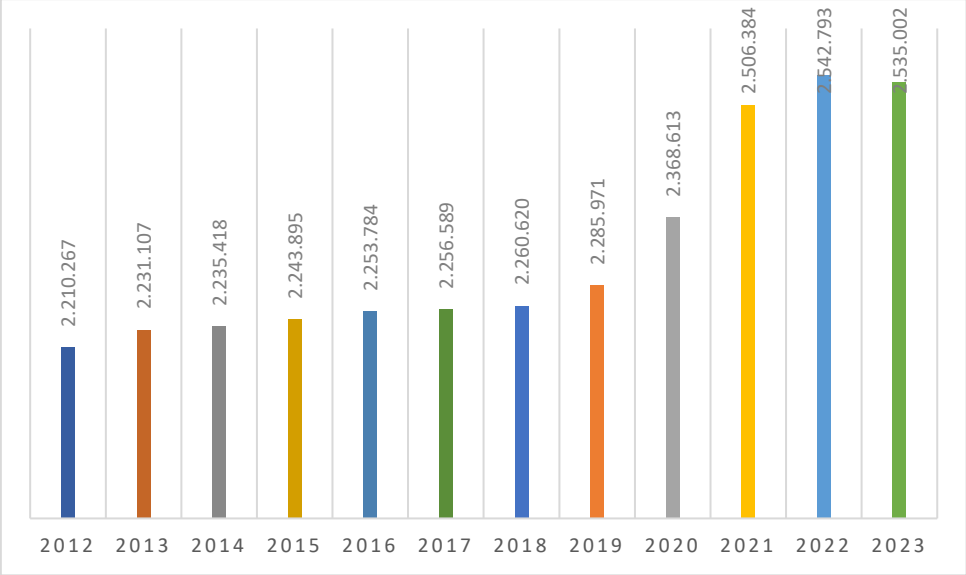

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur

Untuk lebih jelasnya mengenai pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur pada periode tahun 2012-2023 per kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.22. Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Agrabinta	37.257	37.581	37.577	37.720	37.886	37.934	37.995	35.547	37.003	39.299	41.323	39.861
2	Leles	32.202	32.438	32.435	32.558	32.701	32.742	32.795	28.461	29.231	30.900	31.730	32.150
3	Sindangbarang	52.767	53.281	53.362	53.565	53.801	53.868	53.964	52.131	55.009	58.689	59.912	59.560
4	Cidaun	65.456	66.077	66.102	66.353	66.646	66.729	66.824	57.084	60.967	67.127	70.642	69.114
5	Naringgul	45.308	45.678	45.680	45.854	46.055	46.113	46.188	42.164	43.863	45.846	48.036	47.065
6	Cibinong	58.705	59.239	59.224	59.449	59.710	59.784	59.891	57.350	59.038	64.002	65.469	64.566
7	Cikadu	35.210	35.465	35.472	35.606	35.762	35.806	35.867	32.615	34.802	37.051	37.508	37.617
8	Tanggeung	44.824	45.226	45.182	45.354	45.553	45.609	45.696	46.704	48.198	50.940	51.393	51.727
9	Pasirkuda	34.905	35.210	35.179	35.313	35.470	35.514	35.574	32.849	33.670	35.189	38.898	35.939
10	Kadupandak	49.501	49.922	49.936	50.126	50.347	50.410	50.497	47.878	50.313	53.525	53.792	53.960
11	Cijati	33.101	33.418	33.415	33.542	33.690	33.732	33.793	31.252	32.203	35.350	34.796	35.929
12	Takokak	51.602	52.059	52.033	52.231	52.462	52.527	52.618	48.159	49.604	53.381	52.308	54.573
13	Sukanagara	49.620	50.126	50.217	50.408	50.630	50.693	50.784	53.282	54.682	57.195	57.201	57.408
14	Pagelaran	68.947	69.559	69.532	69.796	70.103	70.190	70.313	70.393	72.565	76.920	77.227	78.343
15	Campaka	64.579	65.166	65.142	65.390	65.678	65.753	65.871	64.314	67.286	70.627	70.930	71.311
16	Campakamulya	23.934	24.155	24.119	24.211	24.318	24.339	24.379	22.082	22.842	23.495	24.073	23.690
17	Cibeber	117.710	118.899	118.998	119.450	119.977	120.127	120.353	122.656	128.467	136.232	137.561	138.117
18	Warungkondang	66.020	66.642	66.811	67.064	67.360	67.444	67.564	71.922	75.649	80.972	80.525	82.411
19	Gekbrong	52.179	52.686	52.874	53.075	53.309	53.375	53.470	54.430	58.120	61.366	63.048	62.859
20	Cilaku	99.225	100.193	100.712	101.094	101.539	101.662	101.844	108.621	112.332	119.425	122.188	121.056
21	Sukaluyu	71.438	72.030	72.178	72.452	72.770	72.892	73.033	83.212	86.404	92.837	93.892	93.999
22	Bojongpicung	72.208	72.852	72.961	73.238	73.561	73.653	73.784	80.537	81.903	86.064	86.111	86.388
23	Haurwangi	54.805	55.316	55.351	55.561	55.805	55.870	55.970	60.258	62.244	64.895	65.998	65.179
24	Ciranjang	76.106	76.850	77.134	77.427	77.768	77.865	78.004	84.102	86.231	89.523	91.833	89.727
25	Mande	70.738	71.409	71.709	71.982	72.300	72.390	72.519	76.159	78.037	82.134	84.222	83.111
26	Karangtengah	136.484	137.896	138.366	138.891	139.502	139.709	139.981	153.643	158.594	166.638	170.927	167.556
27	Cianjur	160.992	162.633	163.213	163.828	164.548	164.753	165.062	168.851	171.154	178.012	176.368	177.314
28	Cugenang	101.702	102.647	102.988	103.378	103.832	103.960	104.145	108.284	111.953	119.540	120.961	121.370
29	Pacet	96.143	99.845	100.206	100.587	101.030	101.155	101.335	102.328	106.422	111.838	113.981	113.103
30	Cipanas	106.258	107.329	107.706	108.115	108.590	108.717	108.911	105.616	109.737	114.257	115.574	115.127
31	Sukaresmi	81.513	82.260	82.374	82.678	83.052	83.146	83.294	82.504	86.191	92.615	93.720	93.772
32	Cikalongkulon	98.828	97.020	97.230	97.599	98.029	98.128	98.302	100.583	103.899	110.500	110.646	111.100
Kabupaten Cianjur		**2.210.267**	**2.231.107**	**2.235.418**	**2.243.895**	**2.253.784**	**2.256.589**	**2.260.620**	**2.285.971**	**2.368.613**	**2.506.384**	**2.542.793**	**2.535.002**

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka Tahun 2013-2023

1. Struktur Penduduk

Struktur penduduk merupakan komposisi karakteristik penduduk yang dilihat dari jenis kelamin, kelompok umur dan mata pencaharian. Adapun struktur penduduk di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

***A.* Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

Struktur penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Cianjur, sex ratio rata-rata di Kabupaten Cianjur berbanding sama yaitu 100, yaitu dalam 100 penduduk perempuan terdapat 100 penduduk laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.23. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Cianjur Tahun 2023

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Sex Ratio	Jumlah
Agrabinta	20.498	19.363	106	39.861
Leles	16.965	15.185	114	32.150
Sindangbarang	30.238	29.322	103	59.560
Cidaun	36.092	33.022	110	69.114
Naringgul	25.078	21.987	115	47.065
Cibinong	33.110	31.456	10+	64.566
Cikadu	20.044	17.573	115	37.617
Tanggeung	26.287	25.440	103	51.727
Pasirkuda	19.170	16.769	115	35.939
Kadupandak	27.563	26.397	104	53.960
Cijati	18.154	17.775	102	35.929
Takokak	27.840	26.733	105	54.573
Sukanagara	29.253	28.155	104	57.408
Pagelaran	39.947	38.396	104	78.343
Campaka	36.657	34.654	106	71.311
Campakamulya	12.565	11.125	114	23.690
Cibeber	70.160	67.957	103	138.117
Warungkondang	42.065	40.346	104	82.411
Gekbrong	32.801	30.058	110	62.859
Cilaku	61.131	59.925	102	121.056
Sukaluyu	48.037	45.962	105	93.999
Bojongpicung	43.622	42.766	102	86.388
Haurwangi	33.836	31.343	108	65.179
Ciranjang	45.389	44.338	102	89.727
Mande	42.488	40.623	104	83.111
Karangtengah	84.766	82.790	103	167.556
Cianjur	89.013	88.301	101	177.314
Cugenang	62.623	58.747	107	121.370
Pacet	58.192	54.911	106	113.103
Cipanas	60.026	55.101	110	115.127
Sukaresmi	48.423	45.349	107	93.772
Cikalongkulon	56.913	54.187	105	111.100
Kabupaten Cianjur	**1.298.946**	**1.236.056**	**105**	**2.535.002**

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka, 2024

B. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Struktur penduduk menurut umur dalam arti demografi adalah komposisi penduduk menurut kelompok umur tertentu. Komposisi menurut umur dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- Usia Belum Produktif (Kelompok Umur < 14 Tahun),
- Usia Produktif (Kelompok Umur Antara 15 - 59 Tahun),
- Usia Tidak Produktif (Kelompok Umur > 60 Tahun)

Jumlah usia produktif di Kabupaten Cianjur lebih banyak daripada jumlah penduduk dengan usia belum produktif dan tidak produktif, seperti terlihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.24. Jumlah Penduduk Menurut Umur Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2023

Kelompok Umur	2022			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	110.343	105.782	216.125	105.414	99.166	204.580
5-9	108.181	104.222	212.403	127.158	120.138	247.296
10-14	107.751	102.257	210.008	123.165	116.034	239.199
15-19	111.466	102.774	214.240	69.952	68.417	138.369
20-24	113.423	103.027	216.450	113.312	106.349	219.661
25-29	106.796	98.606	205.402	108.151	97.435	205.586
30-34	103.542	98.860	202.402	98.644	92.141	190.785
35-39	93.332	90.820	184.152	93.587	90.220	183.807
40-44	86.438	87.628	174.066	92.388	93.285	185.673
45-49	86.084	85.902	171.986	83.679	87.185	170.864
50-54	73.594	72.234	145.828	79.952	77.859	157.811
55-59	66.898	61.611	128.509	63.309	61.117	124.426
60-64	53.189	47.852	101.041	53.726	48.305	102.031
65-69	38.822	33.762	72.584	36.610	32.417	69.027
70-74	24.054	22.215	46.269	25.242	21.006	46.248
75+	20.154	21.740	41.328	24.657	24.982	49.639
Jumlah	**1.304.067**	**1.239.292**	**2.542.793**	**1.298.946**	**1.236.056**	**2.535.002**

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka, 2024

Gambar 2.24. Piramida Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2023

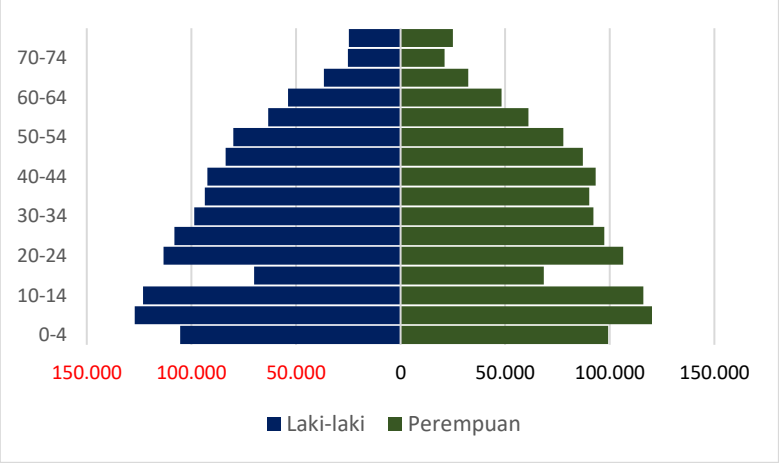

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka, 2024 (diolah)

Tabel 2.25. Luas Wilayah, Persentase Penduduk, dan Kepadatan Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Km²)
1	Agrabinta	192,65	1,57	206,91
2	Leles	114,32	1,27	281,23
3	Sindangbarang	159,08	2,35	374,40
4	Cidaun	295,51	2,73	233,88
5	Naringgul	281,32	1,86	167,30
6	Cibinong	235,48	2,55	274,19
7	Cikadu	188,66	1,48	199,39
8	Tanggeung	59,8	2,04	865,00
9	Pasir Kuda	115,15	1,42	312,11
10	Kadupandak	104,41	2,13	516,81
11	Cijati	49,02	1,42	732,95
12	Takokak	143,75	2,15	383,88
13	Sukanagara	174,05	2,26	329,84
14	Pagelaran	199,44	3,09	392,81
15	Campaka	143,75	2,81	496,08
16	Campakamulya	74,27	0,93	318,97
17	Cibeber	124,73	5,45	1.107,33
18	Warungkondang	45,16	3,25	1.824,87
19	Gekbrong	50,77	2,48	1.238,11
20	Cilaku	52,53	4,78	2.304,51
21	Sukaluyu	48,02	3,71	1.957,50
22	Bojongpicung	88,34	3,41	977,90
23	Haurwangi	46,18	2,57	1.411,41
24	Ciranjang	34,81	3,54	2.577,62
25	Mande	98,79	3,28	841,29
26	Karangtengah	48,53	6,61	3.452,63
27	Cianjur	26,15	6,99	6.780,65
28	Cugenang	76,15	4,79	1.593,83
29	Pacet	41,66	4,46	2.714,91
30	Cipanas	67,28	4,54	1.711,16
31	Sukaresmi	92,15	3,70	1.017,60
32	Cikalongkulon	144,02	4,38	771,42
Jumlah		**3.614,34**	**100**	**701,37**

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur (Kabupaten Cianjur Dalam Angka Tahun 2023)

Jika berdasarkan luas Kabupaten Cianjur (3.614,34 km²), maka kepadatan penduduk per Km² pada tahun 2023 mencapai 701,37 jiwa. Dilihat dari sebarannya terdapat 9 kecamatan di Kabupaten Cianjur yang memiliki kepadatan tinggi dengan kepadatan penduduk di atas 1.500 jiwa per km² yaitu kecamatan-kecamatan di wilayah utara.

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah rasio antara pertambahan penduduk dalam interval selama satu tahun terhadap jumlah penduduk di tahun sebelumnya. Semakin cepat laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan bahwa jumlah populasi suatu wilayah semakin banyak. Sebaliknya, laju pertumbuhan penduduk yang lambat menunjukkan jumlah populasi suatu wilayah sedikit. Berdasarkan kriteria tersebut, rerata LPP kecamatan-kecamatan di Kabupaten Cianjur pada tahun 2022-2023 yaitu sebesar 1,14 persen atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021-2022 sebesar 1,50 persen. Wilayah dengan LPP tertinggi berada di Kecamatan Naringgul sebesar 4,05 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.26. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	
	2022	2023	2021-2022	2022-2023
Agrabinta	41.323	39.861	1,09	1,43
Leles	31.730	32.150	0,24	4,05
Sindangbarang	59.912	59.560	1,36	1,48
Cidaun	70.642	69.114	0,90	2,96
Naringgul	48.036	47.065	0,68	2,66
Cibinong	65.469	64.566	1,16	0,88
Cikadu	37.508	37.617	0,74	1,53
Tanggeung	51.393	51.727	1,39	1,54
Pasirkuda	38.898	35.939	1,12	2,13
Kadupandak	53.792	53.960	0,92	0,81
Cijati	34.796	35.929	0,57	1,64
Takokak	52.308	54.573	0,26	2,23
Sukanagara	57.201	57.408	1,50	0,37
Pagelaran	77.227	78.343	1,17	1,85
Campaka	70.930	71.311	0,98	0,97
Campakamulya	24.073	23.690	0,13	0,83
Cibeber	137.561	138.117	1,60	1,38
Warungkondang	80.525	82.411	2,02	1,78
Gekbrong	63.048	62.859	1,98	2,43
Cilaku	122.188	121.056	2,18	1,37
Sukaluyu	93.892	93.999	2,75	1,25
Bojongpicung	86.111	86.388	1,81	0,38
Haurwangi	65.998	65.179	1,94	0,44
Ciranjang	91.833	89.727	1,97	0,23
Mande	84.222	83.111	1,85	1,19
Karangtengah	170.927	167.556	2,26	0,55
Cianjur	176.368	177.314	1,02	-0,39
Cugenang	120.961	121.370	1,82	1,53
Pacet	113.981	113.103	1,54	1,13
Cipanas	115.574	115.127	0,99	0,76
Sukaresmi	93.720	93.772	1,48	1,25
Cikalongkulon	110.646	111.100	1,50	0,54
Kabupaten Cianjur	**2.542.793**	**2.535.002**	**1,50**	**1,14**

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka, 2023

Gambar 2.25. Posisi Relatif Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2023

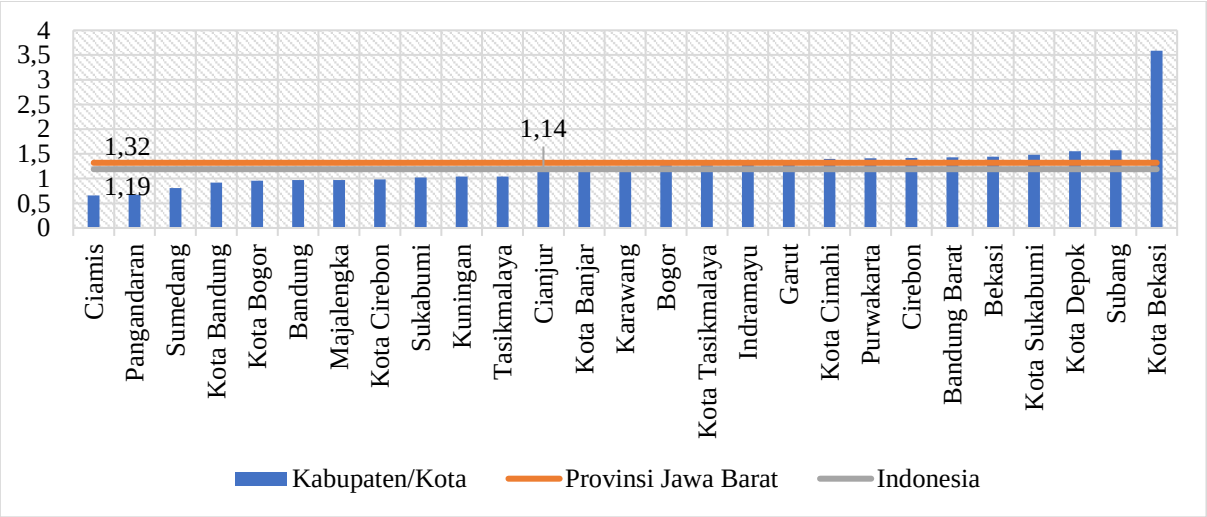

Sumber: BPS, 2024

Dari gambar di atas terlihat bahwa LPP Kabupaten Cianjur berada pada posisi 12 dari Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Angka ini juga berada di bawah LPP Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, kondisi ini menggambarkan keberhasilan Kabupaten Cianjur dalam menjalankan program KB dan pengendalian penduduk.

2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dengan data dasar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Untuk Kabupaten Cianjur, LPE berdasarkan PDRB Kabupaten Cianjur Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Konstan memiliki karakteristik LPE fluktuatif atau mengalami kenaikan dan penurunan.

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Cianjur mengalami pasang surut dimana angka tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,43 persen dan mengalami kontraksi paling rendah pada tahun 2020 sebesar -0,78 karena adanya Covid-19. Pada tahun 2023 terus mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi di Kabupaten Cianjur. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur bila dibandingkan dengan Kabupaten yang berbatasan, Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.27. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten yang Berbatasan, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2014-2023

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)					
	Kabupaten Cianjur	Kabupaten Bogor	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Bandung Barat	Provinsi Jawa Barat	Nasional
2014	5,06	6,01	5,98	5,68	5,09	5,02
2015	5,45	6,09	4,91	5,03	5,05	4,88
2016	6,43	5,84	5,85	5,65	5,66	5,02
2017	5,77	5,92	5,75	5,21	5,33	5,07
2018	6,24	6,19	5,81	5,5	5,66	5,17
2019	5,67	5,85	5,64	5,05	5,07	5,02
2020	-0,78	-1,76	-0,92	-2,41	-4,08	-2,07
2021	3,48	3,55	3,74	3,46	3,74	3,70
2022	5,04	5,25	5,12	5,34	5,45	5,31
2023	5,16	5,19	5,17	5,00	5,00	5,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 2.26. Grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur Dengan Kabupaten yang Berbatasan, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2014-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik (diolah)

Pada Gambar tersebut dapat dilihat Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Cianjur dari tahun 2014-2019 lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Barat dan Nasional, saat terjadi pandemi Covid-19 pun LPE Kabupaten Cianjur masih lebih tinggi karena sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi *core business* dapat bertahan dalam situasi pandemi dibandingkan sektor industri. Pada Tahun 2022, LPE Kabupaten Cianjur belum mampu lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Barat dan Nasional, namun pada tahun 2023 LPE Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan dan lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

2. Indeks Gini

Indeks Gini *(gini ratio)* yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Semakin tinggi nilai indeks Gini atau mendekati satu menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi, sedangkan semakin kecil atau mendekati nol suatu nilai Gini menunjukkan semakin meratanya distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi.

Indeks Gini Kabupaten Cianjur mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2014-2023 dimana indeks gini terendah terjadi pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 0,28. Penurunan terjadi dari tahun 2018 sebesar 0,37 ke tahun 2020 mencapai angka 0,35 namun meningkat menjadi 0,372 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, indeks gini kembali menurun hingga angka 0,313 dan naik tipis pada tahun 2023 sebesar 0,319. Hal ini menunjukan bahwa pemerataan distribusi pendapatan dan pengeluaran aktual di Kabupaten Cianjur cukup.

Dengan turunnya gini ratio, ini dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Cianjur cukup merata, namun perlu dianalisis lebih dalam terkait kecukupan pendapatannya. Perbandingan Indeks Gini dengan Kabupaten yang Berbatasan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.28. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten yang Berbatasan Tahun 2014-2023

Tahun	Indeks Gini					
	Kabupaten Cianjur	Kabupaten Bogor	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Bandung Barat	Provinsi Jawa Barat	Nasional
2014	0,28	0,38	0,32	0,33	0,40	0,414
2015	0,28	0,42	0,36	0,34	0,43	0,402
2016	0,36	0,4	0,33	0,36	0,40	0,394
2017	0,35	0,393	0,33	0,41	0,39	0,391
2018	0,370	0,416	0,329	0,394	0,41	0,384
2019	0,363	0,404	0,347	0,362	0,40	0,38
2020	0,350	0,381	0,334	0,376	0,40	0,381
2021	0,372	0,396	0,343	0,356	0,41	0,381
2022	0,313	0,412	0,31	0,37	0,42	0,381
2023	0,319	0,425	0,425	0,388	0,425	0,388

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Gambar 2.27. Grafik Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Cianjur Dengan Kabupaten yang Berbatasan, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2014-2023

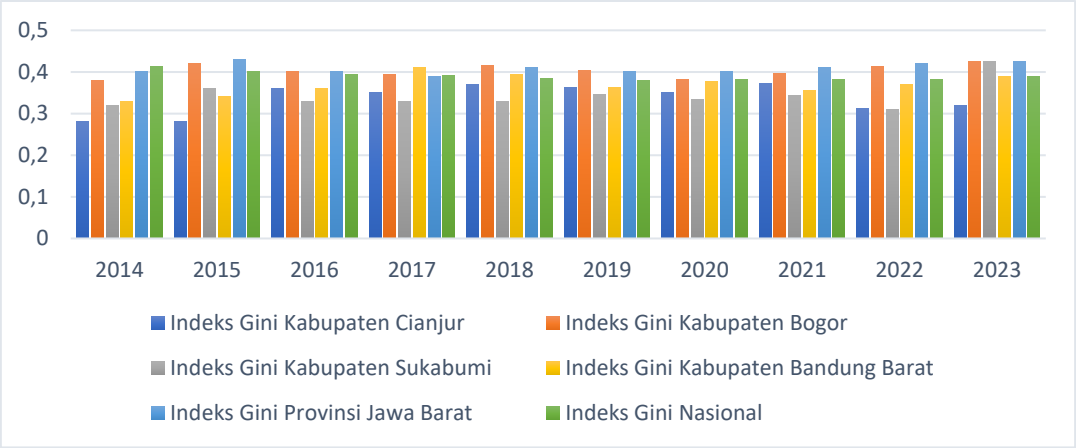

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (diolah)

3. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin Kabupaten Cianjur cukup fluktuatif. Persentase terendah terjadi pada tahun 2019 dimana penduduk miskin di Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 9,15%. Hal tersebut kemudian meningkat hingga pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020 dan mencapai puncak pada tahun 2021 yang mencapai angka 11,81% dan kembali menurun hingga angka 10,22% pada tahun 2023. Peningkatan persentase penduduk miskin pada periode tahun 2020-2021 disebabkan oleh pandemi covid-19 yang memberikan dampak signifikan pada seluruh aspek kehidupan baik di tingkat Kabupaten Cianjur, nasional bahkan seluruh dunia. Rincian persentase penduduk miskin Kabupaten Cianjur disajikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.29. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten yang Berbatasan Tahun 2014-2023

Tahun	Persentase Penduduk Miskin					
	Kabupaten Cianjur	Kabupaten Bogor	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Bandung Barat	Provinsi Jawa Barat	Nasional
2014	11,47	8,91	8,81	12,26	9,18	10,96
2015	12,21	8,96	8,96	12,67	9,53	11,13
2016	11,62	8,83	8,13	11,71	8,95	10,7
2017	11,41	8,57	8,04	11,49	8,71	10,12
2018	9,81	7,14	6,76	10,06	7,45	9,66
2019	9,15	6,66	6,22	9,38	6,91	9,22
2020	10,36	7,69	7,09	10,49	7.88	9,78
2021	11,18	8,13	7,7	11,30	8.40	9,71
2022	10,55	7,73	7,34	10,82	8.06	9,57
2023	10.22	7.27	7.01	10.52	7.62	9,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik

Gambar 2.28. Grafik Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten yang Berbatasan Tahun 2014-2023

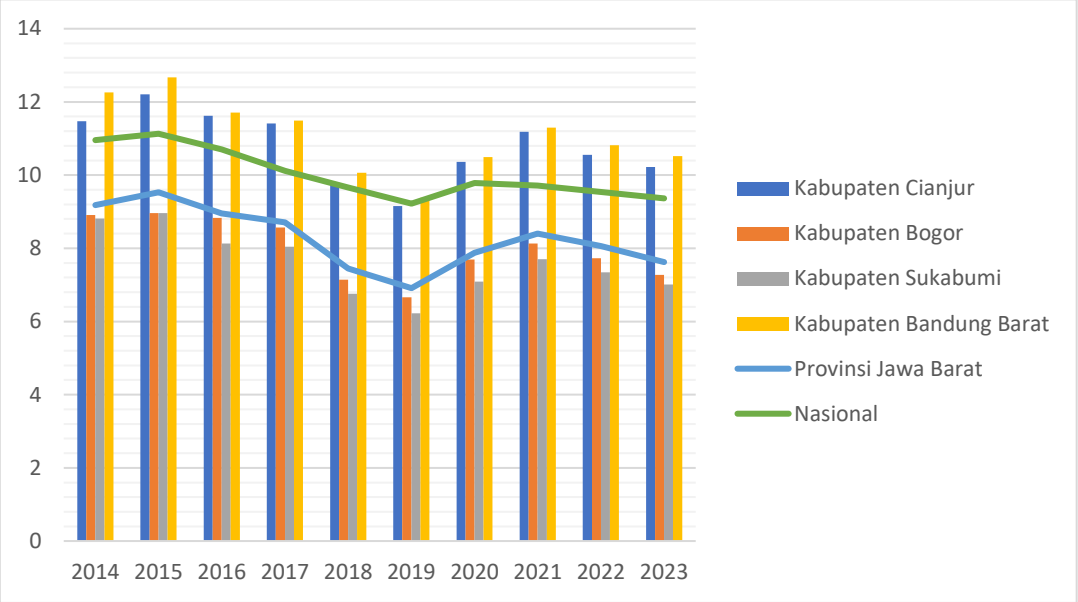

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cianjur secara garis besar berada diatas Provinsi Jawa Barat dan Nasional, hal ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi Kabupaten Cianjur dalam menurunkan angka kemiskinan dengan diantaranya menambah lapangan pekerjaan, melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah serta memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka. TPT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja pada tahun yang sama yang dinyatakan dalam persentase. Perkembangan dan Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten yang berbatasan, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2014-2023 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.30. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten yang Berbatasan, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2014-2023

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka					
	Kabupaten Cianjur	Kabupaten Bogor	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Bandung Barat	Provinsi Jawa Barat	Nasional
2014	14,87	7,65	8,09	8,15	8,45	5,94
2015	10,06	10,01	10,05	10,01	8,72	6,18
2016	10,2	N/A	N/A	N/A	8,89	5,61

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka					
	Kabupaten Cianjur	Kabupaten Bogor	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Bandung Barat	Provinsi Jawa Barat	Nasional
2017	10,1	9,55	7,66	9,33	8,22	5,5
2018	10,23	9,75	7,77	8,5	8,23	5,3
2019	9,81	9,06	7,99	8,17	8,04	5,23
2020	11,05	14,29	9,6	12,25	10,46	7,07
2021	9,32	12,22	9,51	11,65	9,82	6,49
2022	8,41	10,64	7,77	9,63	8,31	5,86
2023	7,36	8,47	7,32	8,11	7,44	5,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 2.29. Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten yang Berbatasan, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2014-2023

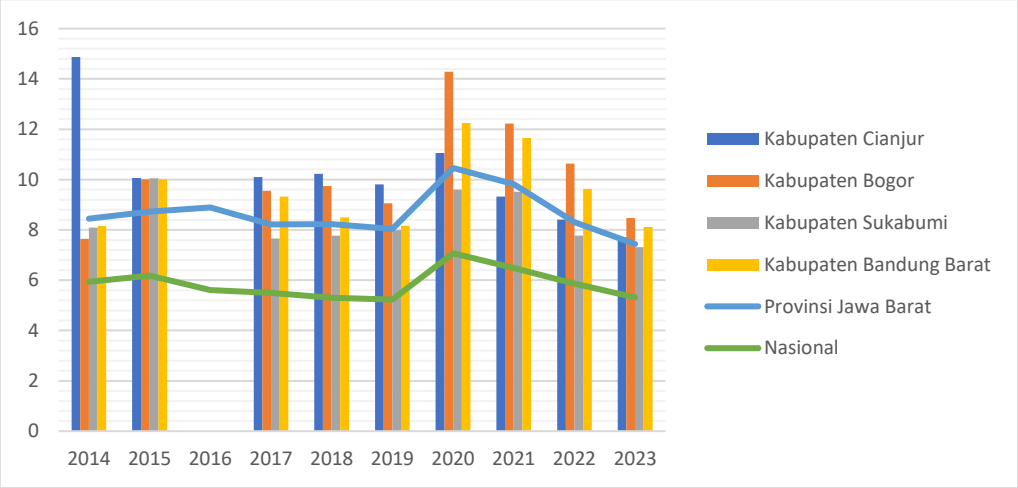

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik (diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa TPT Kabupaten Cianjur turun signifikan pada tahun 2015 kemudian naik pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi covid-19 kemudian kembali menurun pada tahun 2021-2023. Tren ini relevan dengan kondisi pada tingkat Provinsi Jawa Barat dan Indonesia pada periode yang sama adanya kondisi pemulihan perekonomian pasca covid-19. Berdasarkan data pada Tabel tersebut, tercatat TPT di Kabupaten Cianjur pada Tahun 2023 sebesar 7,36 persen atau sebanyak 107.215 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang angkatan kerja yang ada di Provinsi Kabupaten Cianjur, 7-8 diantaranya merupakan pengangguran.

Posisi TPT Kabupaten Cianjur pada tahun 2023 berada di posisi tengah, bukan menjadi kelompok tertinggi juga bukan di kelompok terendah. Meskipun demikian TPT Kabupaten Cianjur masih berada di atas nilai TPT Provinsi Jawa Barat dan Indonesia.

Gambar 2.30. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2023

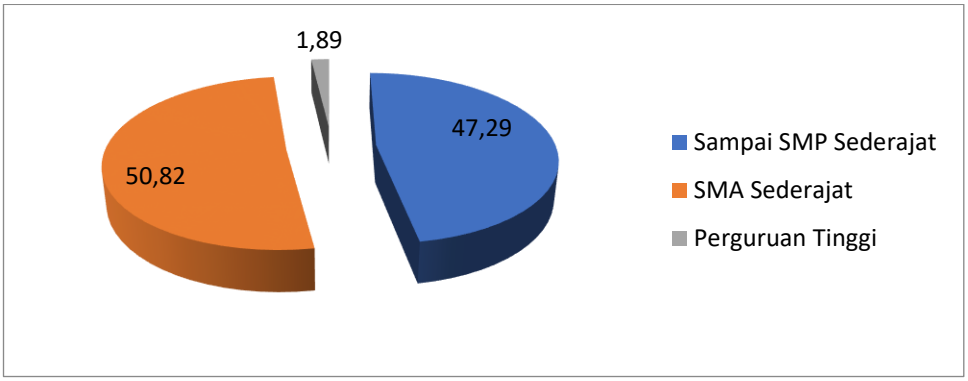

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka, 2024

Gambar di atas menggambarkan kualitas pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan terakhir. Mayoritas pengangguran terbuka di Kabupaten Cianjur pada tahun 2023 memiliki pendidikan terakhir SMA sederajat dengan 50,82 persen, diikuti sampai SMP sederajat dengan 47,29 persen dan perguruan tinggi sebesar 1,89 persen.

5. Inflasi

Tingkat inflasi Tahunan tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi. Tingkat inflasi tahun 2018-2021 lebih rendah dari target 3+1 persen karena dampak COVID-19 menurunkan aktivitas perekonomian dimana permintaan barang dan jasa mengalami penurunan. Seiring dengan adanya pemulihan ekonomi, tingkat inflasi tahun 2022 dan inflasi tahunan meningkat menjadi 5,45 persen sehingga telah melampaui target yang maksimum yang telah ditentukan yaitu 4 persen. Inflasi pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,73 persen. Dimana artinya dapat dikendalikan dengan baik dan diharapkan tidak akan menyebabkan inflasi yang tidak terkendali di atas target yang sudah ditetapkan yaitu 4 persen.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

1. Indeks Pembangunan Manusia

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan melalui indikator indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Menurut UNDP, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia ("*a process of enlarging people's choices*"). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk, karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang

sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2.31. Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Cianjur 2019-2023

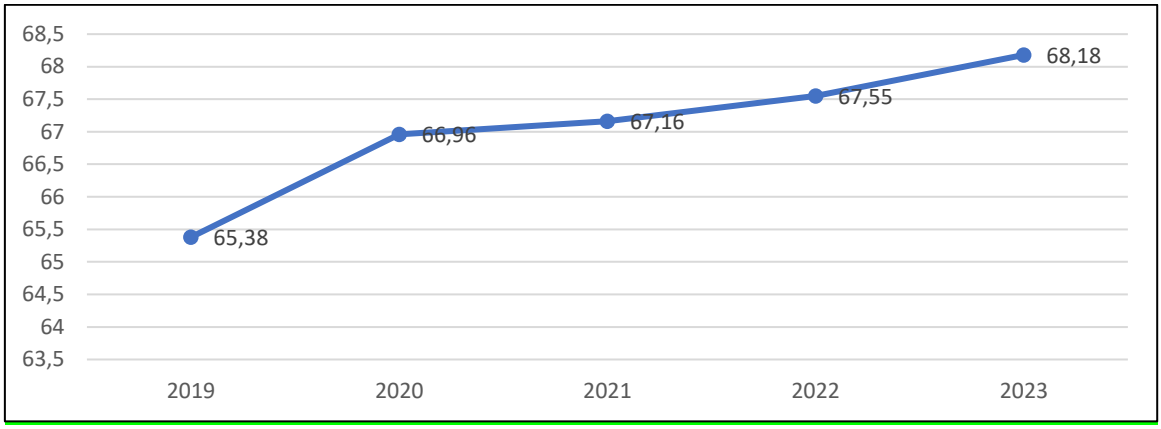

Sumber : BPS Kab. Cianjur, 2024

Berdasarkan Grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cianjur pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terkoreksi capaiannya, hal ini berdasarkan data capaian yang disampaikan BPS Kabupaten Cianjur dalam Berita Resmi Statistik Nomor 01/12/3203/Th, VI, Desember 2023. Pada Tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cianjur meningkat 0,63 poin (0,93 persen) dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 67,55 poin. Selama tahun 2020-2023, IPM Kabupaten Cianjur rata-rata meningkat sebesar 0,61 persen per tahun.

Tabel 2.31. Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Cianjur dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 (%)

No	Tahun	Kabupaten Cianjur	Provinsi Jawa Barat	Nasional
1	2019	1,18	1,02	0,74
2	2020	-0,03	0,08	0,03
3	2021	0,31	0,50	0,49
4	2022	0,58	0,50	0,74
5	2023	0,93	0,83	0,84

Sumber : BPS Kab. Cianjur dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur dari tahun ke tahun masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Barat, namun tingkat pertumbuhan IPM tahun 2022 dan 2023 melebihi Provinsi Jawa Barat dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 0,93 persen pertumbuhannya. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian IPM antara kabupaten Cianjur dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional pada Grafik berikut.

Gambar 2.32. Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019-2023

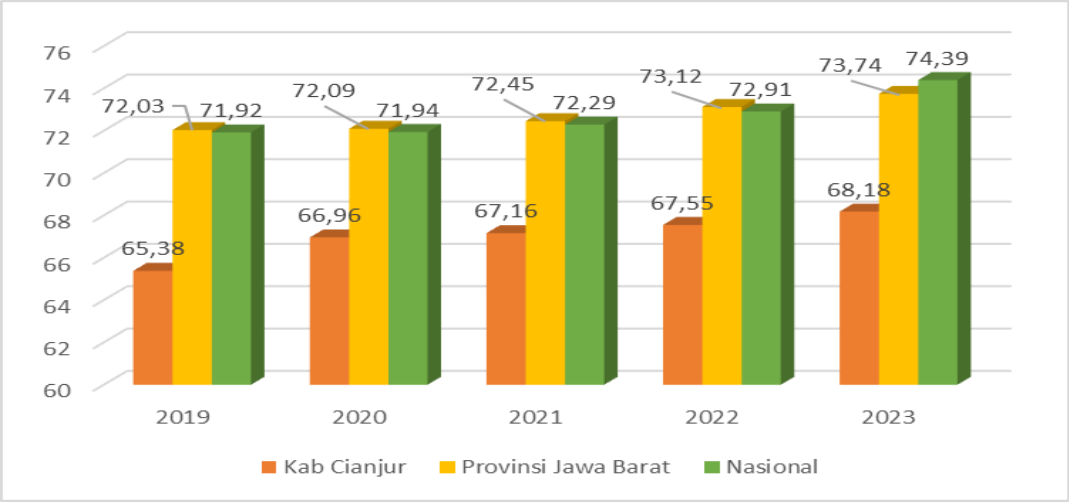

Sumber : BPS Kab. Cianjur dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2023, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur terus mengalami peningkatan. Selama kurun waktu tahun 2019 – 2023. Terjadi kenaikan sebesar 2,8 poin atau naik sebesar 4,2 persen dibandingkan tahun 2019.

Gambar 2.33. Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cianjur, Kabupaten yang Berbatasan dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

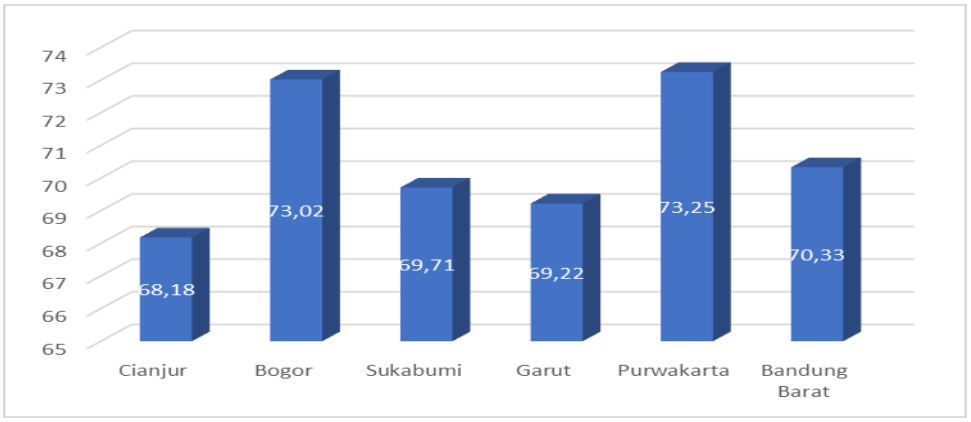

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Berdasarkan Grafik diatas Kabupaten Cianjur masih ada di posisi terendah jika dibandingkan dengan Kabupaten yang berbatasan dan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.32. Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

No	Komponen	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	69,91	73,9	74,1	74,37	74,61
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6,97	7,18	7,19	7,2	7,22

No	Komponen	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,97	11,99	12	12,01	12,03
4	Pengeluaran per Kapita (juta)	8,29	7,98	8,02	8,24	8,62

Sumber : BPS Kab. Cianjur, 2024 dan Perda RPJMD 2021-2026

Usia harapan hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah dimasa mendatang. Mayoritas saat ini penduduk di Kabupaten Cianjur didominasi oleh usia produktif pada usia 15 hinga 34 tahun. Seiring dengan membaiknya kualitas hidup masyarakat, usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Cianjur juga semakin meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk lansia. Diketahui usia harapan hidup di Kabupaten Cianjur adalah 74,85 tahun, kondisi ini dapat menggambarkan bahwa Kabupaten Cianjur ke depan harus mulai mempersiapkan diri untuk memasuki masa transisi *ageing population*

Pada tahun 2014 indeks kesehatan di Kabupaten Cianjur sebesar 75,51 tahun meningkat menjadi 77,82 tahun di tahun 2022 atau mengalami kenaikan sebesar 2,31 selama kurun waktu tersebut. Perkembangan Indeks Kesehatan selama tahun 2014-2023 dapat dilihat dalam grafik berikut.

Gambar 2.34. Grafik Indeks Kesehatan Kabupaten Cianjur Tahun 2014-2023

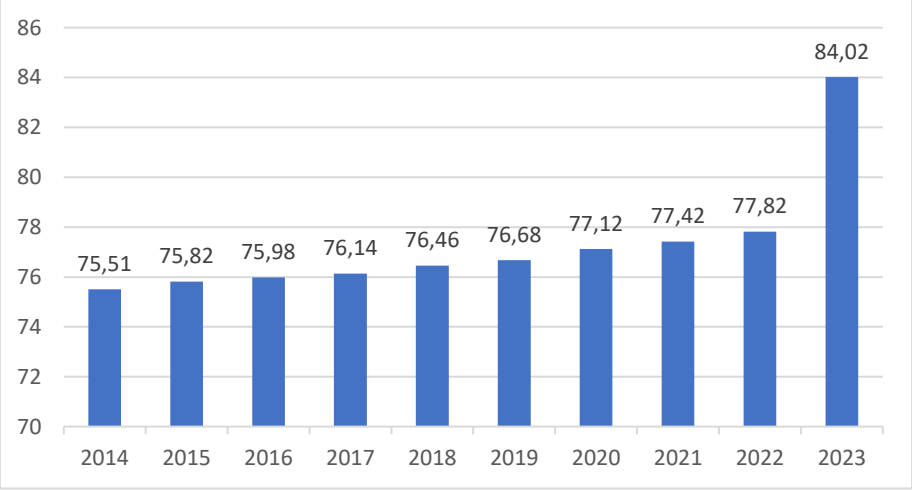

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Kesehatan merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Indeks Kesehatan yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk

kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

2. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat yang merupakan komponen IPM dihitung dengan menggunakan umur harapan hidup. Pada tahun 2023 dari hasil angka terkoreksi dari BPS Kabupaten Cianjur mencapai 74,61 Tahun dan melebihi target dari yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 17 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, sehingga. Perkembangan Angka Harapan Hidup selama tahun 2020-2023 dapat dilihat dalam grafik berikut.

Gambar 2.35. Grafik Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Cianjur Tahun 2020-2023

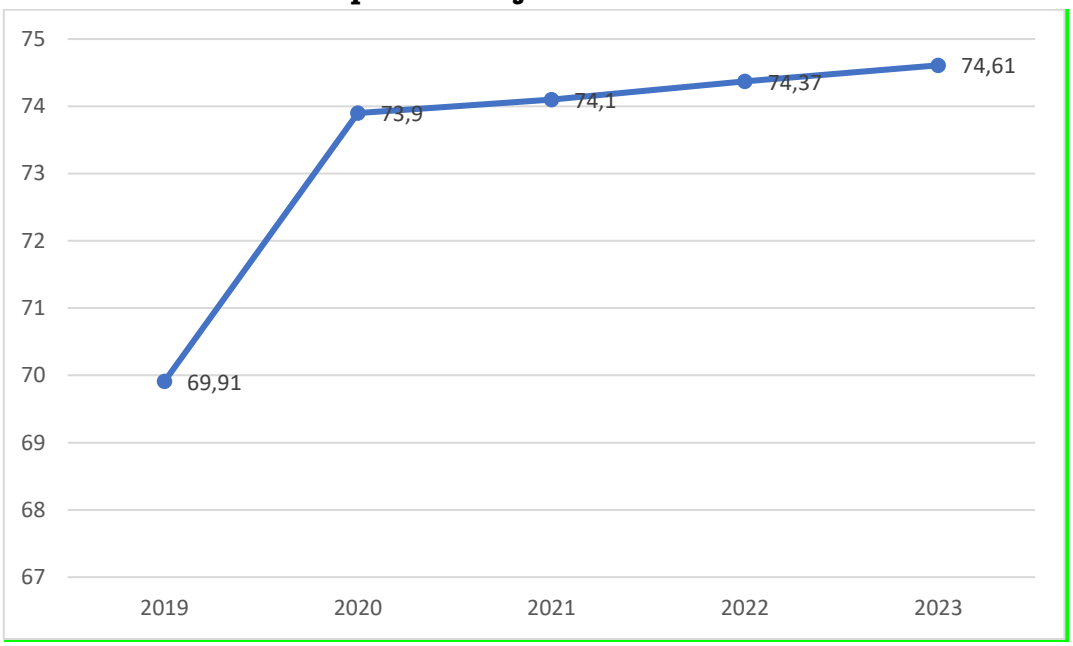

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024

Berdasarkan grafik diatas, Umur Harapan Hidup di Kabupaten Cianjur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan walaupun peningkatannya tidak begitu besar. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Gambar 2.36. Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Cianjur, Kabupaten yang Berbatasan dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

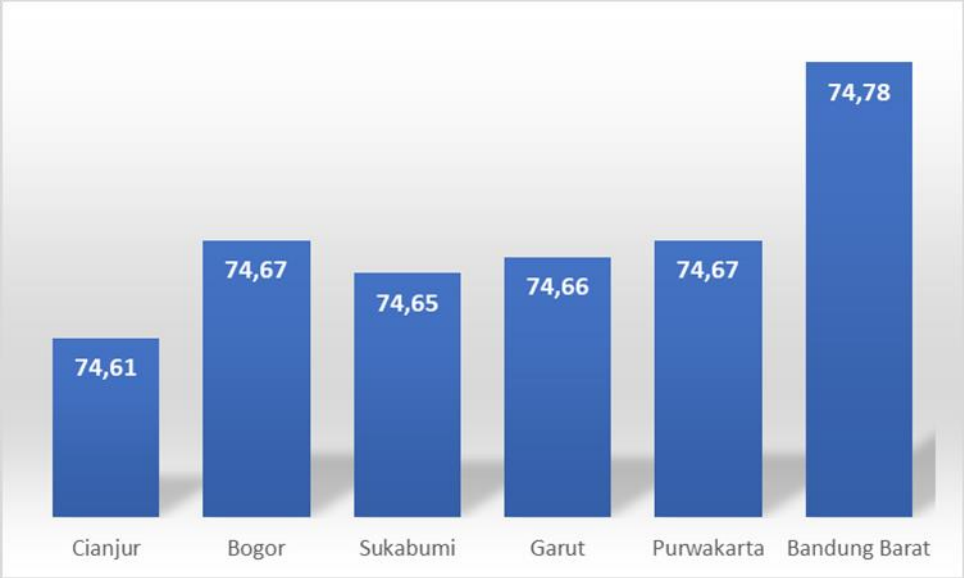

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Berdasarkan grafik di atas, angka harapan hidup Kabupaten Cianjur berada di posisi terendah dibandingkan dengan Kabupaten yang berbatasan dan Provinsi Jawa Barat.

Gambaran hasil program kesehatan lainnya dapat dilihat dari jumlah kematian bayi dan ibu di Kabupaten Cianjur. Pada tahun 2023 jumlah kasus kematian bayi tercatat sebanyak 156 kasus mengalami peningkatan dari tahun 2022.

Adapun jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2023 sebanyak 51 kasus mengalami peningkatan dari tahun 2022. Mengenai jumlah kematian bayi dan ibu di Kabupaten Cianjur periode 2019-2023, selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.33. Jumlah Kematian Bayi dan Ibu di Kabupaten Cianjur Periode 2019– 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kasus Kematian Bayi (kasus)	56	173	175	129	156
2	Jumlah Kasus Kematian Ibu (kasus)	23	33	49	33	51

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Cianjur tahun 2022, LKPJ 2023

Selama kurun waktu 2019-2023, jumlah kasus kematian bayi dan ibu mengalami fluktuatif dengan jumlah terendah terjadi pada tahun 2019 yakni 56 kasus kematian dan kematian ibu sebesar 23 kasus. Namun meningkat secara signifikan pada tahun 2020 pada saat terjadi pandemi COVID-19, dengan jumlah kasus sebesar 173 kasus dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 175 kasus. Selanjutnya pada

tahun 2023, jumlah kasus kematian bayi meningkat menjadi 27 kasus dari tahun 2022 yang mencapai 129 kasus, dan kematian ibu meningkat 18 kasus dari tahun 2022 yang mencapai 33 kasus. Hal ini perlu menjadi perhatian serius terkait penyebab meningkatnya jumlah kematian bayi dan ibu. Berdasarkan hasil evaluasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, penyebab 3 (tiga) terbesar kematian ibu yang pertama adalah sebesar 29,4 persen dari hipertensi dengan 15 kasus, kemudian komplikasi non obstetri sebesar 21,6 persen dan 19,6 persen pendarahan. Untuk kematian bayi, yang terbesar disebabkan oleh asfiksia (masalah sistem pernapasan yang diakibatkan oleh rendahnya kadar oksigen di dalam tubuh) sebesar 27,45 persen dengan 42 kasus.

3. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pendidikan yang merupakan komponen IPM dihitung dengan menggunakan indeks pendidikan terbentuk dari komponen Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). AHLS Kabupaten Cianjur tahun 2020-2023 meningkat 0,04 tahun lebih rendah dari target sebesar 0,44 tahun dari 2020-2023, sehingga capaian tahun 2023 harapan lama sekolah tercapai 12,03 tahun atau Tingkat SMA atau sederajat. Masih rendahnya capaian harapan lama sekolah di Kabupaten Cianjur selama tahun 2020-2023 adalah berdasarkan dari hasil evaluasi bahwa siswa yang melanjutkan Pendidikan tinggi masih berpusat diluar Kabupaten Cianjur karena berdasarkan perhitungan BPS adalah siswa yang melanjutkan pendidikan tinggi seminggu lalu dan tercatat di wilayah Kabupaten Cianjur. Sehingga pemerintah Kabupaten Cianjur terus berupaya meningkatkan harapan sekolah dengan proses penegerian Universitas Suryakancana menjadi Universitas Negeri. Selain itu, penjajakan dan proses izin dalam pengefektifan proses pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi (prodi) di Cianjur menjadi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur. Perkembangan dimensi Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023 sebagaimana dalam tabel berikut.

Gambar 2.37. Grafik Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Cianjur Tahun 2020-2023

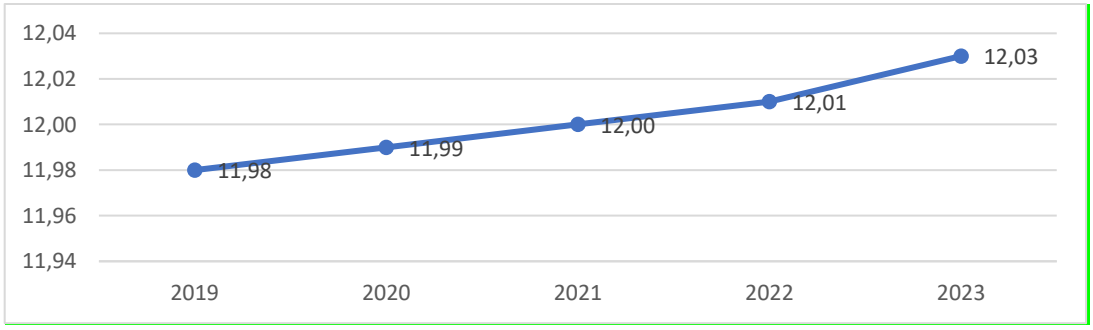

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024 dan PERDA RPJMD Kab Cianjur 2021-2026

Komponen dimensi pengetahuan selanjutnya selain harapan lama sekolah adalah rata-rata lama sekolah. Capaian rata-rata lama sekolah tahun 2020-2023 sebagaimana pada tabel berikut.

Gambar 2.38. Grafik Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Cianjur 2019-2023

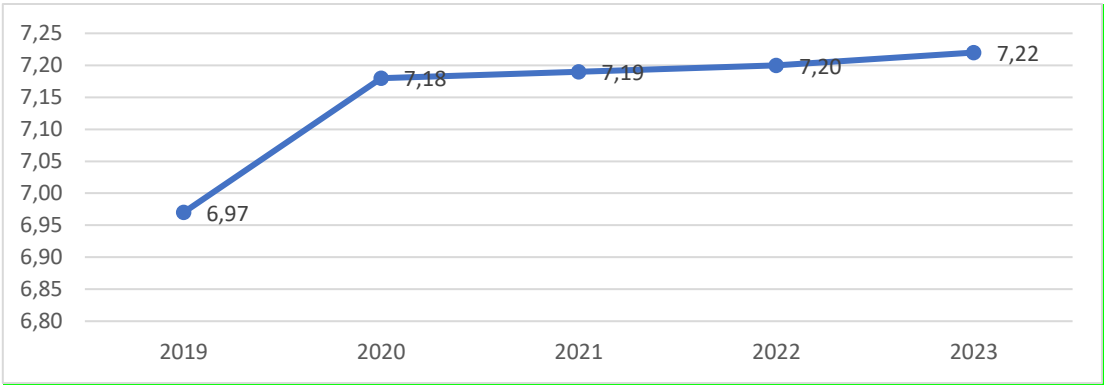

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur 2024 dan PERDA RPJMD Kab Cianjur 2021-2026

Berdasarkan data pada tabel diatas, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cianjur pada tahun 2023 mencapai 7,22 atau sama dengan kelas 1 SMP atau sederajat. Untuk mencapai target rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cianjur yang berjalan sampai tahun 2024 melalui akselerasi pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan secara gratis. Untuk mengetahui perkembangan Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dengan Kabupaten berbatasan sebagaimana pada tabel berikut ini.

Gambar 2.39. Grafik Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata sekolah Kabupaten Cianjur, Kabupaten yang berbatasan dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

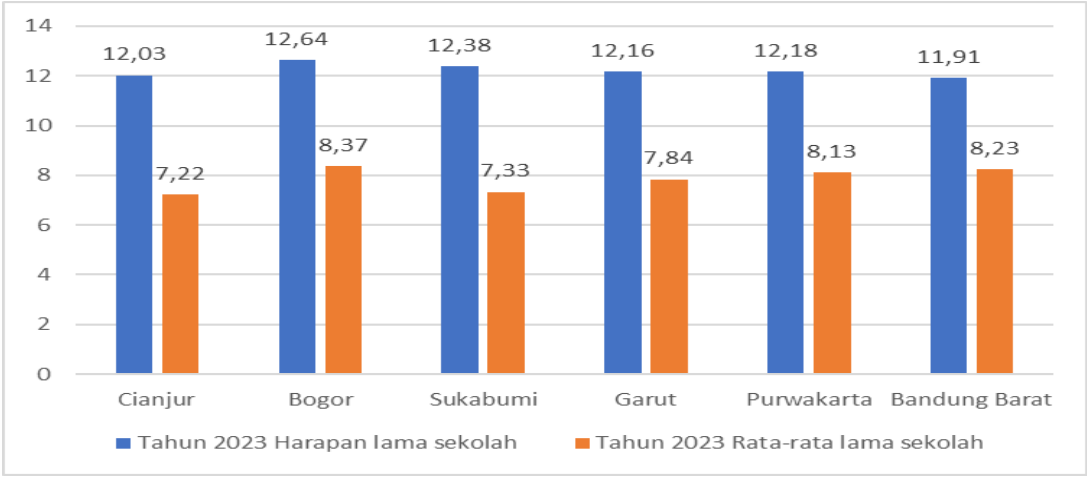

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Berdasarkan pada grafik diatas, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Cianjur masih berada di atas Kabupaten Bandung Barat, dan untuk Kabupaten Bogor dan yang lainnya berada di atas Kabupaten

Cianjur. Sedangkan untuk angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Cianjur berada di bawah dibawah kabupaten yang berbatasan.

4. Jumlah Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja. Jumlah pengeluaran per kapita Kabupaten Cianjur tahun 2014-2023 terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 mengalami penurunan (Rp.7.980.000) dan tahun 2021 kembali mengalami kenaikan (Rp.8.052.000) dan pada tahun 2023 mencapai Rp. 8.626.000.

Peningkatan pengeluaran perkapita Kabupaten Cianjur ini sejalan dengan upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui program kegiatan yang mendorong terjadinya peningkatan pendapatan dan adanya berbagai bantuan sosial kepada masyarakat.

Gambar 2.40. Jumlah Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten Cianjur Tahun 2014-2023

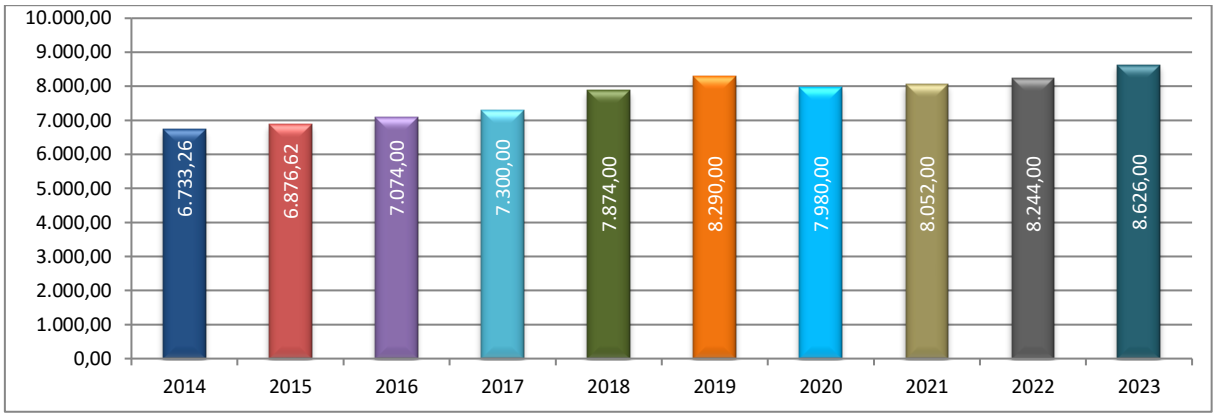

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur

5. Kesetaraan Gender

A. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender Development Index* (GDI) diformulasikan sebagai perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dan IPM Laki-laki. Penghitungan IPM terpilah gender ini membuat analisis kualitas pembangunan, baik pada laki-laki maupun perempuan dapat dilakukan secara parsial. Nilai IPG dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Gambar 2.41. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Cianjur Tahun 2014-2023

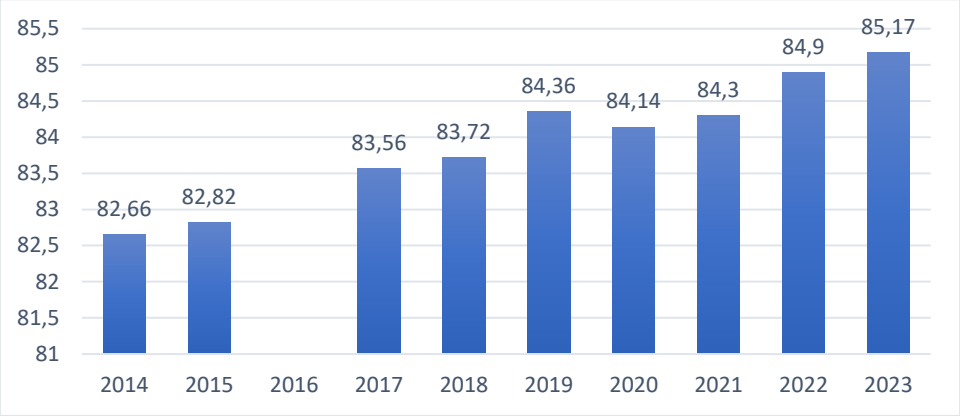

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dimensi pengukuran IPG sama seperti pengukuran IPM, yang membedakan adalah adanya pemilahan menurut gender pada setiap dimensi pengukuran dimana pada tahun 2023, capaian IPG Kabupaten Cianjur berada pada angka 85,17 (meningkat dari tahun sebelumya) dan dapat diartikan bahwa kesenjangan pembangunan perempuan dan laki-laki semakin baik dari tahun ke tahun, serta pembangunan sudah berbasis gender. Hal yang perlu dikaji adalah pada tahun 2019 dimana indikator makro mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19 namun IPG Kabupaten Cianjur mengalami kenaikan yang signifikan sebelum mengalami penurunan pada tahun 2020.

B. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau *Gender Empowerment Measure* (GEM) dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. Ada tiga sub indikator yang dipakai untuk menghitung IDG yaitu (1) Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen; (2) Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, Kepemimpinan, dan Teknisi; dan (3) Sumbangan Pendapatan Perempuan.

Gambar 2.42. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Cianjur Tahun 2014-2023

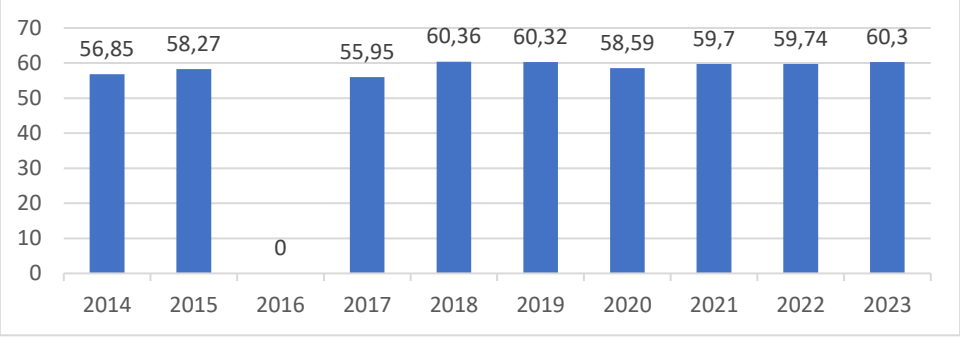

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

IDG Kabupaten Cianjur menurun pada periode 2018-2020 namun kemudian menunjukan peningkatan pada periode 2020-2023. Hal ini menarik untuk dikaji, tingkat pengangguran dan beberapa indikator makro lain menunjukan kondisi yang kurang baik pasca pandemi namun IDG Kabupaten Cianjur menunjukan perkembangan positif pasca pandemi. Hal ini menggambarkan bahwa ada peningkatan aktivitas perempuan di Kabupaten Cianjur pada bidang ekonomi dan politik pasca pandemi.

C. Indeks Ketimpangan Gender

Pada tahun 2010 *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan *Gender Inequality Index* (GII) sebagai ukuran baru ketimpangan gender. GII menggambarkan potensi pencapaian pembangunan manusia yang hilang sebagai dampak dari ketimpangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi (UNDP, 2016). GII menyempurnakan kelemahan ukuran ketimpangan gender sebelumnya seperti *Gender Empowerment Measure* (GEM) dan *Gender Development Index* (GDI) (BPS, 2019).

Pengembangan ukuran ketimpangan gender yang dilakukan UNDP mendorong BPS melakukan adopsi penghitungan GII dengan menghitung Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Perbedaan GII UNDP dan IKG BPS terletak pada indikator yang digunakan. Dalam hal ketimpangan kesehatan, UNDP menggunakan Angka Kematian Ibu *(Maternal Mortality Rate)* sebagai indikator faktor risiko kematian ibu melahirkan dan Tingkat Fertilitas Remaja *(Adolescent Birth Rate)* sebagai indikator fertilitas remaja. BPS menggunakan indikator proporsi wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir tidak di fasilitas kesehatan sebagai faktor risiko kematian ibu melahirkan, sedangkan fertilitas remaja didekati dengan proporsi wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama kali di usia kurang dari 20 tahun. Pada dimensi pemberdayaan, indikator pendidikan yang digunakan oleh UNDP adalah persentase penduduk berusia 25 tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMP, sementara BPS menggunakan batasan minimal SMA.

Gambar 2.43. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2023

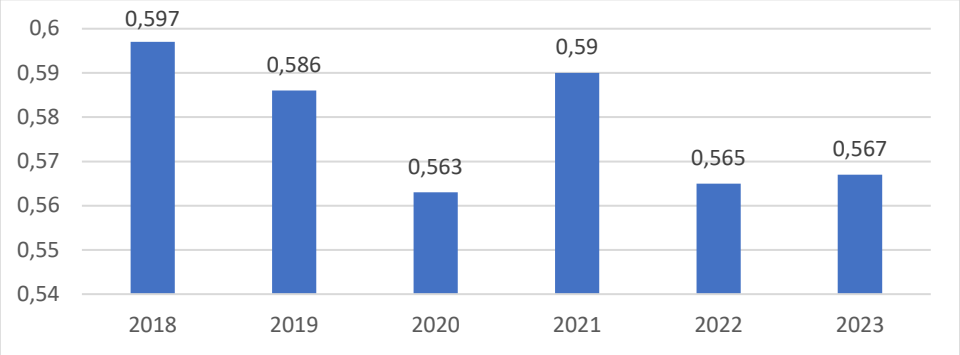

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Semakin tinggi nilai indeks ketimpangan gender, semakin tinggi ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Tabel di atas menunjukan angka IKG Kabupaten Cianjur relatif stagnan pada rentang 0,565-060 hal ini sejalan dengan kondisi di Provinsi Jawa Barat yang relatif stagnan pada angka yang relatif sama.

6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup 6 (enam) sub urusan yaitu Kualitas Hidup Perempuan; Perlindungan Perempuan; Kualitas Keluarga; Sistem Data Gender dan Anak; Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan Perlindungan Khusus Anak. Capaian kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2018 – 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.34. Capaian Kinerja Layanan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	57.16	54.97	49.54	51.46	53,26
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	9	9	9	8	9
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	29.75	29.75	29.75	29.75	32.88
4	Rasio KDRT	0	0	0	10	1
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	762.773	762.879	762.77	417.213	140,720

Sumber: DPPKBP3A, 2024

Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya mencapai sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan dan terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan dampak pornografi. Peningkatan pemberdayaan perempuan memegang peran dan posisi yang strategis diantaranya terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan dan keluarga berencana dengan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG)

dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki. Salah satu indikator untuk mengetahui peran aktif perempuan yaitu dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.

7. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA disusun dengan mengacu pada konvensi hak anak yang terkait dengan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesahatan dasar, pendudukan, dan perlindungan khusus. Diketahui nilai Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur mencapai 57,08 pada tahun 2022.

Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Cianjur menggunakan *proxy* skor Kabupaten Layak Anak (KLA). Diketahui Kabupaten Cianjur pada tahun 2022 memperoleh skor KLA sebesar 527, dan tahun 2023 memperoleh skor 501 dengan kategori Pratama.

8. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen yang menggambarkan kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP dapat dijadikan rujukan bagi kebijakan dan strategi pembangunan pemuda. IPP mengukur pemuda berdasarkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Diketahui nilai indeks pembangunan pemuda pada tingkat Provinsi Jawa Barat mencapai nilai 48,83 pada tahun 2021, nilai 49,67 pada tahun 2022, dan nilai 51,17 pada tahun 2023.

Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Cianjur menggunakan *proxy* Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif, diketahui pada tahun 2021 dengan nilai 48,15%, pada tahun 2022 dengan nilai 49,50%, dan pada tahun 2023 dengan nilai 50%.

9. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional Dimana Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.35. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2023

Tahun	Indeks Pembangunan Kebudayaan	
	Nasional	Provinsi Jawa Barat
2018	53,74	51,21
2019	55,91	53,28
2020	54,65	52,04
2021	51,90	50,78
2022	55,13	53,67
2023	55,57	54,10

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pada tabel diatas, Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 capaian selalu dibawah nasional. Data yang tersedia terkait Indeks Pembangunan Kebudayaan sampai dengan saat ini masih pada tingkat Provinsi dan Nasional, adapun untuk tingkat Kabupaten indikator kebudayaan Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.36. Indikator Kebudayaan Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2023

No	Indikator Variabel	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan	18	18	18	18	27
2.	Jumlah warisan budaya tak benda yang telah ditetap- kan	3	3	3	5	6

Sumber: Disbudpar Kabupaten Cianjur

Untuk menunjang pembangunan kebudayaan di Kabupaten Cianjur terdapat dua indicator yang digunakan yaitu cagar budaya dan warisan budaya tak benda. Perkembangan cagar budaya dan warisan tak benda yang telah ditetapkan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah cagar budaya yang sudah terregistrasi di pemerintah daerah di tahun 2023 sebanyak 150 objek yang terdiri dari cagar budaya yang telah ditetapkan sebanyak 27 objek, meningkat dibandingkan objek yang ditetapkan di tahun 2019 sebanyak 18 objek sementara Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang belum ditetapkan sebanyak 123 objek berkurang dibandingkan tahun 2019 sebanyak 132 objek. Sedangkan Jumlah warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan berdasarkan pengusulan dari pemerintah kabupaten Cianjur di tahun 2023 sebanyak 6 objek, meningkat dibandingkan tahun 2019 sebanyak 3 objek.

10. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil wajib dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan ketertiban

administrasi melalui berbagai inovasi untuk mempermudah masyarakat yang membutuhkan pelayananan kependudukan dan catatan sipil.

Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk berada di angka 99 persen pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 99,58 persen. tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.37. Capaian Kinerja Layanan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	101	100	98,2	99,29	99,49
2	Rasio bayi berakte kelahiran	80,84	80,62	86,39	98,5	96
3	Rasio pasangan berakte nikah	N/A				
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ADA				
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	SUDAH				
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	101	100	98,72	99,58	99
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	82,16	73,74	78,65	85	46

Sumber: LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

11. Layanan Bidang Pengawasan

Kinerja penyelenggaraan unsur pemerintahan umum bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dengan indikator Persentase kelompok masyarakat yang meningkat pemahamannya mengenai Wawasan Kebangsaan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mencapai 100 persen tiap tahun, hal ini menunjukan wawasan kebangsaan masyarakat cianjur akan lebih banyak yang memahami mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selanjutnya persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu pada tahun 2022 dalam Pemilihan umum kepala daerah mencapai 67,75 persen mengalami peningkatan pada Tahun 2023 sebesar 73,65 persen.

Tabel 2.38. Capaian Kinerja Layanan Bidang Pengawasan Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase kelompok masyarakat yang meningkat pemahamannya mengenai Wawasan kebangsaan dan pendidikan Politik.	100	100	100	100	100
2	Persentase orang yang berperan aktif dalam pembangunan			100	100	100
3	Persentase Masyarakat dalam Pemilu	75,52	67,75	67,75	67,75	73,65
4	Jumlah konflik sosial	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023

12. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan upaya pemindahan penduduk miskin dari Kabupaten Cianjur ke luar Provinsi Jawa Barat. Pada Tahun 2019, persentase penempatan transmigran tercapai 68 persen. Pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada penempatan transmigran dari Cianjur ke luar provinsi Jawa Barat, hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan *refocusing* anggaran. Untuk tahun 2022 ada persentase penempatan Transmigrasi sebesar 60 sedangkan untuk tahun 2023 tidak ada penempatan.

Tabel 2.39. Capaian Kinerja Layanan Bidang Transmigrasi Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase transmigran swakarsa (%)	68	0	0	60	0

Sumber: Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2024

2.3 Aspek Daya Saing

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Cianjur dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 mengalami laju pertumbuhan rata rata 4,56%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh peningkatan sektor produksi dan investasi. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, masih tetap menjadi andalan dalam memberikan sumbangan terbesar terhadap struktur PDRB daerah pada tahun 2019-2023. Disusul oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel 2.40. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB ADHK (miliar)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.109,61	9.263,12	9.568,56	9.944,80	10.357,26
B	Pertambangan dan Penggalian	80,86	80,83	87,59	91,86	97,89
C	Industri Pengolahan	2.226,79	2.242,74	2.357,52	2.510,49	2.641,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	27,58	27,06	29,88	32,02	33,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,53	12,37	13,54	13,27	13,16
F	Konstruksi	2.846,55	2.659,81	2.841,36	2.898,47	3.204,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.654,88	5.253,15	5.422,59	5.683,99	5.910,47
H	Transportasi dan Pergudangan	2.985,39	2.913,89	2.919,17	3.168,05	3.356,87

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB ADHK (miliar)				
		2019	2020	2021	2022	2023
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.074,23	2.013,50	2.017,63	2.210,20	2.380,09
J	Informasi dan Komunikasi	1.405,92	1.716,22	1.840,59	1.951,39	2.032,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	733,49	739,16	792,15	791,99	809,17
L	Real Estate	757,22	757,31	856,24	922,17	982,01
M,N	Jasa Perusahaan	239,42	200,58	218,45	236,40	250,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	777,6	763,45	747,68	738,34	756,88
P	Jasa Pendidikan	1.484,32	1.548,95	1.555,01	1.600,88	1.664,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	284,31	289,51	308,56	322,44	337,15
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.340,62	1.310,67	1.321,02	1.439,64	1.510,93
PDRB		**32.039,32**	**31.792,32**	**32.897,53**	**34.556,40**	**36.339,55**

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka, 2019-2023

Gambar 2.44. Trend Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (miliar)

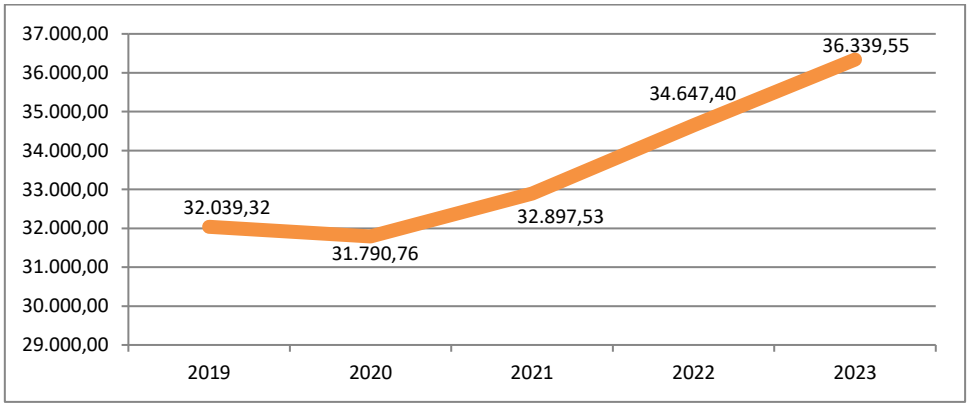

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka, 2019-2023

Secara umum, PDRB ADHK Kabupaten Cianjur menurut lapangan usaha Tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan setiap tahunnya. PDRB ADHK hanya mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19.

Tabel 2.41. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (miliar)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.107,97	15.645,96	16.441,35	17.507,76	18.864,37
B	Pertambangan dan Penggalian	98,67	99,47	114,65	1.222,23	133,65
C	Industri Pengolahan	3.275,49	3.358,80	3.585,17	3.924,20	4.243,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	42,57	41,66	46,34	49,68	52,44
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,47	20,62	22,66	22,54	22,93
F	Konstruksi	3.852,94	3.616,19	4.147,66	4.424,52	5.056,85

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (miliar)				
		2019	2020	2021	2022	2023
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.896,13	7.497,56	7.846,69	8.450,64	9.095,26
H	Transportasi dan Pergudangan	4.583,22	4.635,12	4.739,83	5.331,91	5.819,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.934,93	2.980,42	3.019,11	3.394,87	3.713,52
J	Informasi dan Komunikasi	1.372,31	1.672,05	1.755,90	1.820,64	1.897,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1064,31	1072,73	1184,94	1.248,70	1.291,18
L	Real Estate	893,17	911,14	1034,35	1.125,97	1.215,35
M,N	Jasa Perusahaan	326,52	280,06	307,72	347,42	376,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1151,67	1152,64	1142,55	1.122,27	1.165,67
P	Jasa Pendidikan	2.107,37	2.287,22	2.438,69	2.592,15	2.758,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	383,25	397,13	428,74	448,23	477,73
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.849,86	1.866,69	1.881,32	2.055,24	2.206,78
PDRB		**46.957,85**	**47.535,47**	**50.137,66**	**53.988,97**	**58.391,22**

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka, 2019-2023

Gambar 2.45. Trend Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (miliar)

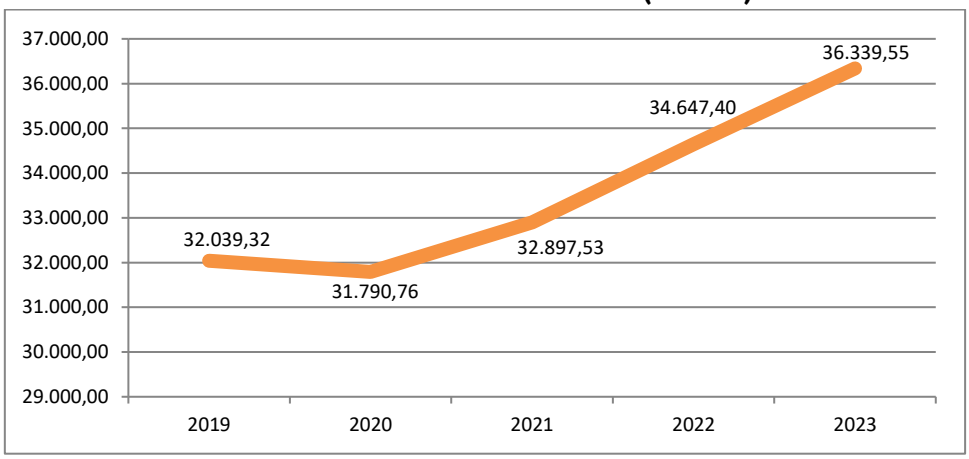

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka, 2019-2023

Secara umum, PDRB ADHB Kabupaten Cianjur menurut lapangan usaha Tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan setiap tahunnya. PDRB ADHB hanya mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita adalah Nilai Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah. PDRB per kapita secara umum naik dari tahun 2018 sampai 2022 dengan tingkat pertambahan yang fluktuatif. Hal ini dapat adanya rata-

rata kenaikan pendapatan per penduduk sehingga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Lonjakan kenaikan dari tahun 2019 ke 2022 cukup tinggi akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan akibat terjadinya pandemi Covid-19 sehingga dari tahun 2020 ke 2023 tidak terjadi kenaikan yang terlalu signifikan dengan kenaikan rata-rata 1,2 juta per tahun. Lonjakan kenaikan PDRB per kapita ini dapat kita lihat lebih lanjut melalui laju PDRB per Kapita yang ada.

Gambar 2.46. PDRB Per Kapita (ADHB) (Juta)

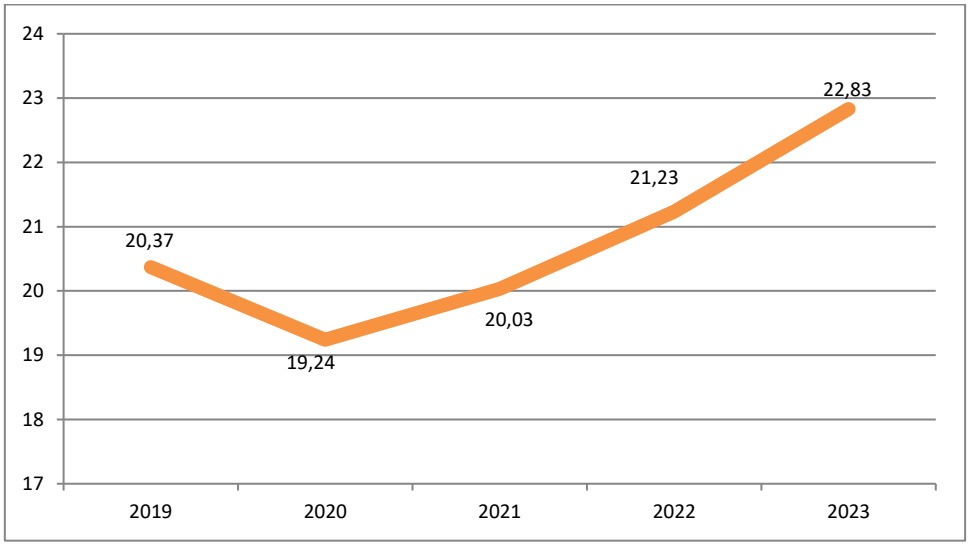

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka, 2019-2023

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penilaian Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah. Sumber-sumber PAD berasal dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah daerah memiliki hak untuk menarik pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga apabila wajib pajak tidak melunasinya maka akan dianggap sebagai utang pajak. Untuk ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak daerah, maka diberlakukan sanksi administrasi berupa denda pajak bagi pajak terutang yang dibayarkan melewati batas waktu pembayaran. Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten adalah: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD menambahkan jenis pajak daerah berupa opsen pajak. Opsen pajak merupakan tambahan pajak menurut persentase tertentu untuk kepentingan kas daerah. Keberadaan opsen pajak diharapkan mampu mendongkrak penerimaan yang minim sehingga bergantung pada dana transfer.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak daerah, pemungutan retribusi daerah terdapat kontraprestasi yang secara langsung bisa ditunjuk. Wajib retribusi menggunakan atau menikmati jasa yang diberikan atas pungutannya.

Jenis retribusi daerah terdiri atas: retribusi jasa umum (pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar dan pengendalian lalu lintas), retribusi jasa usaha (penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, penyediaan tempat penginapan, pelayanan rumah potong hewan ternak, pelayanan jasa kepelabuhanan, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air, penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan) serta retribusi perizinan tertentu (persetujuan

bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, pengelolaan pertambangan rakyat).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
   Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa pembagian laba/dividen.

d. Lain-lain PAD yang Sah
   Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah diluar pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (hasil penjualan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), hasil kerjasama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa, penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

e. Pendapatan Transfer
   Pendapatan transfer berasal dari pemerintah pusat dalam APBN dan berasal dari APBD antar daerah. Jenis pendapatan transfer terdiri dari dana perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa

f. Lain-lain Pendapatan Daerah
   Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan penerimaan lain yang diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam klasifikasi PAD dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi hibah, dana darurat dan pendapatan lainnya yang diterima oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur tertinggi adalah pada tahun 2022 yang mencapai Rp. 823.991.246.909,00 dan pada tahun 2023 yang mencapai Rp. 759.711.624.776,00. Pendapatan asli daerah tersebut merupakan bagian dari laporan keuangan daerah yang telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAK) dan telah melalui audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Semenjak tahun 2019 hingga 2023, Kabupaten Cianjur selalu menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Adapun grafik PAD Kabupaten Cianjur disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 2.47. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

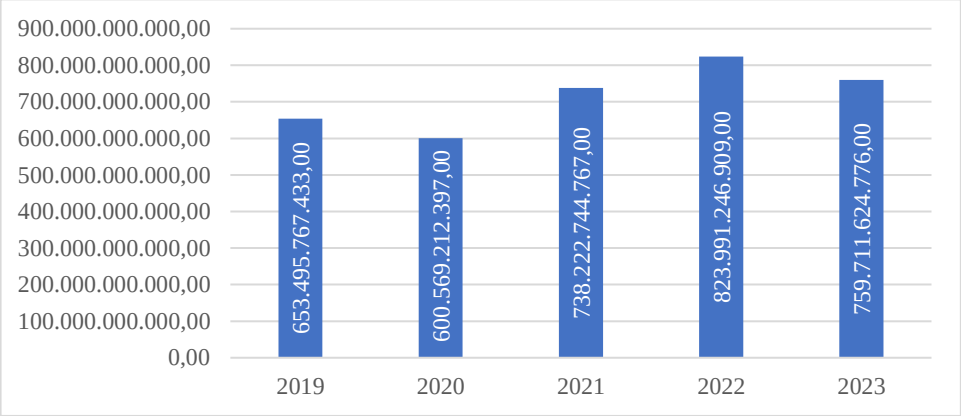

Sumber: Bapenda Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2023

4. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau merupakan kinerja suatu wilayah untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi menuju pembangunan berkelanjutan dan rmah lingkungan. Ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memberikan dampak tercapainya keadilan bagi masyarakat, lingkungan, dan sumber daya alam. Diketahui indeks ekonomi hijau di Kabupaten Cianjur pada tahun 2023 mencapai 50,57 untuk terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

5. Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dimana Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif yaitu Pilar 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi, Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan serta Perluasan Akses dan Kesempatan. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Cianjur pada tahun 2021 mencapai 5,15 persen.

Gambar 2.48. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2023

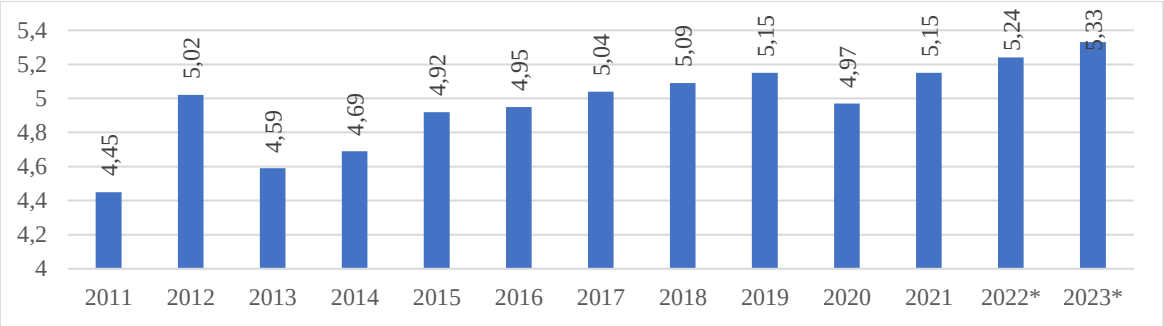

Sumber: Bappenas

6. Ketahanan Pangan

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu lumbung pangan baik di Tingkat provinsi Jawa Barat maupun Nasional, namun dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi fenomena penurunan produksi padi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: luas lahan garapan, tenaga kerja, pupuk, pestisida/obat-obatan, pengalaman petani dalam berusaha tani dan sistem irigasi. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan ditambah dengan terjadinya resesi/inflasi.

Resesi adalah keadaan dimana perputaran ekonomi suatu negara berubah menjadi lambat atau buruk. Perputaran ekonomi yang melambat ini bisa berlangsung cukup lama bahkan tahunan akibat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara menurun selama dua kuartal dan berlangsung secara terus menerus. Situasi resesi disebabkan oleh guncangan ekonomi yang mendadak, perubahan teknologi, tingkat inflasi yang tinggi, pengelolaan utang yang tidak sehat, gelembung aset dan tingkat deflasi yang signifikan. Hal-hal tersebut mengakibatkan penurunan keuntungan perusahaan, meningkatnya pengangguran dan kebangkrutan ekonomi.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012. Pada tahun 2025, Kabupaten Cianjur akan fokus pada penguatan ketahanan pangan dengan konsep:

1. **Ketersediaan Pangan**, Ketersediaan pangan mengacu pada jumlah pangan yang tersedia di pasar dan dalam sistem distribusi. Ketersediaan Pangan melibatkan produksi pangan, impor, ekspor, serta stok pangan. Ketersediaan pangan yang mencukupi di pasar

lokal dan nasional adalah komponen penting dalam ketahanan pangan.

2. **Akses Pangan**, Akses pangan adalah kemampuan individu atau rumah tangga untuk memperoleh atau membeli pangan yang dibutuhkan. Akses Pangan berkaitan dengan masalah ekonomi dan sosial, termasuk pendapatan, harga pangan, dan jaringan distribusi. Masalah seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi akses pangan.
3. **Pemanfaatan Pangan**, Pemanfaatan pangan berkaitan dengan cara individu atau keluarga memproses, memasak, dan mengonsumsi pangan. Pemanfaatan Pangan mencakup aspek gizi, kebersihan, dan pemenuhan kebutuhan gizi yang tepat. Cara pemanfaatan pangan juga mencerminkan kualitas gizi yang diterima oleh individu.
4. **Sumber Daya Alam (SDA)**, Meskipun tidak selalu dianggap sebagai komponen utama, kelestarian sumber daya alam adalah faktor kunci dalam ketahanan pangan jangka panjang. Kelestarian SDA termasuk pengelolaan yang berkelanjutan dari lahan pertanian, air, hutan, dan keanekaragaman hayati yang mendukung produksi pangan.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang Pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin di dalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu bangsa. Indeks Pendidikan diukur dari kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata Tahun bersekolah. Kemampuan baca-tulis orang dewasa tercermin dari data angka melek huruf (*literacy rate*) yaitu proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya). Rata-rata lama Sekolah (*means-years of schooling*) menunjukkan jenjang Pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah. Perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2014-2023 sebagaimana dalam Gambar berikut.

Gambar 2.49. Indeks Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2014 – 2023

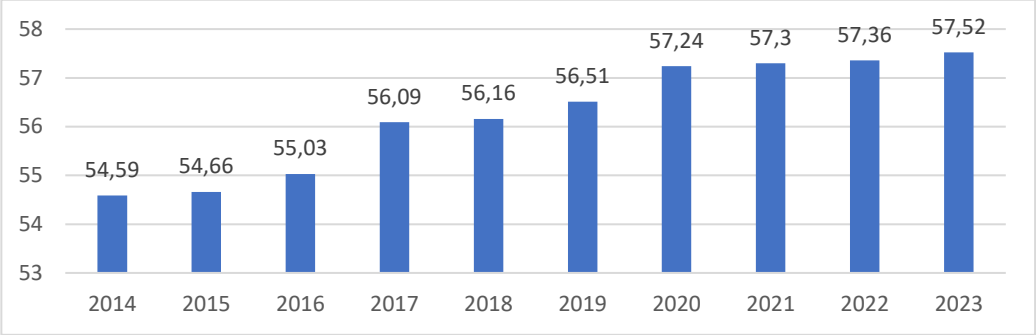

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur

Kualitas pendidikan masyarakat ditunjukan dengan rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah yang capaiannya masih dibawah nasional. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cianjur baru mencapai 7,22 tahun dari target pendidikan wajib belajar 12 tahun. Sementara harapan lama sekolah di Kabupaten Cianjur mencapai 12,06 tahun masih di bawah nasional yang mencapai 12,03 tahun diantaranya dapat disebabkan oleh belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan ditandai dengan masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, adanya kesenjangan layanan pendidikan, serta masih kurangnya mutu pendidikan.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja (labor force) merupakan bagian dari tenaga kerja, yaitu penduduk yang benar-benar terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan memproduksi barang/jasa. Menurut International Labour Organization (ILO) angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan (menganggur). Oleh karena itu Angkatan kerja disebut juga sebagai sejumlah populasi penduduk yang aktif secara ekonomi (*economically active population*).

Angkatan kerja Kabupaten Cianjur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan angka pengangguran yang cukup tinggi pada tahun 2020 bisa jadi karena dampak dari pandemi COVID-19 dimana terjadi PHK.

Gambar 2.50. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Cianjur Tahun 2014-2023

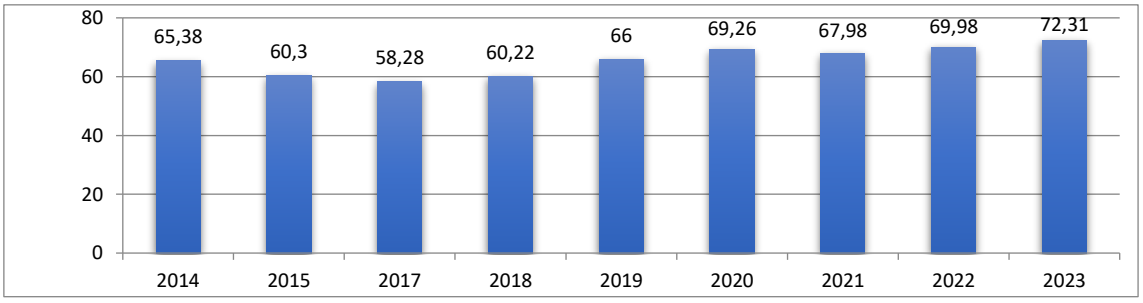

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. TPAK Kabupaten Cianjur pada tahun 2018-2023 menunjukan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, pada tahun 2018 TPAK sebesar 60,22 persen dan pada tahun 2023 menjadi 72,31 persen. Pada tahun 2023 berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, 72 orang termasuk angkatan kerja. Atau dapat diartikan dari 100 orang penduduk usia kerja 72 orang diantaranya aktif secara ekonomi.

Posisi TPAK Kabupaten Cianjur berada pada posisi ke-2 tertinggi di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Pangandaran, nilai TPAK Kabupaten Cianjur sudah berada di atas nilai capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Gambar 2.51. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2023

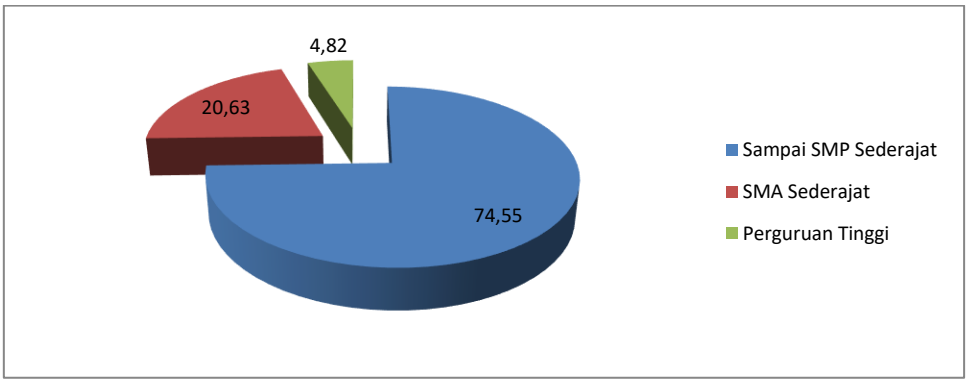

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka, 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan, angkatan kerja di Kabupaten Cianjur mayoritas masih berpendidikan dasar sampai SMP sederajat sebesar 74,55 persen, diikuti oleh SMA sederajat dengan 20,63 persen, dan perguruan tinggi dengan 4,82 persen.

TPAK juga berlaku bagi penyandang disabilitas yang berkesempatan untuk bekerja di bidang formal, di Kabupaten Cianjur persentase penyandang disabilitas berkerja formal mencapai 8,64 persen. Penyandang disabilitas memerlukan pemenuhan hak dan perlindungan melalui perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan.

3. Kualitas Hidup

Kualitas sumber daya manusia juga terkait dengan derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan usia harapan hidup. Kualitas usia harapan hidup di Kabupaten Cianjur dipengaruhi kualitas kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan penguatan sistem kesehatan. Meskipun demikian, Kabupaten Cianjur masih menghadapi beberapa permasalahan sekaligus tantangan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, yaitu masih tingginya penemuan penyakit menular dan tidak menular, masih ditemukan kasus angka kematian ibu yang berkaitan dengan masih rendahnya kualitas kesehatan reproduksi, masih tingginya angka stunting dan gizi buruk.

Jaminan perlindungan sosial yang merata dan inklusif saat ini juga masih belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain belum optimalnya sistem jaminan sosial dengan efektif dan tepat sasaran, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial secara inklusif baik secara sosial dan ekonomi terutama untuk kelompok anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya. Cakupan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Cianjur sudah tinggi melayani masyarakat yaitu berada pada angka 98 persen dari jumlah penduduk total di tahun 2023.

4. Indeks Literasi Digital

Indeks literasi digital merupakan nilai numerik yang mewakili tingkat literasi digital di Indonesia. Indeks literasi digital diselenggarakan untuk mengetahui status literasi digital di Indonesia dan untuk memastikan upaya peningkatan literasi digital masyarakat makin tepat sasaran. Diketahui indeks literasi digital di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 mencapai 3,47 dan meningkat tahun 2022 mencapai 3,6.

Indeks linterasi digital untuk Kabupaten Cianjur menggunakan proxy Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dengan nilai indek pada tahun 2022 sebesar 43,2 dan tahun 2023 sebesar 45,63.

5. Indeks Pembangunan Literasi dan Numerasi

Indeks Pembangunan Literasi adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten) dalam membunan dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Indeks pembangunan literasi di Kabupaten Cianjur menggunakan proxy persentase literasi dan numerisasi tingkat pendidikan SD dan SMP. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut.

Tabel 2.42. Persentase Literasi dan Numerisasi Kabupaten Cianjur

Jenis	2021	2022	2023
Persentase Literasi Membaca SD (%)	N/A	60,49	59,71

Jenis	2021	2022	2023
Persentase Literasi Membaca SMP (%)	N/A	40,46	46,46
Persentase Numerisasi SD (%)	N/A	45,66	48,28
Persentase Numerisasi SMP (%)	N/A	30,66	31,90
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	7,61	31,16

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dan Dinas Arsip Kabupaten Cianjur, 2024

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat terjadi peningkatan drastis pada tahun 2023 disebakan metode perhitungan pada tahun 2022 memiliki perbedaan indikator dan variabel perhitungan.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur daerah adalah berbagai jenis fasilitas yang dibangun oleh pemerintah daerah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendukung berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Indeks Infrastruktur Daerah memberikan gambaran tentang kemajuan pembangunan infrastruktur di suatu daerah sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas pembangunan infrastruktur yang lebih penting dan lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Infrastruktur yang baik merupakan faktor penting dalam ekonomi dan sosial suatu daerah. Infrastruktur yang memadai dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan daerah lain. Oleh karena itu, Indeks Infrastruktur Daerah menjadi indikator yang penting bagi pemerintah dalam mengambil keputusan pengembangan infrastruktur daerah.

Dalam mengukur indeks infrastruktur daerah Kabupaten Cianjur ditetapkan beberapa komponen yang mencakup berbagai aspek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

1. **Kondisi Jalan Mantap**

Kondisi Jalan Mantap merupakan kualitas sarana prasarana jalan Kabupaten yang menggambarkan persentase kondisi kualitas prasarana jalan yang meliputi kondisi struktur jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan lainnya terhadap panjang jalan Kabupaten Cianjur. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Cianjur, panjang Jalan Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur No. 620/Kep 0979-PUTR/2023, panjang Jalan Kabupaten Cianjur adalah 1.335,222 km, yang mana pada tahun 2023 kondisi mantap mencapai 74,10% mengalami peningkatan sebesar 6,64% dari tahun 2022 yang mencapai 67,46%.

Kondisi jalan Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.43. Kondisi Jalan Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

No	Jenis Jalan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Baik (km)	612,40	604,751	602,751	660,07	876.831
2	Sedang (km)	219,81	240,190	270,590	240,96	112.515
3	Rusak (km)	292,20	199,750	163,850	162,81	41.612
4	Rusak Berat (km)	210,86	290,580	298,080	271,74	304.264
Kondisi Mantap (%)		**52,07**	**62,33**	**63,279**	**67,46**	**74,10**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Cianjur, 2024

2. Kondisi Kinerja Irigasi

Jaringan irigasi merupakan bagian infrastruktur penting untuk mendukung peningkatan produksi pertanian yang merupakan sektor dominan dalam perekonomian di Kabupaten Cianjur. Kinerja irigasi menggambarkan kondisi pelayanan irigasi dalam mengairi daerah irigasi (DI) yang diukur dalam persentase luas daerah irigasi yang terairi terhadap total area sawah. Persentase luas daerah irigasi terairi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44. Area Irigasi Terairi Tahun 2019-2023

Komponen	2019	2020	2021	2022	2023
Area Irigasi Terairi (%)	76,8	74,03	77,84	88,0	92,4

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Cianjur, 2023
Keterangan : tahun 2019 – 2020 luas area irigasi berdasarkan Kepmen PUPR No 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
Tahun 2021 – 2023 luar area irigasi berdasarkan hasil analsis Dinas PUTR Kab. Cianjur

3. Kondisi Rumah Tangga Bersanitasi

Sanitasi adalah sebuah perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup dengan bersih dan bermaksud untuk mencegah manusia bersentuhan secara langsung dengan bahan kotor berbahaya, yang mana perilaku ini menjadi usaha yang diharapkan bisa menjaga serta meningkatkan kesehatan manusia. Kondisi rumah tangga bersanitasi dasar adalah kondisi rumah tangga yang dilayani oleh pengelolaan air limbah yang memadai, rumah tangga berakses air bersih, dan rumah tangga yang memiliki toilet yang higienis.

Persentase rumah tangga bersanitasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki sarana sanitasi dasar terhadap jumlah rumah tangga keseluruhan yang dinyatakan dalam persen. Kondisi rumah tangga bersanitasi dapat dilihat dalam tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2.45. Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2019-2023

Komponen	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Tangga Bersanitasi (%)	75,88	83,75	84,69	84,79	86,88

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

Gambar 2.52. Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2019-2023

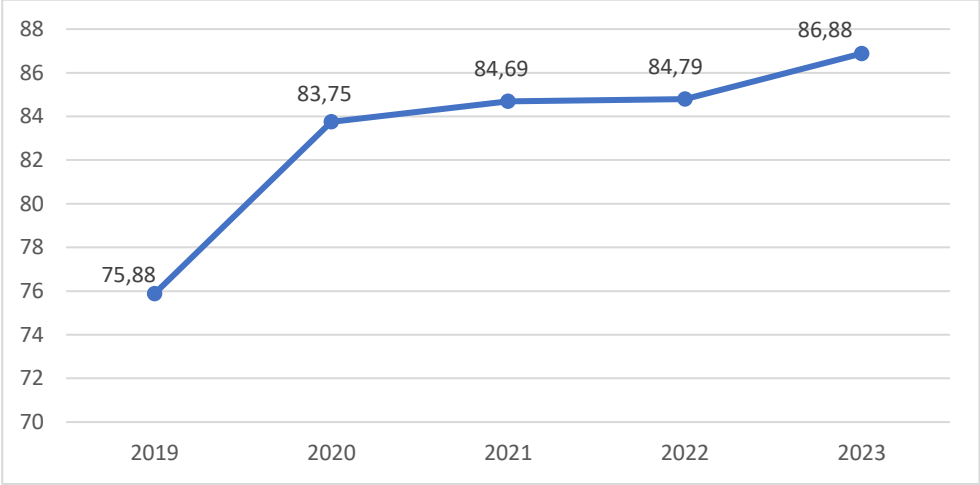

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

4. Kondisi Rumah Tangga Berakses Air Minum

Kebutuhan air bersih sesuai standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah 60 liter/orang/hari atau 0,06 m3/orang/hari dan dalam setahun dibutuhkan sebanyak 21,9 m3/orang/tahun. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum/air bersih sampai dengan tahun 2023 sebanyak 742.626 KK atau 88 persen dari target 843.864 KK.

Adapun rincian jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih dari tahun ke tahun sebagaimana dalam Grafik di bawah ini.

Tabel 2.46. Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Akses Air Minum Tahun 2019-2023

Komponen	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Air Minum (%)	76,37	73,68	77,42	87,3	88

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

Gambar 2.53. Grafik Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Tahun 2019-2023

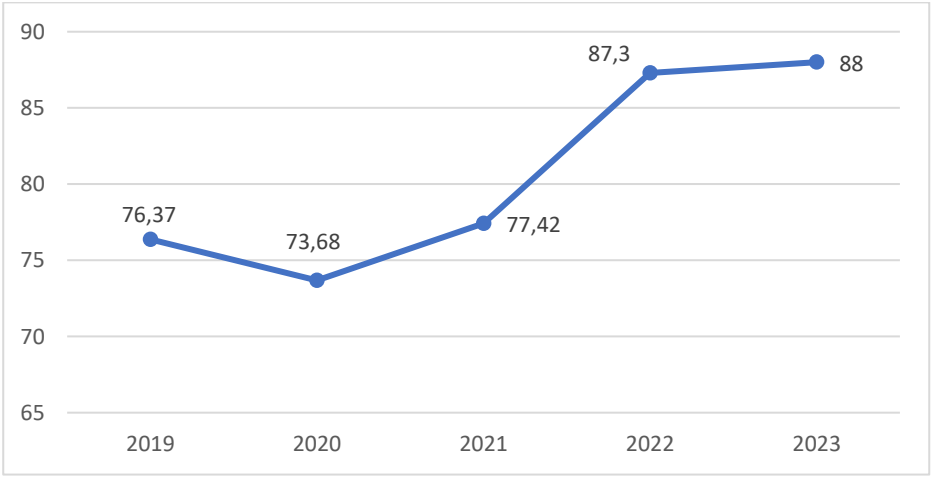

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

5. Indeks Infrastruktur Daerah

Indeks Infrastruktur Daerah adalah indikator yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dalam menyediakan infrastruktur dasar. Untuk menentukan indeks infrastruktur daerah digunakan penilaian berdasarkan indikator: 1) Kondisi mantap jaringan jalan; 2) Persentase area terairi irigasi; 3) Persentase rumah tangga terlayani air minum; dan 4) persentase rumah tangga terlayani sanitasi.

Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur, terbagi dalam 5 (lima) kategori. Adapun kategori penilaian indeks infrastruktur sebagai berikut.

Tabel 2.47. Kategori Indeks Infrastuktur Daerah

KATEGORI INFRASTRUKTUR	
85-100	Sangat Baik
71-84	Baik
55-70	Sedang
40-54	Buruk
0-39	Sangat Buruk

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Capaiam indeks infrastruktur daerah Berdasarkan ketentuan kategori indeks infrastruktur maka dapat diketahui keseluruhan nilai indeks infrastruktur di Kabupaten Cianjur sebagai berikut.

Tabel 2.48. Indeks Infrastruktur Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

Komponen	Indeks Infrastruktur	Indeks Infrastruktur				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kondisi Jalan	Indeks Kondisi Mantap	0,521	0,623	0,633	0,675	0,741
Kondisi Kinerja Irigasi	Indeks Area Irigasi Terairi	0,768	0,740	0,778	0,880	0,924
Kondisi Rumah Tangga Bersanitasi	Indeks Rumah Tangga Bersanitasi	0,759	0,838	0,844	0,848	0,869
Kondisi Rumah Tangga Terlayani Air Minum	Indeks Rumah Tangga Terlayani Air Minum	0,764	0,717	0,774	0,873	0,880
Indeks Infrastruktur Daerah (%)		69,38	72,55	75,32	81,42	85,06
Kategori		**Sedang**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Sangat Baik**

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan penilaian indeks infrastruktur daerah Kabupaten Cianjur dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terjadi peningkatan dari kondisi Sedang pada tahun 2019 hingga mencapai kategori Sangat Baik pada tahun 2023.

Gambar 2.54. Grafik Indeks Infrastruktur Kabupaten Cianjur

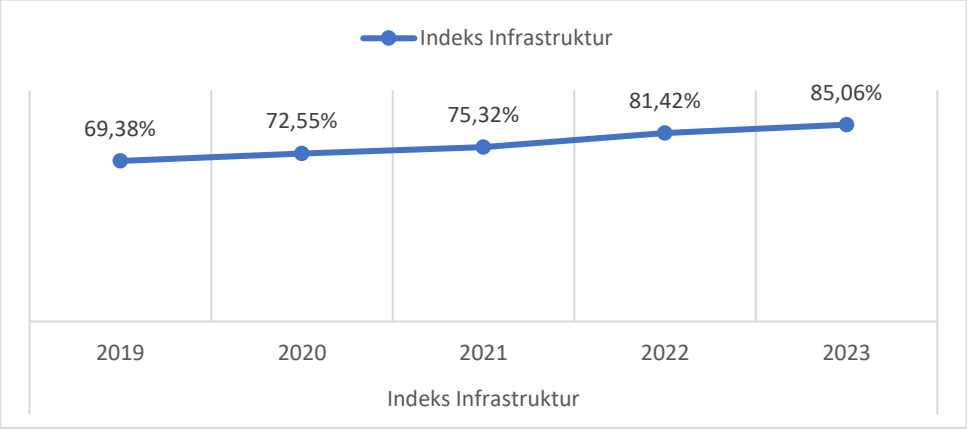

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

1. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah.

Tujuan Indeks Demokrasi Indonesia secara akademis yaitu untuk memberikan data penting bagi studi mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia, memberikan data penting bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi. Bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengevaluasi diri sendiri dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di daerahnya masing-masing berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu kebebasan, kesetaraan serta kapasitas Lembaga demokrasi dimana IDI Provinsi Jawa Barat tahun 2022 yaitu mencapai 83,34.

Indeks Demokrasi di Kabupaten Cianjur menggunakan proxy partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Adapun untuk mengukur demokrasi di Kabupaten Cianjur dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dihitung berdasarkan tahun pelaksanaan pemilu (5 tahun sekali).

Tabel 2.49. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum

	2016	2020
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	64%	67,75%

Sumber: Kesbangpol, 2024

2. Indeks Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggal

Indeks rasa aman ditunjukkan dengan indikator proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Aman tersebut dari kejadian criminal. Kriminalitas merupakan pengertian dari sebuah perilaku yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh tiap individu atau sebagian kelompok masyarakat. Hal ini mencakup tindakan seperti aktivitas pencurian, perampokan, penipuan, kekerasan, ataupun kejahatan lainnya. Angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Cianjur tertinggi adalah pada tahun 2019 dimana tercatat 695 kasus yang tertangani per tahun. Angka ini kemudian terus menurun hingga mencapai angka kriminalitas terendah pada tahun 2023 yang tercatat sejumlah 177 kasus per tahun.

Angka kriminalitas yang tertangani 177 artinya dalam 100.000 penduduk, terdapat 177 penduduk yang berisiko mengalami tindak kejahatan dalam 1 tahun. Semakin tinggi angka kriminalitas berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah. Grafik angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Cianjur disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 2.55. Angka Kriminalitas yang Tertangani Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

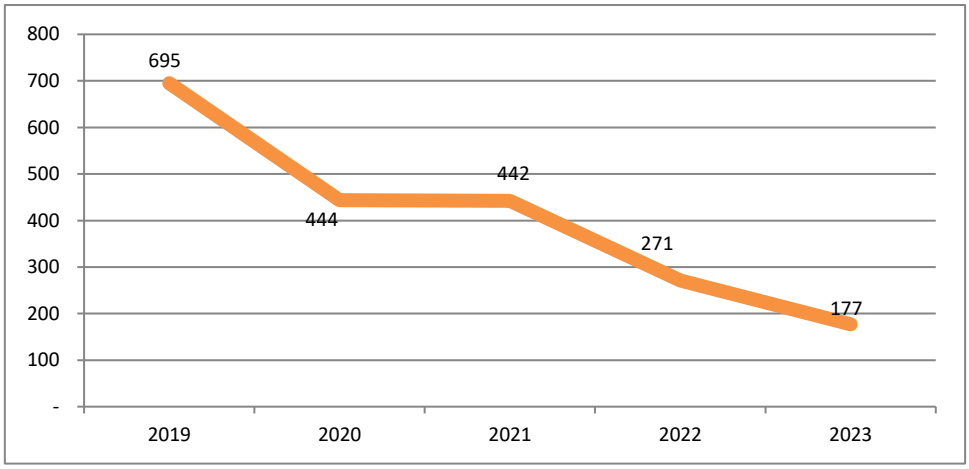

Sumber: Polres Cianjur Tahun 2019-2023

3. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian program-program kerukunan. KUB merupakan hasil survei Badan Litbang dan Biklat Kemenag. Kementerian Agama menilau bahwa kondisi KUB di Indeonsia berada pada kategori tinggi. Ketersediaan Data KUB hanya tersedia hingga tingkat Provinsi Jawa Barat, untuk lebih jelasnya sebagai berikut.

Tabel 2.50. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

Indeks	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kerukunan Umat Beragama	68,5	N/A	76,2	72,21	74,1

Sumber: Sumber Data : Balitbang dan diklat Kementerian Agama RI
** Data hanya sampai Provinsi*
** Data yang terisi adalah Data Capaian Provinsi Jawa Barat*

Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Cianjur menggunakan proxy Indeks Kesalehan Sosial (IKS) yaitu indeks untuk mengukur nilai dari masyarakat yang taat atau sungguh-sungguh menjalankan ibadah yang berkenaan dengan kepentingan umum, bersifat lintas agama. Terdapat 5 (lima) dimensi Indeks Kesalehan Sosial yaitu (1) Kepedulian sosial; (2) Relasi antar manusia; (3) menjaga etika dan budi pekerti; (4) Melestarikan lingkungan; serta (5) Relasi dengan negara dan pemerintah. Adapun Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Cianjur tahun 2022 – 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.51. Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2022 - 2023

Tahun	Indeks Kesalehan Sosial					Skor IKS
	Kepedulian Sosial	Relasi Antar Manusia	Menjaga Etika dan Budi Pekerti	Melestarikan Lingkungan	Relasi dengan Negara dan Pemerintah	
2022	74,74	70,77	70,77	74,39	84,82	73,03
2023	79,53	70,00	88,25	75,47	83,54	79,36

Sumber: Kementerian Agama

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, Indeks Kesalehan Sosial berada pada kategori baik.

4. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kondisi stabilitas keamanan daerah terutama yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Cianjur relatif cukup aman dan terkendali, sehingga apa yang dikhawatirkan misalnya konflik-konflik yang berbasis isu SARA, anarkisme, separatisme atau konflik-konflik horizontal lainnya tidak terjadi.

Hal ini merupakan keberhasilan dari para aparatur Pemerintah Kabupaten Cianjur terutama yang menangani masalah keamanan, ketentraman dan ketertiban umum disamping itu juga peran serta kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk selalu menjaga stabilitas daerahnya. Penanggulangan ketentraman dan ketertiban pada dasarnya merupakan tanggungjawab bersama, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional baik dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Satuan POL PP selalu mengadakan koordinasi dengan

instansi/aparat terkait baik secara formal, non formal, rapat koordinasi maupun mediasi tim-tim dalam unsur Forkopimda.

Sementara dalam bidang kebencanaan Kabupaten Cianjur yang memiliki indeks kerawanan bencana tinggi belum mampu secara optimal melaksanakan upaya-upaya pencegahan, pengurangan resiko bencana serta penanganan pasca bencana secara terpadu sehingga masih perlu menjadi perhatian dari semua pihak terkait tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai Capaian Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.52. Capaian Kinerja Layanan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023

No	Indikator Sasaran	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)(%)	34	34	34	34	34
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (kasus)	110	120	130	140	150
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (%)	29	29	29	29	29
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	60	60	60	60	60
5	Persentase Penegakan PERDA (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP 2023, Bakesbangpol 2023, dan BPBD 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) dari tahun ke tahun menunjukan angka yang stagnan yaitu 34 persen. Hal ini perlu dikaji apakah cakupan petugas Linmas tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, maka seharusnya cakupan tersebut 100 persen.

Adapun untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Cianjur perlu ditingkatkan lagi, karena target cakupan pelayanan bencana kebakaran yaitu 80 persen. Bila melihat data pada tabel di atas, maka terjadi kesenjangan 51 persen. Peningkatan cakupan pelayanan bencana kebakaran perlu dimulai dari menghitung Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di kabupaten Cianjur.

Indeks Ketentraman dan Ketertiban umum dalah ukuran yang digunakan untuk menilai penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Cianjur

Indeks	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketentraman dan Ketertiban	24	56	61	68	52

Sumber: Satpol PP 2023

5. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Daya saing daerah menurut hasil penelitian Bank Indonesia didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Konsep dan definisi daya saing daerah yang dikembangkan dalam penelitian tersebut didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu perkembangan perekonomian daerah ditinjau dari aspek ekonomi regional dan perkembangan konsep dan definisi daya saing daerah dari penelitian-penelitian terdahulu.

Daya saing daerah tidak bisa dipisahkan dari peran iptek. Pentingnya peran iptek dan pembangunan daerah dalam mewujudkan daya saing daerah sebagai berikut:

1) Iptek berperan dalam meningkatkan ketahanan, kemandirian, dan daya saing bangsa (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).
2) Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses, dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah (Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

IDSD memiliki empat komponen utama yang diadaptasi dari GCI 2019, yaitu komponen lingkungan pendukung (enabling environment), komponen sumber daya manusia (human capital), komponen pasar (market), dan komponen ekosistem inovasi (innovation ecosystem) dengan masing-masing komponen mempunyai sejumlah pilar dengan total 12 pilar. Pada tahun 2022, nilai IDSD Kabupaten Cianjur tidak dapat terhitung dikarenakan tidak adanya data pada pilar 2 (infrastruktur) sedangkan pada tahun 2023 nilai IDSD Kabupaten Cianjur mencapai 3,33 lebih rendah dari nilai IDSD Provinsi Jawa Barat sebesar 3,76. Adapun rincian nilai komponen pada masing-masing pilar adalah sebagai berikut.

Tabel 2.54. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023

Tahun	Lingkungan Pendukung				SDM				Pasar		Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
2022	3,97	-	3,07	2,65	3,85	2,14	3,55	2,36	1,73	2,16	5,00	1,59	-
2023	3,98	3,04	4,40	3,07	3,89	2,63	2,10	2,98	2,46	4,66	3,09	2,31	3,33

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional

6. Investasi

Tabel berikut ini memperlihatkan jumlah realisasi investasi penanaman modal asing di Kabupaten Cianjur Tahun 2014 – 2023. Tahun 2023 merupakan puncak investasi yaitu sekitar Rp. 1.802.406.639.556 jauh melebihi nilai investasi terbesar sebelumnya pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.110.225.300.000.

Gambar 2.56. Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Kabupaten Cianjur Tahun 2007-2023

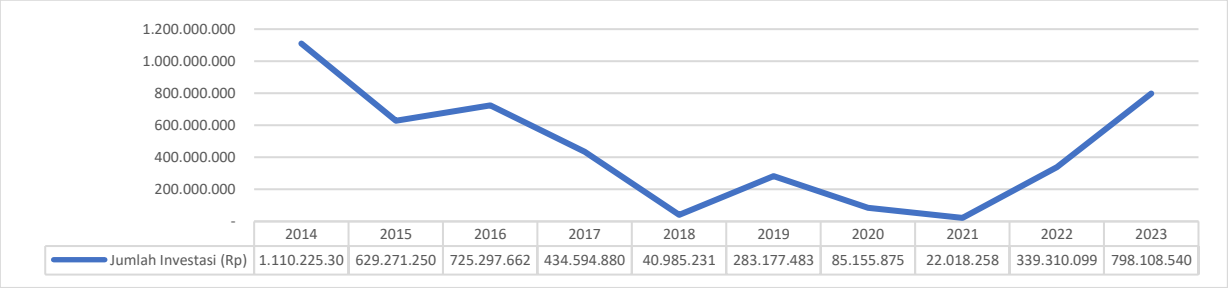

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur, 2024

Peningkatan nilai investasi pada tahun 2023 menunjukan iklim investasi di Kabupaten Cianjur sangat kondusif meskipun berada di dalam ketidakpastian global dan dinamika dalam negeri. Faktor yang mendukung peningkatan tersebut diantaranya (1) Peningkatan dalam pelaporan LKPM melalui *door to door*; (2) Intensifnya pengawasan terhadap pelaku usaha; (3) Tersusunnya tim teknis perizinan; (4) Optimalisasi media promosi investasi; (5) Peningkatan layanan perizinan dan non perizinan melalui layanan jemput bola (SIJEMPOL); (6) Tersedianya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan public; serta (7) adanya Standar Operasional Prosedur yang memberikan kepastian waktu pelayanan untuk masyarakat.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum diuraikan melalui bentuk tata kelola pemerintahan yang diharapkan dapat membantu mengintegrasikan peran pemerintah, sektor pemerintah, dan masyarakat agar pelaksanaanya bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan bisa dipertanggung jawabkan.

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan (reformasi gelombang pertama) dan telah berhasil meletakkan landasan politik, hukum dan ekonomi bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara dilakukan dalam rangka membangun *good governance*, namun banyak pihak yang merasakan reformasi di bidang birokrasi tertinggal dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan kembali untuk mereformasi birokrasi guna mewujudkan *clean government* dan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada skala nasional, dengan mendasarkan pada kesenjangan kondisi birokrasi dengan kondisi yang diinginkaan masyarakat beserta tuntutan perkembangannya, reformasi birokrasi merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan serta merupakan pertaruhan besar Bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan saat ini dan kedepan. Hal ini berkaitan dengan ribuan proses fungsi-fungsi pemerintahan yang melibatkan jutaan pegawai dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, revisi dan penyusunan berbagai regulasi, modernisasi berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, serta penyesuaian tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma, bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga memerlukan upaya luar biasa.

Hal ini dibuktikan dengan begitu lambatnya perjalanan program reformasi birokrasi hingga saat ini. Oleh karena itu, guna melaksanakan reformasi birokrasi, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan beberapa pedoman teknis penerapan reformasi birokrasi yang didalamnya telah mengatur penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

Definisi dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) itu sendiri adalah alat ukur yang digunakan oleh Pemerintah untuk menilai tingkat keberhasilan reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) mencakup berbagai dimensi seperti tata kelola pemerintahan, manajemen SDM, pelayanan publik, akuntabilitas, inovasi dan teknologi informasi. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitasnya dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan profesional bagi pegawai pemerintah. Selain itu, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi secara terukur dan transparan.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang diperoleh Kabupaten Cianjur pada tahun 2023 adalah sebesar 64,86 poin naik 2,47 poin dari realisasi tahun 2022, dan masuk kedalam Kategori B interpretasi Baik.

Gambar 2.57. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

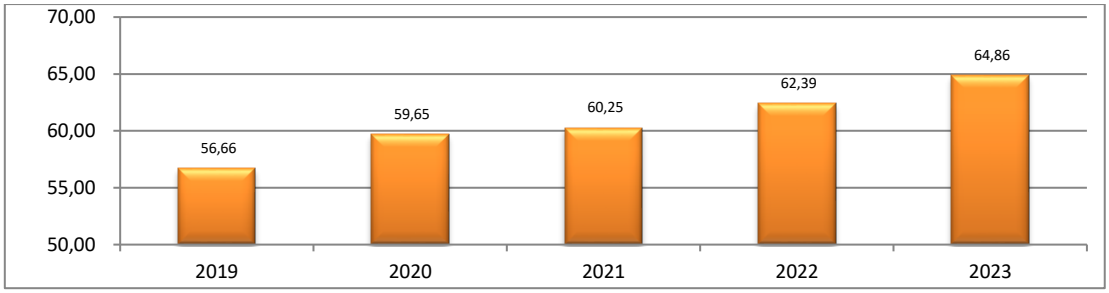

Sumber: Analisis, 2024

Adapun rincian hasil evaluasi capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Cianjur sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.55. Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai				
			2019	2020	2021	2022	2023
A.	Komponen pengungkit						
	1. Pemenuhan	20,00	N/A	11,34	11,45	11,98	N/A
	2. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	N/A	3,81	4,97	5,52	N/A
	3. Reform	30,00	N/A	14,77	14,88	15,19	N/A
Total Komponen Pengungkit		**60,00**	N/A	**29,92**	**31,30**	**32,69**	N/A
B.	Komponen Hasil						
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	N/A	7,45	7,56	7,68	N/A
	2. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	N/A	8,45	7,71	8,79	N/A
	3. Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN	10,00	N/A	9,00	7,41	7,72	N/A
	4. Kinerja Organisasi	10,00	N/A	4,83	6,27	5,51	N/A
Total Komponen Hasil		**40,00**	N/A	**29,73**	**28,95**	**29,70**	N/A
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		**100,00**	**56,66**	**59,65**	**60,25**	**62,39**	**64,86**

Sumber: Kemenpan RB

Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Cianjur telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil.

Untuk komponen hasil antara, ada sebanyak 9 (sembilan) hasil antara yang telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sektor*, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.56. Hasil Antara Area pada Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2023

No	Hasil Antara	Skala	Nilai			Sumber Data
			2021	2022	2023	
1	Sistem Merit	0-400	-	177,00	280,5	KASN
2	ASN Profesional	0-100	58,68 (Sangat Rendah)	55,27 (Sangat Rendah)	71,46	Badan Kepegawaian Negara
3	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0-5	2,46 (Cukup)	2,37 (Cukup)	3,59 (Cukup)	Kementerian PANRB
4	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	54,22 (Cukup)	51,20 (Cukup)	70,36 (Baik)	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI
5	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	60,77 (Zona Kuning)	82,83 (Zona Hijau)	85,56	Ombudsmand RI
6	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,54	4,01	85,56	Kementerian PANRB
7	Kapabilitas APIP	0-5	2 (*Infrastrukture*)	2 (*Infrastrukture*)	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
8	Maturitas SPIP	0-5	2 (Berkembang)	2 (Berkembang)	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
9	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	36,14	45,72	NA	Arsip Nasional RI

Sumber: Kemenpan RB

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu kualitas pelayanan publik, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, dan kualitas pengelolaan arsip.

Selain itu, pada komponen hasil, Pemerintah Kabupaten Cianjur memperoleh nilai yang cukup baik dengan rincian:

Tabel 2.57. Hasil Antara Area pada Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2023

No	Hasil Antara	Skala	Nilai			Sumber Data
			2021	2022	2023	
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	65,20 (Baik)	66,83 (Baik)	67,18 (Baik)	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	77,05	87,92	N/A	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	74,14	77,19	N/A	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5	Survei Internal Organisasi	0-100	75,72	77,38	N/A	SPI Internal oleh KPK

Sumber: Kemenpan RB

2. Indeks Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Diberlakukannya Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 63 SKPD telah menyampaikan laporannya, sehingga capaian IKM Kabupaten Cianjur pada tahun 2023 diperoleh nilai rata-rata yaitu 85,56 poin. Capaian tersebut meningkat sebesar 2,32 poin dari tahun 2022.

Gambar 2.58. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

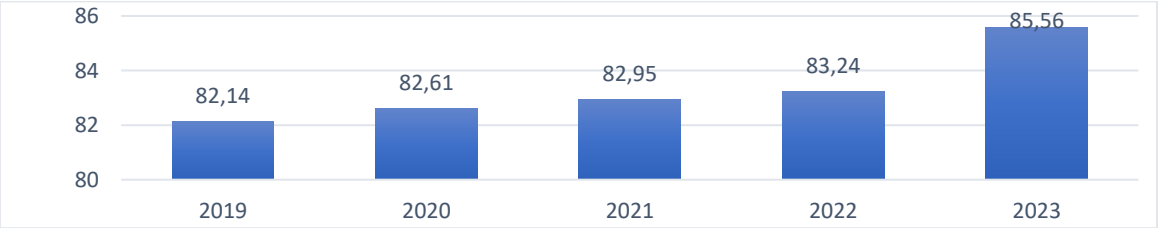

Sumber: Bag. Organisasi Setda, 2024

3. Indeks Inovasi Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan pada era desentralisasi (otonomi daerah) telah memberikan harapan besar terhadap upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dan mensejahterakan

masyarakatnya, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan di seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri berupaya mendorong seluruh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan Inovasi Daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Kegiatan ini diberi nama indeks inovasi daerah. Yang dimaksud indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaharuan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatanya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah.

Kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah Provinsi dan antar pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Indeks Inovasi Daerah) adalah:

a. Memacu dan memotivasi pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pelayanan masyarakat;
b. Mendorong arah penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan *good governance*;
c. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah;
d. Meningkatkan pengawasan dan peran serta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program yang diterapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga dapat diterima (*accepted*) masyarakat, tepat (*appropriated*) dan berkelanjutan (*sustainable*);

e. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang melakukan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan pelayanan publik, peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2023, Kabupaten Cianjur berada di peringkat 204 dari 415 Kabupaten di Indonesia dengan skor indeks sebesar 44,35 poin dengan predikat "Inovatif". Hasil tersebut meningkat dari tahun 2022 sebesar 5,09 poin. Peningkatan nilai ini memberi gambaran bahwa inovasi di Kabupaten Cianjur berkembang dengan cukup baik.

Adapun secara lengkap perkembangan capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.58. Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

No	Tahun	Capaian	Predikat
1	2019	1.190	Sangat Inovatif
2	2020	2.141	Sangat Inovatif
3	2021	33,32	Inovatif
4	2022	39,26	Inovatif
5	2023	44,35	Inovatif

Sumber : SK Kemendagri ttg IID provinsi, kabupaten dan kota Tahun 2018-2021, dan https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/dashboard/summary
catatan : pengukuran tahun 2021 – 2023 menggunakan sistem penilaian baru sehingga hasil skor indeks inovasi daerah berbeda besaran hasilnya

4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

SPBE bukan hanya sekedar penggunaan aplikasi atau sistem informasi dalam pengerjaan operasional kegiatan keseharian pemerintahan. Lebih dari itu, SPBE meliputi beberapa domain antara lain Domain Kegiatan Pemerintahan, Teknologi dan Informasi serta Layanan. Di domain Kegiatan Pemerintahan ruang lingkup SPBE meliputi Rencana Induk SPBE, Proses Bisnis, Anggaran dan Belanja

SPBE serta Data dan Informasi Elektronik. Di Domain Teknologi dan Informasi, SPBE meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah. Sementara di Domain Layanan, SPBE meliputi Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong
penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Cianjur pada tahun 2023 adalah sebesar 3,05 poin, mengalami penurunan sebesar 1,32 poin dari realisasi tahun 2022 sebesar 2,37 poin.

Gambar 2.59. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

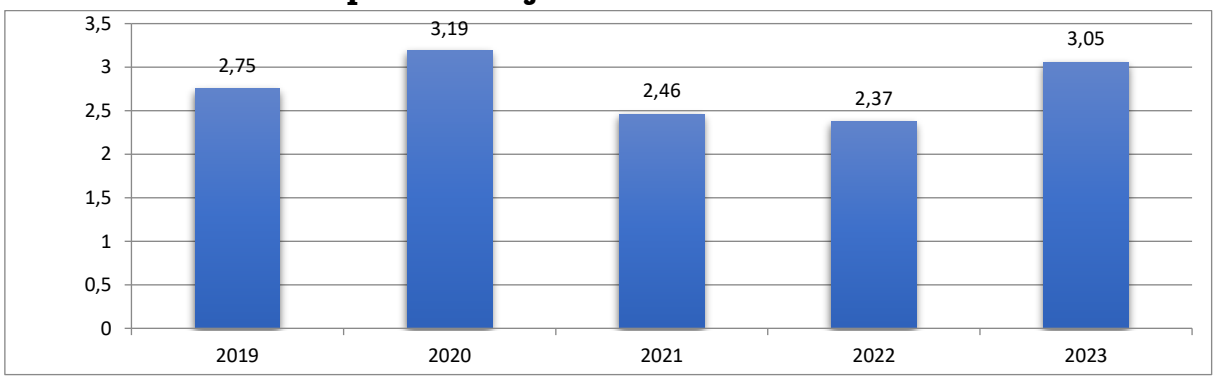

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2024

Adapun rincian hasil evaluasi capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Cianjur sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.59. Hasil Evaluasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

No.	Komponen Penilaian	Nilai				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	**Domain Kebijakan**	**3,18**	**3,94**	**3,50**	**3,50**	**3,80**
	1. Aspek Tata Kelola	3,03	3,86	3,50	3,50	3,80
	2. Aspek Kebijakan Layanan	3,30	4,00	-	-	3,80
B	**Domain Tata Kelola**	**1,71**	**2,29**	**1,50**	**1,40**	**2,20**
	1. Aspek Kelembagaan	2,00	2,00	1,50	1,50	-
	2. Aspek Strategi dan Perencanaan	2,00	2,50	1,50	1,50	2,25
	3. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,33	1,33	1,50	1,25	2,00
C	**Domain Layanan**	**3,15**	**3,42**	**3,19**	**3,07**	**3,95**
	1. Aspek Administrasi Pemerintahan	3,14	3,57	3,20	2,90	3,70
	2. Aspek Layanan Publik	3,17	3,17	3,17	3,33	4,33
Indeks SPBE Kabupaten Cianjur		**2,75**	**3,19**	**2,46**	**2,37**	**3,05**
Predikat		**Baik**	**Baik**	**Cukup**	**Cukup**	**Baik**

Sumber: Kemenpan RB

5. Indeks Keamanan Informasi

Indeks Keamanan Informasi merupakan suatu aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah.

Evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009, yaitu :

a. Tata Kelola Keamanan Informasi;
b. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi;
c. Kerangka Kerja Keamanan Informasi;
d. Pengelolaan Aset informasi;
e. Teknologi dan Keamanan Informasi;
f. Peran TIK.

Tabel 2.60. Indeks Keamanan Informasi Kabupaten Cianjur

No	Komponen Penilaian	2023	satuan
1	Tata Kelola	33	persen
2	Pengelolaan Resiko	21	persen
3	Kerangka Kerja Keamanan Informasi	33	persen
4	Pengelolaan Aset	68	persen
5	Teknologi Dan Keamanan Informasi	44	persen
6	Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga	0	persen
7	Pengamanan Layanan Infrastruktur Awal	0	persen
8	Perlindungan Data Pribadi	0	persen

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

2.5 Evaluasi RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025

Visi pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJPD 2005-2025 yaitu "Dengan Iman dan Takwa Berorientasi Budaya dan Akhlakul Karimah CIanjur Menuju Kabupaten Unggulan Bidang Agribisnis dan Pariwisata". Upaya perwujudan visi jangka Panjang daerah akan ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Cianjur 2005-2025 sebagai berikut:

1) Misi ke-1: Mewujudkan masyarakat berbudaya luhur dan berakhlak mulia sebagai aktualisasi dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mengembangkan masyarakat yang berdaya saing.
2) Misi ke-2: Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).
3) Misi ke-3: Mengembangkan Kabupaten Cianjur sebagai produsen utama komoditas pertanian.
4) Misi ke-4: Mengembangkan pariwisata berbasis kekayaan alam dan budaya lokal.

Tujuan jangka Panjang tahun 2005-2025 dalam mewujudkan masyarakat unggul yang mampu mengembangkan sektor agribisnis dan pariwisata menjadi segmen ekonomi daerah yang beragam dan menguntungkan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta partisipasi dan keterlibatan aktif *stakeholders* sebagai upaya menuju masyarakat Cianjur yang beriman dan bertaqwa serta berorientasi budaya dan akhlakul karimah mewujudkan Cianjur sebagai Kabupaten unggulan bidang agribisnis dan pariwisata.

Sebagai ukuran tercapainya daerah dengan sektor agribisnis dan pariwisata yang beragam dan menguntungkan bagi perekonomian daerah serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan dengan partisipasi dan keterlibatan aktif *stakeholders*, pembangunan hingga tahun 2025 diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1) Terwujudnya masyarakat yang berbudaya luhur dan berakhlak mulia sebagai aktualisasi dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mengembangkan masyarakat yang berdaya saing.
2) Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*).
3) Berkembangnya produsen komoditas pertanian melalui penguatan sistem agribisnis yang efisien, progresif, aman, dan berkelanjutan.
4) Berkembangnya pariwisata berbasis kekayaan alam dan budaya lokal.

2.5.1 Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum terlihat tren positif setiap tahun dalam peningkatan pembangunan manusia yang ditunjukan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini menandakan adanya upaya peningkatan standar sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Namun apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, IPM Kabupaten Cianjur menempati posisi terakhir.

Gambar 2.60. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2023

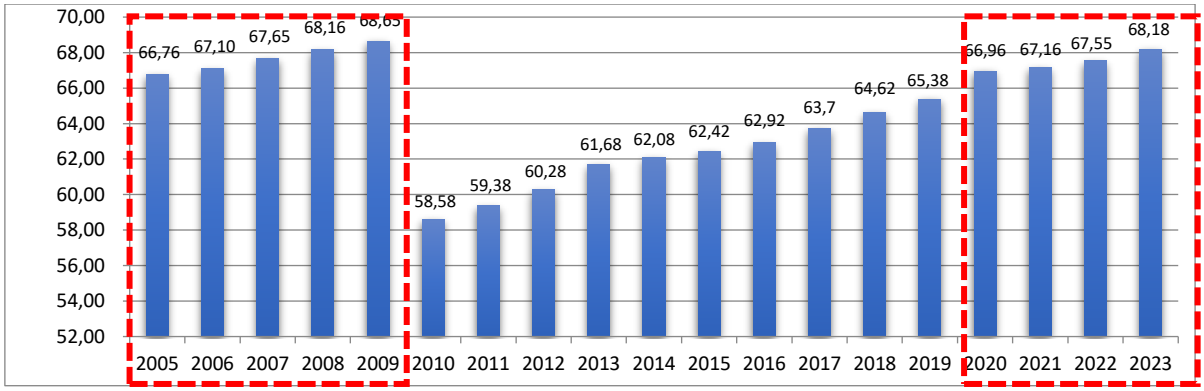

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur

Adanya perubahan perhitungan IPM perlu diperhatikan karena adanya penurunan ataupun kenaikan yang sangat tajam. Namun pada hakikatnya perlu kerja keras dari semua pihak dalam mengakselerasi peningkatan IPM dimasa mendatang. Perbaikan sektor-sektor utama dalam mendukung IPM sangat penting dilakukan secara berkelanjutan dalam memberikan dampak positif secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cianjur.

2.5.2 Angka Kemiskinan

Secara umum persentase penduduk miskin di Kabupaten Cianjur dari tahun 2005 – 2023 cenderung menurun. Adapun kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2006 diakibatkan oleh kenaikan harga minyak dunia, pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan konversi minyak tanah ke gas. Pada tahun 2010 dan 2015 terjadi kenaikan angka kemiskinan yang diakibatkan secara tidak langsung oleh krisis keuangan dunia yang berpengaruh terhadap kebijakan moneter yang ditandai dengan pelemahan nilai mata uang dan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Sedangkan pada tahun 2020-2021 kenaikan angka kemiskinan dikarenakan dampak pandemic Covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan, kenaikan pengangguran karena berhentinya aktivitas masyarakat.

Gambar 2.61. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2023

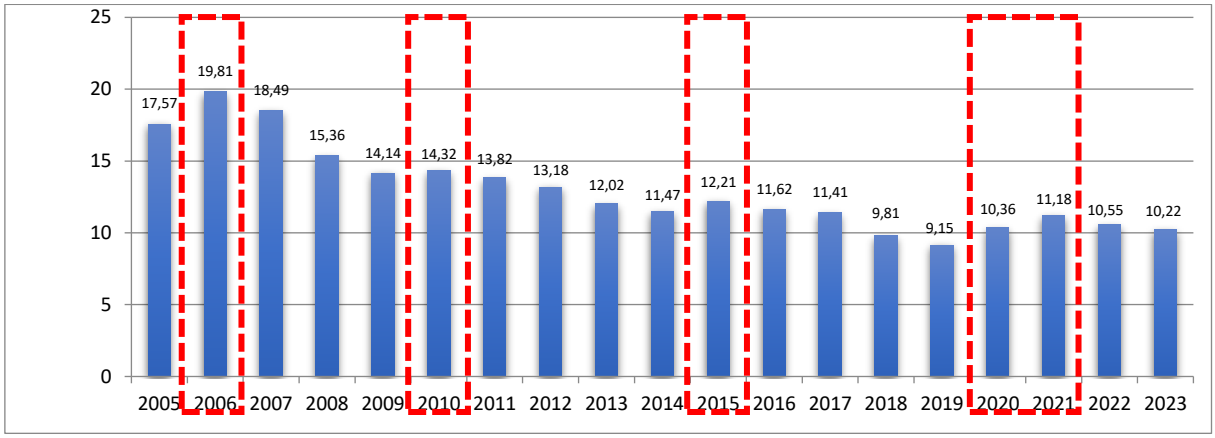

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur

Tantangan bagi Kabupaten Cianjur dalam menurunkan angka penduduk miskin yaitu bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas dan akses pendidikan serta kesehatan, dan meningkatkan infrastruktur yang merata di Kabupaten Cianjur.

2.5.3 Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Cianjur termasuk salah satu yang tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Banyaknya penduduk usia kerja tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang tersedia sehingga menyebabkan pengangguran meningkat.

Gambar 2.62. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2023

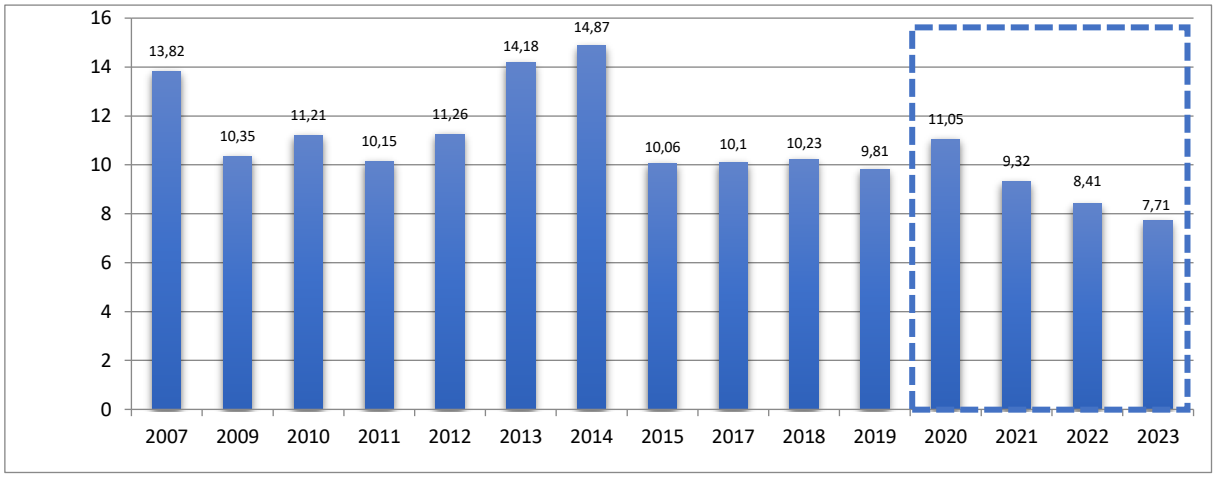

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur

TPT Kabupaten Cianjur pada tahun 2007 - 2020 mengalami fluktuasi hampir setiap tahunnya. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2021 – 2023 setelah adanya pandemic Covid-19 melalui program pemulihan paska pandemi. Tantangan dalam penanganan

pengangguran terjadi tidak hanya perbedaan jumlah pengangguran di perkotaan dan perdesaan, namun juga perbedaan pengangguran terhadap jenis kelamin.

2.5.4 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,43%. *Shock* terbesar dalam perekonomian di Kabupaten Cianjur, juga di seluruh dunia terjadi pada tahun 2019-2020 yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

Gambar 2.63. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur Tahun 2013-2023

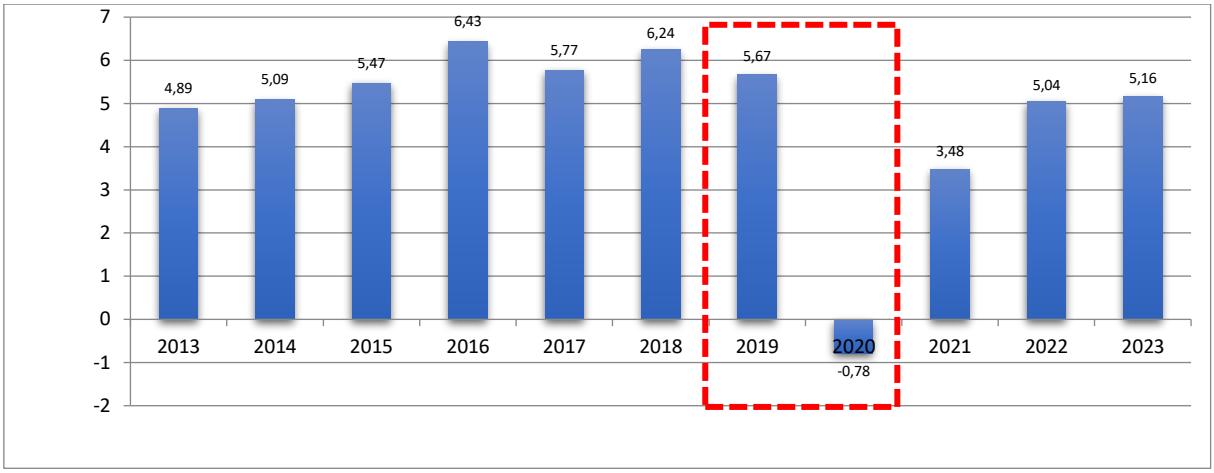

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur

Pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur kembali tumbuh menjadi 3,48 persen dan tahun 2022 tumbuh menjadi 5,04 persen. Pertumbuhan ekonomi diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah kemiskinan. Namun demikian pengaruh tersebut dapat saja berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Keadaan distribusi pendapatan, jumlah penduduk, urbanisasi memiliki kaitan penting dalam menentukan pengaruh yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan jumlah kemiskinan.

2.5.5 Ketimpangan Pendapatan

Dalam kurun waktu 2011-2023, terjadi ketimpangan pendapatan di Kabupaten Cianjur. Data menunjukkan stagnan di angka 0,3 sejak 2016, walaupun demikian ketimpangan pendapatan masih pada kategori sedang.

Gambar 2.64. Gini Rasio Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2023

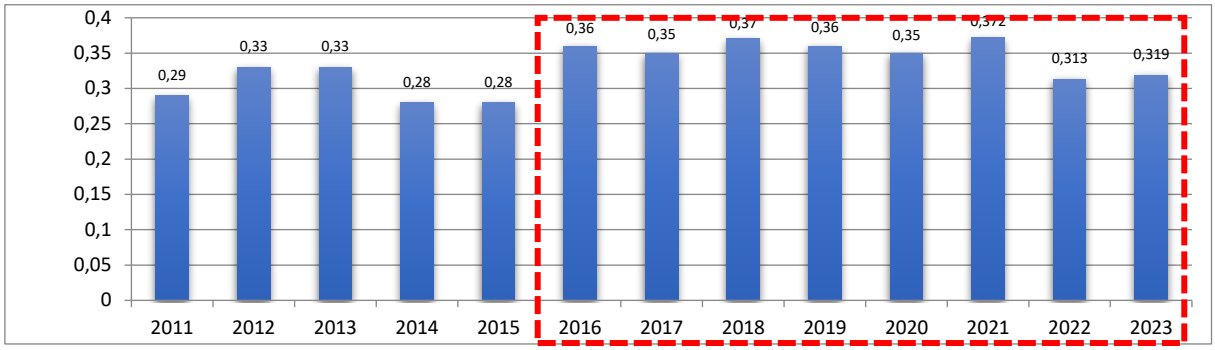

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur

Tantangan dalam ketimpangan di Kabupaten Cianjur yaitu penanganan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat dalam sumber daya dan peluang. Hal tersebut menjadi perhatian tersendiri terkait pemerataan pembangunan di Kabupaten Cianjur, terutama di kantong-kantong daerah miskin, pedesaan dan daerah terpencil.

2.5.6 PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2010-2023 yaitu 153,47 persen. Pada tahun 2005, PDRB Per Kapita hanya sebesar Rp. 9,007 Juta dan mencapai Rp. 22,830 Juta pada tahun 2023.

Gambar 2.65. PDRB Per Kapita Kabupaten Cianjur Tahun 2010-2023

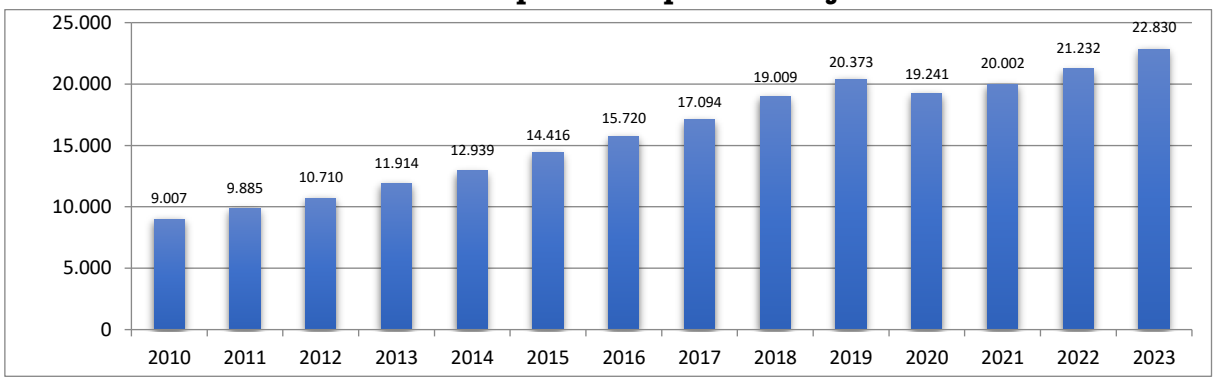

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur

Terjadi penurunan PDRB per kapita dari tahun 2019 ke tahun 2020, hal ini tentu tidak terlepas dari adanya pandemi *Covid-19.* Perlu menjadi perhatian bahwa ketika gini rasio berada pada level sedang namun PDRB per kapita naik setiap tahun, hal ini kemungkinan pendapatan besar hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu. Tingkat PDRB di Kabupaten Cianjur pada jenis usaha Industri Pengolahan pada tahun 2023 mencapai 7,31 persen; dan pada sektor akomodasi dan makan minum atau pengembangan pariwisata mencapai 6,36 persen. Dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 45.000 jiwa.

Tabel 2.61. Uraian Evaluasi Pencapaian RPJPD Tahun 2005 – 2025 Kabupaten Cianjur

Periode Perencanaan		**2006-2011**
Arah Kebijakan		Menegakkan perwujudan pembangunan sebagai sebuah proses yang melibatkan perubahan, peningkatan, pembaharuan dan kemajuan keseluruhan hidup warganya
Uraian Pencapaian	1	Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator pendukung Indek Pembangunan Manuasia (IPM), pada tahun 2010 capaian IPM Kabupaten Cianjur sebesar 66,00 tahun dengan capaian angka harapan hidup sebesar 66,34 tahun pada akhir periode 2011.
	2	Upaya pemerintah Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan taraf pendidikan dapat di ukur dengan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk penyiapan sumber daya manusia yang cerdas. Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan dari 6,82 tahun pada 2010 menjadi 6,97 tahun pada 2011, hal yang sama juga terjadi pada indikator angka melek huruf pada tahun 2010 mencapai 97,55 persen terjadi peningkatan di tahun 2011 menjadi 97,70 persen.
Periode Perencanaan		**2011-2016**
Arah Kebijakan	1	Menumbuhkembangkan kesadaran diri para pelaku pembangunan dalam menjalankan peran pembangunan dan fungsinya masing-masing yang berorientasi pada pertumbuhan wilayah-wilayah potensial secara seimbang
Uraian Pencapaian		Salah satu kondisi dari kualitas pelayanan kesehatan yaitu dibangunnya jalan mantap menuju sarana kesehatan, Upaya Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan pembangunan dan pemeliharaan jalan dengan kondisi mantap pada tahun 2015 mencapai 35,89 persen terjadi peningkatan di tahun 2016 menjadi 37,87 persen.
	2	Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak Kabupaten Cianjur meningkat dari tahun sebelumnya dapat Dilihat dari perolehan pajak daerah Kabupaten Cianjur tahun 2016 sebesar Rp. 131.687.046.195,00 sudah melebihi target yang telah ditentukan dengan capaian 102,30% hal ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 123.836.856.050,00.
Periode Perencanaan		**2016-2021**
Arah Kebijakan		Membangun kekuatan sosial untuk bersinergi dalam aktivitas percepatan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah serta membangun keterkaitan antar wilayah secara terpadu, guna mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah dalam kancah pembangunan regional dan nasional
Uraian Pencapaian	1	Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan melakukan upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif baik berupa penetapan beragam regulasi, untuk meningkatkan kapasitas para pelaku usaha fasilitas maupun penyediaan infrastruktur untuk pengembangan industri. adapun capaian PDRB sektor industri pada tahun 2021 mencapai 3.585 milyar meningkat sebesar 146,63% dari target sebesar 2.445 milyar, sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 6,82 persen dari 3.356 milyar dan telah mencapai dari target akhir RPJMD
	2	Pemerintah Kabupaten Cianjur berupaya meningkatkan nilai PDRB sektor pariwisata ini dengan cara penataan destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Cianjur. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Cianjur

Periode Perencanaan		**2006-2011**
		pada tahun 2021 telah mencapai 4.900 milyar meningkat di bandingkan dengan tahun 2020 sebesar 4.841 milyar dikarenakan Sektor pariwisata merupakan salah satu core business pembangunan Kabupaten Cianjur.
	3	Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kabupaten Cianjur. Sektor ini memberikan kontribusi besar bagi perekonomian KAbupaten Cianjur, Kontribusi terbesar pada capaian kinerja tersebut yaitu : pertanian tanaman pangan, Tanaman Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Jasa Pertanian dan Perburuan, Kehutanan dan Penebangan Kayu dan Perikanan.nilai PDRB sektor pertanian pada tahun 2021 sebesar 16.441 milyar atau meningkat sebesar 115,89% dari target sebesar 14.186 milyar, atau dapat dikatakan mengalamai peningkatan sebesar 5,1 % dari 15.642 milyar bila dibandingkan dengan tahun 2020
	4	Peningkatan kinerja aparatur dapat diukur dengan opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Cianjur berdasarkan pemeriksaan pada tahun 2020 BPK memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) , status ini masih sama di tahun 2021 Kabupaten Cianjur mendapat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021
Periode Perencanaan		**2021-2026**
Arah Kebijakan		Mengembangkan ketangguhan daerah menuju stabilitas serta kemandirian ekonomi yang sehat dan dinamis berlandaskan kehidupan sosial budaya masyarakat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa pada era yang penuh dinamika perubahan, sarat kompetisi dan sulit diprediksi
Uraian Pencapaian	1	kesehatan masyarakat tercermin dari tingginya angka harapan hidup, pada tahun 2021 angka harapan hidup Kabupaten Cianjur berada pada 70,32 tahun, angka ini mengalami peningkatan menjadi 70,58 tahun pada tahun 2022 artinya jika angka harapan hidup meningkat maka derajat kesehatan pebduduk juga meningkat serta memperpanjang usia harapan hidupnya.
	2	Usaha Mikro merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Cianjur pada tahun 2021 usaha mikro yang menjadi wirausaha mencapai 10,2 persen pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 19,8 persen.
	3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB salah satu faktor yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan pariwisata dan pengembangan infrastruktur pariwisata Kabupaten Cianjur, pada tahun 2021 sektor pariwisata mencapai angka 2.017.63 milyar , pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 2.210,20 milyar.
	4	upaya pemerintah Kabupaten Cianjur untuk mengevaluasi kinerja masyarakat dalam mengatasi maslah sosial dan kemiskinan, serta memantau progres dalam mencapai tujuan pembangunan sosial, indeks kesalehan sosial dapat bervariasi tergantung pada faktor budaya, geografis dan sosial di suatu masyarakat pada tahun 2022 indek kesalehan sosial mencapai angka di 74 namun belum mencapai target dikarenakan indikator ini baru ditetapkan pada tahun 2021.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana

2.6.1 Tren Demografi

Tren demografi adalah perubahan dalam suatu populasi dari waktu ke waktu dan merupakan hasil dari pergeseran konteks sosial, politik, dan ekonomi.

A. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi pertumbuhan penduduk merupakan cara penggambaran jumlah penduduk berdasarkan perhitungan tertentu yang didasarkan pada asumsi komponen yang bekerja di dalamnya yang meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi pertumbuhan penduduk memegang peranan penting dalam tujuannya sebagai sebuah sistem perencanaan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, proyeksi penduduk bermanfaat sebagai basis data dan target penentuan kebijakan untuk pembangunan sektoral.

Proyeksi pertumbuhan penduduk akan semakin bertambah (linier) setiap tahunnya. Dengan demikian, Kabupaten Cianjur akan memperoleh bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu keadaan dimana terjadi peningkatan penduduk sebuah negara pada usia produktif yaitu berkisar antara 16 hingga 65 tahun. Peningkatan tersebut diikuti pula dengan menurunnya angka kelahiran serta kematian.

Pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Cianjur bertambah secara signifikan semenjak tahun 2023 sebanyak 2.535.002 jiwa dan mencapai puncaknya pada akhir periode perencanaan RPJPD yang mencapai 2.954.442 jiwa seperti terlihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.66. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

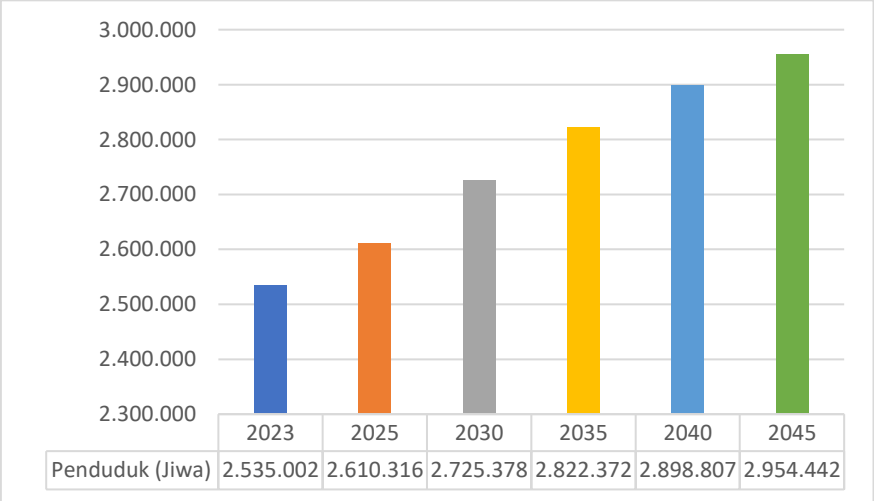

	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Penduduk (Jiwa)	2.535.002	2.610.316	2.725.378	2.822.372	2.898.807	2.954.442

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2023 (diolah)

Proyeksi jumlah penduduk memang setiap tahun mengalami kenaikan, tetapi persentase kenaikan jumlah penduduk per periode

akan mengalami penurunan seperti pada tahun 2030 mengalami kenaikan 4,22 persen dari tahun 2025, lalu menyusut pada akhir periode RPJPD tahun 2045 hanya sebesar 1,88 persen dari tahun 2040. Ada banyak hal yang berperan dari penurunan tersebut diantaranya kebijakan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan jumlah penduduk melalui program keluarga berencana dan adanya perubahan sosial ekonomi di Kabupaten Cianjur.

B. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin menggambarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Data dan informasi rasio jenis kelamin ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pencapaian pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Rasio Jenis Kelamin apabila >100 menandakan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari perempuan. Proyeksi rasio jenis kelamin di Kabupaten Cianjur per periode sampai dengan tahun 2045 terus mengalami penurunan dimana pada periode akhir RPJPD mencapai angka 100,70 dan bukan tidak mungkin tahun-tahun berikutnya rasio jenis kelamin akan mencapai 100 atau bahkan lebih rendah. Adapun proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Cianjur berdasarkan jenis kelamin tahun 2025-2045 dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.67. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

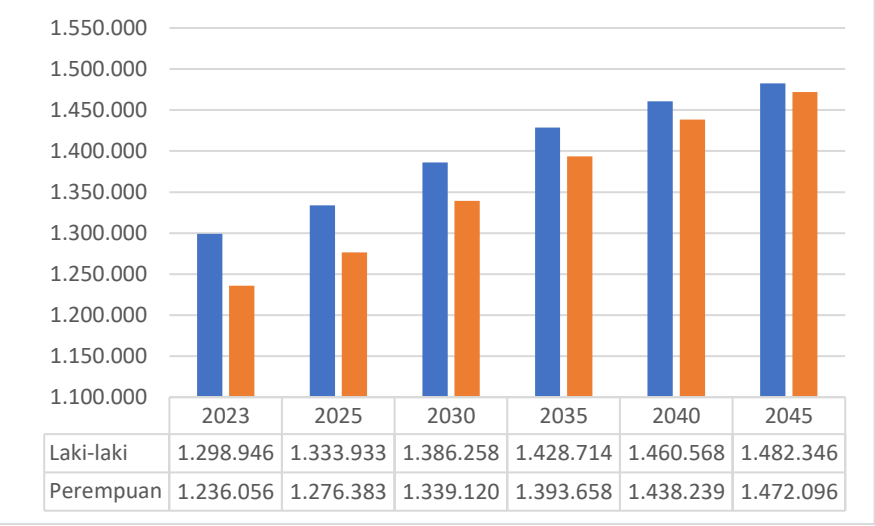

	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	1.298.946	1.333.933	1.386.258	1.428.714	1.460.568	1.482.346
Perempuan	1.236.056	1.276.383	1.339.120	1.393.658	1.438.239	1.472.096

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2023 (diolah)

Adanya penurunan rasio jenis kelamin disebabkan diantaranya oleh usia harapan hidup laki-laki lebih pendek dibandingkan Perempuan. Hal ini disebabkan oleh perilaku tidak sehat dan berisiko lainnya yang dialami oleh laki-laki.

C. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Sebaliknya, jika semakin rendah persentase Rasio Ketergantungan, maka semakin rendah pula beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif. Penduduk muda atau penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung kepada orang tua atau orang lain yang menanggung nya. Demikian pula penduduk berusia 65 tahun atau lebih dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun kerja. Penduduk berusia 15 sampai 64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif dan memiliki potensi ekonomi dalam Pembangunan.

Angka ketergantungan Kabupaten Cianjur pada tahun 2045 akan mencapai 50,90 yang berarti rasio ketergantungan penduduk non produktif mencapai setengah angka dari penduduk produktif. Naiknya angka ketergantungan disebabkan tingginya usia >65 tahun dan sebaliknya usia 0-14 tahun pada tahun 2045 mengalami penurunan sebanyak 65. 415 orang dibandingkan tahun 2025. Adapun proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.68. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

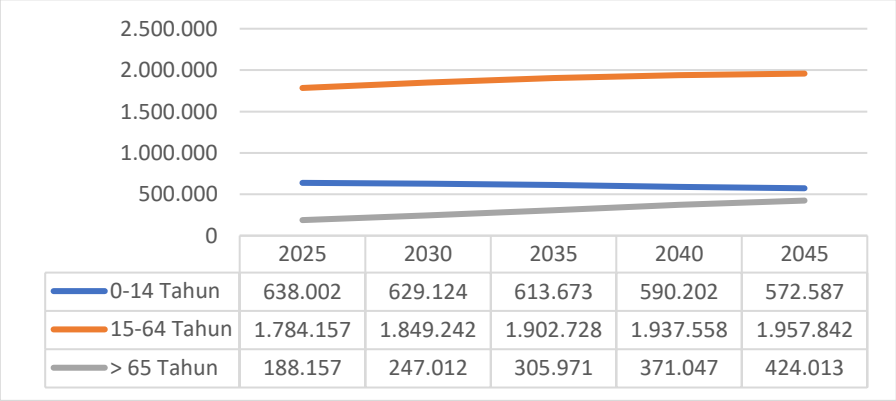

	2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	638.002	629.124	613.673	590.202	572.587
15-64 Tahun	1.784.157	1.849.242	1.902.728	1.937.558	1.957.842
> 65 Tahun	188.157	247.012	305.971	371.047	424.013

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2023 (diolah)

Gambar 2.69. Angka Ketergantungan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

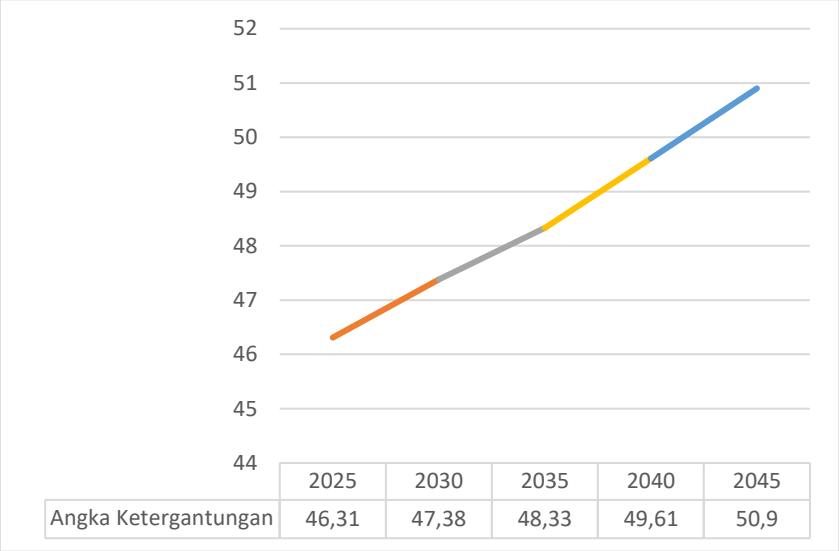

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2023 (diolah)

Bonus demografi menjadi kesempatan yang baik bagi sebuah negara. Ketika jumlah penduduk usia produktif meningkat, maka jumlah potensial tenaga kerja dalam suatu perekonomian juga akan meningkat. Para pekerja ini akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, menghasilkan pendapatan dan menggerakkan perekonomian dengan pengeluaran belanja yang dilakukan. Sehingga dengan jumlah penduduk usia produktif yang meningkat, maka peluang pertumbuhan ekonomi semakin besar.

Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif ini juga mengurangi rasio penduduk yang berusia lanjut usia, yang tergantung pada penduduk usia produktif dalam merawat dan berkontribusi membayar pensiun dan jaminan sosial mereka.

Tetapi, jika bonus demografi ini tidak dipersiapkan dan dimanfaatkan dengan baik, maka akan membawa dampak buruk terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Cianjur berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.62. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

No.	Kecamatan	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)															
		L	P	2025	L	P	2030	L	P	2035	L	P	2040	L	P	2045
1	Agrabinta	21.678	20.743	42.420	22.528	21.762	44.290	23.218	22.648	45.866	23.736	23.373	47.109	24.090	23.923	48.013
2	Leles	16.645	15.927	32.573	17.298	16.710	34.008	17.828	17.391	35.219	18.226	17.947	36.172	18.497	18.369	36.867
3	Sindangbarang	31.429	30.073	61.503	32.662	31.552	64.214	33.663	32.837	66.499	34.413	33.887	68.300	34.926	34.685	69.611
4	Cidaun	37.058	35.460	72.518	38.512	37.202	75.714	39.691	38.718	78.409	40.576	39.956	80.533	41.181	40.897	82.078
5	Naringgul	25.199	24.112	49.312	26.188	25.297	51.485	26.990	26.328	53.318	27.592	27.170	54.761	28.003	27.809	55.812
6	Cibinong	34.345	32.863	67.207	35.692	34.478	70.170	36.785	35.882	72.667	37.605	37.030	74.635	38.166	37.902	76.068
7	Cikadu	19.676	18.828	38.504	20.448	19.753	40.201	21.075	20.557	41.632	21.544	21.215	42.759	21.866	21.714	43.580
8	Tanggeung	26.960	25.797	52.758	28.018	27.065	55.083	28.876	28.168	57.044	29.520	29.069	58.588	29.960	29.753	59.713
9	Pasirkuda	20.406	19.525	39.931	21.206	20.485	41.691	21.856	21.319	43.175	22.343	22.001	44.344	22.676	22.519	45.195
10	Kadupandak	28.219	27.001	55.220	29.326	28.329	57.655	30.224	29.482	59.706	30.898	30.426	61.323	31.359	31.142	62.500
11	Cijati	18.254	17.466	35.720	18.970	18.325	37.295	19.551	19.071	38.622	19.987	19.681	39.668	20.285	20.144	40.429
12	Takokak	27.440	26.257	53.697	28.517	27.547	56.064	29.390	28.669	58.059	30.045	29.586	59.632	30.493	30.283	60.776
13	Sukanagara	30.007	28.713	58.720	31.184	30.124	61.308	32.139	31.351	63.490	32.856	32.354	65.210	33.346	33.115	66.461
14	Pagelaran	40.513	38.765	79.278	42.102	40.670	82.772	43.391	42.327	85.718	44.359	43.681	88.039	45.020	44.709	89.729
15	Campaka	37.209	35.604	72.814	38.669	37.354	76.023	39.853	38.875	78.729	40.742	40.119	80.861	41.349	41.063	82.413
16	Campakamulya	12.629	12.084	24.712	13.124	12.678	25.802	13.526	13.194	26.720	13.827	13.616	27.443	14.034	13.937	27.970
17	Cibeber	72.164	69.050	141.214	74.994	72.444	147.439	77.291	75.395	152.686	79.014	77.806	156.821	80.193	79.638	159.831
18	Warungkondang	42.243	40.420	82.663	43.900	42.407	86.307	45.244	44.134	89.379	46.253	45.546	91.799	46.943	46.618	93.561
19	Gekbrong	33.075	31.648	64.722	34.372	33.203	67.575	35.425	34.555	69.980	36.214	35.661	71.875	36.754	36.500	73.255
20	Cilaku	64.099	61.334	125.433	66.613	64.348	130.962	68.654	66.969	135.623	70.184	69.111	139.295	71.231	70.738	141.969
21	Sukaluyu	49.255	47.130	96.385	51.187	49.447	100.634	52.755	51.460	104.215	53.931	53.107	107.038	54.735	54.357	109.092
22	Bojongpicung	45.173	43.224	88.398	46.945	45.349	92.294	48.383	47.196	95.579	49.462	48.706	98.167	50.199	49.852	100.051
23	Haurwangi	34.622	33.128	67.751	35.980	34.757	70.737	37.082	36.172	73.254	37.909	37.329	75.238	38.474	38.208	76.682
24	Ciranjang	48.175	46.097	94.272	50.065	48.362	98.427	51.598	50.332	101.930	52.748	51.942	104.690	53.535	53.165	106.700
25	Mande	44.182	42.276	86.458	45.915	44.354	90.270	47.322	46.161	93.482	48.377	47.637	96.014	49.098	48.759	97.857
26	Karangtengah	89.667	85.799	175.466	93.185	90.016	183.200	96.038	93.682	189.720	98.180	96.679	194.858	99.644	98.955	198.598
27	Cianjur	92.522	88.530	181.051	96.151	92.881	189.032	99.096	96.664	195.760	101.305	99.756	201.061	102.815	102.105	204.920
28	Cugenang	63.455	60.718	124.173	65.944	63.702	129.647	67.964	66.296	134.261	69.479	68.417	137.897	70.515	70.028	140.543
29	Pacet	59.794	57.214	117.008	62.139	60.026	122.165	64.042	62.471	126.513	65.470	64.469	129.939	66.446	65.987	132.433
30	Cipanas	60.629	58.014	118.643	63.008	60.865	123.873	64.937	63.344	128.281	66.385	65.370	131.755	67.375	66.909	134.284
31	Sukaresmi	49.165	47.044	96.209	51.093	49.356	100.450	52.658	51.366	104.024	53.832	53.009	106.842	54.635	54.257	108.892
32	Cikalongkulon	58.044	55.540	113.584	60.321	58.270	118.591	62.168	60.643	122.811	63.555	62.583	126.137	64.502	64.056	128.558
Kabupaten Cianjur		**1.333.933**	**1.276.383**	**2.610.316**	**1.386.258**	**1.339.120**	**2.725.378**	**1.428.714**	**1.393.658**	**2.822.372**	**1.460.568**	**1.438.239**	**2.898.807**	**1.482.346**	**1.472.096**	**2.954.442**

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024 (diolah)

2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

2.6.2.1 Kebutuhan Rumah

Perhitungan kebutuhan unit rumah di Kabupaten Cianjur dan Sekitarnya pada umumnya dihitung berdasarkan pedoman SNI 03-1733-2004 dengan menggunakan asumsi dasar lingkungan perumahan yang menyatakan jumlah penghuni rumah rata-rata adalah 5 jiwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka proyeksi kebutuhan bangunan rumah di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.63. Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

Kecamatan	Eksisting	Proyeksi Rumah (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Agrabinta	8.176	8.484	8.858	9.173	9.422	9.603
Leles	6.324	6.515	6.802	7.044	7.234	7.373
Sindangbarang	11.826	12.301	12.843	13.300	13.660	13.922
Cidaun	14.000	14.504	15.143	15.682	16.107	16.416
Naringgul	9.538	9.862	10.297	10.664	10.952	11.162
Cibinong	12.946	13.441	14.034	14.533	14.927	15.214
Cikadu	7.444	7.701	8.040	8.326	8.552	8.716
Tanggeung	10.142	10.552	11.017	11.409	11.718	11.943
Pasirkuda	7.694	7.986	8.338	8.635	8.869	9.039
Kadupandak	10.659	11.044	11.531	11.941	12.265	12.500
Cijati	6.916	7.144	7.459	7.724	7.934	8.086
Takokak	10.424	10.739	11.213	11.612	11.926	12.155
Sukanagara	11.277	11.744	12.262	12.698	13.042	13.292
Pagelaran	15.269	15.856	16.554	17.144	17.608	17.946
Campaka	14.047	14.563	15.205	15.746	16.172	16.483
Campakamulya	4.803	4.942	5.160	5.344	5.489	5.594
Cibeber	27.097	28.243	29.488	30.537	31.364	31.966
Warungkondang	15.804	16.533	17.261	17.876	18.360	18.712
Gekbrong	12.379	12.944	13.515	13.996	14.375	14.651
Cilaku	23.949	25.087	26.192	27.125	27.859	28.394
Sukaluyu	18.314	19.277	20.127	20.843	21.408	21.818
Bojongpicung	16.932	17.680	18.459	19.116	19.633	20.010
Haurwangi	12.962	13.550	14.147	14.651	15.048	15.336
Ciranjang	18.033	18.854	19.685	20.386	20.938	21.340
Mande	16.555	17.292	18.054	18.696	19.203	19.571
Karangtengah	33.480	35.093	36.640	37.944	38.972	39.720
Cianjur	34.917	36.210	37.806	39.152	40.212	40.984
Cugenang	23.783	24.835	25.929	26.852	27.579	28.109
Pacet	22.464	23.402	24.433	25.303	25.988	26.487
Cipanas	22.886	23.729	24.775	25.656	26.351	26.857
Sukaresmi	18.481	19.242	20.090	20.805	21.368	21.778
Cikalongkulon	21.815	22.717	23.718	24.562	25.227	25.712
Jumlah	**501.336**	**522.063**	**545.076**	**564.474**	**579.761**	**590.888**

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024 (diolah)

2.6.2.2 Kebutuhan Air Bersih

Perhitungan kebutuhan air bersih dilakukan untuk menentukan debit air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045. Kebutuhan air rata-rata merupakan besarnya pemakaian air rata-rata yang diperlukan setiap hari untuk sambungan termasuk besarnya kebocoran air dalam pendistribusiannya menuju konsumen. Berdasarkan perhitungan dalam RISPAM Kabupaten Cianjur diketahui akses rumah tangga terhadap air siap minum mencapai 38,5 persen dengan kapasitas air mencapai 824 l/det.

Kebutuhan air rata-rata meliputi kebutuhan air untuk sambungan domestik terbagi menjadi 120 l/dt untuk sambungan rumah (SR) dan 30 L/dt untuk hidran umum (HU), sambungan untuk fasilitas umum (non domestik) yaitu 20 persen dari kebutuhan air domestik, dan kebocoran air sebesar 27,69 persen dari kebutuhan air domestik dan non domestik. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh kebutuhan air bersih untuk didistribusikan di Kabupaten Cianjur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.64. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

Kecamatan	Eksisting	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih untuk distribusi (Lt/dt)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Agrabinta	34,75	47,47	56,00	62,99	68,54	81,62
Leles	26,88	36,45	43,00	48,36	52,63	62,67
Sindangbarang	50,26	68,83	81,19	91,32	99,37	118,34
Cidaun	59,50	81,16	95,73	107,68	117,17	139,53
Naringgul	40,54	55,19	65,09	73,22	79,67	94,88
Cibinong	55,02	75,21	88,72	99,79	108,59	129,32
Cikadu	31,64	43,09	50,83	57,17	62,21	74,09
Tanggeung	43,10	59,04	69,64	78,34	85,24	101,51
Pasirkuda	32,70	44,69	52,71	59,29	64,52	76,83
Kadupandak	45,30	61,80	72,89	81,99	89,22	106,25
Cijati	29,39	39,97	47,15	53,04	57,71	68,73
Takokak	44,30	60,09	70,88	79,73	86,76	103,32
Sukanagara	47,93	65,71	77,51	87,19	94,88	112,98
Pagelaran	64,89	88,72	104,65	117,71	128,09	152,54
Campaka	20,41	81,49	96,12	108,11	117,65	140,10
Campakamulya	23,88	27,66	32,62	36,69	39,93	47,55
Cibeber	115,16	158,03	186,41	209,68	228,16	271,71
Warungkondang	67,17	92,51	109,12	122,74	133,56	159,05
Gekbrong	52,61	72,43	85,44	96,10	104,57	124,53
Cilaku	101,78	140,37	165,58	186,24	202,67	241,35
Sukaluyu	77,83	107,87	127,23	143,11	155,73	185,46
Bojongpicung	71,96	98,93	116,69	131,25	142,83	170,09
Haurwangi	55,09	75,82	89,44	100,60	109,47	130,36
Ciranjang	76,64	105,50	124,44	139,98	152,32	181,39

Kecamatan	Eksisting	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih untuk distribusi (Lt/dt)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Mande	70,36	96,76	114,13	128,37	139,69	166,36
Karangtengah	142,29	196,37	231,63	260,53	283,51	337,62
Cianjur	148,40	202,62	239,00	268,83	292,53	348,36
Cugenang	101,08	138,96	163,92	184,37	200,63	238,92
Pacet	95,47	130,94	154,46	173,73	189,05	225,14
Cipanas	97,27	132,77	156,62	176,16	191,70	228,28
Sukaresmi	78,54	107,67	127,00	142,85	155,45	185,12
Cikalongkulon	92,71	127,11	149,94	168,65	183,52	218,55

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum di Kabupaten Cianjur, dapat dihitung pemenuhan kebutuhan air minum berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65. Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Kabupaten Cianjur

Kecamatan	Proyeksi Pemenuhan Air Minum (Lt/dt)				
	2025	2030	2035	2040	2045
Agrabinta	12,73	8,52	6,99	5,55	13,08
Leles	9,57	6,55	5,37	4,26	10,04
Sindangbarang	18,57	12,36	10,13	8,05	18,97
Cidaun	21,65	14,57	11,95	9,49	22,36
Naringgul	14,65	9,91	8,12	6,46	15,21
Cibinong	20,19	13,51	11,07	8,80	20,73
Cikadu	11,45	7,74	6,34	5,04	11,87
Tanggeung	15,94	10,60	8,69	6,91	16,27
Pasirkuda	11,99	8,02	6,58	5,23	12,31
Kadupandak	16,50	11,10	9,10	7,23	17,03
Cijati	10,58	7,18	5,88	4,68	11,02
Takokak	15,79	10,79	8,85	7,03	16,56
Sukanagara	17,79	11,80	9,67	7,69	18,11
Pagelaran	23,83	15,93	13,06	10,38	24,45
Campaka	61,07	14,63	12,00	9,53	22,45
Campakamulya	3,78	4,97	4,07	3,24	7,62
Cibeber	42,87	28,38	23,26	18,49	43,55
Warungkondang	25,34	16,61	13,62	10,82	25,49
Gekbrong	19,82	13,01	10,66	8,47	19,96
Cilaku	38,59	25,21	20,66	16,42	38,68
Sukaluyu	30,03	19,37	15,88	12,62	29,72
Bojongpicung	26,97	17,76	14,56	11,57	27,26
Haurwangi	20,73	13,61	11,16	8,87	20,89
Ciranjang	28,86	18,94	15,53	12,34	29,07
Mande	26,40	17,37	14,24	11,32	26,66
Karangtengah	54,08	35,26	28,91	22,97	54,11
Cianjur	54,22	36,38	29,83	23,70	55,83
Cugenang	37,88	24,95	20,46	16,26	38,29
Pacet	35,47	23,51	19,28	15,32	36,08
Cipanas	35,51	23,84	19,55	15,53	36,59
Sukaresmi	29,13	19,33	15,85	12,60	29,67
Cikalongkulon	34,40	22,83	18,71	14,87	35,03

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

2.6.2.3 Kebutuhan Energi Listrik

Perhitungan kebutuhan energi listrik membutuhkan data jumlah penduduk. Dari data tersebut dapat dilakukan analisis jumlah kebutuhan energi listrik di Kabupaten Cianjur dengan menggunakan jumlah anggota keluarga untuk menentukan jumlah rumah dan mengelompokan sesuai tipe rumah. Adapun beberapa ketentuan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik dengan menggunakan sumber yang mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2016. Berikut adalah penentuan jumlah minimal daya listrik berdasarkan tipe rumah di Kawasan Perkotaan sebagai berikut:

1. Tipe rumah non permanen (kecil) adalah sebesar 1300 Watt /rumah
2. Tipe rumah semi permanen (sedang) adalah sebesar 2200 Watt/rumah
3. Tipe rumah permanen (besar) adalah sebesar 3300 Watt/rumah

Selain itu, kebutuhan energi listrik dihitung dengan beberapa pertimbangan pada peraturan Standar SNI 03-1733-2004 sebagai berikut:

1. Penyediaan kebutuhan daya listrik
   - Setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain; dan
   - Setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 VA per jiwa dan untuk sarana lingkungan sebesar 40 persen dari total kebutuhan rumah tangga.
2. Penyediaan jaringan listrik
   - Disediakan jaringan listrik lingkungan dengan mengikuti hirarki pelayanan, dimana besar pasokannya telah diprediksikan berdasarkan jumlah unit hunian yang mengisi blok siap bangun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui kebutuhan energi listrik di Kabupaten Cianjur berdasarkan kebutuhan listrik domestik, non-domestik, serta kebutuhan gardu distribusi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.66. Proyeksi Kebutuhan Listrik Domestik Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

Kecamatan	Eksisting	Proyeksi Kebutuhan Listrik Domestik (Kwh)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Agrabinta	55.595.440,00	57.691.623,78	60.234.670,56	62.378.362,25	64.067.693,05	65.297.293,03
Leles	43.004.560,00	44.298.701,03	46.251.387,77	47.897.428,41	49.194.586,56	50.138.738,91
Sindangbarang	80.415.440,00	83.643.989,16	87.331.016,20	90.439.039,74	92.888.309,81	94.671.040,83
Cidaun	95.202.720,00	98.624.293,67	102.971.652,53	106.636.310,67	109.524.235,24	111.626.246,26
Naringgul	64.858.400,00	67.063.737,87	70.019.907,43	72.511.845,92	74.475.611,73	75.904.962,57
Cibinong	88.031.440,00	91.402.195,32	95.431.204,09	98.827.505,21	101.503.951,71	103.452.035,85
Cikadu	50.617.840,00	52.365.448,41	54.673.717,38	56.619.500,31	58.152.869,61	59.268.951,12
Tanggeung	68.964.240,00	71.750.492,97	74.913.254,70	77.579.342,52	79.680.346,27	81.209.587,42
Pasirkuda	52.321.920,00	54.306.047,04	56.699.857,59	58.717.748,83	60.307.942,90	61.465.385,00

Kecamatan	Eksisting	Proyeksi Kebutuhan Listrik Domestik (Kwh)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Kadupandak	72.482.560,00	75.099.770,74	78.410.168,64	81.200.708,13	83.399.785,71	85.000.411,07
Cijati	47.027.440,00	48.579.186,92	50.720.557,48	52.525.651,40	53.948.151,09	54.983.534,80
Takokak	70.885.920,00	73.027.937,39	76.247.008,87	78.960.563,67	81.098.973,65	82.655.441,38
Sukanagara	76.686.320,00	79.859.123,78	83.379.313,95	86.346.700,36	88.685.141,70	90.387.204,67
Pagelaran	103.829.200,00	107.817.705,15	112.570.309,59	116.576.574,34	119.733.701,12	122.031.654,26
Campaka	95.519.600,00	99.026.374,53	103.391.457,12	107.071.055,69	109.970.754,02	112.081.334,72
Campakamulya	32.660.400,00	33.608.655,21	35.090.124,73	36.338.947,18	37.323.078,55	38.039.390,54
Cibeber	184.258.240,00	192.050.854,46	200.516.456,13	207.652.636,28	213.276.284,98	217.369.526,10
Warungkondang	107.469.920,00	112.422.089,51	117.377.655,22	121.555.008,59	124.846.961,33	127.243.049,18
Gekbrong	84.175.840,00	88.022.203,04	91.902.221,75	95.172.929,92	97.750.403,21	99.626.448,49
Cilaku	162.854.560,00	170.588.392,09	178.107.928,42	184.446.611,48	189.441.794,61	193.077.599,43
Sukaluyu	124.535.200,00	131.083.946,96	136.862.127,34	141.732.913,59	145.571.324,35	148.365.158,32
Bojongpicung	115.134.880,00	120.220.782,99	125.520.115,10	129.987.250,48	133.507.565,20	136.069.869,09
Haurwangi	88.144.320,00	92.140.739,69	96.202.303,50	99.626.047,28	102.324.119,89	104.287.944,86
Ciranjang	122.621.680,00	128.209.347,98	133.860.816,04	138.624.788,62	142.379.025,15	145.111.591,88
Mande	112.575.360,00	117.583.523,41	122.766.605,13	127.135.745,84	130.578.836,11	133.084.931,24
Karangtengah	227.661.280,00	238.633.598,19	249.152.567,20	258.019.657,91	265.007.346,29	270.093.420,28
Cianjur	237.438.320,00	246.229.855,12	257.083.667,13	266.233.017,76	273.443.140,35	278.691.115,78
Cugenang	161.727.120,00	168.875.360,07	176.319.385,94	182.594.416,57	187.539.438,56	191.138.732,97
Pacet	152.755.200,00	159.130.483,51	166.144.955,22	172.057.888,04	176.717.559,76	180.109.158,51
Cipanas	155.624.800,00	161.354.493,30	168.466.999,37	174.462.571,41	179.187.366,77	182.626.366,55
Sukaresmi	125.668.080,00	130.843.815,33	136.611.410,71	141.473.274,20	145.304.653,41	148.093.369,38
Cikalongkulon	148.339.280,00	154.474.442,92	161.283.676,37	167.023.601,12	171.546.934,29	174.839.297,36

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Tabel 2.67. Proyeksi Kebutuhan Listrik Non-Domestik Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

Kecamatan	Eksisting	Proyeksi Kebutuhan Listik Non-Domestik (Kwh)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Agrabinta	11.119.088,00	11.538.324,76	12.046.934,11	12.475.672,45	12.813.538,61	13.059.458,61
Leles	8.600.912,00	8.859.740,21	9.250.277,55	9.579.485,68	9.838.917,31	10.027.747,78
Sindangbarang	16.083.088,00	16.728.797,83	17.466.203,24	18.087.807,95	18.577.661,96	18.934.208,17
Cidaun	19.040.544,00	19.724.858,73	20.594.330,51	21.327.262,13	21.904.847,05	22.325.249,25
Naringgul	12.971.680,00	13.412.747,57	14.003.981,49	14.502.369,18	14.895.122,35	15.180.992,51
Cibinong	17.606.288,00	18.280.439,06	19.086.240,82	19.765.501,04	20.300.790,34	20.690.407,17
Cikadu	10.123.568,00	10.473.089,68	10.934.743,48	11.323.900,06	11.630.573,92	11.853.790,22
Tanggeung	13.792.848,00	14.350.098,59	14.982.650,94	15.515.868,50	15.936.069,25	16.241.917,48
Pasirkuda	10.464.384,00	10.861.209,41	11.339.971,52	11.743.549,77	12.061.588,58	12.293.077,00
Kadupandak	14.496.512,00	15.019.954,15	15.682.033,73	16.240.141,63	16.679.957,14	17.000.082,21
Cijati	9.405.488,00	9.715.837,38	10.144.111,50	10.505.130,28	10.789.630,22	10.996.706,96
Takokak	14.177.184,00	14.605.587,48	15.249.401,77	15.792.112,73	16.219.794,73	16.531.088,28
Sukanagara	15.337.264,00	15.971.824,76	16.675.862,79	17.269.340,07	17.737.028,34	18.077.440,93
Pagelaran	20.765.840,00	21.563.541,03	22.514.061,92	23.315.314,87	23.946.740,22	24.406.330,85
Campaka	19.103.920,00	19.805.274,91	20.678.291,42	21.414.211,14	21.994.150,80	22.416.266,94
Campakamulya	6.532.080,00	6.721.731,04	7.018.024,95	7.267.789,44	7.464.615,71	7.607.878,11
Cibeber	36.851.648,00	38.410.170,89	40.103.291,23	41.530.527,26	42.655.257,00	43.473.905,22
Warungkondang	21.493.984,00	22.484.417,90	23.475.531,04	24.311.001,72	24.969.392,27	25.448.609,84
Gekbrong	16.835.168,00	17.604.440,61	18.380.444,35	19.034.585,98	19.550.080,64	19.925.289,70
Cilaku	32.570.912,00	34.117.678,42	35.621.585,68	36.889.322,30	37.888.358,92	38.615.519,89
Sukaluyu	24.907.040,00	26.216.789,39	27.372.425,47	28.346.582,72	29.114.264,87	29.673.031,66
Bojongpicung	23.026.976,00	24.044.156,60	25.104.023,02	25.997.450,10	26.701.513,04	27.213.973,82
Haurwangi	17.628.864,00	18.428.147,94	19.240.460,70	19.925.209,46	20.464.823,98	20.857.588,97
Ciranjang	24.524.336,00	25.641.869,60	26.772.163,21	27.724.957,72	28.475.805,03	29.022.318,38

Kecamatan	Eksisting	Proyeksi Kebutuhan Listik Non-Domestik (Kwh)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Mande	22.515.072,00	23.516.704,68	24.553.321,03	25.427.149,17	26.115.767,22	26.616.986,25
Karangtengah	45.532.256,00	47.726.719,64	49.830.513,44	51.603.931,58	53.001.469,26	54.018.684,06
Cianjur	47.487.664,00	49.245.971,02	51.416.733,43	53.246.603,55	54.688.628,07	55.738.223,16
Cugenang	32.345.424,00	33.775.072,01	35.263.877,19	36.518.883,31	37.507.887,71	38.227.746,59
Pacet	30.551.040,00	31.826.096,70	33.228.991,04	34.411.577,61	35.343.511,95	36.021.831,70
Cipanas	31.124.960,00	32.270.898,66	33.693.399,87	34.892.514,28	35.837.473,35	36.525.273,31
Sukaresmi	25.133.616,00	26.168.763,07	27.322.282,14	28.294.654,84	29.060.930,68	29.618.673,88
Cikalongkulon	29.667.856,00	30.894.888,58	32.256.735,27	33.404.720,22	34.309.386,86	34.967.859,47

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Meningkatnya kebutuhan listrik setiap tahunnya perlu diimbangi dengan kebutuhan gardu listrik. Berikut ini merupakan proyeksi kebutuhan gardu listrik di Kabupaten Cianjur.

Tabel 2.68. Proyeksi Kebutuhan Prasarana Gardu Listrik Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

Kecamatan	Eksisting	Proyeksi Kebutuhan Gardu Listrik (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Agrabinta	3	3	4	4	4	4
Leles	3	3	3	3	3	3
Sindangbarang	5	5	5	5	5	6
Cidaun	6	6	6	6	6	7
Naringgul	4	4	4	4	4	4
Cibinong	5	5	6	6	6	6
Cikadu	3	3	3	3	3	3
Tanggeung	4	4	4	5	5	5
Pasirkuda	3	3	3	3	4	4
Kadupandak	4	4	5	5	5	5
Cijati	3	3	3	3	3	3
Takokak	4	4	4	5	5	5
Sukanagara	5	5	5	5	5	5
Pagelaran	6	6	7	7	7	7
Campaka	6	6	6	6	6	7
Campakamulya	2	2	2	2	2	2
Cibeber	11	11	12	12	13	13
Warungkondang	6	7	7	7	7	7
Gekbrong	5	5	5	6	6	6
Cilaku	10	10	10	11	11	11
Sukaluyu	7	8	8	8	9	9
Bojongpicung	7	7	7	8	8	8
Haurwangi	5	5	6	6	6	6
Ciranjang	7	8	8	8	8	9
Mande	7	7	7	7	8	8
Karangtengah	13	14	15	15	16	16
Cianjur	14	14	15	16	16	16
Cugenang	10	10	10	11	11	11
Pacet	9	9	10	10	10	11
Cipanas	9	9	10	10	11	11
Sukaresmi	7	8	8	8	9	9
Cikalongkulon	9	9	9	10	10	10

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan proyeksi kebutuhan gardu, dapat dihitung proyeksi pemenuhan kebutuhan gardu yang menghitung selisih pemenuhan

berdasarkan tahun proyeksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69. Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Gardu Listrik Kabupaten Cianjur

Kecamatan	Proyeksi Pemenuhan Gardu Listrik (unit)				
	2025	2030	2035	2040	2045
Agrabinta	0	0	0	0	0
Leles	0	0	0	0	0
Sindangbarang	0	0	0	0	0
Cidaun	0	0	0	0	1
Naringgul	0	0	0	0	0
Cibinong	0	0	0	0	1
Cikadu	0	0	0	0	0
Tanggeung	0	0	0	0	0
Pasirkuda	0	0	0	0	0
Kadupandak	0	0	0	0	0
Cijati	0	0	0	0	0
Takokak	0	0	0	0	0
Sukanagara	0	0	0	0	0
Pagelaran	0	0	0	0	1
Campaka	0	0	0	0	1
Campakamulya	0	0	0	0	0
Cibeber	0	0	1	1	1
Warungkondang	0	0	1	0	1
Gekbrong	0	0	0	0	1
Cilaku	0	0	1	1	1
Sukaluyu	0	0	1	1	1
Bojongpicung	0	0	1	1	1
Haurwangi	0	0	0	0	1
Ciranjang	0	0	1	1	1
Mande	0	0	1	1	1
Karangtengah	1	1	1	1	1
Cianjur	1	1	1	1	1
Cugenang	0	0	1	1	1
Pacet	0	0	1	1	1
Cipanas	0	0	1	1	1
Sukaresmi	0	0	1	1	1
Cikalongkulon	0	0	1	1	1

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

2.6.2.4 Persampahan

Perhitungan persampahan di Kabupaten Cianjur dihitung dengan memproyeksikan timbulan sampah yang dihasilkan di Kabupaten Cianjur dengan asumsi timbulan sampah domestik berdasarkan SNI 2008-03242 yaitu 2,5 liter/orang/hari dan timbulan sampah non domestik yaitu 20 persen dari timbulan sampah domestik. Diketahui jumlah timbulan sampah di Kabupaten Cianjur yang telah difasilitasi pengolahan sampah adalah sebesar 35 persen dan rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mencapai 32,5 persen. Perhitungan mengenai persampahan ini juga dilakukan untuk

mengetahui jumlah sarana persampahan yang harus disediakan untuk menampung timbunan sampah di Kabupaten Cianjur. Untuk lebih jelasnya mengenai timubulan sampah dan kebutuhan sarana persampahan di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.70. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

Kec	Uraian	Satuan	Eksisting	Tahun				
				2025	2030	2035	2040	2045
Agrabinta	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**40.879**	**42.420**	**44.290**	**45.866**	**47.109**	**48.013**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**19.622**	**20.362**	**21.259**	**22.016**	**22.612**	**23.046**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	131	136	142	147	151	154
	Komposter komunal	jiwa	327	339	354	367	377	384
	Gerobak sampah bersekat	unit	31	32	33	34	35	36
	Container amroll truk	unit	6	6	7	7	7	7
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	8	8	9	9	9	9
	Tipe 2	jiwa	1	1	1	1	1	1
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	7	7	7	7	8	8
Leles	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**31.621**	**32.573**	**34.008**	**35.219**	**36.172**	**36.867**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**15.178**	**15.635**	**16.324**	**16.905**	**17.363**	**17.696**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	101	104	109	113	116	118
	Komposter komunal	jiwa	253	261	272	282	289	295
	Gerobak sampah bersekat	unit	24	24	26	26	27	28
	Container amroll truk	unit	5	5	5	5	5	6
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	6	6	7	7	7	7
	Tipe 2	jiwa	1	1	1	1	1	1
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	5	5	5	6	6	6
Sindangbarang	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**59.129**	**61.503**	**64.214**	**66.499**	**68.300**	**69.611**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**28.382**	**29.521**	**30.823**	**31.920**	**32.784**	**33.413**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	189	197	205	213	219	223
	Komposter komunal	jiwa	473	492	514	532	546	557
	Gerobak sampah bersekat	unit	44	46	48	50	51	52
	Container amroll truk	unit	9	9	10	10	10	10
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	11	12	12	13	13	13
	Tipe 2	jiwa	1	1	1	1	1	1
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	9	10	10	11	11	11
Cidaun	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**70.002**	**72.518**	**75.714**	**78.409**	**80.533**	**82.078**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**33.601**	**34.809**	**36.343**	**37.636**	**38.656**	**39.397**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	224	232	242	251	258	263
	Komposter komunal	jiwa	560	580	606	627	644	657
	Gerobak sampah bersekat	unit	53	54	57	59	60	62
	Container amroll truk	unit	11	11	11	12	12	12
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	13	14	15	15	15	16
	Tipe 2	jiwa	1	1	1	1	1	1

Kec	Uraian	Satuan	Eksisting	Tahun				
				2025	2030	2035	2040	2045
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	11	12	12	13	13	13
Naringgul	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**47.690**	**49.312**	**51.485**	**53.318**	**54.761**	**55.812**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**22.891**	**23.670**	**24.713**	**25.592**	**26.286**	**26.790**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	153	158	165	171	175	179
	Komposter komunal	jiwa	382	394	412	427	438	446
	Gerobak sampah bersekat	unit	36	37	39	40	41	42
	Container amroll truk	unit	7	7	8	8	8	8
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	9	9	10	10	11	11
	Tipe 2	jiwa	1	1	1	1	1	1
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	8	8	8	9	9	9
Cibinong	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**64.729**	**67.207**	**70.170**	**72.667**	**74.635**	**76.068**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**31.070**	**32.260**	**33.682**	**34.880**	**35.825**	**36.512**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	207	215	225	233	239	243
	Komposter komunal	jiwa	518	538	561	581	597	609
	Gerobak sampah bersekat	unit	49	50	53	55	56	57
	Container amroll truk	unit	10	10	11	11	11	11
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	12	13	13	14	14	15
	Tipe 2	jiwa	1	1	1	1	1	1
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	10	11	11	12	12	12
Cikadu	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**37.219**	**38.504**	**40.201**	**41.632**	**42.759**	**43.580**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**17.865**	**18.482**	**19.297**	**19.983**	**20.525**	**20.918**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	119	123	129	133	137	139
	Komposter komunal	jiwa	298	308	322	333	342	349
	Gerobak sampah bersekat	unit	28	29	30	31	32	33
	Container amroll truk	unit	6	6	6	6	6	7
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	7	7	8	8	8	8
	Tipe 2	jiwa	1	1	1	1	1	1
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	6	6	6	7	7	7
Tanggeung	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**50.709**	**52.758**	**55.083**	**57.044**	**58.588**	**59.713**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**24.340**	**25.324**	**26.440**	**27.381**	**28.122**	**28.662**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	162	169	176	183	187	191
	Komposter komunal	jiwa	406	422	441	456	469	478
	Gerobak sampah bersekat	unit	38	40	41	43	44	45
	Container amroll truk	unit	8	8	8	9	9	9
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	10	10	11	11	11	11
	Tipe 2	jiwa	1	1	1	1	1	1
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	8	8	9	9	9	10
Pasirkuda	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**38.472**	**39.931**	**41.691**	**43.175**	**44.344**	**45.195**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**18.467**	**19.167**	**20.012**	**20.724**	**21.285**	**21.694**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	123	128	133	138	142	145
	Komposter komunal	jiwa	308	319	334	345	355	362

Kec	Uraian	Satuan	Eksisting	Tahun				
				2025	2030	2035	2040	2045
	Gerobak sampah bersekat	unit	29	30	31	32	33	34
	Container amroll truk	unit	6	6	6	6	7	7
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	7	8	8	8	9	9
	Tipe 2	jiwa	1	1	1	1	1	1
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	6	6	7	7	7	7
Kadupandak	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**53.296**	**55.220**	**57.655**	**59.706**	**61.323**	**62.500**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**25.582**	**26.506**	**27.674**	**28.659**	**29.435**	**30.000**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	171	177	184	191	196	200
	Komposter komunal	jiwa	426	442	461	478	491	500
	Gerobak sampah bersekat	unit	40	41	43	45	46	47
	Container amroll truk	unit	8	8	9	9	9	9
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	10	11	11	11	12	12
	Tipe 2	jiwa	1	1	1	1	1	1
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	9	9	9	10	10	10
Cijati	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**34.579**	**35.720**	**37.295**	**38.622**	**39.668**	**40.429**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**16.598**	**17.146**	**17.901**	**18.538**	**19.041**	**19.406**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	111	114	119	124	127	129
	Komposter komunal	jiwa	277	286	298	309	317	323
	Gerobak sampah bersekat	unit	26	27	28	29	30	30
	Container amroll truk	unit	5	5	6	6	6	6
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	7	7	7	7	8	8
	Tipe 2	jiwa	1	1	1	1	1	1
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	6	6	6	6	6	6
Takokak	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**52.122**	**53.697**	**56.064**	**58.059**	**59.632**	**60.776**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**25.019**	**25.775**	**26.911**	**27.868**	**28.623**	**29.173**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	167	172	179	186	191	194
	Komposter komunal	jiwa	417	430	449	464	477	486
	Gerobak sampah bersekat	unit	39	40	42	44	45	46
	Container amroll truk	unit	8	8	8	9	9	9
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	10	10	11	11	11	12
	Tipe 2	jiwa	1	1	1	1	1	1
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	8	9	9	9	10	10
Sukanagara	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**56.387**	**58.720**	**61.308**	**63.490**	**65.210**	**66.461**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**27.066**	**28.186**	**29.428**	**30.475**	**31.301**	**31.901**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	180	188	196	203	209	213
	Komposter komunal	jiwa	451	470	490	508	522	532
	Gerobak sampah bersekat	unit	42	44	46	48	49	50
	Container amroll truk	unit	8	9	9	10	10	10
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	11	11	12	12	13	13
	Tipe 2	jiwa	1	1	1	1	1	1

Kec	Uraian	Satuan	Eksisting	Tahun				
				2025	2030	2035	2040	2045
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	9	9	10	10	10	11
Pagelaran	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**76.345**	**79.278**	**82.772**	**85.718**	**88.039**	**89.729**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**36.646**	**38.053**	**39.731**	**41.145**	**42.259**	**43.070**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	244	254	265	274	282	287
	Komposter komunal	jiwa	611	634	662	686	704	718
	Gerobak sampah bersekat	unit	57	59	62	64	66	67
	Container amroll truk	unit	11	12	12	13	13	13
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	15	15	16	16	17	17
	Tipe 2	jiwa	1	1	1	1	1	1
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	12	13	13	14	14	14
Campaka	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**70.235**	**72.814**	**76.023**	**78.729**	**80.861**	**82.413**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**33.713**	**34.950**	**36.491**	**37.790**	**38.813**	**39.558**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	225	233	243	252	259	264
	Komposter komunal	jiwa	562	583	608	630	647	659
	Gerobak sampah bersekat	unit	53	55	57	59	61	62
	Container amroll truk	unit	11	11	11	12	12	12
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	13	14	15	15	16	16
	Tipe 2	jiwa	1	1	1	1	1	1
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	11	12	12	13	13	13
Campakamulya	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**24.015**	**24.712**	**25.802**	**26.720**	**27.443**	**27.970**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**11.527**	**11.862**	**12.385**	**12.826**	**13.173**	**13.426**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	77	79	83	86	88	90
	Komposter komunal	jiwa	192	198	206	214	220	224
	Gerobak sampah bersekat	unit	18	19	19	20	21	21
	Container amroll truk	unit	4	4	4	4	4	4
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	5	5	5	5	5	5
	Tipe 2	jiwa	0	0	0	0	0	0
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	4	4	4	4	4	4
Cibeber	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**135.484**	**141.214**	**147.439**	**152.686**	**156.821**	**159.831**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**65.032**	**67.783**	**70.771**	**73.289**	**75.274**	**76.719**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	434	452	472	489	502	511
	Komposter komunal	jiwa	1.084	1.130	1.180	1.221	1.255	1.279
	Gerobak sampah bersekat	unit	102	106	111	115	118	120
	Container amroll truk	unit	20	21	22	23	24	24
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	26	27	28	29	30	31
	Tipe 2	jiwa	2	2	2	2	3	3
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	22	23	24	24	25	26
Warungkondang	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**79.022**	**82.663**	**86.307**	**89.379**	**91.799**	**93.561**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**37.931**	**39.678**	**41.427**	**42.902**	**44.064**	**44.909**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	253	265	276	286	294	299
	Komposter komunal	jiwa	632	661	690	715	734	748

Kec	Uraian	Satuan	Eksisting	Tahun				
				2025	2030	2035	2040	2045
	Gerobak sampah bersekat	unit	59	62	65	67	69	70
	Container amroll truk	unit	12	12	13	13	14	14
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	15	16	17	17	18	18
	Tipe 2	jiwa	1	1	1	1	1	1
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	13	13	14	14	15	15
Gekbrong	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**61.894**	**64.722**	**67.575**	**69.980**	**71.875**	**73.255**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**29.709**	**31.067**	**32.436**	**33.590**	**34.500**	**35.162**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	198	207	216	224	230	234
	Komposter komunal	jiwa	495	518	541	560	575	586
	Gerobak sampah bersekat	unit	46	49	51	52	54	55
	Container amroll truk	unit	9	10	10	10	11	11
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	12	12	13	13	14	14
	Tipe 2	jiwa	1	1	1	1	1	1
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	10	10	11	11	12	12
Cilaku	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**119.746**	**125.433**	**130.962**	**135.623**	**139.295**	**141.969**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**57.478**	**60.208**	**62.862**	**65.099**	**66.862**	**68.145**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	383	401	419	434	446	454
	Komposter komunal	jiwa	958	1.003	1.048	1.085	1.114	1.136
	Gerobak sampah bersekat	unit	90	94	98	102	104	106
	Container amroll truk	unit	18	19	20	20	21	21
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	23	24	25	26	27	27
	Tipe 2	jiwa	2	2	2	2	2	2
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	19	20	21	22	22	23
Sukaluyu	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**91.570**	**96.385**	**100.634**	**104.215**	**107.038**	**109.092**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**43.954**	**46.265**	**48.304**	**50.023**	**51.378**	**52.364**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	293	308	322	333	343	349
	Komposter komunal	jiwa	733	771	805	834	856	873
	Gerobak sampah bersekat	unit	69	72	75	78	80	82
	Container amroll truk	unit	14	14	15	16	16	16
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	18	19	19	20	21	21
	Tipe 2	jiwa	1	2	2	2	2	2
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	15	15	16	17	17	17
Bojongpicung	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**84.658**	**88.398**	**92.294**	**95.579**	**98.167**	**100.051**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**40.636**	**42.431**	**44.301**	**45.878**	**47.120**	**48.025**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	271	283	295	306	314	320
	Komposter komunal	jiwa	677	707	738	765	785	800
	Gerobak sampah bersekat	unit	63	66	69	72	74	75
	Container amroll truk	unit	13	13	14	14	15	15
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	16	17	18	18	19	19
	Tipe 2	jiwa	1	1	1	2	2	2

Kec	Uraian	Satuan	Eksisting	Tahun				
				2025	2030	2035	2040	2045
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	14	14	15	15	16	16
Haurwangi	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**64.812**	**67.751**	**70.737**	**73.254**	**75.238**	**76.682**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**31.110**	**32.520**	**33.954**	**35.162**	**36.114**	**36.808**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	207	217	226	234	241	245
	Komposter komunal	jiwa	518	542	566	586	602	613
	Gerobak sampah bersekat	unit	49	51	53	55	56	58
	Container amroll truk	unit	10	10	11	11	11	12
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	12	13	14	14	14	15
	Tipe 2	jiwa	1	1	1	1	1	1
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	10	11	11	12	12	12
Ciranjang	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**90.163**	**94.272**	**98.427**	**101.930**	**104.690**	**106.700**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**43.278**	**45.250**	**47.245**	**48.926**	**50.251**	**51.216**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	289	302	315	326	335	341
	Komposter komunal	jiwa	721	754	787	815	838	854
	Gerobak sampah bersekat	unit	68	71	74	76	79	80
	Container amroll truk	unit	14	14	15	15	16	16
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	17	18	19	20	20	20
	Tipe 2	jiwa	1	2	2	2	2	2
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	14	15	16	16	17	17
Mande	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**82.776**	**86.458**	**90.270**	**93.482**	**96.014**	**97.857**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**39.732**	**41.500**	**43.329**	**44.871**	**46.087**	**46.971**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	265	277	289	299	307	313
	Komposter komunal	jiwa	662	692	722	748	768	783
	Gerobak sampah bersekat	unit	62	65	68	70	72	73
	Container amroll truk	unit	12	13	14	14	14	15
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	16	17	17	18	18	19
	Tipe 2	jiwa	1	1	1	1	2	2
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	13	14	14	15	15	16
Karangtengah	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**167.398**	**175.466**	**183.200**	**189.720**	**194.858**	**198.598**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**80.351**	**84.224**	**87.936**	**91.066**	**93.532**	**95.327**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	536	561	586	607	624	636
	Komposter komunal	jiwa	1.339	1.404	1.466	1.518	1.559	1.589
	Gerobak sampah bersekat	unit	126	132	137	142	146	149
	Container amroll truk	unit	25	26	27	28	29	30
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	32	34	35	36	37	38
	Tipe 2	jiwa	3	3	3	3	3	3
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	27	28	29	30	31	32
Cianjur	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**174.587**	**181.051**	**189.032**	**195.760**	**201.061**	**204.920**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**83.802**	**86.905**	**90.735**	**93.965**	**96.509**	**98.362**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	559	579	605	626	643	656
	Komposter komunal	jiwa	1.397	1.448	1.512	1.566	1.608	1.639

Kec	Uraian	Satuan	Eksisting	Tahun				
				2025	2030	2035	2040	2045
	Gerobak sampah bersekat	unit	131	136	142	147	151	154
	Container amroll truk	unit	26	27	28	29	30	31
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	34	35	36	38	39	39
	Tipe 2	jiwa	3	3	3	3	3	3
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	28	29	30	31	32	33
Cugenang	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**118.917**	**124.173**	**129.647**	**134.261**	**137.897**	**140.543**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**57.080**	**59.603**	**62.230**	**64.445**	**66.190**	**67.461**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	381	397	415	430	441	450
	Komposter komunal	jiwa	951	993	1.037	1.074	1.103	1.124
	Gerobak sampah bersekat	unit	89	93	97	101	103	105
	Container amroll truk	unit	18	19	19	20	21	21
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	23	24	25	26	26	27
	Tipe 2	jiwa	2	2	2	2	2	2
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	19	20	21	21	22	22
Pacet	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**112.320**	**117.008**	**122.165**	**126.513**	**129.939**	**132.433**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**53.914**	**56.164**	**58.639**	**60.726**	**62.371**	**63.568**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	359	374	391	405	416	424
	Komposter komunal	jiwa	899	936	977	1.012	1.040	1.059
	Gerobak sampah bersekat	unit	84	88	92	95	97	99
	Container amroll truk	unit	17	18	18	19	19	20
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	22	22	23	24	25	25
	Tipe 2	jiwa	2	2	2	2	2	2
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	18	19	20	20	21	21
Cipanas	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**114.430**	**118.643**	**123.873**	**128.281**	**131.755**	**134.284**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**54.926**	**56.949**	**59.459**	**61.575**	**63.243**	**64.456**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	366	380	396	411	422	430
	Komposter komunal	jiwa	915	949	991	1.026	1.054	1.074
	Gerobak sampah bersekat	unit	86	89	93	96	99	101
	Container amroll truk	unit	17	18	19	19	20	20
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	22	23	24	25	25	26
	Tipe 2	jiwa	2	2	2	2	2	2
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	18	19	20	21	21	21
Sukaresmi	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**92.403**	**96.209**	**100.450**	**104.024**	**106.842**	**108.892**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**44.353**	**46.180**	**48.216**	**49.932**	**51.284**	**52.268**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	296	308	321	333	342	348
	Komposter komunal	jiwa	739	770	804	832	855	871
	Gerobak sampah bersekat	unit	69	72	75	78	80	82
	Container amroll truk	unit	14	14	15	16	16	16
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	18	18	19	20	21	21
	Tipe 2	jiwa	1	2	2	2	2	2

Kec	Uraian	Satuan	Eksisting	Tahun				
				2025	2030	2035	2040	2045
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	15	15	16	17	17	17
Cikalongkulon	**Jumlah penduduk**	**jiwa**	**109.073**	**113.584**	**118.591**	**122.811**	**126.137**	**128.558**
	Timbulan Sampah	**L/org/hari**	**52.355**	**54.520**	**56.924**	**58.950**	**60.546**	**61.708**
	Sarana TPST							
	Wadah komunal	jiwa	349	363	379	393	404	411
	Komposter komunal	jiwa	873	909	949	982	1.009	1.028
	Gerobak sampah bersekat	unit	82	85	89	92	95	96
	Container amroll truk	unit	16	17	18	18	19	19
	TPS							
	Tipe 1	jiwa	21	22	23	24	24	25
	Tipe 2	jiwa	2	2	2	2	2	2
	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	jiwa	17	18	19	20	20	21

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

2.6.2.5 Fasilitas Kesehatan

Perhitungan kebutuhan dan tingkat pelayanan fasilitas kesehatan dilakukan untuk mengetahui tingkat pelayanan dalam memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan yang dilakukan berdasarkan standar dalam SNI-03–1733–2004 mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di perkotaan yang disesuaikan dengan kondisi eksisting di Kabupaten Cianjur. Tingkat kebutuhan sarana digunakan untuk menghitung atau mengetahui tingkat kebutuhan untuk memenuhi kualitas yang ada dan kebutuhan dalam kehidupan dalam 20 tahun mendatang (2025-2045). Untuk menghitung proyeksi akan kebutuhan sarana di masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pelayanan dan kebutuhan sarana kesehatan di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.71. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Jumlah Standar Penduduk (Jiwa)	Radius Penc apaian (m2)	Eksisting (unit)	Jumlah Yang Seharusnya Ada	Tingkat Pelayanan	Proyeksi Sarana (Unit)				
							2025	2030	2035	2040	2045
Agrabinta	Posyandu	1.250	500	54	33	sangat tinggi	34	35	37	38	38
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	7	16	rendah	17	18	18	19	19
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	1	rendah	1	1	2	2	2
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	1	1	tinggi	1	1	2	2	2
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	1	0	sangat tinggi	0	0	0	0	0
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	8	rendah	8	9	9	9	10
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	2	1	sangat tinggi	1	1	2	2	2
	Rumah sakit	120.000	-	0	0	tinggi	0	0	0	0	0
Leles	Posyandu	1.250	500	58	25	sangat tinggi	26	27	28	29	29
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	0	13	rendah	13	14	14	14	15
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	1	rendah	1	1	1	1	1
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	2	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	1	0	sangat tinggi	0	0	0	0	0
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	6	rendah	7	7	7	7	7
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	3	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Rumah sakit	120.000	-	0	0	tinggi	0	0	0	0	0
Sindangbarang	Posyandu	1.250	500	74	47	sangat tinggi	49	51	53	55	56
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	8	24	rendah	25	26	27	27	28
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	2	rendah	2	2	2	2	2
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	3	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Jumlah Standar Penduduk (Jiwa)	Radius Penc apaian (m2)	Eksisting (unit)	Jumlah Yang Seharusnya Ada	Tingkat Pelayanan	Proyeksi Sarana (Unit)				
							2025	2030	2035	2040	2045
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	1	0	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	12	rendah	12	13	13	14	14
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	2	2	tinggi	2	2	2	2	2
	Rumah sakit	120.000	-	0	0	tinggi	1	1	1	1	1
Cidaun	Posyandu	1.250	500	94	56	sangat tinggi	58	61	63	64	66
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	1	28	rendah	29	30	31	32	33
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	2	rendah	2	3	3	3	3
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	3	2	sangat tinggi	2	3	3	3	3
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	2	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	14	rendah	15	15	16	16	16
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	1	2	sedang	2	3	3	3	3
	Rumah sakit	120.000	-	0	1	rendah	1	1	1	1	1
Naringgul	Posyandu	1.250	500	82	38	sangat tinggi	39	41	43	44	45
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	1	19	rendah	20	21	21	22	22
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	2	rendah	2	2	2	2	2
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	4	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	1	0	sangat tinggi	0	0	0	0	0
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	10	rendah	10	10	11	11	11
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	2	2	tinggi	2	2	2	2	2
	Rumah sakit	120.000	-	0	0	tinggi	0	0	0	0	0
Cibinong	Posyandu	1.250	500	84	52	sangat tinggi	54	56	58	60	61
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	0	26	rendah	27	28	29	30	30
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	2	rendah	2	2	2	2	3

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Jumlah Standar Penduduk (Jiwa)	Radius Penc apaian (m2)	Eksisting (unit)	Jumlah Yang Seharusnya Ada	Tingkat Pelayanan	Proyeksi Sarana (Unit)				
							2025	2030	2035	2040	2045
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	5	2	sangat tinggi	2	2	2	2	3
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	2	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	13	rendah	13	14	15	15	15
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	2	2	tinggi	2	2	2	2	3
	Rumah sakit	120.000	-	0	1	rendah	1	1	1	1	1
Cikadu	Posyandu	1.250	500	58	30	sangat tinggi	31	32	33	34	35
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	2	15	rendah	15	16	17	17	17
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	1	rendah	1	1	1	1	1
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	3	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	2	0	sangat tinggi	0	0	0	0	0
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	7	rendah	8	8	8	9	9
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	1	1	tinggi	1	1	1	1	1
	Rumah sakit	120.000	-	0	0	tinggi	0	0	0	0	0
Tanggeung	Posyandu	1.250	500	68	41	sangat tinggi	42	44	46	47	48
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	0	20	rendah	21	22	23	23	24
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	2	rendah	2	2	2	2	2
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	4	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	1	0	sangat tinggi	0	0	0	0	0
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	10	rendah	11	11	11	12	12
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	1	2	sedang	2	2	2	2	2
	Rumah sakit	120.000	-	0	0	tinggi	0	0	0	0	0
Pasirkuda	Posyandu	1.250	500	50	31	sangat tinggi	32	33	35	35	36

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Jumlah Standar Penduduk (Jiwa)	Radius Penc apaian (m2)	Eksisting (unit)	Jumlah Yang Seharusnya Ada	Tingkat Pelayanan	Proyeksi Sarana (Unit)				
							2025	2030	2035	2040	2045
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	0	15	rendah	16	17	17	18	18
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	1	rendah	1	1	1	1	2
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	3	1	sangat tinggi	1	1	1	1	2
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	1	0	sangat tinggi	0	0	0	0	0
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	8	rendah	8	8	9	9	9
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	2	1	sangat tinggi	1	1	1	1	2
	Rumah sakit	120.000	-	0	0	tinggi	0	0	0	0	0
Kadupandak	Posyandu	1.250	500	84	43	sangat tinggi	44	46	48	49	50
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	1	21	rendah	22	23	24	25	25
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	2	rendah	2	2	2	2	2
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	3	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	1	0	sangat tinggi	0	0	0	1	1
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	11	rendah	11	12	12	12	13
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	1	2	sedang	2	2	2	2	2
	Rumah sakit	120.000	-	0	0	tinggi	0	0	0	1	1
Cijati	Posyandu	1.250	500	51	28	sangat tinggi	29	30	31	32	32
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	7	14	rendah	14	15	15	16	16
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	1	rendah	1	1	1	1	1
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	2	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	2	0	sangat tinggi	0	0	0	0	0
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	7	rendah	7	7	8	8	8

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Jumlah Standar Penduduk (Jiwa)	Radius Penc apaian (m2)	Eksisting (unit)	Jumlah Yang Seharusnya Ada	Tingkat Pelayanan	Proyeksi Sarana (Unit)				
							2025	2030	2035	2040	2045
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	1	1	tinggi	1	1	1	1	1
	Rumah sakit	120.000	-	0	0	tinggi	0	0	0	0	0
Takokak	Posyandu	1.250	500	72	42	sangat tinggi	43	45	46	48	49
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	0	21	rendah	21	22	23	24	24
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	2	rendah	2	2	2	2	2
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	4	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	1	0	sangat tinggi	0	0	0	0	1
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	10	rendah	11	11	12	12	12
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	0	2	rendah	2	2	2	2	2
	Rumah sakit	120.000	-	0	0	tinggi	0	0	0	0	1
Sukanagara	Posyandu	1.250	500	71	45	sangat tinggi	47	49	51	52	53
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	1	23	rendah	23	25	25	26	27
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	2	rendah	2	2	2	2	2
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	5	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	1	0	sangat tinggi	0	1	1	1	1
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	11	sangat tinggi	12	12	13	13	13
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	2	2	tinggi	2	2	2	2	2
	Rumah sakit	120.000	-	0	0	tinggi	0	1	1	1	1
Pagelaran	Posyandu	1.250	500	107	61	sangat tinggi	63	66	69	70	72
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	2	31	rendah	32	33	34	35	36
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	3	rendah	3	3	3	3	3
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	2	3	sedang	3	3	3	3	3

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Jumlah Standar Penduduk (Jiwa)	Radius Penc apaian (m2)	Eksisting (unit)	Jumlah Yang Seharusnya Ada	Tingkat Pelayanan	Proyeksi Sarana (Unit)				
							2025	2030	2035	2040	2045
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	2	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	15	rendah	16	17	17	18	18
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	2	3	sedang	3	3	3	3	3
	Rumah sakit	120.000	-	1	1	tinggi	1	1	1	1	1
Campaka	Posyandu	1.250	500	83	56	sangat tinggi	58	61	63	65	66
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	3	28	rendah	29	30	31	32	33
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	2	rendah	2	3	3	3	3
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	4	2	sangat tinggi	2	3	3	3	3
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	1	1	tinggi	1	1	1	1	1
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	14	rendah	15	15	16	16	16
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	1	2	sedang	2	3	3	3	3
	Rumah sakit	120.000	-	0	1	rendah	1	1	1	1	1
Campakamulya	Posyandu	1.250	500	47	19	sangat tinggi	20	21	21	22	22
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	1	10	rendah	10	10	11	11	11
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	1	rendah	1	1	1	1	1
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	4	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	1	0	sangat tinggi	0	0	0	0	0
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	5	rendah	5	5	5	5	6
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	1	1	tinggi	1	1	1	1	1
	Rumah sakit	120.000	-	0	0	tinggi	0	0	0	0	0
Cibeber	Posyandu	1.250	500	153	108	sangat tinggi	113	118	122	125	128
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	3	54	rendah	56	59	61	63	64
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	5	rendah	5	5	5	5	5

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Jumlah Standar Penduduk (Jiwa)	Radius Penc apaian (m2)	Eksisting (unit)	Jumlah Yang Seharusnya Ada	Tingkat Pelayanan	Proyeksi Sarana (Unit)				
							2025	2030	2035	2040	2045
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	6	5	sangat tinggi	5	5	5	5	5
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	2	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	27	rendah	28	29	31	31	32
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	6	5	sangat tinggi	5	5	5	5	5
	Rumah sakit	120.000	-	0	1	rendah	1	1	1	1	1
Warungkondang	Posyandu	1.250	500	80	63	sangat tinggi	66	69	72	73	75
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	3	32	rendah	33	35	36	37	37
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	3	rendah	3	3	3	3	3
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	2	3	sedang	3	3	3	3	3
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	1	1	tinggi	1	1	1	1	1
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	16	rendah	17	17	18	18	19
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	2	3	sedang	3	3	3	3	3
	Rumah sakit	120.000	-	0	1	rendah	1	1	1	1	1
Gekbrong	Posyandu	1.250	500	61	50	sangat tinggi	52	54	56	58	59
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	1	25	rendah	26	27	28	29	29
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	2	rendah	2	2	2	2	2
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	1	2	sedang	2	2	2	2	2
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	1	1	tinggi	1	1	1	1	1
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	12	rendah	13	14	14	14	15
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	1	2	sedang	2	2	2	2	2
	Rumah sakit	120.000	-	0	1	rendah	1	1	1	1	1
Cilaku	Posyandu	1.250	500	115	96	sangat tinggi	100	105	108	111	114

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Jumlah Standar Penduduk (Jiwa)	Radius Penc apaian (m2)	Eksisting (unit)	Jumlah Yang Seharusnya Ada	Tingkat Pelayanan	Proyeksi Sarana (Unit)				
							2025	2030	2035	2040	2045
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	3	48	rendah	50	52	54	56	57
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	4	rendah	4	4	5	5	5
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	6	4	sangat tinggi	4	4	5	5	5
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	1	1	tinggi	1	1	1	1	1
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	24	rendah	25	26	27	28	28
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	4	4	tinggi	4	4	5	5	5
	Rumah sakit	120.000	-	0	1	rendah	1	1	1	1	1
Sukaluyu	Posyandu	1.250	500	100	73	sangat tinggi	77	81	83	86	87
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	0	37	rendah	39	40	42	43	44
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	3	rendah	3	3	3	4	4
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	5	3	sangat tinggi	3	3	3	4	4
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	1	1	tinggi	1	1	1	1	1
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	18	rendah	19	20	21	21	22
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	4	3	sangat tinggi	3	3	3	4	4
	Rumah sakit	120.000	-	0	1	rendah	1	1	1	1	1
Bojongherang	Posyandu	1.250	500	82	68	sangat tinggi	71	74	76	79	80
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	1	34	rendah	35	37	38	39	40
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	3	rendah	3	3	3	3	3
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	5	3	sangat tinggi	3	3	3	3	3
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	2	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	17	rendah	18	18	19	20	20

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Jumlah Standar Penduduk (Jiwa)	Radius Penc apaian (m2)	Eksisting (unit)	Jumlah Yang Seharusnya Ada	Tingkat Pelayanan	Proyeksi Sarana (Unit)				
							2025	2030	2035	2040	2045
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	3	3	tinggi	3	3	3	3	3
	Rumah sakit	120.000	-	0	1	rendah	1	1	1	1	1
Haurwangi	Posyandu	1.250	500	85	52	sangat tinggi	54	57	59	60	61
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	0	26	rendah	27	28	29	30	31
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	2	rendah	2	2	2	3	3
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	3	2	sangat tinggi	2	2	2	3	3
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	1	1	tinggi	1	1	1	1	1
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	13	rendah	14	14	15	15	15
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	3	2	sangat tinggi	2	2	2	3	3
	Rumah sakit	120.000	-	0	1	rendah	1	1	1	1	1
Ciranjang	Posyandu	1.250	500	95	72	sangat tinggi	75	79	82	84	85
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	3	36	rendah	38	39	41	42	43
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	3	rendah	3	3	3	3	4
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	4	3	sangat tinggi	3	3	3	3	4
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	1	1	tinggi	1	1	1	1	1
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	18	rendah	19	20	20	21	21
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	3	3	tinggi	3	3	3	3	4
	Rumah sakit	120.000	-	0	1	rendah	1	1	1	1	1
Mande	Posyandu	1.250	500	98	66	sangat tinggi	69	72	75	77	78
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	2	33	rendah	35	36	37	38	39
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	3	rendah	3	3	3	3	3
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	3	3	tinggi	3	3	3	3	3

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Jumlah Standar Penduduk (Jiwa)	Radius Penc apaian (m2)	Eksisting (unit)	Jumlah Yang Seharusnya Ada	Tingkat Pelayanan	Proyeksi Sarana (Unit)				
							2025	2030	2035	2040	2045
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	2	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	17	rendah	17	18	19	19	20
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	3	3	tinggi	3	3	3	3	3
	Rumah sakit	120.000	-	0	1	rendah	1	1	1	1	1
Karangtengah	Posyandu	1.250	500	161	134	sangat tinggi	140	147	152	156	159
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	8	67	rendah	70	73	76	78	79
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	6	rendah	6	6	6	6	7
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	7	6	sangat tinggi	6	6	6	6	7
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	2	1	sangat tinggi	1	2	2	2	2
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	33	rendah	35	37	38	39	40
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	10	6	sangat tinggi	6	6	6	6	7
	Rumah sakit	120.000	-	1	1	tinggi	1	2	2	2	2
Cianjur	Posyandu	1.250	500	188	140	sangat tinggi	145	151	157	161	164
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	6	70	rendah	72	76	78	80	82
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	6	rendah	6	6	7	7	7
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	4	6	rendah	6	6	7	7	7
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	3	1	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	35	rendah	36	38	39	40	41
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	9	6	sangat tinggi	6	6	7	7	7
	Rumah sakit	120.000	-	3	1	sangat tinggi	2	2	2	2	2
Cugenang	Posyandu	1.250	500	133	95	sangat tinggi	99	104	107	110	112
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	0	48	rendah	50	52	54	55	56
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	4	rendah	4	4	4	5	5

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Jumlah Standar Penduduk (Jiwa)	Radius Penc apaian (m2)	Eksisting (unit)	Jumlah Yang Seharusnya Ada	Tingkat Pelayanan	Proyeksi Sarana (Unit)				
							2025	2030	2035	2040	2045
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	7	4	sangat tinggi	4	4	4	5	5
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	2	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	24	rendah	25	26	27	28	28
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	3	4	sedang	4	4	4	5	5
	Rumah sakit	120.000	-	0	1	rendah	1	1	1	1	1
Pacet	Posyandu	1.250	500	103	90	sangat tinggi	94	98	101	104	106
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	3	45	rendah	47	49	51	52	53
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	4	rendah	4	4	4	4	4
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	3	4	sedang	4	4	4	4	4
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	2	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	22	rendah	23	24	25	26	26
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	4	4	tinggi	4	4	4	4	4
	Rumah sakit	120.000	-	0	1	rendah	1	1	1	1	1
Cipanas	Posyandu	1.250	500	130	92	sangat tinggi	95	99	103	105	107
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	5	46	rendah	47	50	51	53	54
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	4	rendah	4	4	4	4	4
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	2	4	rendah	4	4	4	4	4
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	0	1	rendah	1	1	1	1	1
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	1	23	rendah	24	25	26	26	27
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	3	4	sedang	4	4	4	4	4
	Rumah sakit	120.000	-	1	1	tinggi	1	1	1	1	1
Sukaresmi	Posyandu	1.250	500	97	74	sangat tinggi	77	80	83	85	87

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Jumlah Standar Penduduk (Jiwa)	Radius Penc apaian (m2)	Eksisting (unit)	Jumlah Yang Seharusnya Ada	Tingkat Pelayanan	Proyeksi Sarana (Unit)				
							2025	2030	2035	2040	2045
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	6	37	rendah	38	40	42	43	44
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	3	rendah	3	3	3	4	4
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	3	3	tinggi	3	3	3	4	4
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	2	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	18	rendah	19	20	21	21	22
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	2	3	sedang	3	3	3	4	4
	Rumah sakit	120.000	-	0	1	rendah	1	1	1	1	1
Cikalongkulon	Posyandu	1.250	500	107	87	sangat tinggi	91	95	98	101	103
	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000	1	44	rendah	45	47	49	50	51
	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000	0	4	rendah	4	4	4	4	4
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500	4	4	tinggi	4	4	4	4	4
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000	2	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500	0	22	rendah	23	24	25	25	26
	Apotik/Rumah Obat	30.000	1.500	4	4	tinggi	4	4	4	4	4
	Rumah sakit	120.000	-	0	1	rendah	1	1	1	1	1

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan tingkat pelayanan dan proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Cianjur, maka dapat diketahui pula kebutuhan penambahan sarana kesehatan di Kabupaten Cianjur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.72. Proyeksi Selisih Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Proyeksi Penambahan Sarana (Unit)					Kebutuhan Luas (Ha)
		2025	2030	2035	2040	2045	
Agrabinta	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	10	1	1	0	0	0,37
	BKIA/Klinik Bersalin	1	0	0	0	0	0,48
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	8	0	0	0	0	0,02
	Apotik/Rumah Obat	-	-	-	-	-	-
	Rumah sakit	-	-	-	-	-	-
Leles	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	13	1	0	0	0	0,44
	BKIA/Klinik Bersalin	1	0	0	0	0	0,37
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	7	0	0	0	0	0,01
	Apotik/Rumah Obat	-	-	-	-	-	-
	Rumah sakit	-	-	-	-	-	-
Sindangbarang	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	17	1	1	1	1	0,60
	BKIA/Klinik Bersalin	2	0	0	0	0	0,70
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	12	1	0	0	0	0,03
	Apotik/Rumah Obat	-	-	-	-	-	-
	Rumah sakit	-	-	-	-	-	-
Cidaun	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	28	1	1	1	1	0,95
	BKIA/Klinik Bersalin	2	0	0	0	0	0,82
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	15	1	1	0	0	0,03
	Apotik/Rumah Obat	1	0	0	0	0	0,04
	Rumah sakit	1	0	0	0	0	0,34
Naringgul	Posyandu	-	-	-	-	-	-

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Proyeksi Penambahan Sarana (Unit)					Kebutuhan Luas (Ha)
		2025	2030	2035	2040	2045	
	Balai Pengobatan Warga	19	1	1	1	0	0,64
	BKIA/Klinik Bersalin	2	0	0	0	0	0,56
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	10	0	0	0	0	0,02
	Apotik/Rumah Obat	-	-	-	-	-	-
	Rumah sakit	-	-	-	-	-	-
Cibinong	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	27	1	1	1	1	0,91
	BKIA/Klinik Bersalin	2	0	0	0	0	0,76
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	13	1	0	0	0	0,03
	Apotik/Rumah Obat	-	-	-	-	-	-
	Rumah sakit	1	0	0	0	0	0,32
Cikadu	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	13	1	1	0	0	0,46
	BKIA/Klinik Bersalin	1	0	0	0	0	0,44
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	8	0	0	0	0	0,02
	Apotik/Rumah Obat	-	-	-	-	-	-
	Rumah sakit	-	-	-	-	-	-
Tanggeung	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	21	1	1	1	0	0,72
	BKIA/Klinik Bersalin	2	0	0	0	0	0,60
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	11	0	0	0	0	0,02
	Apotik/Rumah Obat	1	0	0	0	0	0,02
	Rumah sakit	-	-	-	-	-	-
Pasirkuda	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	16	1	1	0	0	0,54
	BKIA/Klinik Bersalin	1	0	0	0	0	0,45
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	8	0	0	0	0	0,02
	Apotik/Rumah Obat	-	-	-	-	-	-

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Proyeksi Penambahan Sarana (Unit)					Kebutuhan Luas (Ha)
		2025	2030	2035	2040	2045	
	Rumah sakit	-	-	-	-	-	-
Kadupandak	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	21	1	1	1	0	0,72
	BKIA/Klinik Bersalin	2	0	0	0	0	0,63
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	11	0	0	0	0	0,03
	Apotik/Rumah Obat	1	0	0	0	0	0,03
	Rumah sakit	-	-	-	-	-	-
Cijati	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	7	1	1	0	0	0,28
	BKIA/Klinik Bersalin	1	0	0	0	0	0,40
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	7	0	0	0	0	0,02
	Apotik/Rumah Obat	-	-	-	-	-	-
	Rumah sakit	-	-	-	-	-	-
Takokak	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	21	1	1	1	0	0,73
	BKIA/Klinik Bersalin	2	0	0	0	0	0,61
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	11	0	0	0	0	0,02
	Apotik/Rumah Obat	2	0	0	0	0	0,05
	Rumah sakit	-	-	-	-	-	-
Sukanagara	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	22	1	1	1	1	0,77
	BKIA/Klinik Bersalin	2	0	0	0	0	0,66
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	-	-	-	-	-	-
	Apotik/Rumah Obat	-	-	-	-	-	-
	Rumah sakit	-	-	-	-	-	-
Pagelaran	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	30	1	1	1	1	1,02
	BKIA/Klinik Bersalin	3	0	0	0	0	0,90
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	1	0	0	0	0	0,03
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Proyeksi Penambahan Sarana (Unit)					Kebutuhan Luas (Ha)
		2025	2030	2035	2040	2045	
	Tempat Praktek Dokter	16	1	1	0	0	0,04
	Apotik/Rumah Obat	1	0	0	0	0	0,02
	Rumah sakit	-	-	-	-	-	-
Campaka	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	26	1	1	1	1	0,90
	BKIA/Klinik Bersalin	2	0	0	0	0	0,82
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	15	1	1	0	0	0,03
	Apotik/Rumah Obat	1	0	0	0	0	0,04
	Rumah sakit	1	0	0	0	0	0,34
Campakamulya	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	9	0	0	0	0	0,31
	BKIA/Klinik Bersalin	1	0	0	0	0	0,28
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	5	0	0	0	0	0,01
	Apotik/Rumah Obat	-	-	-	-	-	-
	Rumah sakit	-	-	-	-	-	-
Cibeber	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	53	2	2	2	1	1,83
	BKIA/Klinik Bersalin	5	0	0	0	0	1,60
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	28	1	1	1	1	0,06
	Apotik/Rumah Obat	-	-	-	-	-	-
	Rumah sakit	1	0	0	0	0	0,67
Warungkondang	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	30	1	1	1	1	1,03
	BKIA/Klinik Bersalin	3	0	0	0	0	0,94
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	1	0	0	0	0	0,03
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	17	1	1	0	0	0,04
	Apotik/Rumah Obat	1	0	0	0	0	0,03
	Rumah sakit	1	0	0	0	0	0,39
Gekbrong	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	25	1	1	1	1	0,85
	BKIA/Klinik Bersalin	2	0	0	0	0	0,73
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	1	0	0	0	0	0,04

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Proyeksi Penambahan Sarana (Unit)					Kebutuhan Luas (Ha)
		2025	2030	2035	2040	2045	
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	13	1	0	0	0	0,03
	Apotik/Rumah Obat	1	0	0	0	0	0,04
	Rumah sakit	1	0	0	0	0	0,31
Cilaku	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	47	2	2	1	1	1,61
	BKIA/Klinik Bersalin	4	0	0	0	0	1,42
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	25	1	1	1	1	0,06
	Apotik/Rumah Obat	-	-	-	-	-	-
	Rumah sakit	1	0	0	0	0	0,59
Sukaluyu	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	39	2	1	1	1	1,31
	BKIA/Klinik Bersalin	3	0	0	0	0	1,09
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	19	1	1	1	0	0,04
	Apotik/Rumah Obat	-	-	-	-	-	-
	Rumah sakit	1	0	0	0	0	0,45
Bojongherang	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	34	2	1	1	1	1,17
	BKIA/Klinik Bersalin	3	0	0	0	0	1,00
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	18	1	1	1	0	0,04
	Apotik/Rumah Obat	-	-	-	-	-	-
	Rumah sakit	1	0	0	0	0	0,42
Haurwangi	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	27	1	1	1	1	0,92
	BKIA/Klinik Bersalin	2	0	0	0	0	0,77
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	14	1	1	0	0	0,03
	Apotik/Rumah Obat	-	-	-	-	-	-
	Rumah sakit	1	0	0	0	0	0,32
Ciranjang	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	35	2	1	1	1	1,19
	BKIA/Klinik Bersalin	3	0	0	0	0	1,07

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Proyeksi Penambahan Sarana (Unit)					Kebutuhan Luas (Ha)
		2025	2030	2035	2040	2045	
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	19	1	1	1	0	0,04
	Apotik/Rumah Obat	-	-	-	-	-	-
	Rumah sakit	1	0	0	0	0	0,44
Mande	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	33	2	1	1	1	1,11
	BKIA/Klinik Bersalin	3	0	0	0	0	0,98
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	17	1	1	1	0	0,04
	Apotik/Rumah Obat	-	-	-	-	-	-
	Rumah sakit	1	0	0	0	0	0,41
Karangtengah	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	62	3	3	2	1	2,14
	BKIA/Klinik Bersalin	6	0	0	0	0	1,99
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	35	2	1	1	1	0,08
	Apotik/Rumah Obat	-	-	-	-	-	-
	Rumah sakit	-	-	-	-	-	-
Cianjur	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	66	3	3	2	2	2,28
	BKIA/Klinik Bersalin	6	0	0	0	0	2,05
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	2	0	0	0	0	0,08
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	36	2	1	1	1	0,08
	Apotik/Rumah Obat	-	-	-	-	-	-
	Rumah sakit	-	-	-	-	-	-
Cugenang	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	50	2	2	1	1	1,69
	BKIA/Klinik Bersalin	4	0	0	0	0	1,41
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	25	1	1	1	1	0,06
	Apotik/Rumah Obat	1	0	0	0	0	0,04
	Rumah sakit	1	0	0	0	0	0,59
Pacet	Posyandu	-	-	-	-	-	-

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Proyeksi Penambahan Sarana (Unit)					Kebutuhan Luas (Ha)
		2025	2030	2035	2040	2045	
	Balai Pengobatan Warga	44	2	2	1	1	1,50
	BKIA/Klinik Bersalin	4	0	0	0	0	1,32
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	1	0	0	0	0	0,04
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	23	1	1	1	0	0,05
	Apotik/Rumah Obat	-	-	-	-	-	-
	Rumah sakit	1	0	0	0	0	0,55
Cipanas	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	42	2	2	1	1	1,46
	BKIA/Klinik Bersalin	4	0	0	0	0	1,34
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	2	0	0	0	0	0,07
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	1	0	0	0	0	0,11
	Tempat Praktek Dokter	23	1	1	1	1	0,05
	Apotik/Rumah Obat	1	0	0	0	0	0,04
	Rumah sakit	-	-	-	-	-	-
Sukaresmi	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	32	2	1	1	1	1,13
	BKIA/Klinik Bersalin	3	0	0	0	0	1,09
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	19	1	1	1	0	0,04
	Apotik/Rumah Obat	1	0	0	0	0	0,04
	Rumah sakit	1	0	0	0	0	0,45
Cikalongkulon	Posyandu	-	-	-	-	-	-
	Balai Pengobatan Warga	44	2	2	1	1	1,51
	BKIA/Klinik Bersalin	4	0	0	0	0	1,29
	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas dan Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-
	Tempat Praktek Dokter	23	1	1	1	0	0,05
	Apotik/Rumah Obat	-	-	-	-	-	-
	Rumah sakit	1	0	0	0	0	0,54

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Dari tabel penambahan unit fasilitas kesehatan di Kabupaten Cianjur diketahui pula kebutuhan luas penambahan sarana pada masing-masing kecamatan, diantaranya penambahan balai pengobatan warga 1.182 unit seluas 33,08 Ha, klinik bersalin sebanyak 87 unit seluas 29,54 Ha, puskesmas sebanyak 1 unit seluas 0,11 Ha, puskesmas pembantu sebanyak 7 unit seluas 0,31 Ha, tempat praktek dokter

sebanyak 577 seluas 1,15 Ha, apotik sebanyak 12 unit seluas 0,40 Ha, dan rumah sakit sebanyak 13 unit seluas 7,12 Ha.

2.6.2.6 Fasilitas Pendidikan

Perhitungan kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Cianjur dilakukan pada tahun proyeksi 2025-2045. Analisis proyeksi fasilitas pendidikan dilakukan sesuai terkait standar yang ada yaitu SNI-03–1733–2004 mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di perkotaan yang disesuaikan dengan kondisi eksisting di Kabupaten Cianjur.

Analisis proyeksi faslitas pendidikan, dilakukan dengan menggunakan hasil analisis proyeksi penduduk usia belajar menggunakan analisis *kohort*. Tipe analisis *kohort* yang dilakukan dalam perhitungan proyeksi kebutuhan sarana pendidikan adalah *Behavioral Cohort,* menyajikan data mengenai kelompok belajar dan persentase kelompok belajar dalam periode waktu tertentu.

Tabel 2.73. Proyeksi Penduduk Usia Belajar Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Proyeksi Penduduk Usia Belajar (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Agrabinta	TK	2672	2790	2890	2968	3025
	SD	2715	2835	2935	3015	3073
	SMP	2800	2923	3027	3109	3169
	SMA	2927	3056	3165	3250	3313
Leles	TK	2052	2143	2219	2279	2323
	SD	2085	2177	2254	2315	2359
	SMP	2150	2245	2324	2387	2433
	SMA	2248	2347	2430	2496	2544
Sindangbarang	TK	3875	4045	4189	4303	4385
	SD	3936	4110	4256	4371	4455
	SMP	4059	4238	4389	4508	4594
	SMA	4244	4431	4588	4713	4803
Cidaun	TK	4569	4770	4940	5074	5171
	SD	4641	4846	5018	5154	5253
	SMP	4786	4997	5175	5315	5417
	SMA	5004	5224	5410	5557	5663
Naringgul	TK	3107	3244	3359	3450	3516
	SD	3156	3295	3412	3505	3572
	SMP	3255	3398	3519	3614	3684
	SMA	3402	3552	3679	3779	3851
Cibinong	TK	4234	4421	4578	4702	4792
	SD	4301	4491	4651	4777	4868
	SMP	4436	4631	4796	4926	5020
	SMA	4637	4842	5014	5150	5249
Cikadu	TK	2426	2533	2623	2694	2746
	SD	2464	2573	2664	2737	2789
	SMP	2541	2653	2748	2822	2876
	SMA	2657	2774	2873	2950	3007
Tanggeung	TK	3324	3470	3594	3691	3762
	SD	3376	3525	3651	3750	3822
	SMP	3482	3635	3765	3867	3941
	SMA	3640	3801	3936	4043	4120
Pasirkuda	TK	2516	2627	2720	2794	2847
	SD	2556	2668	2763	2838	2892
	SMP	2635	2752	2850	2927	2983

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Proyeksi Penduduk Usia Belajar (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
	SMA	2755	2877	2979	3060	3118
Kadupandak	TK	3479	3632	3762	3863	3938
	SD	3534	3690	3821	3925	4000
	SMP	3645	3805	3941	4047	4125
	SMA	3810	3978	4120	4231	4313
Cijati	TK	2250	2350	2433	2499	2547
	SD	2286	2387	2472	2539	2587
	SMP	2358	2461	2549	2618	2668
	SMA	2465	2573	2665	2737	2790
Takokak	TK	3383	3532	3658	3757	3829
	SD	3437	3588	3716	3816	3890
	SMP	3544	3700	3832	3936	4011
	SMA	3705	3868	4006	4115	4194
Sukanagara	TK	3699	3862	4000	4108	4187
	SD	3758	3924	4063	4173	4254
	SMP	3876	4046	4190	4304	4386
	SMA	4052	4230	4381	4499	4586
Pagelaran	TK	4994	5215	5400	5546	5653
	SD	5074	5297	5486	5635	5743
	SMP	5232	5463	5657	5811	5922
	SMA	5470	5711	5915	6075	6191
Campaka	TK	4660	4865	5039	5175	5274
	SD	4806	5018	5196	5337	5439
	SMP	5024	5246	5432	5579	5686
	SMA	4587	4789	4960	5094	5192
Campakamulya	TK	1631	1703	1764	1811	1846
	SD	1705	1780	1844	1894	1930
	SMP	1557	1625	1683	1729	1762
	SMA	1582	1651	1710	1756	1790
Cibeber	TK	9320	9731	10077	10350	10549
	SD	9744	10173	10535	10821	11028
	SMP	8896	9289	9619	9880	10069
	SMA	9038	9436	9772	10037	10229
Warungkondang	TK	5456	5696	5899	6059	6175
	SD	5704	5955	6167	6334	6456
	SMP	5208	5437	5631	5783	5894
	SMA	5290	5524	5720	5875	5988
Gekbrong	TK	4142	4325	4479	4600	4688
	SD	4272	4460	4619	4744	4835
	SMP	4466	4663	4829	4959	5055
	SMA	4077	4257	4409	4528	4615
Cilaku	TK	8028	8382	8680	8915	9086
	SD	8279	8643	8951	9193	9370
	SMP	8655	9036	9358	9611	9796
	SMA	7902	8251	8544	8776	8944
Sukaluyu	TK	6169	6441	6670	6850	6982
	SD	6361	6642	6878	7064	7200
	SMP	6651	6944	7191	7386	7527
	SMA	6072	6340	6566	6743	6873
Bojongpicung	TK	5657	5907	6117	6283	6403
	SD	5834	6091	6308	6479	6603
	SMP	6099	6368	6595	6774	6904
	SMA	5569	5815	6021	6185	6303
Haurwangi	TK	4336	4527	4688	4815	4908
	SD	4472	4669	4835	4966	5061
	SMP	4675	4881	5055	5191	5291
	SMA	4268	4456	4615	4740	4831
Cirangjang	TK	6033	6299	6524	6700	6829
	SD	6222	6496	6727	6910	7042

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Proyeksi Penduduk Usia Belajar (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
	SMP	6505	6791	7033	7224	7362
	SMA	5939	6201	6422	6595	6722
Mande	TK	5533	5777	5983	6145	6263
	SD	5706	5958	6170	6337	6459
	SMP	5966	6229	6450	6625	6752
	SMA	5447	5687	5889	6049	6165
Karangtengah	TK	11230	11725	12142	12471	12710
	SD	11581	12091	12522	12861	13107
	SMP	12107	12641	13091	13445	13703
	SMA	11054	11542	11952	12276	12512
Cianjur	TK	11587	12098	12529	12868	13115
	SD	11949	12476	12920	13270	13525
	SMP	12493	13043	13507	13873	14139
	SMA	11406	11909	12333	12667	12910
Cugenang	TK	7947	8297	8593	8825	8995
	SD	8195	8557	8861	9101	9276
	SMP	8568	8946	9264	9515	9697
	SMA	7823	8168	8458	8687	8854
Pacet	TK	7488	7819	8097	8316	8476
	SD	7723	8063	8350	8576	8741
	SMP	8074	8429	8729	8966	9138
	SMA	7371	7696	7970	8186	8343
Cipanas	TK	7593	7928	8210	8432	8594
	SD	7830	8176	8467	8696	8863
	SMP	8186	8547	8851	9091	9266
	SMA	7475	7804	8082	8301	8460
Sukaresmi	TK	6157	6429	6658	6838	6969
	SD	6350	6630	6866	7052	7187
	SMP	6638	6931	7178	7372	7514
	SMA	6061	6328	6554	6731	6860
Cikalongkulon	TK	7269	7590	7860	8073	8228
	SD	7497	7827	8106	8325	8485
	SMP	7837	8183	8474	8703	8871
	SMA	7156	7471	7737	7947	8099

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Analisis proyeksi fasilitas pendidikan yang dilakukan adalah analisis tingkat pelayanan sarana pendidikan terhadap penduduk usia belajar yang adil di setiap Kecamatan di Kabupaten Cianjur. Diketahui proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Cianjur masih memerlukan total sebanyak 10 unit Taman Kanak-kanak dan 104 unit taman bacaan yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan standar SNI 03-1733-2004, maka tingkat pelayanan dan proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.74. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Jumlah Standar Penduduk (Jiwa)	Radius Pencapaian (m2)	Eksisting (unit)	Jumlah Yang Seharusnya Ada	Keterangan	Proyeksi Sarana (Unit)				
							2025	2030	2035	2040	2045
Agrabinta	TK	1.250	500	4	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	SD	1.600	1.000	31	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	SMP	4.800	1.000	10	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	SMA	4.800	3.000	3	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	2	rendah	2	2	2	2	2
Leles	TK	1.250	500	1	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	SD	1.600	1.000	28	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	SMP	4.800	1.000	6	0	sangat tinggi	0	0	0	0	1
	SMA	4.800	3.000	3	0	sangat tinggi	0	0	1	1	1
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	1	rendah	1	1	1	1	1
Sindangbarang	TK	1.250	500	12	3	sangat tinggi	3	3	3	3	4
	SD	1.600	1.000	36	2	sangat tinggi	2	3	3	3	3
	SMP	4.800	1.000	17	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	SMA	4.800	3.000	4	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	2	rendah	2	3	3	3	3
Cidaun	TK	1.250	500	15	4	sangat tinggi	4	4	4	4	4
	SD	1.600	1.000	43	3	sangat tinggi	3	3	3	3	3
	SMP	4.800	1.000	18	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	SMA	4.800	3.000	7	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	3	rendah	3	3	3	3	3
Naringgul	TK	1.250	500	5	2	sangat tinggi	2	3	3	3	3
	SD	1.600	1.000	37	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	SMP	4.800	1.000	13	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	SMA	4.800	3.000	4	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	2	rendah	2	2	2	2	2
Cibinong	TK	1.250	500	15	3	sangat tinggi	3	4	4	4	4
	SD	1.600	1.000	48	3	sangat tinggi	3	3	3	3	3
	SMP	4.800	1.000	21	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	SMA	4.800	3.000	4	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Jumlah Standar Penduduk (Jiwa)	Radius Pencapaian (m2)	Eksisting (unit)	Jumlah Yang Seharusnya Ada	Keterangan	Proyeksi Sarana (Unit)				
							2025	2030	2035	2040	2045
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	3	rendah	3	3	3	3	3
Cikadu	TK	1.250	500	4	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	SD	1.600	1.000	31	1	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	SMP	4.800	1.000	15	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	SMA	4.800	3.000	3	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	1	rendah	2	2	2	2	2
Tanggeung	TK	1.250	500	2	3	sedang	3	3	3	3	3
	SD	1.600	1.000	29	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	SMP	4.800	1.000	9	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	SMA	4.800	3.000	3	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	2	rendah	2	2	2	2	2
Pasirkuda	TK	1.250	500	2	2	tinggi	2	2	2	2	2
	SD	1.600	1.000	24	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	SMP	4.800	1.000	5	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	SMA	4.800	3.000	2	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	2	rendah	2	2	2	2	2
Kadupandak	TK	1.250	500	1	3	rendah	3	3	3	3	3
	SD	1.600	1.000	40	2	sangat tinggi	2	2	2	2	3
	SMP	4.800	1.000	13	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	SMA	4.800	3.000	3	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	2	rendah	2	2	2	2	3
Cijati	TK	1.250	500	3	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	SD	1.600	1.000	30	1	sangat tinggi	1	2	2	2	2
	SMP	4.800	1.000	11	0	sangat tinggi	0	1	1	1	1
	SMA	4.800	3.000	2	0	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	1	rendah	1	1	2	2	2
Takokak	TK	1.250	500	13	3	sangat tinggi	3	3	3	3	3
	SD	1.600	1.000	34	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	SMP	4.800	1.000	12	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	SMA	4.800	3.000	2	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Jumlah Standar Penduduk (Jiwa)	Radius Pencapaian (m2)	Eksisting (unit)	Jumlah Yang Seharusnya Ada	Keterangan	Proyeksi Sarana (Unit)				
							2025	2030	2035	2040	2045
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	2	rendah	2	2	2	2	2
Sukanagara	TK	1.250	500	18	3	sangat tinggi	3	3	3	3	3
	SD	1.600	1.000	31	2	sangat tinggi	2	2	3	3	3
	SMP	4.800	1.000	8	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	SMA	4.800	3.000	1	1	tinggi	1	1	1	1	1
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	2	rendah	2	2	3	3	3
Pagelaran	TK	1.250	500	5	4	sangat tinggi	4	4	4	4	5
	SD	1.600	1.000	48	3	sangat tinggi	3	3	3	4	4
	SMP	4.800	1.000	9	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	SMA	4.800	3.000	2	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	3	rendah	3	3	3	4	4
Campaka	TK	1.250	500	8	4	sangat tinggi	4	4	4	4	4
	SD	1.600	1.000	44	3	sangat tinggi	3	3	3	3	3
	SMP	4.800	1.000	13	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	SMA	4.800	3.000	1	1	tinggi	1	1	1	1	1
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	3	rendah	3	3	3	3	3
Campakamulya	TK	1.250	500	1	1	tinggi	1	1	1	1	1
	SD	1.600	1.000	17	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	SMP	4.800	1.000	4	0	sangat tinggi	0	0	0	0	0
	SMA	4.800	3.000	2	0	sangat tinggi	0	0	0	0	0
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	1	rendah	1	1	1	1	1
Cibeber	TK	1.250	500	12	7	sangat tinggi	7	7	8	8	8
	SD	1.600	1.000	62	5	sangat tinggi	6	6	6	6	6
	SMP	4.800	1.000	17	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	SMA	4.800	3.000	4	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	5	rendah	6	6	6	6	6
Warungkondang	TK	1.250	500	4	4	tinggi	4	4	5	5	5
	SD	1.600	1.000	29	3	sangat tinggi	3	3	4	4	4
	SMP	4.800	1.000	13	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	SMA	4.800	3.000	2	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Jumlah Standar Penduduk (Jiwa)	Radius Pencapaian (m2)	Eksisting (unit)	Jumlah Yang Seharusnya Ada	Keterangan	Proyeksi Sarana (Unit)				
							2025	2030	2035	2040	2045
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	3	rendah	3	3	4	4	4
Gekbrong	TK	1.250	500	4	3	sangat tinggi	3	3	4	4	4
	SD	1.600	1.000	24	2	sangat tinggi	3	3	3	3	3
	SMP	4.800	1.000	5	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	SMA	4.800	3.000	1	1	tinggi	1	1	1	1	1
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	2	rendah	3	3	3	3	3
Cilaku	TK	1.250	500	20	6	sangat tinggi	6	7	7	7	7
	SD	1.600	1.000	56	5	sangat tinggi	5	5	5	6	6
	SMP	4.800	1.000	19	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	SMA	4.800	3.000	6	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	5	rendah	5	5	5	6	6
Sukaluyu	TK	1.250	500	1	5	rendah	5	5	5	5	6
	SD	1.600	1.000	35	4	sangat tinggi	4	4	4	4	4
	SMP	4.800	1.000	13	1	sangat tinggi	1	1	1	1	2
	SMA	4.800	3.000	3	1	sangat tinggi	1	1	1	2	2
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	4	rendah	4	4	4	4	4
Bojongpicung	TK	1.250	500	5	4	sangat tinggi	4	5	5	5	5
	SD	1.600	1.000	40	3	sangat tinggi	4	4	4	4	4
	SMP	4.800	1.000	8	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	SMA	4.800	3.000	1	1	tinggi	1	1	1	1	1
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	3	rendah	4	4	4	4	4
Haurwangi	TK	1.250	500	6	3	sangat tinggi	3	4	4	4	4
	SD	1.600	1.000	22	3	sangat tinggi	3	3	3	3	3
	SMP	4.800	1.000	6	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	SMA	4.800	3.000	2	1	sedang	1	1	1	1	1
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	3	rendah	3	3	3	3	3
Cirangjang	TK	1.250	500	10	5	sangat tinggi	5	5	5	5	5
	SD	1.600	1.000	35	4	sangat tinggi	4	4	4	4	4
	SMP	4.800	1.000	15	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	SMA	4.800	3.000	3	1	sangat tinggi	1	1	1	1	2

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Jumlah Standar Penduduk (Jiwa)	Radius Pencapaian (m2)	Eksisting (unit)	Jumlah Yang Seharusnya Ada	Keterangan	Proyeksi Sarana (Unit)				
							2025	2030	2035	2040	2045
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	4	rendah	4	4	4	4	4
Mande	TK	1.250	500	6	4	sangat tinggi	4	5	5	5	5
	SD	1.600	1.000	43	3	sangat tinggi	3	4	4	4	4
	SMP	4.800	1.000	7	1	sangat tinggi	1	1	1	1	1
	SMA	4.800	3.000	1	1	tinggi	1	1	1	1	1
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	3	rendah	3	4	4	4	4
Karangtengah	TK	1.250	500	29	8	sangat tinggi	9	9	10	10	10
	SD	1.600	1.000	61	7	sangat tinggi	7	7	8	8	8
	SMP	4.800	1.000	23	2	sangat tinggi	2	3	3	3	3
	SMA	4.800	3.000	7	2	sangat tinggi	3	3	3	3	3
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	7	rendah	7	7	8	8	8
Cianjur	TK	1.250	500	51	9	sangat tinggi	9	10	10	10	10
	SD	1.600	1.000	63	7	sangat tinggi	7	8	8	8	8
	SMP	4.800	1.000	29	2	sangat tinggi	2	3	3	3	3
	SMA	4.800	3.000	12	2	sangat tinggi	3	3	3	3	3
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	7	rendah	7	8	8	8	8
Cugenang	TK	1.250	500	26	6	sangat tinggi	6	7	7	7	7
	SD	1.600	1.000	54	5	sangat tinggi	5	5	5	6	6
	SMP	4.800	1.000	19	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	SMA	4.800	3.000	2	2	tinggi	2	2	2	2	2
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	5	rendah	5	5	5	6	6
Pacet	TK	1.250	500	13	6	sangat tinggi	6	6	6	7	7
	SD	1.600	1.000	29	5	sangat tinggi	5	5	5	5	5
	SMP	4.800	1.000	13	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	SMA	4.800	3.000	4	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	4	rendah	5	5	5	5	5
Cipanas	TK	1.250	500	12	6	sangat tinggi	6	6	6	7	7
	SD	1.600	1.000	40	5	sangat tinggi	5	5	5	5	5
	SMP	4.800	1.000	16	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	SMA	4.800	3.000	4	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Jumlah Standar Penduduk (Jiwa)	Radius Pencapaian (m2)	Eksisting (unit)	Jumlah Yang Seharusnya Ada	Keterangan	Proyeksi Sarana (Unit)				
							2025	2030	2035	2040	2045
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	5	rendah	5	5	5	5	5
Sukaresmi	TK	1.250	500	3	5	sedang	5	5	5	5	6
	SD	1.600	1.000	39	4	sangat tinggi	4	4	4	4	4
	SMP	4.800	1.000	9	1	sangat tinggi	1	1	1	1	2
	SMA	4.800	3.000	3	1	sangat tinggi	1	1	1	2	2
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	4	rendah	4	4	4	4	4
Cikalongkulon	TK	1.250	500	7	6	sangat tinggi	6	6	6	6	7
	SD	1.600	1.000	52	4	sangat tinggi	5	5	5	5	5
	SMP	4.800	1.000	11	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	SMA	4.800	3.000	3	2	sangat tinggi	2	2	2	2	2
	Taman Bacaan	2.500	1.000	0	4	rendah	5	5	5	5	5

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan tingkat pelayanan dan proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Cianjur, maka dapat diketahui pula kebutuhan penambahan sarana pendidikan di Kabupaten Cianjur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.75. Proyeksi Selisih Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Proyeksi Penambahan Sarana (Unit)					Kebutuhan Luas (Ha)
		2025	2030	2035	2040	2045	
Agrabinta	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	2	0	0	0	0	0,03
Leles	TK	1	1	0	0	0	0,09
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	1	0	0	0	0	0,02
Sindangbarang	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	2	0	0	0	0	0,04
Cidaun	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	3	0	0	0	0	0,05
Naringgul	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	2	0	0	0	0	0,03
Cibinong	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	3	0	0	0	0	0,05
Cikadu	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	2	0	0	0	0	0,03
Tanggeung	TK	1	2	0	0	0	0,15
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	2	0	0	0	0	0,04
Pasirkuda	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Proyeksi Penambahan Sarana (Unit)					Kebutuhan Luas (Ha)
		2025	2030	2035	2040	2045	
	Taman Bacaan	2	0	0	0	0	0,03
Kadupandak	TK	2	1	0	0	0	0,16
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	2	0	0	0	0	0,04
Cijati	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	1	0	0	0	0	0,02
Takokak	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	2	0	0	0	0	0,04
Sukanagara	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	2	0	0	0	0	0,04
Pagelaran	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	3	0	0	0	0	0,05
Campaka	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	3	0	0	0	0	0,05
Campakamulya	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	1	0	0	0	0	0,02
Cibeber	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	6	0	0	0	0	0,10
Warungkondang	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	3	0	0	0	0	0,06
Gekbrong	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Proyeksi Penambahan Sarana (Unit)					Kebutuhan Luas (Ha)
		2025	2030	2035	2040	2045	
	Taman Bacaan	3	0	0	0	0	0,04
Cilaku	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	5	0	0	0	0	0,09
Sukaluyu	TK	4	1	0	0	0	0,28
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	4	0	0	0	0	0,07
Bojongpicung	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	4	0	0	0	0	0,06
Haurwangi	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	3	0	0	0	0	0,05
Cirangjang	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	4	0	0	0	0	0,06
Mande	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	3	0	0	0	0	0,06
Karangtengah	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	7	0	0	0	0	0,12
Cianjur	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	7	0	0	0	0	0,12
Cugenang	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	5	0	0	0	0	0,08
Pacet	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-

Kecamatan	Jenis Sarana (Unit)	Proyeksi Penambahan Sarana (Unit)					Kebutuhan Luas (Ha)
		2025	2030	2035	2040	2045	
	Taman Bacaan	5	0	0	0	0	0,08
Cipanas	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	5	0	0	0	0	0,08
Sukaresmi	TK	2	3	0	0	0	0,28
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	4	0	0	0	0	0,07
Cikalongkulon	TK	-	-	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan	5	0	0	0	0	0,08

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Dari tabel penambahan unit fasilitas pendidikan di Kabupaten Cianjur diketahui pula kebutuhan luas penambahan sarana, diantaranya untuk TK membutuhkan luas sebesar 0,96 Ha dan taman bacaan diperlukan luas lahan 1,77 Ha menurut SNI 03-1733-2004.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044

Kabupaten Cianjur setelah penetapan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 telah mengalami berbagai perubahan mengikuti perkembangan pembangunan yang terjadi, sejalan dengan hal tersebut kebijakan-kebijakan terkait Penataan Ruang di tingkat Nasional maupun Provinsi pun mengalami banyak perubahan sehingga berdampak terhadap dokumen rencana spasial yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dilakukan proses peninjauan kembali terhadap rencana spasial tersebut agar rencana spasial yang direncanakan untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat 20 tahun mendatang, sesuai dengan arahan kebijakan penataan ruang tingkat Provinsi dan Nasional, serta telah disesuaikan dengan kondisi terkini di Kabupaten Cianjur. Adapun arahan pembangunan di Kabupaten Cianjur berdasarkan Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2023-2043 sebagai berikut:

2.7.1.1 Tujuan dan Kebijakan Penataan Ruang

Pada tahun 2023-2043 Kabupaten Cianjur dalam penataan ruangnya bertujuan untuk mewujudkan Wilayah Daerah yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya

berbasis pertanian dan pariwisata secara efisien, seimbang, dan berkelanjutan.

Adapun dalam mencapai tujuan penataan ruang, maka kebijakan penataan ruang yang dirumuskan terdiri atas:

a) Perwujudan pengembangan daerah yang berorientasi meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat;
b) Pengembangan ruang fungsional yang terintegrasi dengan pengembangan agribisnis dan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan serta berorientasi pada pemerataan pembangunan Daerah;
c) Pengaturan dan pengendalian pusat kegiatan di wilayah utara dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah tengah dan selatan berdasarkan peran dan fungsi yang ditetapkan;
d) Pemantapan prasarana di wilayah utara dan pengembangan prasarana pada wilayah tengah dan selatan untuk mendorong perkembangan pencapaian rencana struktur ruang yang berkualitas, andal, dan berkelanjutan;
e) Perwujudan, pengembangan dan optimalisasi pengembangan kawasan lindung;
f) Perlindungan terhadap manusia dan kegiatannya dari bencana alam, dengan perwujudan rencana sistem prasarana wilayah berupa penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana;
g) Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
h) Pembangunan berbasis mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan; dan
i) Kebijakan pemanfaatan potensi pertambangan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

2.7.1.2 Rencana Struktur Ruang

Adapun rencana struktur ruang yang diatur pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur pada Tahun 2023-2043, meliputi:

1. Sistem pusat permukiman terdiri atas:
   - PKW merupakan kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi sebagai destinasi pariwisata dan pusat pertumbuhan kelautan, yaitu PKW Cidaun – Rancabuaya;
   - PKL memiliki fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat jasa dan pelayanan masyarakat berupa PKL Cianjur, PKL Sukanagara, dan PKL Sindangbarang;
   - PPK memiliki fungsi sebagai pusat produksi dan industri perkebunan, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, serta industri dengan skala pelayanan beberapa kecamatan, terdiri atas: (1) Wilayah Utara meliputi PPK Cipanas, PPK Ciranjang, PPK

Warungkondang, dan PPK Cikalongkulon; (2) Wilayah Tengah meliputi PPK Campaka, PPK Kadupandak, dan PPK Pagelaran; dan (3) Wilayah Selatan meliputi PPK Tanggeung dan PPK Cibinong.

- PPL memiliki fungsi sebagai pusat produksi pertanian dengan skala antar desa, terdiri atas: (1) Wilayah Utara meliputi PPL Pacet, PPL Sukaresmi, PPL Cugenang, PPL Mande, PPL Sukaluyu, PPL Cilaku, PPL Karangtengah, PPL Haurwangi, PPL Bojongpicung, PPL Gekbrong, dan PPL Cibeber; (2) Wilayah Tengah meliputi PPL Takokak, PPL Campakamulya, PPL Cijati, dan PPL Pasirkuda; dan (3) Wilayah Selatan meliputi PPL Cikadu, PPL Naringgul, PPL Leles, dan PPL Agrabinta.

2. Sistem jaringan prasarana terdiri atas:
   - Sistem jaringan transportasi, meliputi:
     - Sistem jaringan jalan, yaitu:
       - Jalan umum yang terbagi atas:
         - Jalan arteri primer, terdiri atas Jalan Gekbrong (Bts. Kabupaten) – Bts. Kota Cianjur; Jalan Pasir Hayam – Simpang 3 Perintis Kemerdekaan; Jalan Perintis Kemerdekaan; Jalan Lingkar Cianjur; Jalan Bts. Kota Cianjur – Citarum; dan Jalan Raya Bandung.
         - Jalan arteri sekunder, terdiri atas Ruas Jalan Lingkar Selatan; Ruas Jalan P. Hidayatullah; Ruas Jalan Hos Cokro Aminoto; Ruas Jalan Mangun Sarkoro; Ruas Jalan Adi Sucipta; Ruas Jalan Siliwangi; Ruas Jalan Amalia Rubini; Ruas Jalan KH. Hasyim Ashari; Ruas Jalan Suroso; Ruas Jalan Ir. H. Juanda; Ruas Jalan KH R. Abdullah Bin Nuh; Ruas Jalan Pramuka (Cikolotok–Sindanglaka); Ruas Jalan Bojong – Sukataris.
         - Jalan kolektor primer (1), terdiri atas Ruas Jalan Tegalbuleud (Cibuni) – Agrabinta – Sindangbarang; Ruas Jalan Sindangbarang – Cidaun; Ruas Jalan Cidaun – Cisela – Cilaki; Ruas Jalan Puncak – Bts. Kota Cianjur; Jalan Ir. H. Juanda; Jalan Dr. Muwardi; Ruas Jalan Ciloto (Puncak); dan Ruas Jalan BTS. Bandung/Cianjur – Naringgul – Cidaun.
         - Jalan kolektor primer (2), terdiri atas Jalan raya Cibeber (Cibeber); Ruas Jalan Sp.3. Perintis Kemerdekaan (Pasir Hayam) – Cibeber; Jalan Raya Sukanagara (Sukanagara-Kab. Cianjur); Ruas Jalan Cibeber – Sukanagara; Jalan Raya Sindangbarang (Sindangbarang-Kab.Cianjur); Ruas Jalan Sukanagara - Sindangbarang; Ruas Jalan

Selajambe – Cibogo – Cibeet; Ruas Jalan Jbt. Citarum Lama/Cipeuyeum.

- Jalan kolektor primer (3), terdiri atas Ruas jalan Jbt. Citarum Lama – Haurwangi/Cipeuyem; Cikadu – SP. Pancuh Tilu; dan Ruas jalan Bts. Kabupaten Bandung/Cianjur – Pondok Datar;
- Jalan kolektor primer (4), terdiri atas Jaringan jalan Bayuning – Bts. Kabupaten Bandung; Peningkatan fungsi ruas jalan Tungturunan – Tanjungsari; Jaringan Jalan Cianjur – Sukaluyu; Peningkatan fungsi ruas jalan Cikalongkulon – Bts. Purwakarta; Peningkatan fungsi jalan untuk jalur wisata Cianjur – Mande; Peningkatan fungsi ruas jalan Ciranjang – Bojongpicung; Peningkatan fungsi ruas jalan Cibeber – Bojongpiucung – Haurwangi; Jaringan jalan Puncak II; Ruas jalan Lingkar Cipanas – Pacet; Peningkatan fungsi jalur wisata Cipanas – Cikalongkulon; Jaringan Jalan Warungkondang – Cugenang; Jalur vertikal Cianjur – Agrabinta/Sindangbarang; Peningkatan fungsi jalan untuk jalur wisata Gunung Padang; Peningkatan fungsi ruas jalan Sukanagara – Takokak Bts. Kabupaten Sukabumi; Peningkatan fungsi ruas jalan Kadupandak – Takokak; Peningkatan fungsi ruas jalan Pagelaran – Kadupandak; Peningkatan fungsi ruas jalan Sukanagara – Pagelaran; Peningkatan fungsi ruas jalan Sukanagara – Campakamulya Bts. Kabupaten Bandung Barat; Jaringan Jalan Campaka – Campakamulya; Jaringan jalan Pagelaran – Pasirkuda Bts. Kabupaten Bandung; Jaringan jalan Pagelaran – Pasirkuda Bts. Kabupaten Bandung; Peningkatan fungsi ruas jalan Tanggeung – Kadupandak; Peningkatan fungsi ruas jalan Cibinong – Leles; Peningkatan fungsi ruas jalan Cibinong – Cikadu; Peningkatan fungsi ruas jalan Sindangbarang – Cibinong; Peningkatan fungsi ruas jalan Sindangbarang – Cikadu; Peningkatan fungsi ruas jalan Cidaun – Naringgul; Peningkatan fungsi ruas jalan Agrabinta – Leles.
- Jalan kolektor sekunder, meliputi Ruas Jalan Siti Jaenab; Ruas Jalan Moch Ali; Ruas Jalan Brs. Benteng; Ruas Jalan Taifur Yusuf; Ruas Jalan Otto Iskandardinata II; Ruas Jalan Masjid Agung; Ruas Jalan Pasar Baru/Ruko; Ruas Jalan Otista II; Ruas Jalan Gadog III – Gadog I; Ruas Jalan Sukanagara – Gunung sari; Ruas Jalan Mangkupraja; Ruas Jalan Muka I – II – III – Jalan Nasional;

Ruas Jalan H. Agus Saleh; Ruas Jalan Akses Terminal Rawabango; Ruas Jalan Yulius Usman; Ruas Jalan Dewi Sartika; Ruas Jalan Aria Cikondang; dan Ruas Jalan Akses Terminal Pasir Hayam.

- Jalan lokal primer (1), meliputi Ruas Jalan Wijaya Kusumah; Ruas Jalan Sumur – Cukanggaleuh; dan Ruas Jalan Padaasih – Cibungur.
- Jalan lokal primer (2), meliputi: 1. Ruas Jalan Cisalak – Karyabakti; 2. Ruas Jalan Karya Bakti – Cinerang; 3. Ruas Jalan Cibodas – Simpang; 4. Ruas Jalan Huve – Darmaga;

- Rencana jaringan jalan tol terdiri atas: (1) Rencana Jaringan Jalan Tol Cikarang – Ciranjang; (2) Rencana Jaringan Jalan Tol Sukabumi - Ciranjang; (3) Rencana Jaringan Jalan Tol Ciranjang – Padalarang; (4) Rencana Jaringan Jalan Tol Soreang – Ciwidey – Cidaun; dan e. Rencana Jaringan Jalan Tol Caringin – Cianjur (Akses Puncak).
- Terminal penumpang terdiri atas: (1) Pembangunan terminal tipe C: Terminal Cidaun; Terminal Sindangbarang; Terminal Agrabinta; Terminal Leles; Terminal Tanggeung; Terminal Pagelaran; Terminal Sukanagara; Terminal Takokak; Terminal Campakamulya; Terminal Cibeber; Terminal Warungkondang; Terminal Ciranjang; Terminal Mande; Terminal Cipanas; Terminal Cikalongkulon; (2)Pengembangan terminal tipe C: Terminal Pasirhayam di Kecamatan Cilaku;dan (3) Terminal Rawa Bango di Kecamatan Karangtengah.
- Jembatan timbang yaitu jembatan timbang Rawabango di Kecamatan Karangtengah.

- Sistem jaringan kereta api, meliputi:
  - Revitalisasi dan reaktivasi jalur rel kereta api Bandung–Padalarang–Cianjur–Sukabumi (jalur Bogor – Jogja);
  - Pengembangan stasiun kereta api meliputi Stasiun Sindang Resmi di Kecamatan Campaka; Stasiun Lampegan di Kecamatan Campaka; Stasiun Cibeber di Kecamatan Cibeber; Stasiun Cilaku di Kecamatan Cilaku; Stasiun Cianjur di Kecamatan Cianjur; Stasiun Cipeuyeum di Kecamatn Haurwangi; Stasiun Maleber di Kecamatan Karangtengah; Stasiun Ciranjang di Kecamatan Ciranjang; dan Stasiun Selajambe di Kecamatan Sukaluyu.
  - Peningkatan pelayanan kereta api meliputi peningkatan sistem jaringan pelayanan kereta api lintas Bandung-Padalarang-Cianjur-Sukabumi; peningkatan angkutan

barang bagi distribusi komoditas perdagangan; peningkatan sarana dan prasarana perlintasan sebidang.
    - Rencana pembangunan jaringan jalur kereta api antar kota meliputi jalur kereta api Ciwidey – Rancabuaya; Jalur kereta api Cileungsi-Jonggol-Cianjur (Segmen Ciwidey – Cidaun); dan Jalur kereta api Cijulang – Rancabuaya - Pelabuhan Ratu.
  - Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan meliputi: (1) Alur pelayaran sungai dan alur pelayanan danau, yaitu lintas Jangari-Palumbon-Calincing-Maleber-Cipeundeuy; (2) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan meliputi Dermaga Maleber di Kecamatan Cikalongkulon; Dermaga Babakan Garut di Kecamatan Ciranjang; Dermaga Calincing di Kecamatan Ciranjang; Dermaga Kebon Coklat di Kecamatan Mande; Dermaga Jangari di Kecamatan Mande; dan Dermaga Ciputri di Kecamatan Mande.
  - Sistem jaringan transportasi laut meliputi: (1) Pelabuhan pengumpan lokal, yaitu rencana Pelabuhan Sindangbarang di Kecamatan Sindangbarang; (2) Rencana terminal khusus, yaitu Megatop di Kecamatan Cidaun; (3) Pelabuhan perikanan berupa pangkalan pendaratan ikan, yaituPPI Jayanti – Cidaun di Kecamatan Cidaun; PPI Cikakap – Agrabinta di Kecamatan Agrabinta.
- Sistem jaringan energi meliputi Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan terdiri atas:
  - Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
    - Pembangkit listrik, meliputi PLTA Cirata; PLTA Rajamandala; Pembangunan PLTA Cisokan Hulu (Upper Cisokan Pumped Storage - UCPS); Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bojongpicung dan Cibeber; Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Waduk Cirata tersebar di Wilayah Selatan; Pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Kecamatan Takokak, Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Sindangbarang, dan Kecamatan Cidaun; dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Desa Sindangjaya, Desa Ciputri dan Desa Sukatani Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Tanggeung.
    - PLTMH, terdiri atas PLTMH Pesantren 1, Desa Bunijaya, Kecamatan Pagelaran; PLTMH Pusaka 1, DesaKarangjaya, Kecamatan Pasirkuda; PLTMH Pusaka 2, Desa Girimukti,

Kecamatan Pasirkuda; PLTMH Cibalapulang 1, Desa Waringinsari, Kecamatan Takokak; PLTMH Cibalapulang 2, Desa Wargasih, Kecamatan Kadupandak; PLTMH Cibalapulang 3, Kecamatan Kadupandak/Takokak; PLTMH Cijampang 2A, Desa Situhiang, Kecamatan Pagelaran; PLTMH Kalapanunggal, Desa Kalapanunggal Kecamatan Cikadu; PLTMH Cibuni Mandiri, Desa Karangjaya, Kecamatan Pasirkuda; PLTMH Cibuni, Desa Karangjaya, Kecamatan Pasirkuda; dan PLTMH Cijedil dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga terbarukan lainnya.

- Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
  - Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, terdiri atas jalur SUTET pada Haurwangi – Ciranjang – Sukaluyu – Karangtengah – Mande - Sukaresmi (Saguling-Cibinong);.jalur SUTET pada Takokak – Sukanegara - Campakamulya (Tasikmalaya-Depok); jalur SUTT pada Sukaresmi – Pacet – Cugenang – Cianjur – Karangtengah – Sukaluyu – Ciranjang - Haurwangi; Rencana pembangunan SUTT di Kecamatan Cugenang – Cianjur – Karangtengah – Sukaluyu – Mande – Ciranjang - Haurwangi; Rencana pembangunan SUTT pada jalur Cugenang – Cianjur – Cilaku – Cibeber – Campaka – Sukanagara – Pagelaran – Tanggeung; dan Rencana pembangunan SUTT Jampangkulon – Tanggeung.
  - Gardu listrik, terdiri atas Pengembangan Gardu Listrik Cianjur II; Pembangunan Gardu Induk di Kecamatan Tanggeung; dan Pengembangan sumber energi terbarukan.

- Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas:
  - Sistem jaringan irigasi berupa jaringan irigasi teknis dan irigasi non-teknis tersebar di seluruh kecamatan, terdiri atas: (1) rehabilitasi tuntas DI Cidadali; (2) rehabilitisasi DI Kewenangan Pusat yaitu DI Cihea, meliputi Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Haurwangi; (3) rehabilitasi DI Kewenangan Provinsi; (4) rehabilitasi DI Kewenangan Kabupaten; (5) peningkatan dan rehabililitasi DI Gempol di Desa Girimukti, Desa Muaracikadu, dan Desa Sirnagalih Kecamatan Sindangbarang; (6) peningkatan dan rehabilitasi DI Jaya Harapan/Cisiluman/Cibural di Desa Cibuluh, Desa Cimaragang dan Desa Neglasari Kecamatan Cidaun; g. rencana

pembangunan jaringan irigasi baru DI Cilandak, DI Tonjong Panto, DI Cidadali dan DI Curugdendeng, DI Parungbangkong; (7) Rehabilitasi Daerah Irigasi pedesaan tersebar di Kabupaten Cianjur; dan (8) Rencana peningkatan irigasi pedesaan menjadi irigasi kabupaten tersebar di Kabupaten Cianjur

- Sistem pengendalian banjir berupa pengembangan jaringan pengendalian banjir meliputi: (1) perbaikan dan pengaturan Sungai Cianjur, Sungai Cianjurleutik, Sungai Cisarua Gede dan Cisarua leutik di Kecamatan Cugenang, Kecamatan Cianjur dan Kecamatan Karangtengah; (2) Sungai Cikundul di Kecamatan Cipanas, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresmi dan Kecamatan Cikalongkulon; (3) Sungai Cinangsi di kecamatan Cikalongkulon; (4) Sungai Cipendawa dan Sungai Cikanyere di Kecamatan Pacet dan Kecamatan Sukaresmi; (5) Sungai Cimacan di Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Pacet; (6) Sungai Cisokan di Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Sukaluyu dan Kecamatan Mande; (7) Sungai Citarum di Kecamatan Haurwangi; (7) Sungai Cilaku di kecamatan Cilaku dan Kecamatan Sukaluyu; (8) Sungai Cikondang di Kecamatan Cibeber; (9) Sungai Cibalapulang di Kecamatan Sukanagara; (10) Sungai Cijampang di Kecamatan Pagelaran; (11) Sungai Cibuni di Kecamatan Pasirkuda, Kecamatan Tanggeung, Kecamatan Kadupandak, Kecamatan Cijati dan Kecamatan Agrabinta; (12) Sungai Cisadea dan Sungai Ciselang di Kecamatan Sindangbarang; (13) Sungai Cidamar di Kecamatan Cidaun; (14) Sungai Cipandak di Kecamatan Naringgul dan Kecamatan Cidaun; (15) Sungai Cisela di Kecamatan Cidaun; dan (16) Anak-anak sungai lain yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur
- Bangunan sumber daya air terdiri atas: (1) Bendung kewenangan pusat, meliputi Bendung Ciranjang di Kecamatan Bojongpicung; dan Bendung Cisokan di Kecamatan Bojongpicung/Cibeber; (2) Bendung kewenangan provinsi, meliputi Bendung Cimenteng di Kecamatan Cianjur; Bendung Susukan Gede di Kecamatan Cibeber; Bendung Cipadang/Cibeleng di Kecamatan Warungkondang; Bendung Cibalagung di Kecamatan Cianjur; Bendung Cihelang di Kecamatan Karangtengah; Bendung Cilandak di Kecamatan Sukanagara; Bendung Babancong di Kecamatan Takokak; Bendung Cidadali di Kecamtan Kadupandak; dan Bendung

Citajur, Cisarua, Rawapanjang 1, Rawapanjang 2, Cilumut/Mariuk, (Tonjong Panto) di Kecamatan Pagelaran.

- Air tanah pada (CAT) kabupaten, meliputi CAT Cibuni yang merupakan CAT lintas Daerah dan CAT Cianjur.

- Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
  - Sistem penyediaan air minum, meliputi pengembangan dan peningkatan kapasitas layanan SPAM IKK, pembangunan dan pengembangan SPAM IKK lainnya, dan pembangunan dan pengembangan SPAM perdesaan yang melayani kawasan perdesaan.
  - Sistem pengelolaan air limbah;
  - Sistem jaringan persampahan, meliputi: (1) Pembangunan TPS3R yang tersebar di Kecamatan Cidaun, Kecamatan Sindangbarang, Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Naringgul, Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Gekbrong, Kecamatan Cianjur, Kecamatan Ciranjang, dan Kecamatan Karangtengah; (2) Pembangunan TPS di Kecamatan Cibinong, Kecamatan Takokak, Kecamatan Cipanas; (3) Pembangunan dan pengembangan TPST pada Kawasan Permukiman; (4) Pembangunan TPA, meliputi TPA Tanggeung di Kecamatan Tanggeung; TPA Sukanagara di Kecamatan Sukanagara; dan TPA Mekarsari di Kecamatan Cikalongkulon.
  - Sistem Jaringan Evakuasi Bencana terdiri atas: (1) penetapan Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana; (2) jalur evakuasi bencana; dan (3) Tempat evakuasi bencana.
  - Sistem drainase, terdiri atas: (1) Perbaikan dan pengembangan Jaringan drainase sungai utama, meliputi Sungai Citarum; Sungai Cibuni; Sungai Cisadea; Sungai Cipandak; Sungai Cidamar; Sungai Cisokan; Sungai Cidahu; Sungai Cidahu Leutik; Sungai Ciselang; Sungai Ciujung; Sungai Cikalapa; Sungai Cibuntu; Sungai Ciwidig; Sungai Cisela; Sungai Cikawung; dan anak-anak Sungai yang bermuara ke Sungai utama tersebar di Kabupaten Cianjur; (2) Jaringan drainase primer meliputi saluran yang terhubung langsung dengan sungai; (3) Jaringan drainase sekunder meliputi saluran yang terhubung langsung ke drainase primer ; dan (4)Jaringan drainase tersier meliputi saluran yang dibuat secara khusus yang terdapat pada kawasan perumahan, permukiman, industri dan pusat-pusat kegiatan.

Gambar 2.70. Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten Cianjur

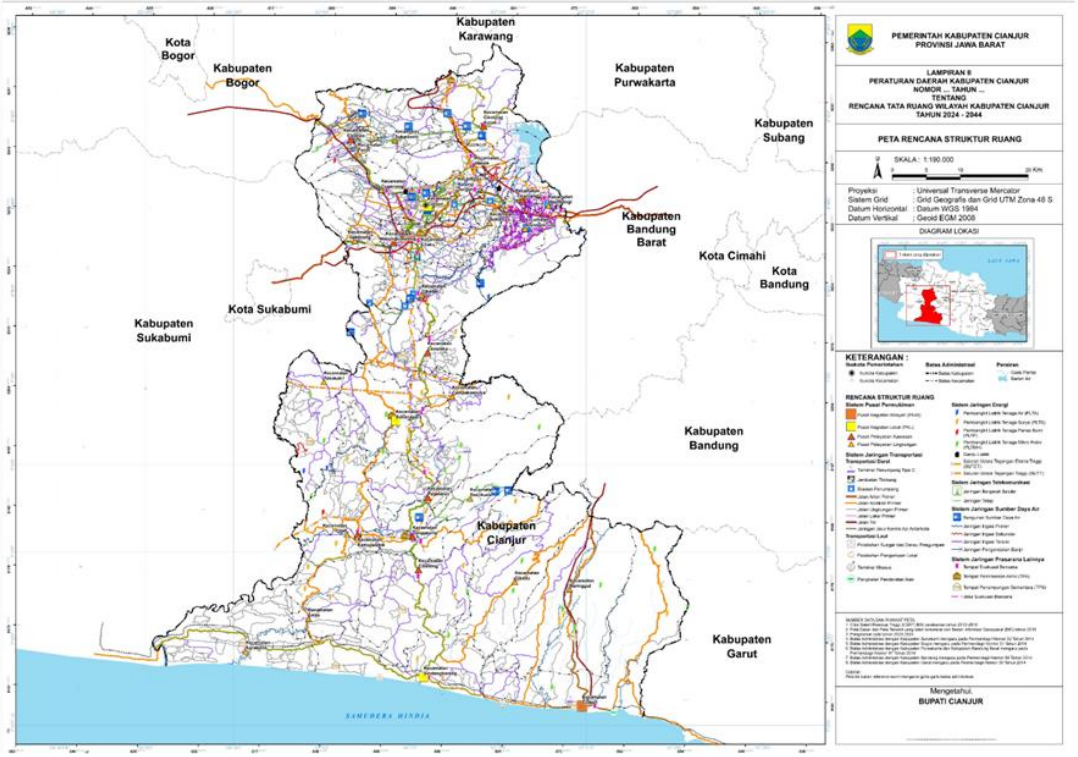

Sumber: Draft Revisi RTRW KAbupaten Cianjur

2.7.1.3 Rencana Pola Ruang

Adapun rencana pola ruang yang diatur dalam RTRW Kab. Cianjur Tahun 2023-2043, terdiri atas:

1. Kawasan Lindung, terdiri atas:
   - Badan air, meliputi:
     - Sungai utama yang bermuara ke Laut tersebar di: (1) Sungai Citarum; (2) Sungai Cibuni; (3) Sungai Cisadea; (4) Sungai Cipandak; (5) Sungai Cidamar; (6) Sungai Cisokan; (7) Sungai Cidahu; (8)Sungai Cidahuleutik; (9) Sungai Ciselang; (10) Sungai Ciujung; (11) Sungai Cikalapa; (12) Sungai Cibuntu; (13) Sungai Ciwidig; (14) Sungai Cisela; dan (15) Sungai Cikawung.
     - Waduk, terdiri atas: (1) Waduk Cirata di Kecamatan Cikalongkulon, Kecamatan Mande, Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Haurwangi; (2) Waduk Cisewu di Kecamatan Cidaun; (3) Rencana pengembangan Waduk Cisokan di Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Campaka; (4) Rencana pengembangan Waduk Cibuni yang berada di Kecamatan Kadupandak/Kecamatan Pagelaran; (5) Rencana pengembangan Waduk Cilaki di perbatasan Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Garut; dan (6) Rencana pengembangan

Waduk Cisadea di Kecamatan Cibinong/Kecamatan Sindangbarang

- Situ, terdiri atas: (1) Rawa Hideung I, Rawa Patat, dan Rawa Herang, di Kecamatan Kadupandak; (2) Rawa Beber, Rawa Benteur, Rawa Eceng, Rawa Gede II, Rawa Kalong, Rawa Patat, Rawa Kajar, Rawa Katepos, Rawa Kole, Rawa Caplak, Situ Galuga, Situ Ciateul/Citawak, Situ Ngebul, di Kecamatan Pagelaran; (3) Rawa Leuwisoro/Citambur, Rawa Getok, Rawa Tamiang, Rawa Gede II, Rawa Balok/Rawa Bala, Rawa Citawak/Ciateul, Rawa Gombong, Rawa Kubang, di Kecamatan Pasirkuda; (4) Rawa Gede I, Rawa Tande, Rawa Picung, Situ Sukamanah, di Kecamatan Tanggeung; (5) Rawa Hideung II, Rawa Talaga, Rawa Kubang, Situ Cimaskara, Situ Cibinong, di Kecamatan Cibinong; (6) Rawa Tangkil, Rawa Picung dan Rawa Ciburial, di Kecamatan Cikadu; (7) Rawa Bereum dan Sawah Tamiang di Kecamatan Campaka; (8) Situ Babakan di Kecamatan Sukaresmi; (9) Situ Hegarmanah di Kecamatan Karangtengah; (10) Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap, dan Situ pasir Gobang di Kecamatan Cibeber; (11) Situ Cikabuyutan di Kecamatan Warungkondang; (12) Situ Cikuda di Kecamatan Gekbrong; m.Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak, Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk, di Kecamatan Sukanagara; (13) Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku, di Kecamatan Takokak; (14) Situ Cicalobak, di Kecamatan Leles; (15) Situ Rancatutut, di Kecamatan Agrabinta; dan (16) Situ Cisepat, di Kecamatan Cidaun.
- Embung terdiri atas: (1) Embung Cinangka Berit, Embung Makarmukti , dan Embung Cimala di Kecamatan Cibinong; (2) Embung Kolaberes dan Rawatangkil, berada di Kecamatan Cikadu; (3) Embung Cangkudu di kecamatan Sukaresmi dan Taman Bunga Nusantara di Kecamatan Sukaresmi; (4) Embung Sukatani di Kecamatan Pacet; (5) Embung Sindangjaya di Kecamatan Cipanas; (6) Embung Ciramagirang di Kecamatan Cikalongkulon; (7) Embung Balongsari dan Cimanggu di Kecamatan Sukaluyu; (8) Embung Hegarmanah di Kecamatan Karangtengah; (9) Embung Cipanas di Kecamatan Cijati; (10) Embung Ciraksa di Kecamatan Campaka; (11) Embung Citemen di Kecamatan Agrabinta; (12) Embung Cimanggu dan Balongsari di Kecamatan Sukaluyu; (13) Embung Cikajar dan Embung Cirobi di Kecamatan Kadupandak; (14) Embung Sukajadi dan Hanjawar di

Kecamatan Pagelaran; dan (15) Rencana pembangunan dan pengembangan potensi embung lainnya yang tersebar berada di setiap kecamatan.

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:
  - Fungsi kawasan budi daya yang memiliki kesesuaian aspek fisik menjadi kawasan berfungsi lindung di Kecamatan Campaka, Kecamatan Campakamulya, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cidaun, Kecamatan Cikadu, Kecamatan Naringgul, Kecamatan Pagalaran, Kecamatan Pasirkuda, dan Kecamatan Sukanagara; dan
  - Pengendalian Pemanfaatan Ruang di kawasan lindung terhadap persetujuan bangunan gedung yang sudah diterbitkan di Kecamatan Campaka, Kecamatan Campakamulya, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cidaun, Kecamatan Cikadu, Kecamatan Naringgul, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pasirkuda, dan Kecamatan Sukanagara.
- Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
  - Sempadan pantai;
  - Sempadan sungai;
  - Kawasan sekitar danau/waduk; dan
  - Kawasan sekitar embung.
- Kawasan konservasi terdiri atas:
  - Kawasan cagar alam, meliputi: (1) Kawasan cagar alam di Kecamatan Campaka; (2) Kawasan cagar alam di Kecamatan Campakamulya; (3) Kawasan cagar alam di Kecamatan Cidaun; (4) Kawasan cagar alam di Kecamatan Cipanas; (5) Kawasan cagar alam di Kecamatan Naringgul; dan (6) Kawasan cagar alam di Kecamatan Takokak.
  - Kawasan taman nasional yaitu Taman Nasional Gunung Gede Pangrango; dan
  - Kawasan taman wisata alam berada di Kecamatan Cipanas
- Kawasan cagar budaya terdiri atas Megalitikum Gunung Padang di Desa Karyamukti Kecamatan Campaka

2. Kawasan Budi Daya terdiri atas:
   - Kawasan hutan produksi, meliputi Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang tersebar di 20 kecamatan; dan Kawasan Hutan Produksi Tetap.yang tersebar di 21 kecamatan.
   - Kawasan pertanian terdiri atas:
     - Kawasan tanaman pangan tersebar di 32 kecamatan Kabupaten Cianjur;

- Kawasan hortikultura tersebar di 32 kecamatan Kabupaten Cianjur;
- Kawasan perkebunan tersebar di 32 kecamatan Kabupaten Cianjur; dan
- Kawasan peternakan tersebar di Kecamatan Cikalongkulon, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Gekbrong, Kecamatan Mande, Kecamatan Sukaluyu, dan Kecamatan Warungkondang,

- Kawasan perikanan terdiri atas:
  - Kawasan perikanan budi daya, meliputi: (1) Budi daya kolam air tawar tersebar di seluruh kecamatan; (2) Budi daya kolam air payau/tambak tersebar di Kecamatan Agrabinta; Kecamatan Cidaun; Kecamatan Sindangbarang; dan Pengembangan Kawasan Tambak Udang di Kecamatan Agrabinta; (3) Budi daya kolam jaring apung berada di kawasan Waduk Cirata.
  - Sarana dan prasarana peruntukan perikanan, terdiri atas: (1) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cikakap di Kecamatan Agrabinta, PPI Jayanti; (2) Pusat Benih Ikan di Kecamatan Karangtengah; (3) Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Bojongpicung; (4) Unit Pembenihan Rakyat
- Kawasan pertambangan dan energi, terdiri atas:
  - Kawasan pertambangan batuan;
  - Kawasan pertambangan mineral logam berada di 11 kecamatan Kabupaten Cianjur;
  - Kawasan pertambangan mineral bukan logam dengan jenis mineral terdiri atas Lempung, Pasir batu, Pasir, Trass, Andesit, Batu gamping, Bentonit, Oker, Granit, Feldspar, Kaolin, Batu setengah permata, Batu templek, Diatomea, Kayu terkersikkan, Tanah merah dan Tanah urug tersebar di 26 kecamatan Kabupaten Cianjur.
- Kawasan peruntukan industri, berupa rencana pengembangan dan pembangunan Kawasan Peruntukan Industri yang tersebar di: (1) Kecamatan Cikalongkulon; (2) Kecamatan Cilaku; (3) Kecamatan Ciranjang; (4) Kecamatan Gekbrong; (5) Kecamatan Haurwangi; (6) Kecamatan Karangtengah; (7) Kecamatan Mande; dan (8) Kecamatan Sukaluyu.
- Kawasan pariwisata terdiri atas:
  - Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) yang tersebar di: (1) Wilayah Cianjur Utara dengan pusat DPK Kecamatan Cianjur; (2) Wilayah Cianjur Tengah dengan pusat DPK Kecamatan

Campaka; dan (3) Wilayah Cianjur Selatan dengan pusat DPK Kecamatan Cidaun.

- Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK), terdiri atas : (1) Kawasan Strategis Ekowisata Alam Cagar Biosfer dan Heritage Cibodas dan sekitarnya; (2) Kawasan Strategis Ekowisata Danau dan Religi Cikundul - Jangari - Haurwangi dan sekitarnya; (3) Kawasan Strategis Pariwisata Cagar Budaya dan Agro Gunung Padang -Pasirnangka dan sekitarnya; dan (4) Kawasan Strategis Ekowisata Pantai Jayanti - Sinarlaut dan sekitarnya.
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), terdiri atas: (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Alam Perkotaan dan Kriya Cianjur -Warungkondang - Cibeber dan sekitarnya; (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata Alam Pegunungan dan Sungai Citambur - Cibuni - Cijati dan sekitarnya; dan (3) Kawasan Pengembangan Pariwisata Alam Pegunungan Naringgul - Gunung Bengbreng dan sekitarnya.

- Kawasan permukiman, terdiri atas:
  - Kawasan permukiman perkotaan tersebar di Permukiman Perkotaan Kecamatan Cianjur; Permukiman Perkotaan Kecamatan Cibeber; Permukiman Perkotaan Kecamatan Cidaun; Permukiman Perkotaan Kecamatan Cikalongkulon; Permukiman Perkotaan Kecamatan Cilaku; Permukiman Perkotaan Kecamatan Cipanas; Permukiman Perkotaan Kecamatan Cugenang; Permukiman Perkotaan Kecamatan Karangtengah; Permukiman Perkotaan Kecamatan Mande; Permukiman Perkotaan Kecamatan Naringgul; Permukiman Perkotaan Kecamatan Naringgul; dan Permukiman Perkotaan Kecamatan Sukanagara.
  - Kawasan permukiman perdesaan tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Cianjur.
- Kawasan pertahanan dan keamanan berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara, terdiri atas:
  - Instalasi dan aset militer serta kepolisian meliputi: (1) Kompleks Komando Distrik Militer (KODIM) 0608 Cianjur di Kecamatan Cianjur; (2) Komando Rayon Militer (Koramil) di setiap kecamatan; (3) Batalyon Infantri 300/Raider di Kecamatan Karangtengah; (4) Batalyon Artileri Medan 5/105-Tarik di Kecamatan Cipanas; (5) Lapangan Udara Salatri di Kecamatan Agrabinta; (6) Kepolisian Resort (Polres) Cianjur di Kecamatan Cianjur; (7) Kepolisian Sektor (Polsek) di setiap kecamatan; (8) Satuan Brigade Mobil (Satbrimob), di

Kecamatan Cipanas; dan (9) Satuan Polisi Air (Satpolair), di Kecamatan Cidaun.

- Daerah latihan, yang meliputi: (1) Kecamatan Pacet; (2) Kecamatan Sukaresmi; (3) Kecamatan Sukaluyu; (4) Kecamatan Cikalongkulon; (5) Kecamatan Bojongpicung; (6) Kecamatan Cibinong; (7) Kecamatan Sindangbarang; (8) Kecamatan Cikadu; (9) Kecamatan Agrabinta; (10) Kecamatan Cidaun; dan (11) Kecamatan Naringgul.

Gambar 2.71. Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Cianjur

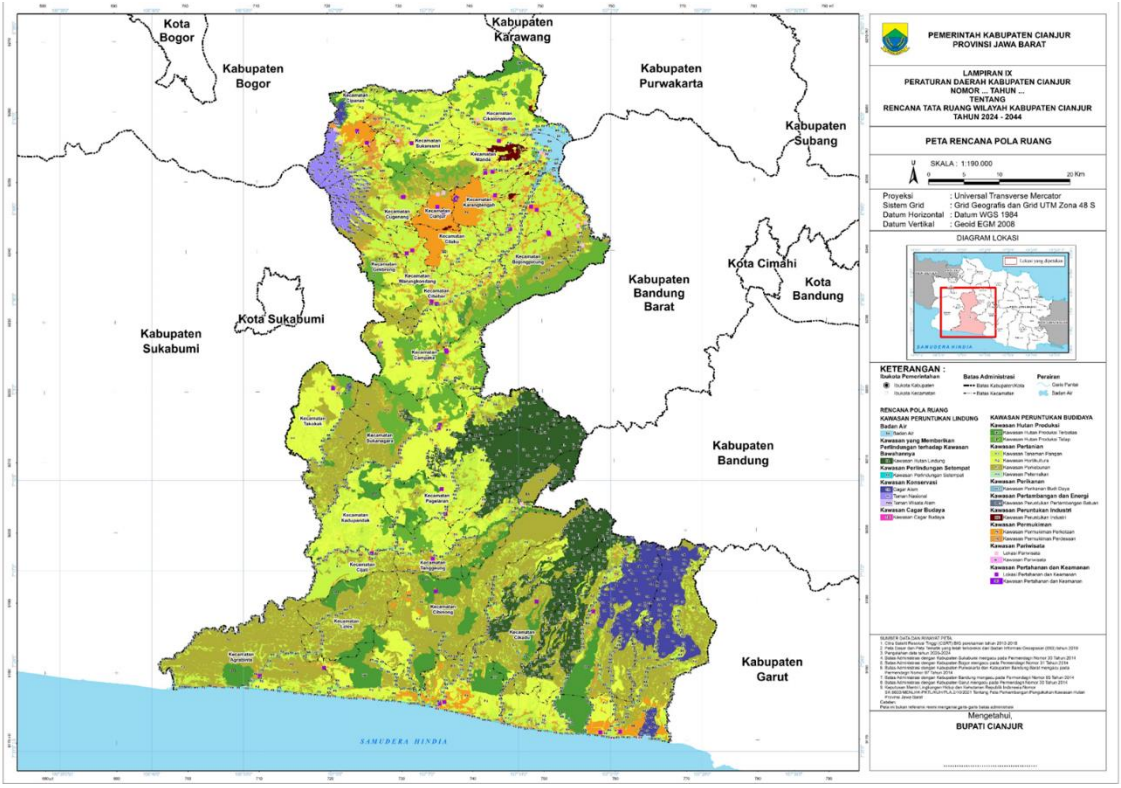

Sumber: Draft Revisi RTRW KAbupaten Cianjur

2.7.1.4 Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten dilihat dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan sebarannya, sebagai berikut:

1. KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
   - Kawasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan di Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan Bojongpicung dan Kecamatan Haurwangi;
   - Kawasan Agropolitan di Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Pacet; dan
   - Penataan Kawasan Pesisir Pantai Selatan di kecamatan Cidaun, Kecamatan Sindangbarang, dan Kecamatan Agrabinta.

2. KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa penataan kawasan wisata alam Naringgul-Cidaun;
3. Penetapan KSK dilaksanakan dengan memperhatikan KSN Perkotaan Jabodetabek-Punjur.

Gambar 2.72. Rencana Kawasan Strategis RTRW Kabupaten Cianjur

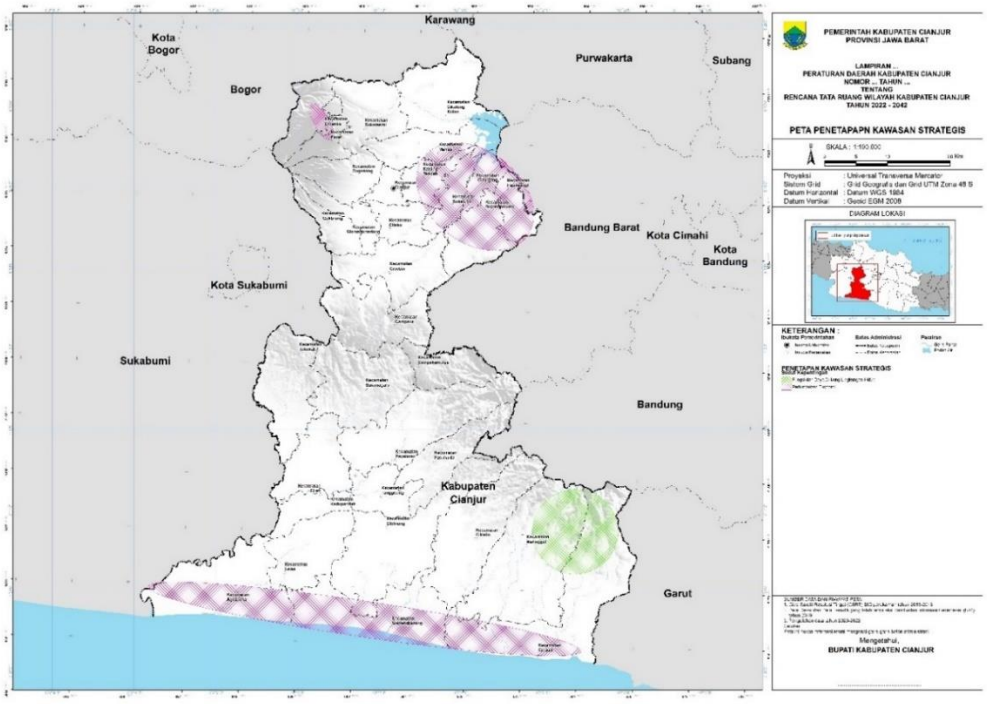

Sumber: Draft Revisi RTRW KAbupaten Cianjur

2.7.2 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu : (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan

Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Berdasarkan hasil Kajian dalam KLHS RPJPD Kabupaten Cianjur, terdapat 188 indikator TPB yang relevan bagi Kabupaten Cianjur. Secara lebih lengkap, capaian setiap indikator TPB di Kabupaten Cianjur dan rekap capaian per target TPB. Adapun TPB diklasifikasikan menjadi 4 (empat), yaitu:

- Pilar sosial terdiri dari TPB 1, 2, 3, 4, dan 5;
- Pilar ekonomi terdiri dari TPB 7, 8, 9, 10, dan 17;
- Pilar lingkungan terdiri dari TPB 6, 11, 12, 13, 14, dan 15; serta
- Pilar hukum dan tata kelola kelembagaan terdiri dari TPB 16.

Jumlah indikator yang relevan dengan kondisi Kabupaten Cianjur, yaitu sebanyak 188 indikator dengan jumlah indikator yang sudah dilaksanakan sebanyak 72 indikator. TPB 3 merupakan TPB dengan jumlah indikator paling banyak, yaitu 32 indikator, sedangkan indikator paling sedikit terdapat pada TPB 13 dengan jumlah 2 indikator. Tingkat pencapaian indikator yang termasuk dalam kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), yaitu TPB 3 sebanyak 16 indikator. Selain itu pada kategori sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB) memiliki sebanyak 69 indikator dan kategori tidak/belum ada data (NA) sebanyak 47 indikator. Hal ini harus menjadi perhatian khusus karena indikator tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.73. Persentase Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Cianjur

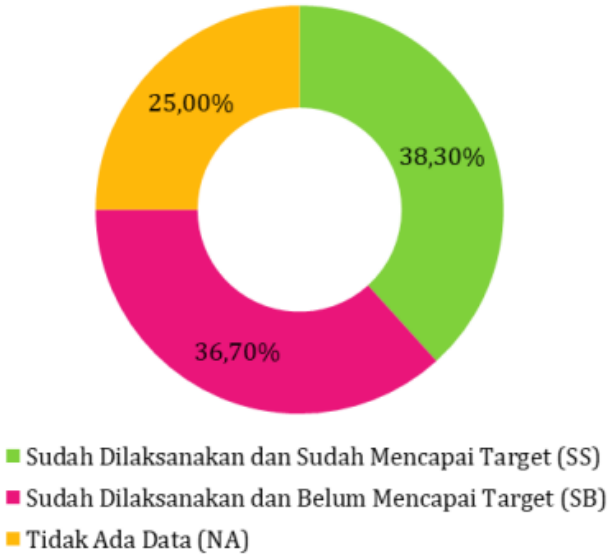

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS RPJPD Kabupaten Cianjur,2023

Berdasarkan tingkat pencapaian indikator dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB) dan tidak ada data (NA)

sebesar 36,70% indikator yang relevan dengan kondisi di Kabupaten Cianjur sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dan 25% indikator yang termasuk kategori tidak ada data.

2.7.3 Penelaahan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Negara Nusantara artinya negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional dan buaya/peradaban Bahari sebagai poros maritim dunia. Berdaulat yang dicapai melalui ketahanan, kesatuan, mandiri dan aman. Maju tercermin dari budaya, modern, Tangguh, inovatif dan adil. Berkelanjutan melalui Pembangunan yang Lestari dan seimbang antara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Visi tersebut dicerminkan oleh lompatan besar meliputi lima sasaran visi yaitu (i) pendapatan per kapita setara negara maju (GNI perkapita sebesar USD 30,300, kontribusi PDB maritim mencapai 17,5 persen, serta PDB industri 28 persen); (ii) kemiskinan menuju nol persen (Tingkat kemiskinan di kisaran 0,5-0,8 persen) dan ketimpangan berkurang (rasio gini 0,290-0,320 dan peningkatan kontribusi PDRB KTI menuju 26 persen); (iii) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang meningkat (*global Power Index)* masuk 15 besar dunia); (iv) Daya saing sumber daya manusia juga terus meningkat (skor HCI menjadi 0,73); dan (v) Intensitas emisi GRK menurun menuju emisi nol netto (*net zero emission*) dengan Tingkat penurunan mencapai 93,5 persen.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan delapan misi (agenda) Pembangunan. Agenda ini pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu (i) Transformasi Indonesia 3 (tiga) agenda yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi dan Transformasi Tata Kelola; (ii) Landasan Transformasi 2 (dua) Agenda yaitu Agenda Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi serta Agenda Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; dan (iii) Kerangka Implementasi dengan 3 (tiga) Agenda yaitu Agenda Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas, Agenda Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan serta Agenda Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui tujuh belas arah kebijakan menuju Indonesia Emas 2045.

1. **Mewujudkan Transformasi Sosial** untuk membangun manusia sehat, cerdas, kreatif, Sejahtera dan berdaya saing.
2. **Mewujudkan Transformasi Ekonomi** untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif termasuk industri manufaktur, *blue economy,* pertanian, pariwisata,

ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta Pembangunan perkotaan berkelanjutan.

3. **Mewujudkan Transformasi Tata Kelola** untuk membangun regulasi yang adaptif dan birokrasi yang bersih, efektif, ramah dan cepat.
4. **Memantapkan Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi** dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di Tingkat global.
5. **Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** dengan memantapkan ketangguhan individu, keluarga, Masyarakat dan lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal sosial budaya, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan.
6. **Pembangunan Kewilayahan** diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas Pembangunan melalui pengembangan kebijakan Pembangunan daerah secara umum dan penterjemahan agenda transformasi, stabilitas dan ketahanan.
7. **Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan** menjadi faktor kunci sekaligus sebagai salah satu pilar pendukung pemenuhan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata Kelola, stabilitas dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.
8. **Kesinambungan Pembangunan** Diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, komunikasi public yang handal, serta pembiayaan Pembangunan yang inovatif dan dituangkan kedalam pentahapan Pembangunan dalam jangka Panjang secara terukur dan konsisten seperti terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.76. Tahapan dan Fokus Pembangunan RPJP Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

Tahapan Pembangunan	Fokus Pembangunan
Tahapan Pertama (2025-2029) adalah Penguatan Fondasi Transformasi	a. Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif; b. Transformasi ekonomi difokuskan pada Upaya lanjutan hilirisasi sumberdaya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset dan inovasi, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital ke seluruh wilayah Indonesia, Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa; c. Transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan dan regulasi yang tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, peningkatan pelayanan public berbasis teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas Masyarakat sipil; d. Stabilitas dan ketangguhan diplomasi difokuskan pada penguatan stabilitas hukum, politik dan keamanan yang mencakup penegakan hukum dan anti korupsi, penguatan regulasi terkait demokrasi dan system politik, penguatan ketahanan dan keamanan luar negeri; e. Pengembangan diplomasi yang Tangguh difokuskan pada penguatan infratstruktur diplomasi dan kelembagaan, serta mengkonsolidasikan kebijakan dan Langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi; f. Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada peningkatan ketangguhan manusia dan Masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; optimalisasi peran agama, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan ketangguhan sosial dan budaya; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK; g. Pembangunan wilayah difokuskan untuk peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah (Smart Grid); h. Pembiayaan Pembangunan dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiscal, serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan Pembangunan non pemerintah.
Tahapan kedua (2030-2034) dengan telah terwujudnya fondasi yang	a. Transformasi sosial dititikberatkan pada penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas;

Tahapan Pembangunan	Fokus Pembangunan
kuat, Indonesia melakukan akselerasi transformasi	b. Transformasi ekonomi difokuskan pada percepatan peningkatan produktivitas, penguatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan terutama di luar Jawa termasuk melanjutkan pembangunan IKN dan daerah mitranya, serta optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti penerapan blue economy, green economy, dan bio economy; c. Transformasi tata kelola difokuskan pada terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera dan berkompeten, deregulasi secara masif dan penguatan naskah urgensi regulasi, partai politik yang berintegritas, serta masyarakat sipil yang partisipatif; d. Stabilitas dan ketangguhan diplomasi difokuskan pada semakin rendahnya tingkat kriminalitas dan mulai menguatnya diplomasi proaktif, semakin menurunnya tingkat korupsi dan mulai tertanamnya budaya hukum, terlaksananya digitalisasi pemilu secara lebih baik, adaptifnya pengelolaan fiskal dan moneter terhadap guncangan, serta dalam pengembangan diplomasi yang tangguh, konsolidasi kebijakan sinergis, infrastruktur dan kelembagaan diplomasi telah bekerja secara efektif; e. Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi; penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah; meningkatnya manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; dan terwujudnya generasi muda yang sadar akan peran keluarga dalam meningkatkan ketangguhan sosial dan budaya; f. Pembangunan wilayah difokuskan pada percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru termasuk pengembangan superhub ekonomi IKN yang didorong dengan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital; g. Pembiayaan pembangunan telah berkembangnya sumber pendanaan non pemerintah dan tercapainya optimalisasi beberapa sumber pendanaan pemerintah.
Tahapan ketiga (2035-2039) Indonesia memulai langkah untuk melakukan ekspansi global	a. Transformasi sosial dititikberatkan pada penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. Transformasi ekonomi difokuskan pada penguatan transformasi yang menghasilkan economic power house melalui peningkatan daya saing yang tinggi secara internasional dan berkelanjutan dengan menekankan pada perluasan dan penguatan peran dalam Global Value Chain, penguasaan teknologi menengah dan tinggi, dan menjadi hub maritim Asia; c. Transformasi tata kelola ditekankan pada terwujudnya kelembagaan yang adaptif, SDM ASN yang kompetitif, lembaga tunggal pengelola regulasi, penyusunan regulasi berbasis teknologi informasi, partai politik yang transparan dan akuntabel, kemitraan pemerintah - non pemerintah, efektivitas pengendalian pembangunan, serta pelayanan publik yang inovatif, dan masyarakat sipil yang kuat dan mandiri;

Tahapan Pembangunan	Fokus Pembangunan
	d. Stabilitas dan ketangguhan diplomasi pada tahap ini difokuskan pada pemantapan Indonesia sebagai kekuatan di kawasan dan penguatan ketertiban masyarakat, pelaksanaan budaya hukum dan penghapusan korupsi, menciptakan platform ruang publik nonkomersil berbasis digital yang aman dan sehat, peningkatan jumlah penerimaan negara dan efektivitas belanja negara, serta penguatan diplomasi yang sinergis didukung oleh infrastruktur dan kelembagaan diplomasi yang handal telah mengantarkan Indonesia menjadi Global Player Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang professional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian nasional; e. Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada terwujudnya manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, generasi muda yang sadar akan peran keluarga dalam meningkatkan ketangguhan sosial dan budaya, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif, penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta pengurangan pencemaran lingkungan, penerapan energi bersih dan penanganan limbah (padat dan cair) yang terkelola dengan baik di perkotaan, serta integrasi sistem pangan; f. Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan pada peningkatan konektivitas kualitas internasional untuk mendorong ekspansi global terutama pada wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan yang didukung dengan pengembangan energi baru terbarukan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah. Tahap transisi energi berikutnya adalah pembangunan Island Grid di Maluku dan Papua serta National Grid antara Sumatera-Jawa-Bali Nusra-Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua; g. Pembiayaan pembangunan pada tahap ini difokuskan pada peningkatan, pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber dana non pemerintah di daerah.
Tahapan keempat (2040-2045) Indonesia berhasil mewujudkan Indonesia Emas 2045	a. Transformasi sosial dititikberatkan pada perwujudan manusia Indonesia yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing; b. Transformasi ekonomi difokuskan pada perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui semakin besarnya SDM dan inovasi Indonesia yang berdaya saing global; c. Transformasi tata kelola difokuskan pada perwujudan tata kelola kolaboratif yang dicirikan dengan kelembagaan yang adaptif, ASN yang profesional, ekosistem regulasi yang tangguh, partai politik yang modern dan berintegritas, serta masyarakat sipil yang kuat, mandiri, dan partisipatif; d. tabilitas dan ketangguhan diplomasi difokuskan untuk menguatnya kepemimpinan Indonesia di Asia-Pasifik serta terciptanya rasa aman dan nyaman di masyarakat, hapusnya korupsi dan terwujudnya budaya hukum yang baik, terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat, menguatnya pengelolaan fiskal dan moneter untuk menghadapi berbagai ancaman

Tahapan Pembangunan	Fokus Pembangunan
	VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, serta berlanjutnya penguatan diplomasi Indonesia yang tangguh telah memantapkan peran dan pengaruh Indonesia sebagai *Global Player*; e. Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada terwujudnya manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, generasi muda yang sadar akan peran keluarga dalam meningkatkan ketangguhan sosial dan budaya, Indonesia menjadi negara percontohan penerapan ekonomi hijau dan biru, lingkungan hidup yang berkualitas baik, penerapan energi bersih di seluruh sektor pembangunan, produk pangan termasuk produk olahan Indonesia mendunia, sumber daya hayati yang termanfaatkan sebagai sumber pangan dan farmakologi, dan penurunan emisi GRK menuju pencapaian *Net Zero Emission;* f. Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang handal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas; g. Pembiayaan pembangunan pada tahap ini sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah semakin meningkat.

Sumber: Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

2.7.4 Penelaahan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045. Visi pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 adalah "Jawa Barat Mandiri, Unggul, Berkelanjutan". Mandiri yaitu produktif dan mampu memanfaatkan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Unggul yaitu memiliki kelebihan, utama, terbaik, berada pada posisi lebih tinggi atau menang diantara yang lain dalam kompetensi dan daya saing. Berkelanjutan yaitu pelaksanaan Pembangunan yang terencana dan terukur sehingga tidak merusak lingkungan. Guna mencapai visi tersebut maka misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1) Mengembangkan sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing;
2) Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif;
3) Meningkatkan pelayanan infrastruktur dan pelayanan dasar yang berkualitas;
4) Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
5) Menguatkan tata Kelola pemerintahan yang berkualitas dan berbasis inovasi.

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah. Pada akhir periode RPJPD Provinsi Jawa Barat atau dalam kerangka RPJMD pada tahapan keempat, diharapkan bahwa batas bawah pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat terkategorikan tinggi (IPM = 86,57). Mengacu pada target yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat memiliki tanggungjawab dan memerlukan komitmen agar pembangunan daerahnya mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, target dan prioritas pembangunan Kabupaten Cianjur perlu menyelaraskan dengan tahapan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun tahapan Pembangunan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- Tahap pertama
    1. Pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan dan sosial;
    2. Penciptaan lapangan pekerjaan dan SDM yang kompeten;
    3. Penyediaan infrastruktur dan layanan dasar;
    4. Tata Kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

5. Penataan kelembagaan, regulasi, digitalisasi dan pemberdayaan Masyarakat sipil.

- Tahap kedua
  1. Pembangunan SDM berakhlak, berkarakter, berkualitas dan inklusif;
  2. Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing sektor perekonomian;
  3. Pemerataan infrastruktur dan layanan dasar;
  4. Pemulihan, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
  5. Peningkatan fungsi kelembagaan kolaboratif berbasis teknologi informasi.
- Tahap ketiga
  1. Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan;
  2. *Link and match* industri besar dengan IKM/UMKM;
  3. Optimalisasi infrastruktur dan layanan dasar;
  4. Konsistensi penguatan Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  5. Penguatan kelembagaan adaptif, ASN kompetitif dan Masyarakat sipil mandiri.
- Tahap keempat
  1. Perwujudan manusia Jawa Barat yang unggul;
  2. Pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan;
  3. Perwujudan infrastruktur dan pelayanan dasar yang berkualitas;
  4. Perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
  5. Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang responsive, berkualitas dan berintegritas.

2.7.5 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Kabupaten Cianjur termasuk dalam WP Bodebekpunjur sebagai pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Daerah Provinsi dengan kesetaraan fungsi dan peran Kawasan di KSN Jabodetabekpunjur serta antisipatif terhadap perkembangan pembangunan Wilayah perbatasan. Kabupaten Cianjur memiliki fungsi sebagai PKW yang memiliki peran pusat koleksi dan distribusi skala nasional yaitu berupa PKW Cidaun – Rancabuaya.

2.7.5.1 Tujuan dan Kebijakan Penataan Ruang

Tujuan dalam penataan ruang Provinsi Jawa Barat adalah "Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia". Dalam mencapai tujuan penataan ruang tersebut maka,

disusun berbagai kebijakan penataan ruang yang terdiri atas 9 (sembilan) kebijakan, diantaranya:

a) Pengembangan wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP dengan ketetapan Kawasan yang dikendalikan perkembangannya, kawasan yang didorong perkembangannya, Kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan Kawasan yang ditingkatkan perkembangannya;
b) Pemantapan peran perkotaan di daerah provinsi sesuai fungsi yang ditetapkan, meliputi PKN, PKW, dan PKL;
c) Penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat mejadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali, dan pendorong pengembangan wilayah, serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di daerah provinsi;
d) Perlindungan dan peningkatan kualitas Kawasan yang berfungsi lindung;
e) Pengamanan lahan sawah, serta peningkatan produktivitas pertanian, guna menjaga ketahanan pangan daerah Provinsi dan Nasional;
f) Pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau kecil dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
g) Optimalisasi potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
h) Pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan RTR pertahanan dan keamanan.

2.7.5.2 Rencana Struktur Ruang

Rencana pengembangan Kabupaten Cianjur dalam Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi Jawa Barat, meliputi:

1. Sistem jaringan jalan :
   a. Jalan arteri, terdiri atas:
      - Gekbrong (Bts. Kabupaten) - Bts. Kota Cianjur;
      - Jalan Pasir Hayam - Sp.3 Perint. Kemerdekaan (Kabupaten Cianjur);
      - Jalan Perintis Kemerdekaan (Kabupaten Cianjur);
      - Lingkar Cianjur;
      - Bts. Kota Cianjur – Citarum (Kabupaten Cianjur); dan
      - Jalan Raya Bandung (Kabupaten Cianjur).
   b. Jalan kolektor primer satu (JKP-1) meliputi :
      - Tegalbuleud (Cibuni) - Argabinta – Sindangbarang (Kabupaten Cianjur);

- Sindangbarang – Cidaun (Kabupaten Cianjur);
- Cidaun - Cisela – Cilaki (Kabupaten Cianjur);
- Cilaki - Rancabuaya – Cijayana (Kabupaten Cianjur);
- Puncak - Bts. Kota Cianjur (Kabupaten Bogor);
- Jalan Ir. H. Juanda (Kabupaten Cianjur);
- Jalan Dr. Muwardi (Kabupaten Cianjur);
- Rancabali - Bts. Bandung/Cianjur (Kabupaten Bandung);
- Bts. Bandung/Cianjur - Naringgul – Cidaun (Kabupaten Bandung).

c. Jalan kolektor primer dua (JKP-2), meliputi:
- SP3. Perintis Kemerdekaan (Pasir Hayam)-Cibeber (Kabupaten Cianjur);
- Jalan Raya Cibeber (Cibeber-Kabupaten Cianjur);
- Cibeber-Sukanagara (Kabupaten Cianjur);
- Jalan Raya Sukanagara (Sukanagara-Kabupaten Cianjur);
- Sukanagara-Sindangbarang (Kabupaten Cianjur);
- Jalan Raya Sukanagara (Sindangbarang- Kab Cianjur);
- Rajamandala-Jembatan Citarum Lama (Kabupaten Cianjur);
- Jembatan Citarum Lama-Cihaur Wangi/Cipeuyeum (Kabupaten Cianjur); dan
- Sp. Pancuh Tilu-Cikadu (Kabupaten Cianjur).

d. Jalan kolektor primer tiga (JKP-3), meliputi :
- Simpang Muara Cikadu-Sp. Pancuh Tilu (Kabupaten Cianjur);
- Cikadu-Kebon Muncang-Batas Kabupaten Bandung/Cianjur;
- Batas Kabupaten Bandung/Cianjur-Pondok Datar; dan
- Gununghalu-Sukanagara (Kabupaten Cianjur).

e. Jalan tol, yaitu ruas jalan Caringin-Cianjur (Akses Puncak) (JW82) (rencana);

f. Jembatan timbang terdapat di daerah Bojong.

2. Sistem jaringan kereta api, berupa jaringan jalur kereta api Cileungsi–Jonggol–Cianjur (rencana);
3. Sistem jaringan sungai, danau dan penyebrangan, yaitu pelabuhan sungai dan danau;
4. Sistem jaringan transportasi laut, meliputi :
   a. Pelabuhan pengumpan lokal yaitu Pelabuhan Sindangbarang;
   b. Terminal khusus di perairan Kabupaten Cianjur; dan
   c. Pangkalan pendarat ikan (PPI), meliputi PPI Cikakap dan PPI Jayanti.
5. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi :
   a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
   b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
   c. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM).

6. Sistem jaringan irigasi, meliputi :
7. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu DI Cihea
   a. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi DI Babancong, DI Cibalagung, DI Ciheulang, DI Cimenteng, DI Cipadang Cibeleng, DI Susukan Gede, dan DI Tonjong Panto;
   b. Rencana pembangunan jaringan irigasi baru, meliputi DI Cilandak, Tonjong Panto, Cidadali, dan Curugdengdeng; DI Parungbangkong; DI Tanjong Panto;
   c. Sistem pengendali banjir, yaitu sungai di daerah Kabupaten Cianjur; dan
   d. Jaringan dan bangunan sumber daya air, meliputi bendungan dan bendung.

Untuk lebih jelasnya Rencana Struktur Ruang Provinsi Jawa Barat dapat di lihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.74. Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Jawa Barat

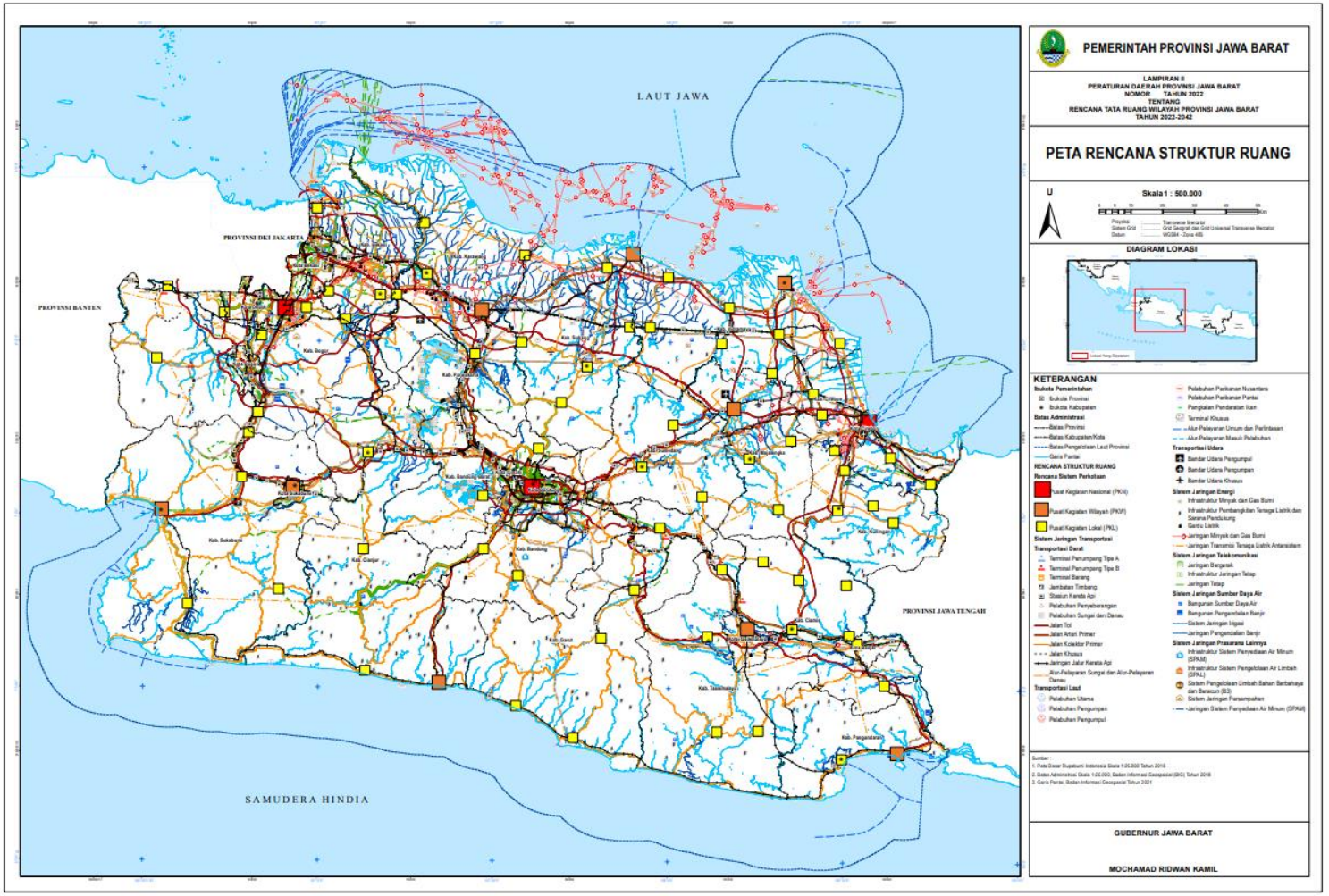

Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

2.7.5.3 Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya baik pada wilayah daratan maupun laut. Berikut beberapa kawasan yang terkait dengan Kabupaten Cianjur.

1. Rencana Pola Ruang Lindung
   a. Badan air tersebar di seluruh daerah Kabupaten;
   b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa hutan lindung;
   c. Kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar waduk dan danau/situ;
   d. Kawasan konservasi meliputi : (1) Cagar Alam Talaga Warna (terletak di Daerah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur); (2) Cagar Alam Takokak, Cagar Alam Cadas Malang, dan Cagar Alam Bojong Larang Jayanti; (3) Cagar Alam Gunung Simpang; (4) Taman Nasional Gunung Gede Pangrango; (5) Taman Wisata Alam Jember; dan (6)Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Taman Bunga Nusantara dan Kebun Raya Cibodas.
   e. Kawasan Cagar Budaya, yaitu Gunung Padang
2. Rencana Pola Ruang Budidaya, terdiri atas:
   a. Kawasan hutan produksi;
   b. Kawasan pertanian;
   c. Kawasan perikanan tangkap tersebar di perairan Kabupaten Cianjur;
   d. Kawasan pertambangan dan energi;
   e. Kawasan pariwisata meliputi : (1) Destinasi kawasan pariwisata provinsi, terdiri atas Destinasi pariwisata provinsi Bogor-Cianjur-Sukabumi dan Destinasi pariwisata provinsi Pangandaran-Tasikmalaya-Garut-Cianjur; dan (2) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, yaitu Kawasan Pariwisata Cagar Budaya Cianjur – Sukabumi dan sekitarnya.
   f. Kawasan transportasi.

.Untuk lebih jelasnya Rencana Struktur Ruang Provinsi Jawa Barat dapat di lihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.75. Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Jawa Barat

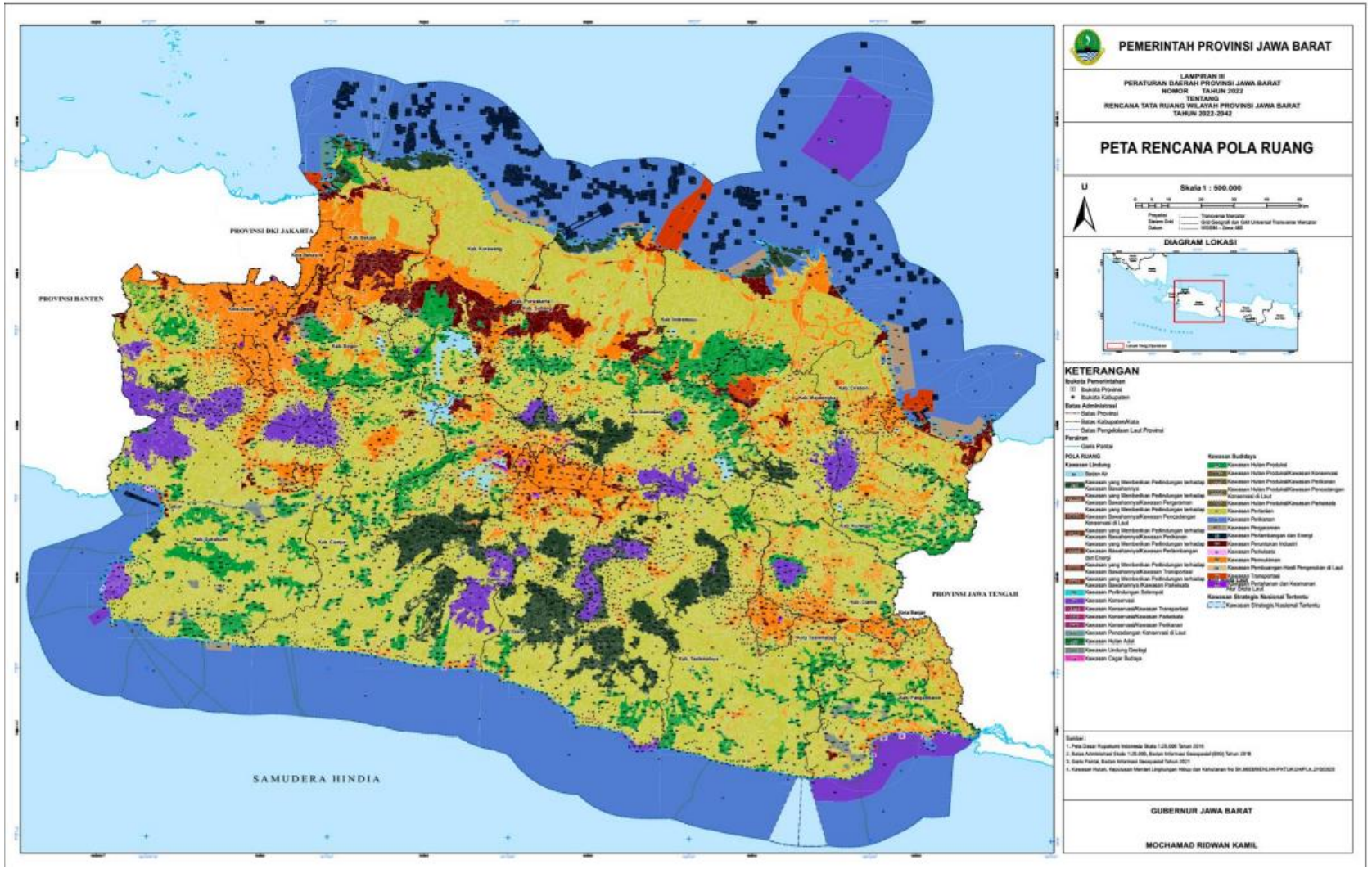

Sumber : Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

2.7.5.4 Wilayah Pengembangan dan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat

Selain itu, dalam peningkatan efektivitas pengelolaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, Kabupaten Cianjur termasuk kedalam 2 (dua) WP diantara 6 (enam) WP yang dibagi, yaitu:

a) WP Bodebekpunjur, pengembangan Kawasan perkotaan di Wilayah Daerah Provinsi dengan kesetaraan fungsi dan peran Kawasan di KSN Jabodetabekpunjur, serta antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi Daerah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok dan Sebagian Wilayah di Kabupaten Cianjur;
b) WP Sukabumi dan sekitarnya, penjabaran dari Kawasan andalan Sukabumi yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan Wilayah perbatasan, meliputi Daerah Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur.

Kabupaten Cianjur berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 diarahkan pada beberapa Kawasan strategis Provinsi, diantaranya:

a) Destinasi Pariwisata Provinsi Bogor-Cianjur-Sukabumi;
b) Destinasi Pariwisata Provinsi Pangandaran-Tasikmalaya-Garut-Cianjur
c) Kawasan Pariwisata Cagar Budaya Cianjur-Sukabumi, dan sekitarnya; dan KSN Bodebek-punjur.

Gambar 2.76. Peta Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat

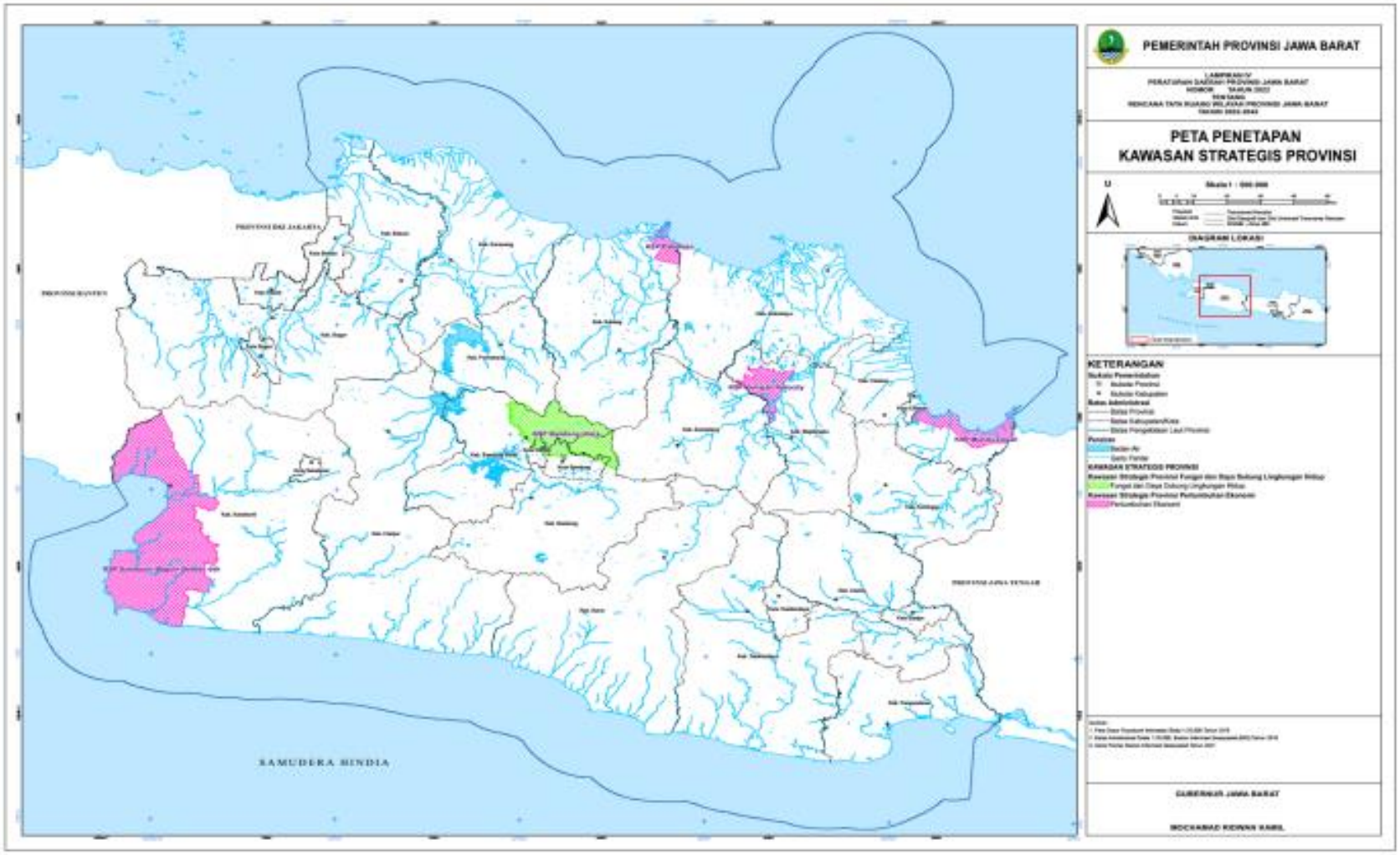

Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

2.7.6 Penelahaan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur

Penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagai Kawasan Perkotaan yang merupakan pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan.

Yang termasuk dalam kawasan Bodebekpunjur yaitu sebagian wilayah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat yang mencakup Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Sukaresmi. Kebijakan penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur meliputi:

1. Pengembangan dan pemantapan sistem kota-kota secara hierarki dan terintegrasi dalam bentuk Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sesuai dengan fungsi dan perannya;
2. Pengendalian perkembangan Kawasan Perkotaan Inti untuk membatasi penjalaran pertumbuhan ke kawasan sekitarnya;
3. Pengembangan sistem prasarana untuk meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya, serta meningkatkan keterhubungan dalam konteks internasional dan nasional;
4. Penetapan dan pemantapan fungsi Kawasan Lindung dan RTH dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya penyediaan air tanah dan air permukaan, konservasi air dan tanah, serta menanggulangi banjir;
5. Pengembangan dan pemantapan Kawasan Budidaya dengan tetap memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta aspek keberlanjutan ekologis;
6. Pemantapan fungsi pemerintahan skala nasional dan pengembangan ekonomi berskala internasional dan nasional berbasis industri serta perdagangan dan jasa;
7. Pengembangan sistem prasarana serta penerapan dan pemantapan program-program pengendalian banjir dan rob di Kawasan Jabodetabek-Punjur secara komprehensif;
8. Penerapan dan pemantapan konsep pengembangan Kawasan Budidaya dan pembangunan sarana prasarananya di kawasan pesisir pantai utara sebagai upaya antisipasi pemenuhan kebutuhan ruang perkotaan dengan memperhatikan keberlanjutan ekologis dan keberlanjutan ekosistem perairan, serta

mempertimbangkan upaya pengendalian terhadap ancaman bencana banjir dan/ atau rob dan kenaikan muka air laut;

9. Pengembangan sistem prasarana dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimum perkotaan yang mendukung fungsi kawasan; dan
10. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan keterpaduan pembangunan melalui kerjasama antardaerah, kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan Peran Masyarakat.
11. Strategi pengembangan dan pemantapan sistem kota-kota secara hierarki dan terintegrasi dalam bentuk Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sesuai dengan fungsi dan Perannya.
12. Mengembangkan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional, pusat perekonomian dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, serta mendorong perkotaan sekitarnya yang berada dalam Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur untuk mendukung kegiatan perkotaan inti;
13. Mendorong pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sesuai peran dan fungsinya masing-masing;
14. Meningkatkan keterkaitan Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya dalam rangka mendukung keterpaduan peran dan fungsi antara kota inti dan kota sekitarnya melalui penyediaan infrastruktur yang terintegrasi; dan
15. Mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berdasar atas keterpaduan antardaerah sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan.

Gambar 2.77. Peta Pola Ruang Kabupaten Cianjur Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023

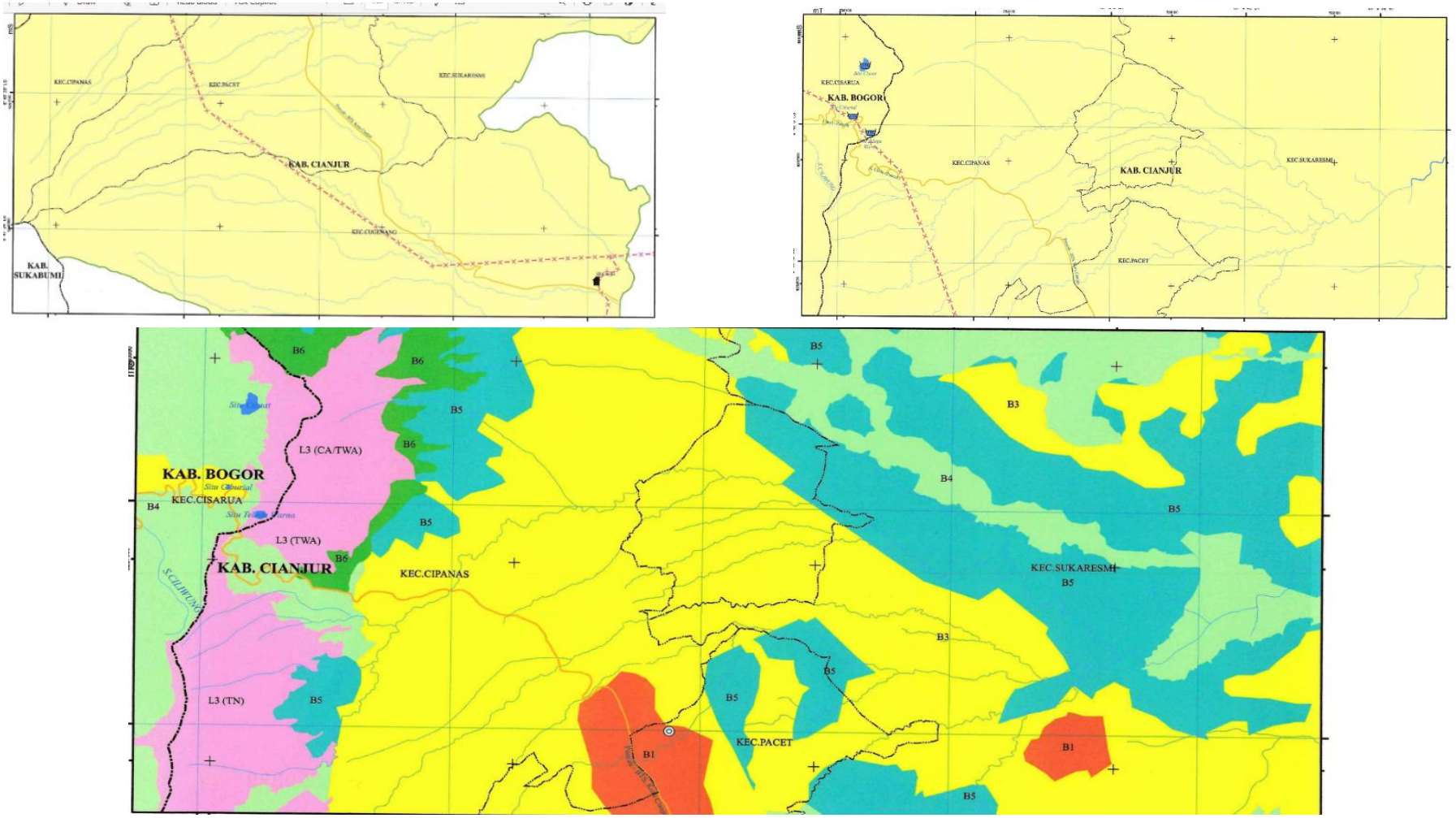

2.7.7 Penelaahan Peraturan Presiden (PERP RES) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, Kabupaten Cianjur diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis dan perikanan, dengan pengembangan sebagai berikut :

1. Jalur horizontal Tegalbuleud – Sindangbarang – Cidaun ;
2. Jalur vertikal, meliputi :
   a. Sindangbarang – Pagelaran– Tanggeung – Sukanagara – Cianjur; dan
   b. Cidaun – Naringgul – Rancabali – Cianjur .
3. Terminal di Kecamatan Sindangbarang dan Kecamatan Cidaun;
4. Pembangunan tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang;
5. Pembangunan dan peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS);
6. Pembangunan jalur vertikal Ciwidey – Cikadu – Sindangbarang;
7. Pelebaran jalan Cianjur – Sindangbarang;
8. Pengembangan Kawasan Pesisir Minapolitan Jawa Barat Selatan;
9. Pembangunan daerah irigasi baru DI Curug Dengdeng;
10. Pengembangan Pump Storage Upper Cisokan;
11. Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terapung Cirata;
12. Pembangunan Desa Digital;
13. Pembangunan pangkalan pendaratan ikan (PPI Jayanti);
14. Pengembangan Kawasan Tambak Udang;
15. Pengadaan sarana penangkapan ikan;
16. Pengembangan destinasi wisata Kabupaten Cianjur, meliputi Kawasan Gunung Padang (Kec. Campaka), Pantai Cemara Cipanglay (Kec. Cidaun), Pantai Tipar Sinar Laut (Kec. Agrabinta), Pantai Batukumbung (Kec. Cidaun), Kawasan Wisata Budaya Pandanwangi (Kec. Warungkondang);
17. Pengembangan desa wisata.Pembangunan dan peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS);
18. Pembangunan jalur vertikal Ciwidey – Cikadu – Sindangbarang;
19. Pelebaran jalan Cianjur – Sindangbarang;
20. Pengembangan Kawasan Pesisir Minapolitan Jawa Barat Selatan;
21. Pembangunan daerah irigasi baru DI Curug Dengdeng;
22. Pengembangan Pump Storage Upper Cisokan;
23. Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terapung Cirata;
24. Pembangunan Desa Digital;
25. Pembangunan pangkalan pendaratan ikan (PPI Jayanti);

26. Pengembangan Kawasan Tambak Udang;
27. Pengadaan sarana penangkapan ikan;
28. Pengembangan destinasi wisata Kabupaten Cianjur, meliputi Kawasan Gunung Padang (Kec. Campaka), Pantai Cemara Cipanglay (Kec. Cidaun), Pantai Tipar Sinar Laut (Kec. Agrabinta), Pantai Batukumbung (Kec. Cidaun), Kawasan Wisata Budaya Pandanwangi (Kec. Warungkondang);
29. Pengembangan desa wisata.

2.7.8 Penelaahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Kabupaten Cianjur termasuk dalam kawasan Aglomerasi Daerah Khusus Jakarta. Kawasan Aglomerasi adalah kawasan yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi sekalipun berbeda dari sisi administratif sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global.

Masuknya Kabupaten Cianjur sebagai kawasan aglomerasi yaitu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bukan hanya menjadi *catchment area* atau daerah tangkapan air dan resapan air namun berkembang menjadi Kabupaten sektor Industri di Kecamatan Mande dan Kecamatan Cikalongkulon. Pada bidang ketahanan pangan bagi kebutuhan warga Jakarta dan sekitarnya akan dipenuhi oleh Kabupaten Cianjur yang telah berhasil dalam pemenuhan kebutuhan lokal dan stok pangan Jawa Barat.

2.7.9 Penelaahan Rancangan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kawasan Sekitarnya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaanya. Adapun perumusan visi pada wilayah Kabupaten dan Kabupaten sekitarnya harus sejalan dengan visi pada Provinsi dan visi Provinsi harus sejalan dengan visi Nasional, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77. Persandingan Visi RPJPD Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sekitarnya

Nasional	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Cianjur	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Bogor	Kabupaten Purwakarta	Kabupaten Bandung Barat
Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan	Dengan Iman dan Takwa Mewujudkan Cianjur Mandiri, Maju dan Berkelanjutan Berbasis Budaya	Kabupaten Sukabumi Maju, Mandiri dan Berkelanjutan	Kabupaten Bogor Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Kabupaten Purwakarta Maju, Mandiri dan Berkelanjutan	Bandung Barat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan

Sumber: Rancangan RPJPD Kabupaten Cianjur; Rancangan RPJPD Kabupaten Sukabumi; Rancangan RPJPD Kabupaten Bogor; Rancangan RPJPD Kabupaten Purwakarta; Rancangan RPJPD Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan persandingan visi RPJPD Kabupaten Cianjur dan Kabupaten sekitarnya diketahui terdapat kesamaan pada visi Mandiri, Maju dan Berkelanjutan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN CIANJUR 2025-2045

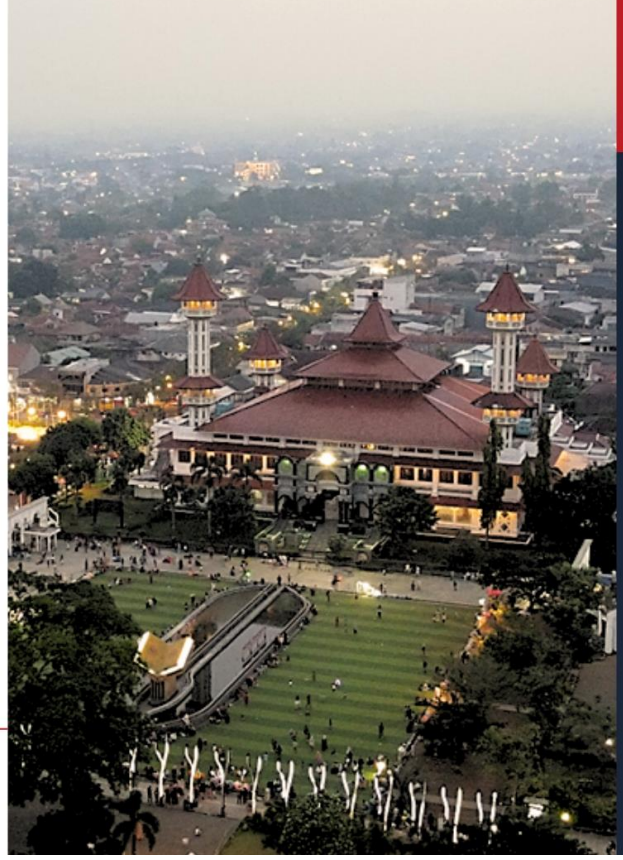

Pada bab ini disajikan berbagai permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi kehidupan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Cianjur. Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan dengan pendekatan urusan wajib dan pilihan. Hal ini dimaksudkan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah.

3.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Cianjur

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang akan dicapai di masa yang akan datang. Ketidaksesuaian pembangunan dengan kondisi riil yang dibuat saat perencanaan timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, serta ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum dan kondisi daerah yang telah dijabarkan pada Bab II dokumen ini, maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan pelayanan dasar yang ada di Kabupaten Cianjur antara lain:

1. Bidang Pendidikan

Permasalahan pokok bidang pendidikan mencakup belum optimalnya harapan lama sekolah bagi siswa usia sekolah; belum optimalnya rata-rata lama sekolah; serta sarana dan prasarana pendidikan masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas. Adapun permasalahan bidang pendidikan secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut.

Tabel 3. 1. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pendidikan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya harapan lama sekolah bagi siswa usia sekolah	• Masih adanya angka putus sekolah disebabkan masih tingginya keluarga miskin ekstrem dan memiliki anak usia sekolah tahun 2023 yang mencapai 0,51 persen	• Sulitnya memperoleh pekerjaan untuk penghidupan yang layak di perdesaaan • Belum meratanya bantuan untuk intervensi terhadap keluarga miskin yang memiliki anak usia sekolah • Masih besarnya jumlah anggota keluarga/ yang mempengaruhi peluang anak untuk dapat meneruskan pendidikannya seperti mendukung anak untuk bekerja membantu orang tua bekerja daripada sekolah
		• Masih belum meratanya satuan Pendidikan di semua jenjang pendidikan berdasarkan jarak tempuh antara siswa dan satuan Pendidikan • Masih belum meratanya kualitas bangunan sesuai standar sekolah • Masih belum meratanya alat peraga Pendidikan di semua jenjang pendidikan	Kemampuan anggaran serta pemenuhan prioritas yang bertahap untuk pemenuhan sektor Pendidikan dan sektor prioritas lainnya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		• Masih rendahnya rapor Pendidikan Tingkat PAUD, SD dan SMP	• Penempatan tenaga pendidik belum merata dan sesuai dengan komptensinya • Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidikan secara formal di SD masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1; • Masih belum optimalnya pemahaman dan kompetensi yang dimiliki bagi satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan dalam menentukan skala prioritas Perencanaan Berbasis Data (PBD) dengan lebih tepat sasaran. • Masih rendahnya satuan Pendidikan dan tenaga kependidikan dalam memiliki kemampuan statistik dasar untuk dapat melakukan analisis dari data yang disajikan • Kompetensi dan keterampilan tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan guna meningkatkan kualitas mutu pendidikan
2	Belum optimalnya Rata-rata Lama Sekolah	• Masih tingginya penduduk keluarga miskin ekstrem tahun 2023 yang mencapai 0,51 persen dan memiliki anak usia sekolah	• Sulitnya memperoleh pekerjaan untuk penghidupan yang layak di perdesaaan • Belum meratanya bantuan untuk intervensi terhadap keluarga miskin yang memiliki anak usia sekolah
		• Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat Pada Jenjang Pendidikan Kesetaraan Baik Paket A, Paket B dan Paket C karena faktor usia dan telah bekerja	• Masih besarnya jumlah anggota keluarga/ yang mempengaruhi peluang anak untuk dapat meneruskan pendidikannya seperti mendukung anak untuk bekerja membantu orang tua bekerja daripada sekolah • Masih adanya masyarakat umur 25 tahun ke atas yang tidak menamatkan Pendidikan SMP dikarenakan sudah bekerja dan berkeluarga
		• Kurang meratanya lembaga pendidikan kesetaraan	• Belum optimalnya sarana prasarana pada jenjang pendidikan kesetaraan , kapasitas dan kualitas PKBM serta Akreditasi PKBM • Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidikan secara formal di SD masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1; • Belum meratanya Lembaga Pendidikan kesetaraan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya Pemberdayaan lembaga pendidikan kesetaraan	• masih banyaknya lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan yang belum terakreditasi • ketidak jelasan sistem insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan kesetaraan • Belum optimalnya data sasaran didik (warga belajar) • masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti dan mengenal secara jelas tentang keberadaan dan peran pendidikan nonformal
3	Sarana dan Prasarana pendidikan masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas	• Masih terdapat RKB yang perlu di rehabilitasi dan pembangunan baru untuk memenuhi kapasitas siswa • Ketersediaan layanan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan terutama pada jenjang PAUD, SD dan SMP yang perlu ditingkatkan	• Pemilihan prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan yang mengalami rusak berat dan perlu bangunan baru • Belum adanya peta Lokasi berdasarkan kondisi sekolah di semua jenjang Pendidikan secara komprehensif dan rencana lima tahunan untuk di intervensi

Sumber: Hasil Analisis, 2024.

2. Bidang Kesehatan

Permasalahan pokok bidang kesehatan mencakup masih tingginya angka kesakitan; masih tingginya kematian ibu dan bayi; dan masih adanya kasus balita stunting. Adapun permasalahan bidang kesehatan secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 2. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kesehatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih tingginya angka kesakitan	Masih kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan	• Jumlah Rumah sakit yang masih kurang • Sarana dan prasarana penunjang di layanan kesehatan yang belum sesuai standar • Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat • Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (KN) yang belum maksimal • Meningkatnya penyakit menular di kalangan masyarakat
		Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata	• Terjadi ketimpangan tingkat kesejahteraan • Masih kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih • Penempatan tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan Anjab- ABK

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			• Belum optimal nya peranan Organisasi Profesi dalam pembinaan dan pemberdayaan anggotanya melalui peningkatan kompetensi profesi. • Jumlah dan sebaran tenaga medis belum optimal
		Faktor Kesehatan lingkungan	• Belum optimalnya persentase sanitasi layak dan air minum layak serta rumah layak huni
2	Masih tinggi nya kematian ibu dan bayi	Belum optimalnya pelayanan ANC (Anti Natal Care)	• Masih kurangnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan nya sebanyak 6 kali • Masih kurangnya alat Ultrasonograpy di Puskesmas • kurangnya pengalaman, keterampilan dan pengetahuan kader kesehatan; • Masih kurangnya Puskesmas Mampu PONED • Masih kurangnya tenaga medis khusus yang menangani ibu dan anak
3	Masih adanya kasus balita stunting	Kekurangan asupan gizi yang terjadi sejak bayi masih dalam kandungan dan berlanjut sejak kelahiran	• Pemeriksaaan ibu hamil Kurang Energi Kronik yang belum optimal • Masih tingginya keluarga beresiko stunting yang disebabkan oleh kurang tercukupinya pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi • Tidak mendapatkan ASI eksklusif • Belum meratanya pemberian PMT bagi balita stunting dan ibu hamil
		Belum optimalnya pencegahan sejak dini	• Pendampingan calon pengantin yang belum optimal • Pemeriksaan anemia terhadap remaja putri yang belum optimal serta konsumsi TTD bagi remaja putri yang anemia • Penyediaan air bersih dan sanitasi aman yang belum optimal • Belum optimalnya penerapan Kawasan rumah pangan lestari
		Belum optimalnya pola asuh	• Belum optimalnya konseling gizi dan kesehatan kepada ibu hamil • Belum optimalnya kelas parenting kepada orang tua

Sumber: Hasil analisis, 2024.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pokok bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar belum memadai; belum optimalnya ketaatan dalam pemanfaatan lahan kedalam rencana pemanfaatan ruang; dan tingginya indeks risiko bencana. Adapun permasalahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 3. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar belum memadai	Belum optimalnya kondisi mantap jalan kabupaten	• Muatan kendaraan yang berlebihan (*over dimension, over loading*/ ODOL) • Kurang baiknya sistem drainase jalan • Ketidaksesuaian standar pembangunan jalan • Masih rendahnya penerapan teknologi baru dalam kegiatan pemeliharaan jalan
		Rendahnya kondisi jaringan irigasi teknis dan non teknis dalam kondisi baik	• Belum memadainya SDM dan sarana pendukung untuk pemeliharaan irigasi • Adanya alih fungsi irigasi menjadi drainase perkotaan
		Kondisi jaringan drainase dalam kondisi baik belum optimal	• Rendahnya partisipasi masyarakat pengguna irigasi dalam pemeliharaan, pengelolaan, dan pembangunan drainase
		Belum terintegrasinya sistem drainase perkotaan yang berdaya fungsi optimal	• Pemanfaatan lahan perumahan belum disertai dengan penyediaan sistem drainase yang terintegrasi • Masih tercampurnya sistem drainase dengan pembuangan limbah domestic dan jaringan irigasi
		Belum tertanganinya banjir	• Belum terbebaskannya sempadan sungai dari bangunan liar • Belum optimalnya normalisasi sungai secara berkala dan berkesinambungan • Belum tersedianya system drainase yang baik • Adanya pendangkalan sungai • Sumur resapan tidak efektif
		Cakupan pelayanan air bersih belum optimal	• Sebaran sumber air baku tidak merata • Lokasi air baku tidak berada pada lahan masyarakat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			melainkan lahan milik PERHUTANI • Kuantitas air baku rendah • Lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan air baku
		Cakupan pelayanan air minum belum optimal	• Masih rendahnya pelayanan PDAM • Rendahnya kualitas air minum • Kurangnya sumber air baku • Belum optimalnya pelayanan SPAM perkotaan • Kualitas sarana dan prasarana saluran perpipaan tidak memadai
		Cakupan pelayanan persampahan perkotaan belum optimal	• Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpadu • Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah • Belum meratanya pelayanan pengangkutan persampahan • Belum tersedianya TPA untuk wilayah Tengah dan Selatan • Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
2	Belum optimalnya ketaatan dalam pemanfaatan lahan kedalam rencana pemanfaatan ruang	Rendahnya peningkatan persentase bangunan ber-IMB	• Belum tersedianya database bangunan yang sudah ber-IMB • Menurunnya jumlah pemohon IMB yang berskala besar (perumahan, industri, perdagangan/jasa) • Adanya pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dalam hal IMB untuk perusahaan dan perumahan • Adanya persyaratan izin lokasi yang dibebankan di akhir rangkaian proses izin pada penerbitan IMB • Panjangnya alur proses penerbitan IMB akibat regulasi baru
		Belum terdapatnya regulasi tata ruang	• Terdapatnya alih fungsi lahan terutama untuk lahan-lahan pertanian menjadi lahan-lahan non pertanian • Belum tersedianya Peraturan Daerah mengenai RDTR • Belum tersedianya aturan Intensif dan Disinsentif pengendalian ruang • Nelum adanya Billding code yang mengatur aturan jebis-jenis konstruksi bangunan untuk bencana • Belum terdapatnya aturan-aturan yang mengatur pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan ruang.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Adanya peningkatan alih fungsi lahan	• Rendahnya rasio RTH per satuan luas wilayah • Belum adanya basis data tentang aset tanah untuk dijadikan ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau • Belum terdapatnya sebaran masing-masing jenis RTH terutama untuk kawasan-kawasan perkotaan • Belum tersedianya Perda RDTR kawasan perkotaan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pemanfaatan uang • Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang • Belum tersusunnya masterplan untuk kawasan strategis sebagai acuan untuk pengendalian pemanfaatan ruang • Terbatasnya SDM, peralatan, dan teknologi penunjang untuk pengawasan dan pengendalian ruang • Pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukkan
3	Tingginya indeks risiko bencana	Belum optimalnya penanggulangan bencana	• Belum terdapat Peraturan Daerah tentang Rencana Penaggulangan Bencana (RPB) • Belum memiliki Dokumen Kontijensi Risiko Bencana • Kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat terutama untuk anak-anak yg masih mengenyam pendidikan • Belum terdapatnya aturan/legalitas terkait kebencanaan • Belum terdapatnya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan.
		Belum optimalnya upaya mitigasi bencana	• Terbatasnya sumber daya aparatur bidang penanggulangan bencana, baik aspek kuantitas maupun kualitas • Masih lemahnya sistem pendataan/informasi • Masih kurangnya infrastruktur mitigasi bencana • Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana • Belum tersedianya kontijensi kebencanaan

Sumber: Hasil analisis, 2024.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pokok bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman mencakup pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang didukung infrastruktur dasar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; pemerataan infrastruktur dasar; pemerataan infrastruktur dasar interkoneksi wilayah di Kabupaten Cianjur. Adapun permasalahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 4. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan yang didukung infrastruktur dasar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masih tingginya angka Rumah tangga (RT) yang menempati rumah tidak layak huni	• Harga rumah tidak terjangkau bagi kelompok MBR dan di bawah MBR • Pelayanan PSU belum optimal • Proses serah terima PSU belum optimal
		Masih terdapatnya perumahan dan permukiman pada kawasan bencana dan penyedia pangan tinggi	• Permukiman pedesaan masih menempati kawasan-kawasan rawan bencana • Permukiman perkotaan maupun pedesaan banyak yang menggunakan lahan-lahan pertanian pangan
		Masih besarnya luasan kawasan kumuh	• Belum adanya sinkronisasi dan integrasi program mengenai penataan dan pengendalian kawasan kumuh • Belum adanya basis data mengenai deliniasi kawasan kumuh • Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan swadaya
2	Pemerataan infrastruktur dasar	Masih rendahnya jumlah penduduk dengan rumah tinggal yang mengakses sarana sanitasi bersuspek aman di tahun 2023	• Infrastruktur yang kurang tangguh, inklusif dan berkelanjutan • Kurangnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) • Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas sanitasi terbangun dan lingkungan • Semakin luasnya wilayah permukiman yang belum dilengkapi SPAL sesuai standar • Sulitnya mencari lahan yang ideal untuk pembangunan sanitasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih rendahnya Rumah tangga (RT) yang menempati rumah tidak layak huni	• Harga rumah tidak terjangkau bagi kelompok MBR dan di bawah MBR • Pelayanan PSU belum optimal • Proses serah terima PSU belum optimal
3	Pemerataan infrastruktur dasar Interkoneksi wilayah di Kabupaten Cianjur	Masih besarnya *backlog* perumahan	• Keterbatasan dan mahalnya harga lahan • Belum optimalnya intervensi untuk penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan
		Belum optimalnya realisasi penataan kawasan kumuh	• Rendahnya daya beli masyarakat • Layanan infrastruktur permukiman yang belum memadai • Belum optimalnya penegakan sanksi dan aturan
		Masih rendahnya jumlah penduduk dengan rumah tinggal yang mengakses sarana sanitasi bersuspek aman	• Kurangnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) • Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas sanitasi terbangun dan lingkungan • Semakin luasnya wilayah permukiman yang belum dilengkapi SPAL sesuai standar • Sulitnya mencari lahan yang ideal untuk pembangunan sanitasi
		Akses jaringan jalan antar wilayah	• Lambatnya penanganan kondisi infrastruktur jalan maupun jembatan untuk menunjang aktivitas. • Kerusakan akibat bencana longsor • Kerusakan akses jalan di beberapa wilayah • Keterbatasan pendanaan

Sumber: Hasil analisis, 2024.

5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pokok bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mencakup cakupan pelayanan penanganan kejadian kebakaran masih rendah; dan belum optimalnya capaian angka ketentraman dan ketertiban umum. Adapun permasalahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 5. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	cakupan pelayanan penanganan kejadian kebakaran masih rendah.	Belum optimalnya penanganan bencana kebakaran	• Masih rendahnya rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu • Masih rendahnya pelaksanaan penyuluhan proteksi kebakaran di titik rawan bencana kebakaran • Masih rendahnya penanganan kejadian yang ditangani dalam waktu tanggap
		Belum optimalnya pelayanan kesiapsiagaan, pencegahan dan penanggulangan risiko bencana, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	• Terbatasnya UPTD WMK untuk penanganan kejadian kebakaran. • Kualitas dan kuantitas SDM Pemadam Kebakaran yang masih kurang. • Sarana dan prasarana yang masih sangat minim
2	Belum Optimalnya Capaian Angka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sistem pengawasan perizinan dan pemanfaatan ruang belum berjalan optimal	• belum memadainya sarana prasarana untuk patroli • Belum optimalnya integrasi perizinan antar Lembaga • Rasio Jumlah PNS Satpol PP terhadap jumlah penduduk belum ideal
		Masih banyaknya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.	• Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang berlaku, terutama Perda terkait Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat masih tinggi	• Masih rendahnya tingkat kesadaran dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan
		Perlindungan masyarakat masih kurang	• Masih kurangnya rasio linmas terhadap jumlah penduduk

Sumber: Hasil analisis, 2024.

6. Bidang Sosial

Permasalahan pokok bidang sosial yaitu masih tingginya penduduk miskin. Adapun permasalahan bidang sosial secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 6. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Sosial

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih tingginya penduduk miskin	Pendidikan yang masih rendah dengan Tingkat rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 sebesar 7,12 tahun Penanganan PMKS yang belum optimal	• Masih banyaknya warga tidak mampu/fakir miskin • Masih adanya Keluarga Berumah Tak Layak Huni. • Masih belum adanya program untuk masyarakat adat • Tingginya kemiskinan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Tingginya jumlah anak terlantar di Kabupaten Cianjur	• Meningkatnya jumlah anak terlantar dan anak jalanan • Meningkatnya jumlah anak nakal • Belum optimalnya institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial
		Belum memadainya sarana dan prasarana penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	• Masih terdapat rumah tidak layak huni • Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap sarana dan prasarana masih rendah/ sulit • Penanganan korban bencana yang masih belum terpecahkan secara cepat • Belum adanya rumah singgah
		Tingginya kasus tuna sosial	• Masih tingginya tingkat kemiskinan • Tingkat pengganggguran masih tinggi • Masih rendahnya kebijakan pemerintah dalam penanganan permasalahan sosial

Sumber: Hasil analisis, 2024.

7. Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan pokok bidang tenaga kerja mencakup masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Cianjur yang disebabkan oleh ketersediaan kesempatan kerja yang masih terbatas. Adapun permasalahan bidang tenaga kerja secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 7. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Tenaga Kerja

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih tingginya angka pengangguran yang ada	Keterbatasan kesempatan kerja	• Rendahnya kualitas tenaga kerja • Keterampilan dan Pendidikan yang tidak sesuai yang tidak sesuai dengan dunia kerja • Pasar tenaga kerja masih terbatas • Kurangnya kolaboratif, kerja sinergi, antara pemerintah (pusat) dengan pemerintah daerah, antara pemerintah dengan dunia industri • Rendahnya produktivitas tenaga kerja mengakibatkan rendahnya pendapatan

Sumber: Hasil analisis, 2024.

8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pokok bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimalnya capaian pembangunan kualitas keluarga; belum optimalnya pemberdayaan gender; dan pemenuhan hak anak yang belum optimal. Adapun permasalahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 8. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	*Belum optimalnya capaian pembangunan kualitas keluarga*	• Belum optimalnya dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya • Masih adanya kasus KDRT dan *human trafficking*	• Belum optimalnya pelaporan KDRT dan *human trafficking* • Belum optimalnya sosialisasi mengenai pentingnya melaporkan KDRT dan *human trafficking* • Karakteristik masyarakat yang cenderung malu untuk melaporkan KDRT dan *human trafficking*
2	Belum optimalnya pemberdayaan gender	Belum optimalnya pemberdayaan Perempuan	• Masih sedikitnya keterlibatan peran perempuan • Distribusi hasil pembangunan yang tidak merata memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender (gender gap), • *gender empowerment measurement* (GEM-kualitas perempuan) dan *gender related development index* (GDI-kesetaraan gender) yang masih rendah. • Penyerapan tenaga kerja perempuan masih rendah
3	Pemenuhan Hak Anak yang belum optimal	Belum optimalnya perlindungan atas hak anak	• Belum optimalnya keberadaan Forum Anak Daerah di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan • Pelibatan aspirasi anak dalam pembangunan yang belum optimal • Penyediaan wahana kreatifitas untuk anak anak yang masih kurang • Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak

Sumber: Hasil analisis, 2024.

9. Bidang Pangan

Permasalahan pokok bidang pangan mencakup belum optimalnya ketahanan pangan masyarakat. Adapun permasalahan bidang pangan secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 9. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pangan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya ketahanan pangan masyarakat	Belum optimalnya ketersediaan pangan daerah	• Kebutuhan konsumsi pangan Masyarakat meningkat • Cadangan pangan pemerintah masih kurang memadai • Ketersediaan lumbung pangan belum optimal • Ekspor impor pangan belum tersedia datanya
		Belum optimalnya akses terhadap pangan	• Masih terdapat desa rawan pangan • Jaringan distribusi pangan yang belum merata • Fluktuasi harga pangan masih tinggi
		Belum optimalnya pemanfaatan pangan	• Belum optimalnya diversifikasi pangan • Kualitas dan keamanan pangan yang belum terjaga • Pemenuhan gizi yang kurang terperhatikan • Ketidakmampuan mengakses teknologi pengolahan pangan

Sumber: Hasil analisis, 2024.

10. Bidang Pertanahan

Permasalahan pokok bidang pertanahan mencakup belum optimalnya pengelolaan pertanahan. Adapun permasalahan bidang pertanahan secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 10. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pertanahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pengelolaan pertanahan	Terdapat kendala dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan	• Belum adanya database pertanahan yang lengkap dan akurat • Adanya ketidakjelasan kepemilikan tanah • Pengendalian konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang masih belum diselesai • Alih fungsi lahan pertanian yang perlu pengaturan yang jelas • Kurangnya sosialisasi dari dinas terkait terkait dengan kepemilikan lahan
		Belum semua kegiatan memiliki dokumen perencanaan pengadaan tanah yang memadai	• Belum adanya dokumen yang terkait tanah-tanah terlantar yang dapat dijadikan aset pemerintah • Harga jual tanah yang tidak terkendali • Proses legalitas dan administrasi rumit • Lemahnya intervensi kebijakan dari pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten

Sumber: Hasil analisis, 2024.

11. Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan pokok bidang lingkungan hidup mencakup adanya degradasi lingkungan/ penurunan kualitas lingkungan; lemahnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan belum termanfaatkannya limbah sebagai EBT secara maksimal. Adapun permasalahan bidang lingkungan hidup secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 11. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Lingkungan Hidup

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Adanya degradasi lingkungan/ penurunan kualitas lingkungan	Belum optimalnya pelestarian keanekaragaman hayati	• Adanya alih fungsi lahan • Adanya perubahan pola tanam
		Adanya penurunan kuantitas dan kualitas air bersih	• Adanya kerusakan hutan dan lahan resapan air • Berkurangnya tutupan lahan kawasan non terbangun • Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2	Lemahnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pengolahan limbah belum optimal	• Kurangnya sarana prasarana pengolahan limbah • Masih rendahnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat • Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengolah limbah • Masih rendahnya tingkat pengelolaan persampahan dari sumber sampah sampai tempat pembuangan akhir • Belum optimalnya tempat pembuangan sampah akhir
		Pengelolaan lingkungan pada industri belum optimalnya	• Belum memadainya pengaturan industri dalam penanganan limbah • Lemahnya penegakan hukum untuk pengendalian pencemaran
		Instalasi pengolahan limbah di rumah tangga dan industri masih rendah	• Adanya keterbatasan lahan untuk menyediakan IPAL • Belum efektifnya regulasi yang mewajibkan penyediaan IPAL domestik • Belum optimal pelayanan IPLT Babaakan Karet
3	Belum termanfaatkannya limbah sebagai EBT secara maksimal	Masih rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan energi baru terbarukan	• Belum optimalnya sosialisasi pemanfaatan limbah sebagai EBT • Kurangnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi pengolah limbah
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengolahan limbah menjadi EBT	• Terbatasnya ketersediaan teknologi pengolahan limbah

Sumber: Hasil analisis, 2024.

12. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pokok bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu masih rendahnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun permasalahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 12. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	• Jarak dan letak geografis merupakan faktor pentingnya yang menjadi permasalahan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil • Belum adanya UPT yang menjangkau seluruh wilayah • Masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur penyelenggara Adminduk • Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, diantaranya adalah Bangunan Kantor dan perangkat lunak, terutama kebutuhan alat cetak KTP-El untuk 32 Kecamatan
		Masih kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	• Masih banyak Masyarakat kabupaten cianjur yang tidak mau mengurus langsung untuk mendapatkan dokumen kependudukan • Belum optimalnya penggunaan admindukcapil digital / online

Sumber: Hasil Analisis, 2024.

13. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pokok bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mencakup belum optimalnya kemandirian desa. Adapun permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.13. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kemandirian desa	Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan	• Keberdayaan masyarakat dan desa dalam partisipasi dan swadaya yang cenderung menurun. • Penataan desa dan penyelenggaraan administrasi desa yang belum optimal • Keberdayaan masyarakat dan desa dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang masih minim dan belum optimal. • Program dan kegiatan terhadap pembangunan desa masih belum sinergis dan masih bersifat sektoral.

Sumber: Hasil analisis, 2024.

14. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pokok bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mencakup pengendalian penduduk belum optimal. Adapun permasalahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.14. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pengendalian penduduk belum optimal.	Rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap pengendalian angka kelahiran	• Keberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi belum terus menerus • Adanya preferensi masyarakat untuk menggunakan jenis KB tertentu • Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan kontrasepsi • Adanya kalangan masyarakat tertentu yang mengharamkan keikutsertaan dalam program KB • Masih rendahnya kepesertaan KB Pria
		Tingginya pernikahan anak (kurang dari 19 tahun)	• Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang usia nikah ideal • Adanya dorongan kebutuhan ekonomi • Masih adanya pengaruh budaya untuk melakukan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di KUA • Masih rendahnya Tingkat Pendidikan masyarakat

Sumber: Hasil analisis, 2024.

15. Bidang Perhubungan

Permasalahan pokok bidang perhubungan mencakup belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan darat. Adapun permasalahan bidang perhubungan secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 15. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perhubungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan darat	Belum optimalnya layanan angkutan umum	• Belum memadainya ketersediaan fasilitas penunjang dalam optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi seperti terminal, shelter/halte/pangkalan. • Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor masih terbatas pada perlengkapan dan peralatan pengujian model lama dan belum terbarukan. • Kurangnya kesadaran masyarakat yang memiliki kendaraan wajib uji untuk menguji kendaraannya (angkutan orang dan barang) secara berkala. • Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum perkotaan dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi
		Belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang lalu lintas

Sumber: Hasil analisis, 2024.

16. Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pokok bidang komunikasi dan informatika mencakup belum optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan belum memadainya infrastruktur telekomunikasi dan jaringan internet. Adapun permasalahan bidang komunikasi dan informatika secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 16. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Belum optimalnya peran TIK dalam mendukung pelayanan public	• Masih Kurangnya Kebijakan, Infrastruktur, Aplikasi Dan Perencanaan Bidang TIK • Belum optimlanya tata Kelola dan manajemen SPBE • Belum optimalnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi pada pengguna • Belum optimalnya Infrastruktur SPBE yang terintegrasi • Minimnya SDM berkompetensi TIK/ Literasi Digital
		• Belum optimalnya penerapan satu data indonesia	• Belum optimalnya regulasi terkait pedoman dan kriteria untuk kesamaan format data • Rendahnya kesadaran perangkat daerah terkait fungsi Kominfo sebagai integrator data • Sistem keamanan data yang masih lemah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			• Masih rendahnya SDM pengelola data
		• Belum optimalnya penyelenggaran informasi public	• Belum optimalnya peran dan fungsi Kelompok Informasi Masyarakat • Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan informasi • minimnya inovasi penyampaian informasi pemda • kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait penyebaran informasi
2	Belum memadainya infrastruktur telekomunikasi dan jaringan internet	Terdapat beberapa kecamatan yang belum terakses jaringan telekomunikasi dan internet	Adanya kendala geografis dalam Pembangunan dan pemasangan infrastruktur

Sumber: Hasil analisis, 2024.

17. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan pokok bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah mencakup masih belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. Adapun akar masalah yang muncul akibat dari permasalahan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.17. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro	Masih rendahnya koperasi yang berkualitas.	• Masih rendahnya kapasitas SDM perkoperasian • Belum optimalnya upaya pemberdayaan kelembagaan koperasi
		Masih belum optimalnya kapasitas usaha mikro dalam perekonomian	• Masih rendahnya akses terhadap permodalan usaha mikro • Masih rendahnya pemasaran produk usaha mikro • Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana usaha mikro • Masih rendahnya kapasitas SDM usaha mikro • Kurangnya inovasi dalam pengembangan produk yang dihasilkan

Sumber: Hasil analisis, 2024.

18. Bidang Penanaman Modal

Permasalahan pokok bidang penanaman modal mencakup masih rendahnya nilai investasi. Adapun akar masalah dari permasalahan tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 18. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Penanaman Modal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya nilai investasi	Kurangnya daya saing investasi daerah	• Belum optimalnya penggalian potensi investasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			• Belum terpetakannya produk unggulan yang spesifik dan kompetitif • Belum optimalnya upaya promosi peluang penanaman modal yang ada di Kabupaten Cianjur • Belum optimalnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka menarik investasi • Belum terimplementasikannya pelaksanaan regulasi investasi daerah • Belum diterapkannya kebijakan insentif terhadap kemudahan berinvestasi

Sumber: Hasil analisis, 2024.

19. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pokok bidang kepemudaan dan olahraga mencakup masih rendahnya capaian prestasi bidang olahraga; dan belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan. Adapun akar masalah dari permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 19. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya capaian prestasi bidang olahraga	Belum meratanya fasilitas olahraga	• prasarana dan sarana olahraga masih terbatas dan belum memenuhi standar • partisipasi dan kebugaran jasmani masyarakat berolahraga masih rendah
		Belum optimalnya peran organisasi olahraga	• sistem pembinaan olahraga prestasi belum dikembangkan dan dilakukan secara sistematis, terencana, berjenjang dan berkelanjutan • Masih minimnya perhatian Pemerintah untuk pembinaan atlet atlet muda • Masih kurangnya penghargaan pemerintah terhadap atlit berprestasi di ajang kabupaten maupun provinsi dan nasional
2	Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Belum optimalnya peran organisasi dan komunitas kepemudaan	• Belum adanya manajerial untuk mengurus peran dan fungsi organisasi • Organisasi kepemudaan belum menunjukan eksistensi

Sumber: Hasil analisis, 2024.

20. Bidang Statistik

Permasalahan pokok bidang statistik yaitu belum optimalnya penyediaan data statistik dalam cianjur satu data. Adapun

permasalahan tersebut secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 20. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Statistik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyediaan data statistik dalam Cianjur satu data	Belum optimalnya pengelolaan integrasi data statistik dalam rangka satu data	• Kurang siapnya data yang akan disampaikan • Adanya kendala/ hambatan dalam melakukan pembagian data (sharing data) • Keterbatasan base data pembangunan dan kinerja pembangunan
		Rendahnya tingkat ketersediaan data sektoral	• Kualitas dan kuantitas data belum optimal • Belum tersedianya standarisasi data • Minimnya sarana dan prasarana pengolah integrasi data

Sumber: Hasil analisis, 2024.

21. Bidang Persandian

Permasalahan pokok bidang persandian yaitu masih rendahnya tingkat keamanan informasi. Adapun permasalahan tersebut secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 21. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Persandian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya Tingkat keamanan informasi	Belum optimalnya penerapan sistem keamanan informasi	• Masih rendahnya tata Kelola • Masih rendahnya pengelolaan resiko • Belum optimalnya kerangka kerja keamanan informasi • Belum optimalnya pengelolaan aset • Belum optimalnya teknologi dan keamanan informasi • Belum adanya pengamanan keterlibatan pihak ketiga • Belum adanya pengamanan layanan infrastruktur awal • Belum adanya perlindungan data pribadi

Sumber: Hasil analisis, 2024.

22. Kebudayaan

Permasalahan pokok bidang kebudayaan mencakup belum optimalnya pemajuan pembangunan kebudayaan daerah. Adapun permasalahan tersebut secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 22. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kebudayaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pemajuan pembangunan kebudayaan daerah	Belum optimalnya pelestarian kebudayaan daerah	• Masih banyaknya cagar budaya yang belum dilestarikan • Masih banyaknya warisan budaya tak benda yang terancam punah • Rendahnya apresiasi dan kecintaan terhadap budaya lokal, dan sejarah Lokal
		Belum optimalnya pengembangan kebudayaan daerah	• Masih kurangnya sarana publik yang secara berkesinambungan menampilkan seni budaya daerah • Berkurangnya pengetahuan dan kecintaan masyarakat khususnya generasi muda terhadap seni budaya daerah yang kian bersaing dengan unsur budaya asing • Kurangnya apresiasi terhadap budayawan • Belum adanya regulasi dan inventarisasi pemetaan bidang kebudayaan

Sumber: Hasil analisis, 2024.

23. Bidang Perpustakaan

Permasalahan pokok bidang perpustakaan yaitu rendahnya minat baca. Adapun permasalahan tersebut secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 23. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perpustakaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya minat baca	Belum terbangunnya budaya baca di keluarga	• Tidak semua keluarga memiliki akses terhadap buku • Adanya akses terhadap HP yang sudah merajalela
		Masih minimnya sarana prasarana untuk membaca	• Masih minimnya titik-titik untuk mengakses perpustakaan *online* • Belum meratanya sebaran perpustakaan • Koleksi buku di perpustakaan yang masih terbatas • Perpustakaan daerah yang masih konvensional/ belum modern

Sumber: Hasil analisis, 2024.

24. Bidang Kearsipan

Permasalahan pokok bidang kearsipan yaitu belum optimalnya penyelenggaraaan kearsipan. Adapun permasalahan tersebut secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 24. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kearsipan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan kearsipan	Perangkat Daerah yang belum menerapkan sistem kearsipan secara baku	• Terbatasnya SDM pengelola kearsipan dan fungsional arsiparis • Belum optimalnya penerapan Sistem Kearsipan Dinamis terintegrasi (SRIKANDI) • Belum memiliki Depot Arsip yang merupakan tempat penyimpanan arsip yang terstruktur dan terpelihara • Belum Optimalnya Klasifikasi Arsip • Belum Adanya Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis • Masih Kurangnya Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif • Masih Kurangnya Pedoman Pengelolaan Arsip Vital • Belum Optimalnya Pengelolaan Penyusutan Arsip

Sumber: Hasil analisis, 2024.

25. Bidang Perikanan dan Kelautan

Perikanan dan kelautan merupakan salah satu bidang bagian dari sektor pertanian yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB sektor pertanian. Walaupun demikian kontribusi pembangunan perikanan dan kelautan belum dioptimalkan, mengingat potensi perikanan dan kelautan yang masih besar namun belum tergali sepenuhnya. Permasalahan terkait belum optimalnya kontribusi bidang perikanan dan kelautan dalam perekonomian daerah adalah belum optimalnya produksi perikanan dan kelautan. Adapun akar masalah dari permasalahan di bidang perikanan dan kelautan dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Tabel 3. 25. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perikanan dan Kelautan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kontribusi perikanan dan kelautan terhadap perekonomian daerah belum optimal	Belum optimalnya produksi perikanan dan kelautan	• Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada • Masih kurangnya adaptasi teknologi baru untuk peningkatan produksi • Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan • Masih terbatasnya kapasitas sumberdaya manusia yang ada • Masih rendahnya akses permodalan • Masih rendahnya investasi sektor perikanan dan kelautan

Sumber: Hasil analisis, 2024.

26. Bidang Pariwisata

Pariwisata merupakan bidang pariwisata yang berbasis jasa yang potensial dan strategis dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Untuk menjadi daya tarik bagi wisatawan maka diperlukan faktor penunjang untuk berkembangnya pariwisata diatarnya atraksi, pelayanan dan keamanan, harga tiket, dan loyalitas wisatawan. Adapun akar masalah dari permasalahan di bidang pariwisata dapat dilihat pada tebal berikut.

Tabel 3. 26. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pariwisata

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah belum optimal	Jumlah kunjungan wisatawan yang belum optimal	• Belum optimalnya Pengembangan destinasi wisata potensial • Potensi budaya belum dimanfaatkan secara optimal • Masih kurangnya Sumberdaya manusia pariwisata • Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata • Belum optimalnya pemasaran pariwisata dan budaya secara terpadu • Masih terbatasnya produk ekonomi kreatif

Sumber: Hasil analisis, 2024.

27. Bidang Pertanian

Pertanian merupakan bidang perekonomian dominan namun perkembangan kontribusi sektor tersebut setiap tahunnya terus mengalami penurunan. Adapun penyebabnya adalah semakin berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, sumber daya petani yang masih rendah dan bahkan mengalami penurunan, produktifitas pertanian yang masih kurang optimal sehingga perlu ditingkatkan, serta pemasaran hasil komoditas pertanian yang belum optimal. Adapun akar masalah dari permasalahan di bidang pertanian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 27. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pertanian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tren kontribusi PDRB sektor pertanian yang semakin menurun	Luas lahan pertanian yang semakin berkurang	Alih fungsi lahan
		SMD pertanian yang masih rendah dan kurang	• Minat pemuda untuk melanjutkan usaha pertanian rendah • Kelembagaan petani yang masih lemah • Rendahnya kapasitas budidaya petani

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Produktivitas pertanian belum optimal	• Rendahnya kapasitas budidaya pertanian • Infrastruktur pertanian masih kurang memadai • Teknologi dan Sarana prasarana produksi yang minim • Perubahan iklim yang mengganggu siklus tanam • Pemenuhan bibit/benih pertanian unggul belum merata

Sumber: Hasil analisis, 2024.

28. Bidang Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu bidang pembangunan yang telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah karena mempunyai keterkaitan yang erat dengan perkembangan sektor perekonomian lainnya. Untuk itu, bidang perdagangan perlu dioptimalkan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan ke depan. Permasalahan terkait belum optimalnya perkembangan perdagangan adalah belum optimalnya penyediaan barang yang dibutuhkan masyarakat dan kurangnya perdagangan berskala ekspor antar wilayah maupun negara. Adapun akar masalah dari permasalahan di bidang perdagangan dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Tabel 3. 28. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perdagangan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kontribusi sektor perdagangan belum optimal	Belum optimalnya penyediaan barang yang dibutuhkan masyarakat	• Sarana distribusi perdagangan yang belum optimal dan merata • Perlindungan konsumen dan pengawasan barang yang beredar belum optimal
		Belum optimalnya perdagangan berskala ekspor antar wilayah maupun negara	• Minimnya pengetahuan tentang prosedur ekspor bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah • Promosi dan pemasaran produk daerah masih terbatas

Sumber: Hasil analisis, 2024.

29. Bidang Perindustrian

Perindustrian bukan bidang pembangunan utama dalam perekonomian Cianjur selama ini sehingga belum dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam perekonomian daerah. Ke depan sektor industri perlu diprioritaskan untuk meningkatkan nilai tambah sektor primer yang ada terutama pertanian (agroindustry) dan pengembangan UMKM dalam rangka mendukung penguatan sektor agribisnis. Permasalahan yang muncul akibat masih rendahnya peranan industri di Kabupaten Cianjur adalah masih rendahnya kapasitas

industri kecil dan menengah yang ada. Identifikasi terhadap akar permasalahan yang muncul dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Tabel 3. 29. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perindustrian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian daerah	Masih rendahnya kapasitas industri kecil dan menengah	• Kurang optimalnya pemanfaatan bahan baku lokal yang tersedia; • Belum menerapkan standarisasi produk, pendaftaran HKI, dan sistem mutu; • Sarana dan prasarana produksi yang masih terbatas • Akses pemasaran produk IKM yang masih terbatas • Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja di bidang industri.

Sumber: Hasil analisis, 2024.

30. Bidang Transmigrasi

Permasalahan pokok bidang transmigrasi yaitu masih rendahnya penempatan calon transmigran untuk ditempatkan di permukiman transmigran. Adapun permasalahan tersebut secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 30. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Transmigrasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya penempatan calon transmigran untuk ditempatkan di permukiman transmigran	Tidak adanya kepastian kuota penempatan yang diterima oleh Kabupaten	Kepastian kuota penempatan yang diterima oleh Kabupaten ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sumber: Hasil analisis, 2024.

31. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan pokok bidang kesatuan bangsa dan politik mencakup masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi unjuk rasa atau demonstrasi; masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat; dan masih adanya potensi konflik horizontal di kalangan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 31. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan	Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam menyikapi kebijakan pemerintah	• Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	ketertiban umum berupa aksi unjuk rasa atau demonstrasi		• Kurangnya sosialisasi tentang kebijakan pemerintah • Masih adanya ormas yang mementingkan golongan dengan mengatasnamakan Masyarakat untuk menolak kebijakan pemerintah
2	Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik	• Kurangnya tingkat pendidikan masyarakat • Kurangnya sosialisasi pemerintah
3	Masih adanya potensi konflik horizontal di kalangan masyarakat	Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam wawasan kebangsaan	• Kurangnya sosialisasi wawasan kebangsaan • Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di Masyarakat • Pemahanan keagamaan yang salah • Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila wawasan kebangsaan dan nasionalisme

Sumber: Hasil analisis, 2024.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis dapat juga dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Penentuan isu-isu strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Cianjur dilakukan berdasarkan hasil telaah beberapa kebijakan sebelumnya sehingga didapatkan isu-isu strategis di tingkat internasional, nasional, maupun provinsi.

Isu-isu strategis tersebut menggambarkan isu pembangunan yang sedang berkembang dan mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Cianjur karena adanya keterkaitan dengan pembangunan pada tingkatan lainnya. Secara garis besar, telaahan isu-isu strategis tersebut dikelompokkan berdasarkan permasalahan pembangunan yang dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Setiap terbagi atas beberapa urusan, seperti:

1. Kelompok sumber daya manusia mencakup urusan-urusan terkait tenaga kerja; pendidikan; perpustakaan; kesehatan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; kepemudaan dan olahraga; serta kebudayaan.
2. Kelompok ekonomi menyangkut urusan-urusan terkait pangan; kelautan dan perikanan; pertanian; pemberdayaan masyarakat dan

desa; investasi; koperasi, usaha kecil dan menengah; perindustrian; perdagangan; sosial; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta infrastruktur dan permukiman.

3. Kelompok lingkungan mencakup urusan-urusan terkait lingkungan hidup dan kebencanaan.
4. Kelompok tata kelola menyakut urusan-urusan terkait keuangan; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; komunikasi dan informatika; statistik; perencanaan pembangunan; kepegawaian; serta pengawasan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal – hal sebelumnya serta mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Cianjur, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2. Penguatan ketahanan dan ketersediaan pangan yang berkelanjutan;
3. Percepatan transformasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
4. Pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan;
5. Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Masyarakat;
6. Ketersediaan Infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
8. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana; dan
9. Peningkatan kualitas tata kelola dan layanan pemerintahan serta reformasi birokrasi hulu dan hilir.

Tabel 3. 32. Keterkaitan Permasalahan Kabupaten Cianjur dengan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Cianjur

No	Masalah	Isu Strategis
1	Masih adanya angka putus sekolah disebabkan masih tingginya keluarga miskin ekstrem dan memiliki anak usia sekolah tahun 2023 yang mencapai 0,51 persen	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	Masih belum meratanya satuan Pendidikan di semua jenjang pendidikan berdasarkan jarak tempuh antara siswa dan satuan Pendidikan	
3	Masih belum meratanya kualitas bangunan sesuai standar sekolah	
4	Masih belum meratanya alat peraga Pendidikan disemua jenjang pendidikan	
5	Masih rendahnya rapor Pendidikan Tingkat PAUD, SD dan SMP	
6	Masih tingginya penduduk keluarga miskin ekstrem tahun 2023 yang mencapai 0,51 persen dan memiliki anak usia sekolah	

No	Masalah	Isu Strategis
7	Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat Pada Jenjang Pendidikan Kesetaraan Baik Paket A, Paket B dan Paket C karena faktor usia dan telah bekerja	
8	Kurang meratanya lembaga pendidikan kesetaraan	
9	Belum optimalnya Pemberdayaan lembaga pendidikan kesetaraan	
10	Masih terdapat RKB yang perlu di rehabilitasi dan pembangunan baru untuk memenuhi kapasitas siswa	
11	Ketersediaan layanan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan terutama pada jenjang PAUD,SD dan SMP yang perlu ditingkatkan	
12	Masih kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan	
13	Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata	
14	Faktor Kesehatan lingkungan	
15	Belum optimalnya pelayanan ANC (Anti Natal Care)	
16	Kekurangan asupan gizi yang terjadi sejak bayi masih dalam kandungan dan berlanjut sejak kelahiran	
17	Belum optimalnya pencegahan sejak dini	
18	Belum optimalnya pola asuh	
19	Belum optimalnya kondisi mantap jalan kabupaten	Ketersediaan Infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah
20	Rendahnya kondisi jaringan irigasi teknis dan non teknis dalam kondisi baik	
21	Kondisi jaringan drainase dalam kondisi baik belum optimal	
22	Belum terintegrasinya sistem drainase perkotaan yang berdaya fungsi optimal	
23	Belum tertanganinya banjir	
24	Cakupan pelayanan air bersih belum optimal	
25	Cakupan pelayanan air minum belum optimal	
26	Cakupan pelayanan persampahan perkotaan belum optimal	
27	Rendahnya peningkatan persentase bangunan ber-IMB	
28	Belum terdapatnya regulasi tata ruang	
29	Adanya peningkatan alih fungsi lahan	
30	Belum optimalnya penanggulangan bencana	Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana
31	Belum optimalnya upaya mitigasi bencana	
32	Masih tingginya angka Rumah tangga (RT) yang menempati rumah tidak layak huni	Ketersediaan Infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah
33	Masih terdapatnya perumahan dan permukiman pada kawasan bencana dan penyedia pangan tinggi	
34	Masih besarnya luasan kawasan kumuh	

No	Masalah	Isu Strategis
35	Masih rendahnya jumlah penduduk dengan rumah tinggal yang mengakses sarana sanitasi bersuspek aman di tahun 2023	
36	Masih rendahnya Rumah tangga (RT) yang menempati rumah tidak layak huni	
37	Masih besarnya backlog perumahan	
38	Belum optimalnya realisasi penataan kawasan kumuh	
39	Masih rendahnya jumlah penduduk dengan rumah tinggal yang mengakses sarana sanitasi bersuspek aman	
40	Akses jaringan jalan antar wilayah	
41	Belum optimalnya penanganan bencana kebakaran	Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana
42	Belum optimalnya pelayanan kesiapsiagaan, pencegahan dan penanggulangan risiko bencana, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	
43	Sistem pengawasan perijinan dan pemanfaatan ruang belum berjalan optimal	
44	Masih banyaknya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.	Peningkatan kualitas tata kelola dan layanan pemerintahan serta reformasi birokrasi hulu dan hilir
45	Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat masih tinggi	
46	Perlindungan masyarakat masih kurang	
47	Pendidikan yang masih rendah dengan Tingkat rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 sebesar 7,12 tahun Penanganan PMKS yang belum optimal	Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Masyarakat
48	Tingginya jumlah anak terlantar di Kabupaten Cianjur	
49	Belum memadainya sarana dan prasarana penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	
50	Tingginya kasus tuna sosial	
51	Keterbatasan kesempatan kerja	Percepatan transformasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
52	Belum optimalnya dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
53	Masih adanya kasus KDRT dan human trafficking	
54	Belum optimalnya pemberdayaan Perempuan	
55	Belum optimalnya perlindungan atas hak anak	
56	Belum optimalnya ketersediaan pangan daerah	Penguatan ketahanan dan ketersediaan pangan yang berkelanjutan
57	Belum optimalnya akses terhadap pangan	
58	Belum optimalnya pemanfaatan pangan	
59	Terdapat kendala dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan	Peningkatan kualitas tata kelola dan layanan

No	Masalah	Isu Strategis
		pemerintahan serta reformasi birokrasi hulu dan hilir
60	Belum semua kegiatan memiliki dokumen perencanaan pengadaan tanah yang memadai	
61	Belum optimalnya pelestarian keanekaragaman hayati	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
62	Adanya penurunan kuantitas dan kualitas air bersih	
63	Pengolahan limbah belum optimal	
64	Pengelolaan lingkungan pada industri belum optimalnya	
65	Instalasi pengolahan limbah di rumah tangga dan industri masih rendah	
66	Masih rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan energi baru terbarukan	
67	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengolahan limbah menjadi EBT	
68	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan kualitas tata kelola dan layanan pemerintahan serta reformasi birokrasi hulu dan hilir
69	Masih kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	
70	Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan	
71	Rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap pengendalian angka kelahiran	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
72	Tingginya pernikahan anak (kurang dari 19 tahun)	
73	Belum optimalnya layanan angkutan umum	Ketersediaan Infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah
74	Belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas	
75	Belum optimalnya peran TIK dalam mendukung pelayanan public	Peningkatan kualitas tata kelola dan layanan pemerintahan serta reformasi birokrasi hulu dan hilir
76	Belum optimalnya penerapan satu data indonesia	
77	Belum optimalnya penyelenggaran informasi public	
78	Terdapat beberapa kecamatan yang belum terakses jaringan telekomunikasi dan internet	
79	Masih rendahnya koperasi yang berkualitas.	Percepatan transformasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
80	Masih belum optimalnya kapasitas usaha mikro dalam perekonomian	
81	Kurangnya daya saing investasi daerah	
82	Belum meratanya fasilitas olahraga	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
83	Belum optimalnya peran organisasi olahraga	

No	Masalah	Isu Strategis
84	Belum optimalnya peran organisasi dan komunitas kepemudaan	
85	Belum optimalnya pengelolaan integrasi data statistik dalam rangka satu data	Peningkatan kualitas tata kelola dan layanan pemerintahan serta reformasi birokrasi hulu dan hilir
86	Rendahnya tingkat ketersediaan data sektoral	
87	Belum optimalnya penerapan sistem keamanan informasi	
88	Belum optimalnya pelestarian kebudayaan daerah	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
89	Belum optimalnya pengembangan kebudayaan daerah	
90	Belum terbangunnya budaya baca di keluarga	
91	Masih minimnya sarana prasarana untuk membaca	
92	Perangkat Daerah yang belum menerapkan sistem kearsipan secara baku	Peningkatan kualitas tata kelola dan layanan pemerintahan serta reformasi birokrasi hulu dan hilir
93	Belum optimalnya produksi perikanan dan kelautan	Percepatan transformasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
94	Jumlah kunjungan wisatawan yang belum optimal	Pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan
95	Luas lahan pertanian yang semakin berkurang	Percepatan transformasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
96	SMD pertanian yang masih rendah dan kurang	
97	Produktivitas pertanian belum optimal	
98	Belum optimalnya penyediaan barang yang dibutuhkan masyarakat	Percepatan transformasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
99	Belum optimalnya perdagangan berskala ekspor antar wilayah maupun negara	
100	Masih rendahnya kapasitas industri kecil dan menengah	Percepatan transformasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
101	Tidak adanya kepastian kuota penempatan yang diterima oleh Kabupaten	Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Masyarakat
102	Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam menyikapi kebijakan pemerintah	
103	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik	
104	Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam wawasan kebangsaan	

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka dilakukan pembobotan untuk melihat isu strategis di Kabupaten Cianjur seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 33. Pembobotan Isu Strategis Kabupaten Cianjur

Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria					Total Skor
	1	2	3	4	5	
Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	25	20	20	15	10	90
Penguatan ketahanan dan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	25	20	20	15	10	90
Percepatan transformasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	25	20	20	15	10	90
Pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan	20	20	20	15	10	85
Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Masyarakat	25	20	20	15	9	89
Ketersediaan Infrastruktur dasar dan Konektivitas Wilayah	25	20	20	15	10	90
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	20	20	17	12	10	79
Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	20	20	20	13	9	82
Peningkatan kualitas tata kelola dan layanan pemerintahan serta reformasi birokrasi hulu dan hilir	20	20	18	12	13	83

Keterangan:

Kriteria	Bobot
Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	25
Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	25
Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyrakat	20
Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15
Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	15

Dari tabel pembobotan diatas, didapatkan 5 isu strategis yang paling prioritas, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2. Penguatan ketahanan dan ketersediaan pangan yang berkelanjut;
3. Percepatan transformasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
4. Ketersediaan Infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah; dan
5. Penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan dan perlindungan sosial masyarakat.

Selain hasil dari analisis kondisi dan gambaran umum terhadap permasalahan pembangunan Kabupaten Cianjur, isu strategis dari dinamika internasional, nasional, maupun regional juga akan mempengaruhi pembangunan Kabupaten Cianjur. Berdasarkan hasil telaahan terhadap beberapa kebijakan sebelumnya, didapatkan bahwa

terdapat isu–isu strategis di tingkat internasional, nasional, maupun provinsi.

Oleh karena itu, bagan di bawah ini menunjukkan sinkronisasi isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Cianjur dengan isu strategis pembangunan jangka panjang yang juga sedang berkembang di dunia internasional, nasional, serta regional. Keterkaitan dan sinkronisasi isu strategis ini akan mempengaruhi pembangunan Kabupaten Cianjur karena adanya keterkaitan dengan pembangunan pada tingkatan lainnya. Secara garis besar, isu – isu strategis pembangunan jangka panjang di tingkat internasional, nasional, provinsi, maupun kabupaten dapat dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) topik utama yang menjadi fokus pembangunan.

Kesembilan topik tersebut antara lain terkait sumber daya manusia, sarana dan prasarana, lingkungan, ekonomi, kemiskinan, pangan, institusi dan pelayanan publik, komunitas dan pembangunan berkelanjutan, serta pengendalian penduduk. Adapun topik terkait pengendalian penduduk merupakan isu strategis di tingkat provinsi maupun Kabupaten Cianjur mengingat banyaknya jumlah penduduk yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cianjur.

Tabel 3. 34. Hasil Telaah Isu Strategis Tingkat Internasional, Nasional, dan Provinsi Dalam Perumusan Isu Strategi

No	Permasalahan Pembangunan	Urusan	Perumusan Isu Strategis Per Rumpun Urusan				Rumusan Isu Strategis Daerah
			Telaah Isu Internasional	Telaah Isu Nasional	Telaah Isu Provinsi	Telaah Isu Kabupaten/ Kota	
1	Sumber Daya Manusia	Tenaga Kerja	Pengembangan kapasitas SDM untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan	Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas	Masih rendahnya pencari kerja yang berkerja	Pengangguran serta perluasan kesempatan kerja	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
				Produktivitas tenaga kerja masih tertinggal	Produktivitas tenaga kerja masih rendah		
				Strategi para pekerja menghadapi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di sektor ketenagakerjaan			
		Pendidikan	Kualitas Pendidikan untuk Semua (Universal Quality Education)	Rendahnya kualitas dan mutu pendidikan	Pemerataan distribusi guru antar daerah	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	
			Teknologi Digital dalam Pendidikan (*Digital Technologies in Education*)	Kualitas dan kesejahteraan guru	Rendahnya partisipasi pendidikan	Pemberdayaan lembaga pendidikan nonformal	
			Solidaritas dan Kemitraan (*Solidarity and Partnership*)	Relevansi kurikulum di dunia pendidikan	Akreditasi sekolah yang masih rendah		
				Kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Optimalisasi penerapan teknologi informasi pembelajaran		
				Ketimpangan akses digital			
		Perpustakaan		Rendahnya tingkat literasi masyarakat	Rendahnya tingkat literasi masyarakat	Rendahnya tingkat literasi masyarakat	
		Kesehatan	Pandemi dan kesehatan publik	Pembiayaan dan fasilitas kesehatan	Akses, mutu, dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan	

No	Permasalahan Pembangunan	Urusan	Perumusan Isu Strategis Per Rumpun Urusan				Rumusan Isu Strategis Daerah
			Telaah Isu Internasional	Telaah Isu Nasional	Telaah Isu Provinsi	Telaah Isu Kabupaten/ Kota	
				Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan	Jumlah, mutu, dan penyebaran sumber daya Kesehatan	Pemberdayaan layanan kesehatan	
				Gizi buruk dan stunting	Pembiayaan kesehatan untuk peningkatan pelayanan Kesehatan	Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata	
				Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Pemberdayaan masyarakat untuk perilaku hidup bersih dan sehat	Intervensi gizi spesifik dan sensitif	
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Kesenjangan gender yang tinggi	Perlindungan perempuan dan anak	Perlindungan perempuan dan anak	
				Perlindungan perempuan dan anak			
		Pengendalian penduduk dan keluarga berencana					
		Kepemudaan dan Olahraga		Prestasi olahraga	Peningkatan kesejahteraan insan olahraga	Peningkatan kesejahteraan insan olahraga	
					Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	
		Kebudayaan		Karakter dan jatidiri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan Masyarakat	Belum optimalnya pelindungan kebudayaan dan cagar budaya di Jawa Barat	Belum optimalnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan daerah	

No	Permasalahan Pembangunan	Urusan	Perumusan Isu Strategis Per Rumpun Urusan				Rumusan Isu Strategis Daerah
			Telaah Isu Internasional	Telaah Isu Nasional	Telaah Isu Provinsi	Telaah Isu Kabupaten/ Kota	
						Belum optimalnya pengembangan budaya daerah sebagai modal dasar pembangunan	
2	Ekonomi	Pangan	Ketahanan pangan dunia	Ketahanan dan ketersediaan pangan dalam negeri	Akses pangan belum merata	Ketahanan Pangan dan ketersediaan pangan	Penguatan ketahanan dan ketersediaan pangan yang berkelanjutan
					Ketersedian pangan belum optimal		
					Pemanfaatan pangan belum optimal		
					Keamanan pangan, Diversifikasi pangan dan Kerawanan pangan		
		Kelautan dan Perikanan	Keadilan bagi nelayan dan keberlanjutan stok sumber ikan global	Potensi ekonomi Laut Belum Optimal	Produksi Perikanan tangkap dan budidaya belum optimal	Potensi Perikanan belum dikembangkan sepenuhnya	
			Konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati laut	Produktivitas sumber daya kelautan dan keamanan laut			
				Food loss and waste			
		Pariwisata		Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata	Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata	Pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan
					Length of Stay (LOS) wisatawan nusantara yang menjadi target pasar potensial pasca pandemi masih rendah dan dapat berimplikasi pada spending money wisatawan		

No	Permasalahan Pembangunan	Urusan	Perumusan Isu Strategis Per Rumpun Urusan				Rumusan Isu Strategis Daerah
			Telaah Isu Internasional	Telaah Isu Nasional	Telaah Isu Provinsi	Telaah Isu Kabupaten/ Kota	
					Optimalisasi kinerja sektor-sektor ekonomi spesifik wilayah (pariwisata, ekraf, digital, dan waste management)		
					Pengembangan Pariwisata Alam dan ekonomi kreatif (atraksi, infrastruktur)		
		Pertanian			Rendahnya pendapatan pelaku usaha perkebunan	Kontribusi Sektor pertanian yang semakin menurun	
					Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura belum optimal		
					Masih rendahnya capaian NTUP yang menggambarkan kondisi kesejahteraan peternak		
					Masih kurangnya produksi daging, telur, dan susu dalam memenuhi pangan hewani		
					Belum Optimalnya penjaminan mutu produk hewan		
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang belum Optimal	Percepatan transformasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif

No	Permasalahan Pembangunan	Urusan	Perumusan Isu Strategis Per Rumpun Urusan				Rumusan Isu Strategis Daerah
			Telaah Isu Internasional	Telaah Isu Nasional	Telaah Isu Provinsi	Telaah Isu Kabupaten/ Kota	
		Investasi		Pembiayaan berkelanjutan dan investasi di Indonesia	Tuntutan kebutuhan peningkatan investasi	Investasi Daerah yang Belum Optimal	
		Koperasi, Usaha Kecil Menengah		Rendahnya kontribusi UMKM dan Koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi	Belum optimalnya kualitas koperasi	Masih rendahnya koperasi yang berkualitas	
					Belum optimalnya daya saing UKM	Masih terhambatnya pertumbuhan UMKM	
					Pemberdayaan UMKM dan Startup		
					Pelatihan dan pemasaran digital produk UMKM		
					Peningkatan produktivitas dan partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi dan Optimalisasi pertumbuhan startup		
					Integrasi Pengembangan Ekraf		
					Peran pemuda dalam kewirausahaan		
		Perindustrian	Penerapan industri hijau	Deindustrialisasi Dini	Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan Belum Optimal	Masih rendahnya kapasitas industri kecil dan menengah	
		Perdagangan	Perubahan Konstelasi Perdagangan Global	Regulasi, proteksi dan kebijakan yang memihak produk dalam negeri dengan tujuan untuk menaikkan daya saing produk dalam negeri	Pertumbuhan sektor Perdagangan Belum Pulih	penyediaan barang pokok dan penting yang dibutuhkan oleh masyarakat	

No	Permasalahan Pembangunan	Urusan	Perumusan Isu Strategis Per Rumpun Urusan				Rumusan Isu Strategis Daerah
			Telaah Isu Internasional	Telaah Isu Nasional	Telaah Isu Provinsi	Telaah Isu Kabupaten/ Kota	
		Sosial		Perlindungan sosial bagi masyarakat	Perlindungan sosial bagi masyarakat	Perlindungan sosial bagi masyarakat	Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Masyarakat
		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Pelaksanaan K3 dan Penegakan Perda	Pelaksanaan K3 dan Penegakan Perda	
		Infrastruktur dan Permukiman	Belum meratanya ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan (SDGs)	Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan yang didukung infrastruktur dasar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Ketersediaan Infrastruktur dasar dan Konektivitas Wilayah
			Belum meratanya akses permukiman yang aman dan berkelanjutan (SDGs)	Belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman	Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Pemerataan infrastruktur dasar	
			Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral (AEC)	Belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi layak dan aman	Pengembangan Kawasan Rebana dan Jabar Selatan	Interkoneksi wilayah di Kabupaten Cianjur	
				Belum memadainya kualitas prasarana jalan mendukung pengembangan wilayah	Ketersediaan Infrastruktur Dasar		
				Masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah	Penyediaan infrastruktur penunjang		

No	Permasalahan Pembangunan	Urusan	Perumusan Isu Strategis Per Rumpun Urusan				Rumusan Isu Strategis Daerah
			Telaah Isu Internasional	Telaah Isu Nasional	Telaah Isu Provinsi	Telaah Isu Kabupaten/ Kota	
				Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Infrastruktur			
				Ibu Kota Negara (IKN)			
3	Lingkungan	Lingkungan Hidup	Terancamnya fungsi ekosistem daratan yang berkelanjutan (SDGs)	Belum tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan.	Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Sumberdaya Alam, Tata Ruang dan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
			Mendukung penurunan emisi gas rumah kaca global (Perjanjian Paris)	Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi GRK melalui Pembangunan Rendah Karbon	Net zero emission Tahun 2045 dengan Penurunan emisi gas rumah kaca	Pengelolaan sampah	
					Daya dukung dan daya tampung lingkungan yang melebihi ambang batas	Penyediaan air bersih	
					Penurunan kuantitas dan kualitas air	Kualitas udara	
					Berkurangnya luas kawasan resapan air	Kerusakan lingkungan	
					Penurunan kualitas udara	Konflik sumber daya alam	
						Lahan kritis	
		Kebencanaan		Pengelolaan risiko bencana	Pengurangan risiko bencana di Provinsi Jawa Barat	Tingginya indeks risiko bencana di Kabupaten Cianjur	Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana
				Tingginya risiko bencana di Indonesia	Penguatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana		

No	Permasalahan Pembangunan	Urusan	Perumusan Isu Strategis Per Rumpun Urusan				Rumusan Isu Strategis Daerah
			Telaah Isu Internasional	Telaah Isu Nasional	Telaah Isu Provinsi	Telaah Isu Kabupaten/ Kota	
4	Tata Kelola	Keuangan			pengelolaan keuangan daerah	kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah, kontribusi PAD terhadap pendapatan masih rendah, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah yang belum optimal	Peningkatan kualitas tata kelola dan layanan pemerintahan serta reformasi birokrasi hulu dan hilir
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Perlindungan hukum kepada masyarakat dengan memberikan dokumen kependudukan yang cepat, akurat, lengkap dan gratis	Pemenuhan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Pemenuhan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	
				Kehadiran negara dalam memberikan pelayanan adminduk			
		Komunikasi dan Informatika				Penyelenggaraan informasi publik	
		Statistik				Optimalisasi Cianjur Satu Data	
		Perencanaan Pembangunan				Konsistensi penjabaran dokumen perencanaan	
		Kepegawaian				Kompetensi ASN	
		Pengawasan				Peningkatan kapabilitas APIP	

Sumber : Hasil analisis, 2024

BAB IV
VISI DAN MISI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN CIANJUR 2025-2045

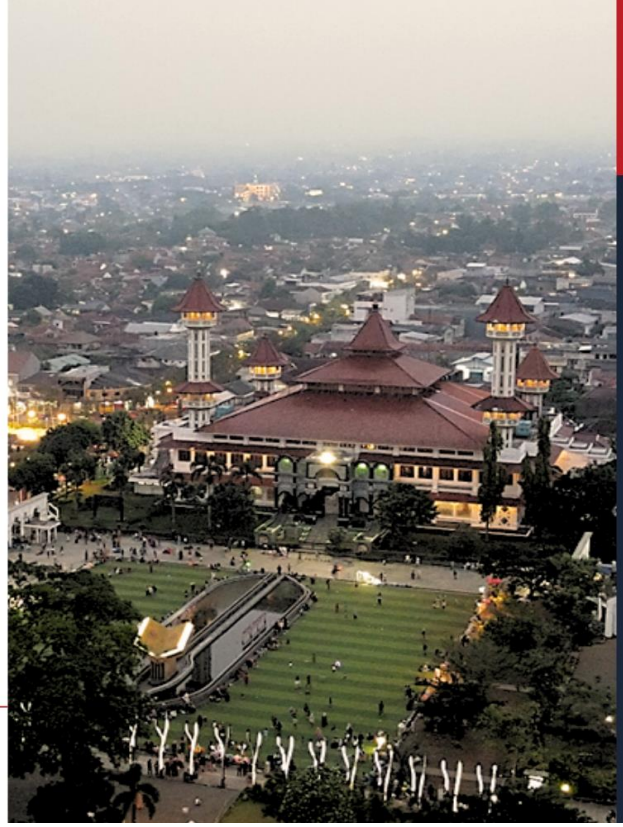

4.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum yang mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, namun suatu komitmen dan upaya merancang serta mengelola perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan 20 tahun ke depan. Visi Kabupaten Cianjur dirumuskan, dibahas, dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para pemangku kepentingan dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu–isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki dan mempedomani RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.

4.1.1 Visi Indonesia Emas 2045

Visi abadi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah menjadi negara yang **merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur**.

Visi abadi Indonesia tersebut diterjemahkan ke dalam visi RPJPN tahun 2025-2045 sebagai **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**. Penentuan visi ini berlandaskan pada kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim, perkembangan megatrend global dan pencapaian Pembangunan periode sebelumnya.

Gambar 4. 1. Visi Indonesia Emas 2045

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

Secara umum, Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan dengan kondisi terbaik dalam aspek sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan**.**

4.1.2 Visi Provinsi Jawa Barat 2045

Rumusan mengenai keadaan atau kondisi Provinsi Jawa Barat yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil Pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi, capaian Pembangunan dan isu strategis Provinsi Jawa Barat serta penjabaran visi Indonesia Emas 2045.

Mempertimbangkan berbagai hal tersebut, visi Provinsi Jawa Barat 2045 yaitu **Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan** yang diharapkan dapat menjadi perekat dan komitmen Bersama semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan.

Visi Provinsi Jawa Barat mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dengan pertimbangan, **Termaju** tingkat perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya; **Berdaya Saing Dunia** memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi, teknologi dan inovasi, sumber daya manusia, serta infrastruktur dalam jangka panjang; dan **Berkelanjutan** kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik, untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

4.1.3 Visi Kabupaten Cianjur 2045

Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini, tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang dan visi RPJPN serta RPJPD Provinsi Jawa Barat, maka perumusan visi RPJPD Kabupaten Cianjur tahun 2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1. Pertimbangan Visi RPJPN dan RPJPD Prov. Jawa Barat Tahun 2025-2045

No	Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi	
			Nasional	Provinsi
1	MANDIRI	Ketahanan Pangan Transformasi dan Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata Berkelanjutan Kemiskinan, Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial	Indonesia yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya	Mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal untuk memenuhi untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif dengan memenuhi kebutuhannya sendiri, produktif melalui penerapan ekonomi hijau dan biru
2	MAJU	Sumber Daya Manusia Tata Kelola dan Layanan Pemerintahan	Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi berakar pada budaya Nusantara	Memiliki standar kualitas hidup yang tinggi melebihi provinsi lain dan berstandar internasional
3	BERKELANJUTAN	Infrastruktur dan Konektivitas Lingkungan Hidup Penanggulangan Bencana	Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan	Menjamin kelestarian SDA dan LH dengan tata kelola yang baik dalam jangka Panjang. Keberlanjutan SDA dan LH bertujuan untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan ekosistem Provinsi

No	Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi	
			Nasional	Provinsi
			sosial, keberlanjutan SDA dan kualitas LH, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau dan laut beserta isinya terjaga dengan baik	Jawa Barat dalam konteks lokal dan global serta kesejahteraan makhluk hidup yang ada didalamnya

Sumber: Tim Penyusun dan Tim Teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

Hasil perumusan visi Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 adalah:

Tabel 4. 2. Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

No	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi
1	Mandiri	Dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada daerah lain,
2	Maju	Bergerak ke depan, mendesak ke depan, menjadi lebih baik, berada pada tingkat peradaban yang lebih tinggi, berkembang
3	Berkelanjutan	berlangsung terus-menerus; berkesinambungan

Sumber: Tim Penyusun dan Tim Teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan masukan muatan lokal daerah maka Visi RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 adalah:

Gambar 4. 2. Visi RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2045

Sumber: Tim Penyusun dan Tim Teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

Pernyataan visi pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2045 Mandiri, Maju dan Berkelanjutan di atas memiliki makna:

Tabel 4. 3. Makna Visi Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

No	Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
1	MANDIRI	Ketahanan Pangan Transformasi dan Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata Berkelanjutan Kemiskinan, Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial	Dengan iman dan takwa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal (sumber daya manusia dan sumber daya alam serta budaya)
2	MAJU	Sumber Daya Manusia Tata Kelola dan Layanan Pemerintahan	Dengan berlandaskan iman dan takwa menjadi lebih baik dalam pengelolaan sumber daya lokal sektor unggulan agribisnis dan pariwisata yang didukung oleh sumber daya manusia yang sehat, sejahtera, berdaya saing, berbudaya luhur dan berakhlak mulia
3	BERKELANJUTAN	Infrastruktur dan Konektivitas Lingkungan Hidup Penanggulangan Bencana	Dengan iman dan takwa memiliki komitmen untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan secara terencana dan terukur dengan tidak merusak dan mengorbankan lingkungan bagi kepentingan generasi di masa yang akan datang dengan memperhatikan budaya dan kearifan lolal

Sumber: Tim Penyusun dan Tim Teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

Adapun penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Cianjur tahun 2025-2045 dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 3. Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Cianjur dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2045

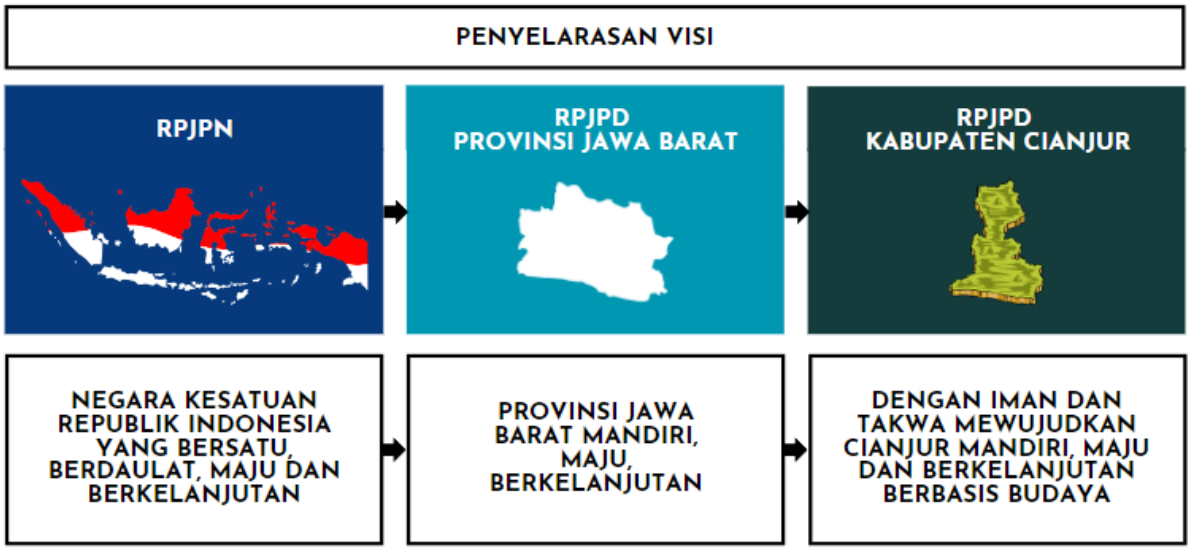

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan Tim Penyusun dan Tim Teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

Adapun penyelarasan sasaran visi RPJPD Kabupaten Cianjur tahun 2025-2045 dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4. Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

No	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
	Nasional				**Provinsi Jawa Barat**				**Kabupaten Cianjur**			
1	Pendapatan per kapita setara Negara maju	GNI Per Kapita (US$)	5.500	30.300	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	57,41-57,77	273,17-325,25	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per Kapita (Rp Juta)	24,47 – 24,83	45,83 – 97,91
		Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	41,87-42,00	46,43-47,60		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	7,31	7,62
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5-,08	Kemiskinan dan ketimpangan menurun	Tingkat Kemiskinan (%)	5,85-6,46	0,09-,059	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	10,07 - 9,12	0,92 - 0,14
		Gini Rasio (Indeks)	0,379-0,382	0,377-0,320		Rasio Gini (Indeks)	0,383-0,390	0,357-0,380		Rasio Gini (Indeks)	0,321 - 0,314	0,312 - 0,289
		Kontribusi PDB KTI (%)	21,5	28,5		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	12,72	10,77		Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	2,21	2,12
		Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15,0		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	48,19	186,06		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,16 - 5,4	5,24 – 6,44
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	NA	NA		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,96-5,37	5,07-6,27				
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	*Global Power Index (%)*	34	15 Besar	Kepemimpinan daerah di dunia internasional meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (Poin)	3,87	5,00	Kepemimpinan daerah di dunia internasional meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,35	3,55
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,54	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,55	0,72	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	69,14	81,47
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,61	75,84	Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO_2eq/2010 IDR Milyar)	8,98	18,08
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,68	74,15		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,06	72,08		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	67,54	69,02

Sumber: RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Barat, Tim Penyusun dan Tim Teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

4.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum tentang upaya atau pilihan jalan (*the chosen track*) yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu menyediakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan. Misi merupakan hal yang penting untuk dirumuskan untuk membantu menggambarkan visi secara lebih jelas yang ingin dicapai dan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi.

Misi dalam RPJPD harus mampu menaungi berbagai tema pembangunan dalam 4 tahap selama 20 tahun ke depan. Perumusan misi merupakan suatu upaya menyusun sistematika berupa pola perjalanan pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur dalam rangka mengembangkan program-program prioritas untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan masyarakat lebih efektif efisien dan terukur. Dalam menyusun misi pembangunan jangka panjang daerah, harus mengacu pada permasalahan pokok.

Proses perumusan misi pembangunan daerah Kabupaten Cianjur memedomani misi nasional sesuai sesuai hasil penyelarasan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 yang merupakan agenda Pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu:

Gambar 4. 4. Delapan Misi (Agenda) Pembangunan Tahun 2045

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045, 2023 (diolah)

Adapun perumusan misi RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 merupakan kondisi yang akan dicapai dari permasalahan yang terjadi, seperti terlihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5. Perumusan Misi RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

No	Masalah	Misi
1	Masih adanya angka putus sekolah disebabkan masih tingginya keluarga miskin ekstrem dan memiliki anak usia sekolah tahun 2023 yang mencapai 0,51 persen	Mewujudkan masyarakat yang sehat, Sejahtera dan berdaya saing
2	Masih belum meratanya satuan Pendidikan di semua jenjang pendidikan berdasarkan jarak tempuh antara siswa dan satuan Pendidikan	
3	Masih belum meratanya kualitas bangunan sesuai standar sekolah	
4	Masih belum meratanya alat peraga Pendidikan disemua jenjang pendidikan	
5	Masih rendahnya rapor Pendidikan Tingkat PAUD, SD dan SMP	
6	Masih tingginya penduduk keluarga miskin ekstrem tahun 2023 yang mencapai 0,51 persen dan memiliki anak usia sekolah	
7	Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat Pada Jenjang Pendidikan Kesetaraan Baik Paket A, Paket B dan Paket C karena faktor usia dan telah bekerja	
8	Kurang meratanya lembaga pendidikan kesetaraan	
9	Belum optimalnya Pemberdayaan lembaga pendidikan kesetaraan	
10	Masih terdapat RKB yang perlu di rehabilitasi dan pembangunan baru untuk memenuhi kapasitas siswa	
11	Ketersediaan layanan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan terutama pada jenjang PAUD,SD dan SMP yang perlu ditingkatkan	
12	Masih kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan	
13	Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata	
14	Faktor Kesehatan lingkungan	
15	Belum optimalnya pelayanan ANC (Anti Natal Care)	
16	Kekurangan asupan gizi yang terjadi sejak bayi masih dalam kandungan dan berlanjut sejak kelahiran	
17	Belum optimalnya pencegahan sejak dini	
18	Belum optimalnya pola asuh	
19	Belum optimalnya kondisi mantap jalan kabupaten	Mewujudkan pemerataan infrastruktur andal dan berkualitas
20	Rendahnya kondisi jaringan irigasi teknis dan non teknis dalam kondisi baik	
21	Kondisi jaringan drainase dalam kondisi baik belum optimal	
22	Belum terintegrasinya sistem drainase perkotaan yang berdaya fungsi optimal	
23	Belum tertanganinya banjir	
24	Cakupan pelayanan air bersih belum optimal	
25	Cakupan pelayanan air minum belum optimal	

No	Masalah	Misi
26	Cakupan pelayanan persampahan perkotaan belum optimal	
27	Rendahnya peningkatan persentase bangunan ber-IMB	
28	Belum terdapatnya regulasi tata ruang	
29	Adanya peningkatan alih fungsi lahan	
30	Belum optimalnya penanggulangan bencana	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan
31	Belum optimalnya upaya mitigasi bencana	
32	Masih tingginya angka Rumah tangga (RT) yang menempati rumah tidak layak huni	Mewujudkan pemerataan infrastruktur andal dan berkualitas
33	Masih terdapatnya perumahan dan permukiman pada kawasan bencana dan penyedia pangan tinggi	
34	Masih besarnya luasan kawasan kumuh	
35	Masih rendahnya jumlah penduduk dengan rumah tinggal yang mengakses sarana sanitasi bersuspek aman di tahun 2023	
36	Masih rendahnya Rumah tangga (RT) yang menempati rumah tidak layak huni	
37	Masih besarnya backlog perumahan	
38	Belum optimalnya realisasi penataan kawasan kumuh	
39	Masih rendahnya jumlah penduduk dengan rumah tinggal yang mengakses sarana sanitasi bersuspek aman	
40	Akses jaringan jalan antar wilayah	
41	Belum optimalnya penanganan bencana kebakaran	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan
42	Belum optimalnya pelayanan kesiapsiagaan, pencegahan dan penanggulangan risiko bencana, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	
43	Sistem pengawasan perizinan dan pemanfaatan ruang belum berjalan optimal	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan
44	Masih banyaknya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya.	Terciptanya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung peningkatan perekonomian daerah
45	Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat masih tinggi	
46	Perlindungan masyarakat masih kurang	
47	Pendidikan yang masih rendah dengan Tingkat rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 sebesar 7,12 tahun Penanganan PMKS yang belum optimal	Mewujudkan masyarakat yang sehat, Sejahtera dan berdaya saing
48	Tingginya jumlah anak terlantar di Kabupaten Cianjur	

No	Masalah	Misi
49	Belum memadainya sarana dan prasarana penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	
50	Tingginya kasus tuna sosial	
51	Keterbatasan kesempatan kerja	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan sektor unggulan agrobisnis dan pariwisata berbasis kekayaan alam, kearifan dan budaya lokal
52	Belum optimalnya dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya	Mewujudkan masyarakat yang sehat, Sejahtera dan berdaya saing
53	Masih adanya kasus KDRT dan human trafficking	
54	Belum optimalnya pemberdayaan Perempuan	
55	Belum optimalnya perlindungan atas hak anak	
56	Belum optimalnya ketersediaan pangan daerah	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan sektor unggulan agrobisnis dan pariwisata berbasis kekayaan alam, kearifan dan budaya lokal
57	Belum optimalnya akses terhadap pangan	
58	Belum optimalnya pemanfaatan pangan	
59	Terdapat kendala dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan
60	Belum semua kegiatan memiliki dokumen perencanaan pengadaan tanah yang memadai	
61	Belum optimalnya pelestarian keanekaragaman hayati	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan
62	Adanya penurunan kuantitas dan kualitas air bersih	
63	Pengolahan limbah belum optimal	
64	Pengelolaan lingkungan pada industri belum optimalnya	
65	Instalasi pengolahan limbah di rumah tangga dan industri masih rendah	
66	Masih rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan energi baru terbarukan	
67	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengolahan limbah menjadi EBT	
68	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan adaptif (Dynamic Governance)
69	Masih kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	

No	Masalah	Misi
70	Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan
71	Rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap pengendalian angka kelahiran	Mewujudkan masyarakat yang sehat, Sejahtera dan berdaya saing
72	Tingginya pernikahan anak (kurang dari 19 tahun)	
73	Belum optimalnya layanan angkutan umum	Mewujudkan pemerataan infrastruktur andal dan berkualitas
74	Belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas	
75	Belum optimalnya peran TIK dalam mendukung pelayanan public	Mewujudkan masyarakat yang sehat, Sejahtera dan berdaya saing
76	Belum optimalnya penerapan satu data indonesia	
77	Belum optimalnya penyelenggaran informasi public	
78	Terdapat beberapa kecamatan yang belum terakses jaringan telekomunikasi dan internet	
79	Masih rendahnya koperasi yang berkualitas.	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan sektor unggulan agrobisnis dan pariwisata berbasis kekayaan alam, kearifan dan budaya lokal
80	Masih belum optimalnya kapasitas usaha mikro dalam perekonomian	
81	Kurangnya daya saing investasi daerah	
82	Belum meratanya fasilitas olahraga	Mewujudkan masyarakat yang sehat, Sejahtera dan berdaya saing
83	Belum optimalnya peran organisasi olahraga	
84	Belum optimalnya peran organisasi dan komunitas kepemudaan	
85	Belum optimalnya pengelolaan integrasi data statistik dalam rangka satu data	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan adaptif (Dynamic Governance)
86	Rendahnya tingkat ketersediaan data sektoral	
87	Belum optimalnya penerapan sistem keamanan informasi	
88	Belum optimalnya pelestarian kebudayaan daerah	Mewujudkan masyarakat yang sehat, Sejahtera dan berdaya saing
89	Belum optimalnya pengembangan kebudayaan daerah	
90	Belum terbangunnya budaya baca di keluarga	
91	Masih minimnya sarana prasarana untuk membaca	
92	Perangkat Daerah yang belum menerapkan sistem kearsipan secara baku	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan adaptif (Dynamic Governance)

No	Masalah	Misi
93	Belum optimalnya produksi perikanan dan kelautan	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan sektor unggulan agrobisnis dan pariwisata berbasis kekayaan alam, kearifan dan budaya lokal
94	Jumlah kunjungan wisatawan yang belum optimal	
95	Luas lahan pertanian yang semakin berkurang	
96	SMD pertanian yang masih randah dan kurang	
97	Produktivitas pertanian belum optimal	
98	Belum optimalnya penyediaan barang yang dibutuhkan masyarakat	
99	Belum optimalnya perdagangan berskala ekspor antar wilayah maupun negara	
100	Masih rendahnya kapasitas industri kecil dan menengah	
101	Tidak adanya kepastian kuota penempatan yang diterima oleh Kabupaten	Mewujudkan masyarakat yang sehat, Sejahtera dan berdaya saing
102	Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam menyikapi kebijakan pemerintah	Terciptanya Masyarakat yang berbudaya luhur, berakhlak mulia dan menjaga kelestarian lingkungan
103	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik	
104	Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam wawasan kebangsaan	

Sumber: Tim Penyusun dan Tim Teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

Berdasarkan pertimbangan permasalahan yang ada di Kabupaten Cianjur, maka Misi RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 terdiri dari:

1. Mewujudkan masyarakat yang sehat, Sejahtera dan berdaya saing;
2. Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan sektor unggulan agrobisnis dan pariwisata berbasis kekayaan alam, kearifan dan budaya lokal;
3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, Akuntabel dan adaptif (*Dynamic Governance*);
4. Terciptanya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung peningkatan perekonomian daerah;
5. Terciptanya Masyarakat yang berbudaya luhur, berakhlak mulia dan menjaga kelestarian lingkungan;
6. Mewujudkan pemerataan infrastruktur andal dan berkualitas;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan;
8. Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun penjelasan masing-masing Misi tersebut adalah sebagai berikut:

Misi 1	:	**Mewujudkan masyarakat yang sehat, Sejahtera dan berdaya saing**

- Meningkatkan SDM diberbagai bidang yang ditandai dengan meningkatnya lndeks Pembangunan Manusia (IPM);
- Meningkatkan kecerdasan, kesehatan, produktivitas, dan kompetensi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang;
- Perluasan jaminan dan bantuan sosial bagi seluruh kelompok Masyarakat terutama kelompok marginal dan rentan;
- Pemerataan dan peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Misi 2	:	**Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan sektor unggulan agrobisnis dan pariwisata berbasis keyaan alam, kearifan dan budaya lokal**

- Memperluas lapangan dan kesempatan kerja serta optimalisasi produktivitas masyarakat melalui peningkatan ekonomi berbasis sektor unggulan agrobisnis dan pariwisata berbasis kearifan dan budaya lokal.
- Optimalisasi sektor-sektor unggulan agribisnis yang bersifat holistik dari hulu ke hilir untuk mencapai ketahanan pangan sengan berbasis kekayaan alam dan potensi yang ada dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tercipta perekonomian daerah yang berkelanjutan.
- Optimalisasi investasi pada sektor perdagangan dan industri agrobisnis maupun pariwisata yang ditunjang dengan keterpaduan rencana dan program berbasis pendekatan wilayah, kearifan dan budaya lokal.

Misi 3	:	**Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, Akuntabel dan adaptif (*Dynamic Governance*)**

- Reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, akuntabel dan melayani, sampai dengan level pemerintahan desa.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik, modernisasi manajemen kepegawaian, restrukturisasi, perubahan manajemen dan organisasi, rekayasa proses administrasi pemerintahan, anggaran berbasis kinerja program dan proses perencanaan yang partisipatif;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi secara lebih optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan transparan berbasis TIK serta membuka akses

informasi publik dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

Misi 4 : Terciptanya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung peningkatan perekonomian daerah

- Peningkatan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum untuk mengurangi tingkat kemiskinan;
- Peningkatan stabilitas ekonomi makro dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi;
- Meningkatkan kerjasama daerah dan internasional seperti *sister city* dalam rangka menciptakan integrasi dengan daerah dan negara lain serta menciptakan komunitas masyarakat yang kuat.

Misi 5 : Terciptanya Masyarakat yang berbudaya luhur, berakhlak mulia dan menjaga kelestarian lingkungan

- Memantapkan tatanan sosial politik kemasyarakatan, meningkatnya budaya, penyelenggaraan fungsi-fungsi publik dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan sejahtera melalui pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan keterampilan, inovasi, dan adaptasi terhadap perubahan;
- Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan berakhlak mulia, berbudaya luhur, menghargai nilai-nilai budaya, dan memelihara warisan budaya dan menghormati perbedaan.

Misi 6 : Mewujudkan pemerataan infrastruktur andal dan berkualitas

- Melakukan peningkatan keterpaduan rencana dan program berbasis pendekatan wilayah, mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kapasitas daya dukung lingkungan, meningkatkan penyediaan air baku untuk semua kebutuhan, kinerja jaringan irigasi, kapasitas pengendalian daya rusak air, kemantapan jalan, konektivitas antar wilayah, kebutuhan hunian dengan prasarana dan sarana pendukung, penyediaan sanitasi layak (pengelolaan limbah dan sampah), serta penanganan *backlog* rumah hunian dan kualitas infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan secara merata.

Misi 7 : Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan

- Pemenuhan kebutuhan energi yang terbarukan, kebutuhan pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau dengan memperhatikan kapasitas atau kemampuan untuk mengantisipasi, mempersiapkan, merespons, dan pulih dengan cepat dari dampak bencana.

Misi 8	:	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan

- Perencanaan, pembangunan infrastruktur yang matang, terpadu dan terintegrasi dari berbagai sektor, terintegrasi sehingga mampu berkembang dan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Kedelapan misi tersebut telah diselaraskan dengan misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat seperti terlihat pada Gambar dibawah.

Gambar 4. 5. Penyelarasan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Barat dengan Misi RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2045

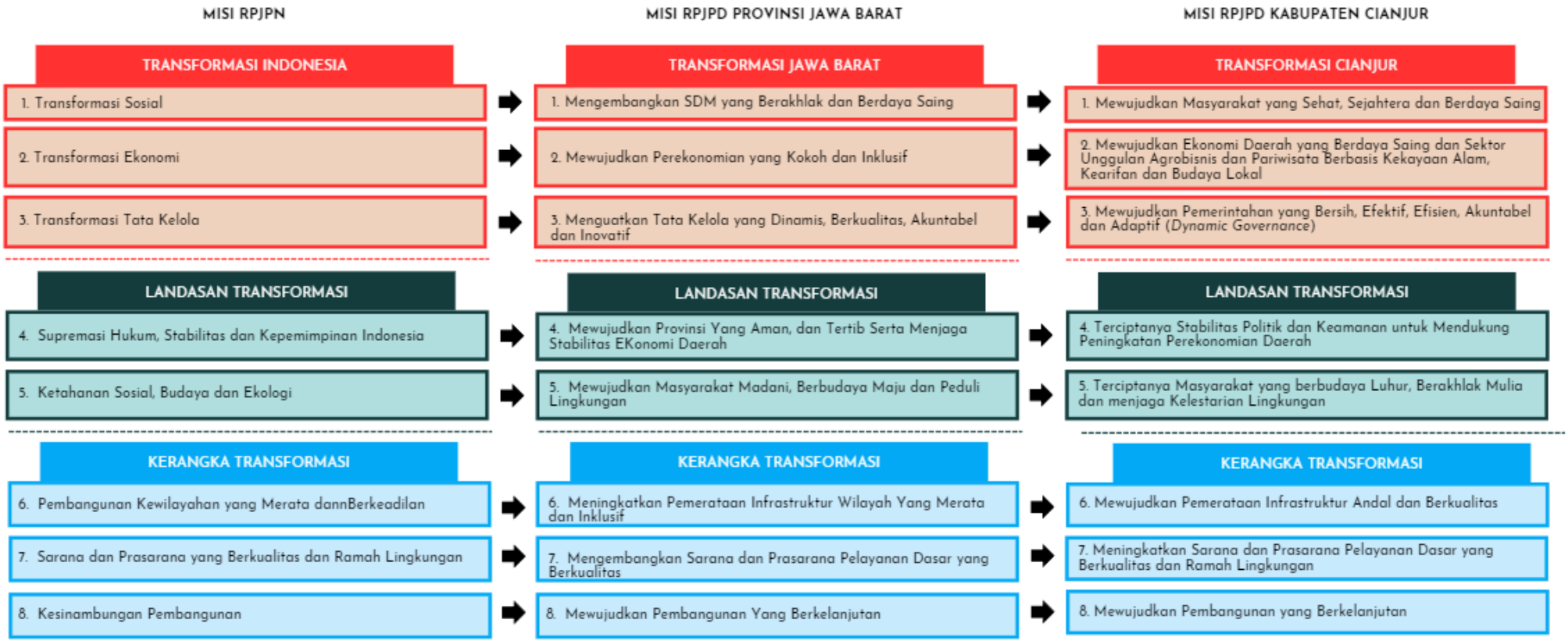

Sumber: Tim Penyusun dan Tim Teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN CIANJUR 2025-2045

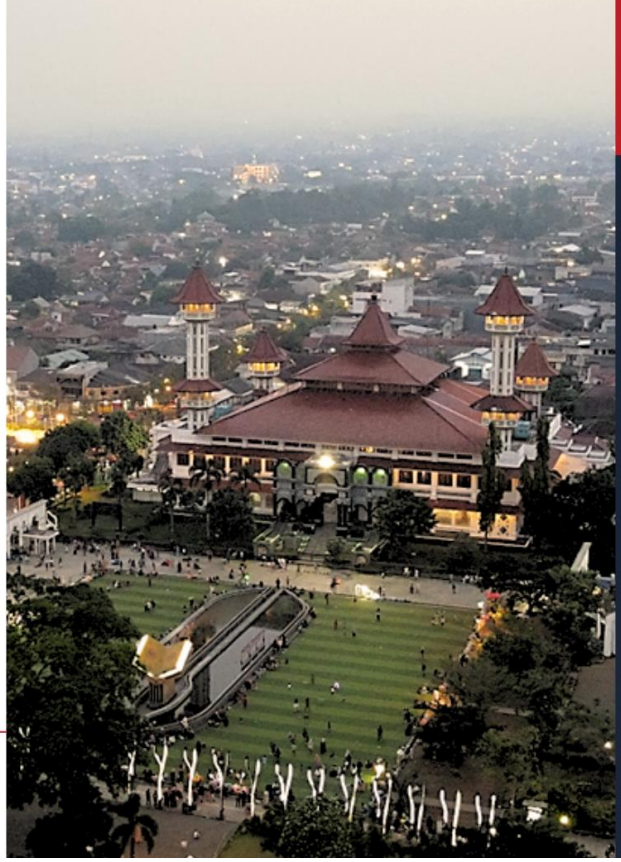

5.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Cianjur mencapai tujuan dan sasaran RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, arah kebijakan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Pada lima tahun pertama, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cianjur ditekankan pada penyediaan sarana dan infrastruktur untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang. Pada tahap kedua, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cianjur ditekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan infrastruktur yang terjangkau.

Pada tahap ketiga, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cianjur ditekankan pada peningkatan pertumbuhan perekonomian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan yang didukung oleh SDM berkualitas di berbagai bidang. Pada lima tahun terakhir, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cianjur ditekankan pada pemantapan perekonomian yang kokoh, adil, dan berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

Gambar 5. 1. Tema Pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

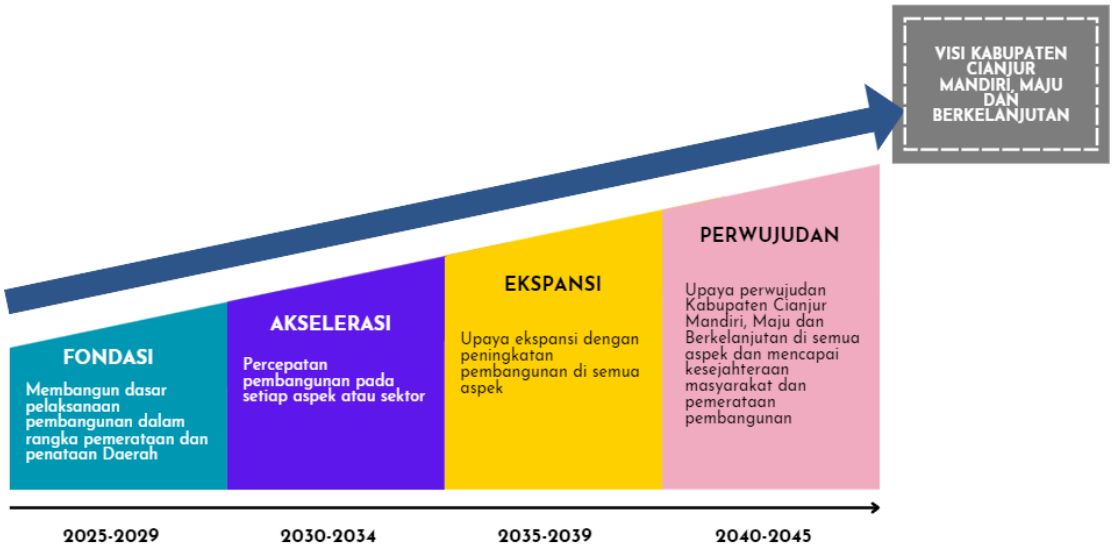

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah menjadi dasar bagi perumusan arah kebijakan daerah selama 20 (dua puluh) tahun. Arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Cianjur bagi ke dalam empat periode RPJMD yaitu periode I (2025-2029), periode II (2030-2034), periode III (2035-2039), periode IV (2040-2045). Implementasi arah kebijakan setiap periode tersebut dilandasi dengan iman dan takwa serta berbasis budaya yang merupakan roh dari visi dan misi RPJPD Tahun 2025-2045.

5.1.1 Periode I Tahun 2025-2029

Periode I diarahkan untuk pembangunan di berbagai bidang yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dalam rangka pemerataan dan persiapan penataan daerah serta menunjang peningkatan ketahanan pangan daerah. Kondisi Kabupaten Cianjur yang aman dan tertib diawali dengan peningkatan kualitas pendidikan yang bermutu dan merata di setiap jenjang, pada tahap pertama, pembangunan pelayanan dasar diarahkan untuk mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta inisiasi pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang didukung oleh penyediaan sarana prasarana dan tenaga kependidikan yang memadai. Pembangunan diarahkan pada pemerataan dan berkeadilan.

Adanya peningkatan akses bagi masyarakat terhadap pendidikan pra sekolah hingga pendidikan menengah. Pembangunan akses literasi masyarakat yang mencakup ketersediaan perpustakaan umum, ketersediaan perpustakaan sekolah, terkait dengan jumlah perpustakaan sekolah, Jumlah Koleksi Per Kapita, hingga pada koleksi

buku yang dipinjam termasuk juga ketercukupan tenaga perpustakaan umum.

Peningkatan sumber daya manusia mengenai pengelolaan kearsipan adalah akan sesuai dengan *Grand Design* Pembinaan SDM Kearsipan yang meliputi strategi pembinaan SDM Kearsipan. Pola dan pelaksanaan pembinaan SDM kearsipan dan target kinerja dan pendanaan dengan harapan dapat terwujudnya peningkatan manajemen kinerja, melalui penguatan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja ANRI dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM Kearsipan dan terwujudnya peningkatan mutu SDM Kearsipan melalui terciptanya kualitas dan kuantitas SDM Kearsipan yang proporsional dan *right sizing*, serta terkelola arsip sebagai pilar *Dynamic governance* dan integrasi memori kolektif bangsa.

Pelayanan kesehatan sudah semakin meningkat ditandai dengan meningkatnya akses pelayanan kesehatan khusus bagi penduduk miskin. Pada tahap pertama juga diprioritaskan pada pencapaian masyarakat sehat terutama melalui konsolidasi upaya kesehatan masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, selain itu perlunya peningkatan SDM kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat Peningkatan kualitas kesehatan berfokus pada meningkatnya penyuluhan tentang gizi dan imunisasi agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin.Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek dengan menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, menumbuhkan swadaya setempat dan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat.

Peningkatan peran kesetaraan gender dalam pembangunan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur untuk melakukan pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi perempuan di Kabupaten Cianjur. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan yang Berperspektif Gender, Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan/Pengasuhan Anak, Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Penurunan Pekerja Anak, dan Pencegahan Perkawinan Anak.

Dari sarana transportasi dan perhubungan, terpenuhinya pembangunan jalan, jembatan, serta simpul–simpul transportasi.

Adanya pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta pengelolaan air limbah. Terwujudnya kebersihan lingkungan ditandai dengan terpenuhinya sarana dan prasarana penunjangnya. Pembangunan perdesaan difokuskan pada tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat desa.
Upaya pembangunan infrastruktur dasar wilayah terutama jalan, jembatan, infrastruktur pengairan dan pengembangan ekonomi lokal sehingga memperlancar aksesibilitas menuju terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru. Pelayanan umum pemerintahan terutama ditujukan untuk pembangunan ketakwaan, kerukunan sosial dan terlaksananya tata pemerintahan yang baik (*Dynamic governance*).

Kabupaten Cianjur merupakan Kabupaten kedua terluas di Jawa Barat dan saat ini sedang mempersiapkan pemekaran daerah Cianjur Selatan. Pemekaran daerah tersebut perlu mempersiapkan beberapa aspek baik legal (aspek hukum) maupun teknis persiapan daerah otonomi baru di lapangan. Proses pengusulan pembentukan Kabupaten Cianjur Selatan sudah dilaksanakan dan diajukan menjadi usulan prioritas dari DPRD Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Pusat. Sementara itu, perlu juga ada pemerataan sarana dan infrastruktur di wilayah Cianjur bagian selatan untuk persiapan pembentukan calon daerah otonomi baru yaitu kabupaten Cianjur Selatan.

Struktur perekonomian mulai tumbuh dan berkembang setelah terkena dampak pandemi covid dan bencana alam gempa bumi yang dipacu oleh tersedianya infrastruktur – infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi. Kegiatan pertanian didukung oleh tersedianya infrastruktur penunjang dan fasilitas pendukung yang mampu meningkatkan produksi maupun distribusi pertanian. Pengembangan pariwisata ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata yang meliputi akses dan ketersediaan akomodasi pariwisata. Ketersediaan infrastruktur penunjang dan fasilitas pendukung juga diarahkan pada pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa. Tersedianya fasilitas penunjang tersebut juga diarahkan agar dapat mendukung terciptanya IKM dan UKM di Kabupaten Cianjur sebagai salah satu bentuk kegiatan perekonomian lokal.

Pembangunan potensi daerah pada tahap ini ditujukan untuk menyiapkan landasan bagi pembangunan daerah agribisnis yang berdaya saing dengan prioritas utama pada penyiapan kerangka regulasi dan dokumen perencanaan pembangunan daerah agribisnis, peningkatan sumberdaya manusia dibidang budidaya dan pengolahan pasca panen sumberdaya agribisnis. Dalam hal pengembangan produk unggulan agribinis, pada tahap awal ini ditujukan pada inventarisasi, identifikasi dan eksploitasi sumberdaya agribisnis yang dapat diunggulkan serta penyiapan sarana prasarana budidaya dan pasca

panen. Dibidang infrastruktur pendukung, pada tahap pertama pembangunan jangka panjang ditujukan pada inisiasi pengembangan kawasan-kawasan sentra pengembangan agribisnis.

Kondisi global dunia saat ini menjadi tidak menentu, dimana banyak negara yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Kabupaten Cianjur dikarunia kondisi geografis yang luas dan subur. Hal ini menjadi potensi yang perlu terus dikembangkan untuk dapat dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Kabupaten Cianjur. Kondisi lingkungan yang semakin menurun membuat kita perlu mempertahankan dan mengembangan potensi yang dimiliki terutama terkait dengan ketahanan pangan. Selaras dengan visi Mandiri, ketahan pangan ini akan menjadikan Kabupaten Cianjur sebagai kota yang mandiri secara pangan sehingga masyarakat dapat meningkat taraf hidupnya.

Pengendalian dan pelestarian lingkungan mulai diarahkan dengan ditetapkannya regulasi untuk mengurangi dampak lingkungan. Resiko bencana sudah mulai berkurang dengan optimalnya sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang sudah terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan. Pembentukan sistem untuk pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi arahan dalam mengendalikan penataan ruang. Penyediaan ruang terbuka hijau diarahkan pada peningkatan alokasi lahan untuk ruang terbuka hijau.

Kontribusi riset dan inovasi memegang peranan penting serta akan sangat mempengaruhi perkembangan keberhasilan membangun masyarakat di daerah untuk lebih maju dan mandiri. Riset dan Inovasi diarahkan agar pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaannya dapat mempercepat peningkatan kecerdasan dan kemampuan masyarakat, mempercepat proses pembaruan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Riset dan Inovasi perlu didukung sinergi gerakan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan skema pendanaan. Hal mendasar yang perlu diatur lebih lanjut adalah bagaimana membangun ekosistem riset dan inovasi di daerah melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh para pelaku utama inovasi yaitu pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, dan industri/dunia usaha *(Triple Helix).*

Peningkatan Sumber daya ASN profesi yang bangga dalam melayani bangsa dengan merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional dengan nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif, dan berusaha untuk mengembangan pelayanan secara digitalisasi dan

pelayanan publik secara terintegrasi dan kemudahan akses informasi yang tak terbatas dalam semua bidang.

5.1.2 Periode II Tahun 2030-2034

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke -1, RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penyelenggaraan pelayanan dasar sebagai urusan wajib pemerintahan daerah yang diikuti dengan semakin meningkatnya dan memantapkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang yang didukung oleh ketersediaan dan pemerataan infrastruktur andal, berkualitas, berkelanjutan dan berketahanan pangan, air dan bencana.

Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, diarahkan pada optimalisasi penyediaan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur yang handal dalam menggunakan TIK. Sistem pelayanan publik semakin sederhana, transparan, dan memiliki kepastian waktu dan biaya yang ditandai dengan berkembangnya outlet pelayanan publik.

Struktur perekonomian mulai tumbuh yang dipacu oleh tersedianya infrastruktur – infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi. Dalam rangka mendukung perekonomian kemasyarakatan, diarahkan juga pada adanya kemudahan pembentukan lembaga perekonomian masyarakat sebagai wadah dalam pengembangan ekonomi lokal. Kegiatan pertanian ditunjang dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pertanian dengan memanfaatkan infrastruktur dan fasilitas penunjang kegiatan pertanian. Peningkatan juga terjadi pada pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam mengakses pasar lokal maupun global. Seiring dengan hal tersebut, sudah mulai munculnya IKM dan UKM yang didorong dengan pembinaan dan motivasi bagi masyarakat pelaku usaha. Pada sektor pariwisata meningkatnya infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata telah disertai dengan optimalnya pengelolaan daerah wisata.

Daya dukung dan kualitas lingkungan diarahkan pada penanganan terhadap dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan ekonomi. Resiko bencana sudah mulai berkurang dengan optimalnya sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang sudah terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan. Pengendalian penataan ruang sudah meningkat ditandai dengan tersosialisasikannya sistem pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyediaan ruang terbuka hijau diarahkan pada peningkatan alokasi lahan untuk ruang terbuka hijau. Pengendalian pertumbuhan penduduk ditandai dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pengendalian kelahiran dan penggunaan alat kontrasepsi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus dalam pembangunan tahap ini ditandai dengan terciptanya pendidikan formal dan non formal yang mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja. Kualitas kesehatan semakin meningkat ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya hidup sehat. Selain itu, peningkatan derajat kesehatan juga diarahkan pada penyelesaian masalah gizi buruk dan menggalakan imunisasi. Pembangunan manusia diarahkan juga pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak semakin baik. Peningkatan kualitas tenaga kerja ditandai dengan meningkatnya tenaga kerja berkualitas dengan minimal lulusan pendidikan menengah atas. Adanya pemenuhan penyediaan kebutuhan pangan pokok khususnya bagi penduduk miskin dan pemenuhan penganekaragaman pangan. Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatnya rata – rata pendapatan masyarakat merupakan capaian untuk menghasilkan masyarakat Kabupaten Cianjur yang sejahtera.

Pemerataan pembangunan yang berkeadilan ditandai dengan adanya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan pra sekolah hingga pendidikan menengah. Selain itu terdapat juga peningkatan akses pelayanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pembangunan juga dilakukan melalui pembangunan jalan baru, pengembangan terminal, serta pengembangan sistem angkutan massal. Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan, pengelolaan sampah diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang sesuai dengan standar pelayanan minimal. Hal ini juga sejalan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih. Terbangunnya fasilitas pengelolaan air limbah terpadu yang diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memelihara fasilitas. Sementara itu, pengembangan kawasan perdesaan difokuskan pada pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia perdesaan dengan adanya kemudahan akses untuk menjangkau berbagai sarana dan prasarana dasar dan penunjang di perdesaan.

Adapun pengembangan potensi agribisnis semakin dipertajam melalui pemantapan kemampuan SDM yang handal dalam pengelolaan sektor primer dan sekunder dengan didukung oleh berkembangnya pusat-pusat pendidikan tinggi serta lembaga *research and development* (R&D) yang berdampak langsung pada peningkatan daya saing produk agrobisnis daerah. Bersamaan dengan itu, pemerintah daerah semakin mendorong keterlibatan sektor swasta untuk mengembangkan industri

pengolahan yang didukung oleh regulasi, perizinan dan iklim investasi yang kondusif. Pada tahap ini kawasan-kawasan agrobisnis semakin berkembang pesat atas dukungan infrastruktur pendukung yang semakin lengkap.

5.1.3 Periode III Tahun 2035-2039

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan dari Periode II, Periode III ditujukan untuk lebih memantapkan pada peningkatan kualitas pembangunan yang berwawasan lingkungan dan peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing. Kondisi aman dan tertib sudah tercipta ditandai dengan kokohnya peran lembaga politik dan hukum yang mampu melindungi masyarakat dari segala macam ancaman ditandai dengan adanya kerjasama dengan unsur vertikal. Hal itu sejalan dengan tersedianya infrastruktur dan fasilitas publik yang mendukung upaya mitigasi bencana serta dikembangkannya sistem informasi kebencanaan dalam rangka menciptakan masyarakat yang tanggap bencana.

Organisasi–organisasi dan lembaga kepemudaan untuk meningkatkan keamanan publik dan mengawal pembangunan sudah mulai berkembang dan kegiatannya berdampak positif terhadap pembangunan. Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, diarahkan pada optimalisasi penyediaan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur yang handal dalam menggunakan dan memanfaatkan TIK. Waktu pelayanan administrasi semakin singkat dengan mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke -2, RPJM ke-3 ditujukkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah menjadi kawasan agrinisnis berdaya saing sebagai *prime mover* pembangunan daerah di berbagai bidang.

Pada tahap ketiga ini, diharapkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat telah memasuki tahap *establish.* Beban pemerintah berkurang seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat dan semakin berperannya sektor swasta dalam memproduksi barang dan jasa secara murah. Walaupun demikian pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan penyediaan barang publik (*public goods*) lainnya yang tidak dapat disediakan secara murah melalui mekanisme pasar tetap dilakukan pemerintah.

Struktur perekonomian mulai tumbuh dan berdaya saing yang ditandai dengan munculnya berbagai spesialisasi atau klaster–klaster pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh wilayah. Klaster–klaster perekonomian yang tumbuh berbasiskan pada sumber daya lokal yang dikembangkan secara partisipatif oleh masyarakat yang bekerjasama

dengan aktor–aktor lain baik pemerintah maupun swasta. Masyarakat sebagai pelaku utama penggerak perekonomian sudah memiliki keahlian yang terspesialisasi dalam mengembangkan sektor–sektor ekonomi.

Sektor pertanian diarahkan untuk peningkatan hasil produksi dari segi kualitas dan mengedepankan ciri khas produk. IKM dan UKM yang menunjang kegiatan produksi mulai berkembang yang didukung oleh akses pemodalan dan inkubasi dalam rangka menciptakan IKM dan UKM yang mandiri dan berdaya saing. Sektor pariwisata diarahkan untuk eksplorasi dan pengembangan potensi–potensi wisata baru. Sejalan dengan berkembangnya sektor–sektor ekonomi tersebut, dalam rangka meningkatkan daya saing, kebijakan pemasaran diarahkan pada perluasan pasar untuk produk–produk unggulan yang ditandai dengan tersedianya regulasi yang mendorong peluang pasar dan ekspor.

Dalam rangka mendukung perekonomian kemasyarakatan, diarahkan juga pada pengembangan dan penguatan lembaga perekonomian masyarakat agar kinerjanya lebih efektif dan efisien serta memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pengembangan ekonomi. Daya dukung dan kualitas lingkungan diarahkan pada penetralisiran dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan–kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas lingkungan ditandai dengan adanya peningkatan penanganan untuk menetralisir dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi.

Resiko bencana sudah mulai berkurang dengan optimalnya sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang sudah terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan. Penyimpangan pemanfaatan ruang semakin diminimalisir melalui penguatan sistem dan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pembangunan berwawasan lingkungan juga ditandai dengan meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau dengan mengalokasikan lahan untuk peningkatan akses terhadap RTH. Pengendalian pertumbuhan penduduk alami maupun migrasi mulai menurun.

Kualitas sumber daya manusia semakin ditingkatkan melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal yang mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja. Akses dan pelayanan kesehatan masyarakat semakin ditingkatkan untuk mendukung penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan kualitas kesehatan berfokus pada penyelesaian masalah gizi buruk dan pengurangan kasus *stunting*.

Pembangunan manusia diarahkan juga pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. Perlindungan terhadap perempuan dan anak semakin baik. Peningkatan kualitas tenaga kerja ditandai dengan meningkatnya tenaga kerja

berkualitas dengan minimal lulusan sekolah menengah dan memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Keahlian dan keterampilan tenaga kerja sudah terspesialisasi dengan kualitas spesifik untuk suatu pasar tertentu.

Kebutuhan pangan lokal yang beragam, bergizi, dan seimbang mulai terpenuhi. Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatnya rerata pendapatan masyarakat merupakan capaian untuk menghasilkan masyarakat Kabupaten Cianjur yang sejahtera. Pembangunan diarahkan pada pemerataan dan berkeadilan. Ketersediaan rumah layak huni yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang semakin meningkat didukung dengan adanya kemudahan pembiayaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar menurunkan luasan permukiman kumuh. Adanya inisiasi pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi baru terbarukan.

Adanya peningkatan akses pelayanan kesehatan yang ditandai dengan tercukupinya sarana kesehatan dan tenaga kesehatan. Akses masyarakat terhadap pendidikan pra sekolah hingga pendidikan tinggi semakin meningkat. Konektivitas dan akses antar wilayah diperbaiki melalui pembangunan jalan baru, pengembangan terminal, serta pengembangan sistem angkutan massal. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara terpadu sudah terpenuhi. Terbangunnya fasilitas pengelolaan limbah domestik dan limbah industri yang terpadu dan ramah lingkungan. Dilakukan juga pengembangan drainase berwawasan lingkungan (*ecodrain*) di kawasan strategis perkotaan serta kawasan perumahan dan permukiman.

Pengelolaan irigasi sudah terpadu dalam rangka meningkatkan cakupan ketersediaan air untuk kawasan pertanian. Sementara itu, pengembangan perdesaan diarahkan pada desa mandiri yang ditandai dengan peningkatan keberdayaan masyarakat desa. Sejalan dengan pemerataan pembangunan, mulai diinisasi juga pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas dan manula.

Pada tahap ini terus dilakukan pemantapan terhadap program wajib belajar 12 tahun seiring dengan semakin meningkatnya taraf pendidikan, keterampilan serta semakin link and match-nya dunia pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja profesional. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pengembangan pendidikan tinggi dan pusat-pusat R&D yang menunjang visi daerah agribisnis yang berdaya saing. Taraf kesehatan semakin baik disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran akan hidup sehat dan bersih serta semakin primanya pelayanan kesehatan sehingga semakin meningkatnya angka harapan hidup, semakin menurunnya angka kematian balita, bayi dan ibu melahirkan, dan semakin rendahnya penyebaran penyakit menular.

Demikian juga penyelenggaraan pelayan umum lainnya semakin baik sehingga semakin tercipta suasana yang memberikan kesempatan bagi ketangan ibadah, meningkatnya kerukunan sosial dan semakin bergairahnya interaksi masyarakat yang penuh kekeluargaan. Seiring dengan kemajuan tersebut kondisi infrastruktur dasar semakin mantap sehingga semakin memberikan kenyamanan, keamanan, efisiensi, ekonomis dan efektivitas dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula kesadaran akan kelestarian lingkungan hidup semakin baik, pencemaran dapat dikurangi secara signifikan serta proses produksi semakin bersahabat dengan lingkungan karena didukung oleh teknologi ramah lingkungan.

5.1.4 Periode IV Tahun 2040-2045

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJPD ke-3, RPJPD ke-4 ditujukkan untuk memastikan telah tercapainya sasaran utama pembangunan daerah agribisnis yang berdaya saing dengan indikator terbangunnya struktur perekonomian daerah yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif produk agribisnis yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta yang ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh di berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum, terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat. Terwujudnya sinergi antara aparat hukum dan masyarakat dalam bidang keamanan, terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral, terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta pelayanan publik yang prima.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Sumber daya manusia Kabupaten Cianjur diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat yang beragama, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagamaan, bergotong royong, dinamis dan berorientasi iptek.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antar sektor. Lembaga perekonomian sudah tersusun, tertata serta berfungsi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan ditunjang dengan berkembangnya industri ramah lingkungan, kapabilitas dan reputasi Kabupaten Cianjur sebagai daerah agrobisnis bertaraf nasional dan Pemantapan destinasi wisata yang menarik dan berkelanjutan berbasis alam dan budaya melalui pemberdayaan masyarakat sekitar dengan promosi dan pengembangan yang terintegrasi dengan perkembangan sektor pertumbuhan ekonomi lainnya. Secara ringkas misi, sasaran pokok dan arah kebijakan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 1. Arah Kebijakan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025 – 2029 (Penguatan Modal Dasar/ Perkuatan Pondasi Transformasi)	**2030 – 2034 (Akselerasi Pembangunan/ Akselerasi Transformasi)**	**2035 – 2039 (Ekspansi dan Transformasi Global/ Ekspansi Global)**	**2040 – 2045 (Pemantapan Capaian Pembangunan/ Perwujudan Indonesia Emas)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Dengan Iman Dan Takwa Mewujudkan Cianjur Mandiri, Maju Dan Berkelanjutan Berbasis Budaya	1. Mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berdaya saing	Peningkatan sarana prasarana penunjang perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Perluasan upaya promotif preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Pengembangan kualitas sumber daya dan layanan kesehatan primer secara merata	Perwujudan perilaku hidup bersih dan sehat yang berkualitas
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan,	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan serta peningkatan ketahanan pangan dan gizi	Pengembangan kualitas pelayanan kesehatan dan akses pelayanan dan ketahanan kesehatan	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Perwujudan pelayanan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas
		Percepatan penuntasan stunting melalui pendampingan calon pengantin serta peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pola asuh dan kesehatan lingkungan	Pengembangan pendampingan calon pengantin serta pelayanan kesehatan ibu dan anak, pola asuh dan kesehatan lingkungan	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.	Perwujudan *zero new* stunting
		Peningkatan pengobatan lengkap bagi penderita tuberkolosis serta penyediaan	Akselerasi pengobatan lengkap bagi penderita tuberkolosis	Pengembangan pengobatan lengkap bagi penderita tuberkolosis serta penyediaan	Pemantapan pengobatan lengkap bagi penderita

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025 – 2029 (Penguatan Modal Dasar/ Perkuatan Pondasi Transformasi)	**2030 – 2034 (Akselerasi Pembangunan/ Akselerasi Transformasi)**	**2035 – 2039 (Ekspansi dan Transformasi Global/ Ekspansi Global)**	**2040 – 2045 (Pemantapan Capaian Pembangunan/ Perwujudan Indonesia Emas)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
		layanan kesehatan khusus tuberkolosis	serta penyediaan layanan kesehatan khusus tuberkolosis	layanan kesehatan khusus tuberkolosis	tuberkolosis serta penyediaan layanan kesehatan khusus tuberkolosis
		Pemenuhan jaminan kesehatan nasional untuk semua kelompok masyarakat	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal rentan miskin	Penguatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan melalui pemerataan dan akses layanan kesehatan	Perwujudan kepesertaan jaminan kesehatan yang merata dan menyeluruh (UHC)
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital iterasi, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Pengembangan mutu dan tata kelola pendidikan serta akses pendidikan diseluruh jenjang pendidikan dari SD sampai SMP	Perwujudan mutu dan tata kelola pendidikan serta akses pendidikan pada jenjang pendidikan dari SD sampai SMP yang berkualitas
		Peningkatan akses, prasarana dan sarana Pusat Kegiatan belajar Mengajar serta Kejar Paket	Akselerasi peningkatan akses, prasarana dan sarana Pusat Kegiatan belajar Mengajar serta Kejar Paket	pengembangan akses, prasarana dan sarana Pusat Kegiatan belajar Mengajar serta Kejar Paket	Pemantapan akses, prasarana dan sarana Pusat Kegiatan belajar Mengajar serta Kejar Paket
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas	Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan serta Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
		Peningkatan dan penguatan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025 – 2029 (Penguatan Modal Dasar/ Perkuatan Pondasi Transformasi)	**2030 – 2034 (Akselerasi Pembangunan/ Akselerasi Transformasi)**	**2035 – 2039 (Ekspansi dan Transformasi Global/ Ekspansi Global)**	**2040 – 2045 (Pemantapan Capaian Pembangunan/ Perwujudan Indonesia Emas)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
		pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan miskin	pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan miskin		bagi kelompok marjinal, rentan miskin dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
		Peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar sektor melalui peningkatan SDM dan optimalisasi sistem pendataan PMKS	Peningkatan kapabilitas dan kapasitas PMKS melalui pemberdayaan berbasis kewirausahaan	Peningkatan kolaborasi pentahelix dalam penanggulangan masalah sosial	Pemerataan dan pemantapan perlindungan sosial adaptif masyarakat
	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan sektor unggulan agrobisnis dan pariwisata berbasis kekayaan alam, kearifan dan budaya lokal	Pengembangan dan penguatan komoditas (jenis usaha pariwisata dan ekonomi kreatif) dengan penyediaan *supply* dan *demand*; optimalisasi kemudahan investasi	Pengembangan kawasan strategis industri ramah lingkungan yang didukung oleh inovasi; peningkatan produktivitas hasil produk industri; peningkatan realisasi investasi	Pengembangan infrastruktur pendukung dalam meningkatkan distribusi dan skala pasar	Pertumbuhan sektor ekonomi yang stabil, produktivitas kuat, berdaya saing, dan nilai tambah tinggi
		Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancilliary service*, aktivitas, *available packages*); optimalisasi kemudahan investasi	Pengembangan pariwisata berbasis inovasi dan realisasi investasi khususnya pada bidang kepariwisataan	Pengembangan dan penguatan infrastruktur pendukung pariwisata dan promosi destinasi secara digital	

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025 – 2029 (Penguatan Modal Dasar/ Perkuatan Pondasi Transformasi)	**2030 – 2034 (Akselerasi Pembangunan/ Akselerasi Transformasi)**	**2035 – 2039 (Ekspansi dan Transformasi Global/ Ekspansi Global)**	**2040 – 2045 (Pemantapan Capaian Pembangunan/ Perwujudan Indonesia Emas)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
		Peningkatan intensitas pelatihan tenaga kerja untuk memiliki kapasitas *enterpreneur;* optimalisasi jaminan kesejahteraan tenaga kerja	Peningkatan up-skil dan re-skil tenaga kerja melalui pengembangan Balai latihan kerja dan kerja sama sekolah vokasi/kejuruan	Peningkatan kapasitas tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan peluang lapangan kerja digital	Pemantapan kapasitas tenaga kerja terhadap transformasi digital dan SDM digital
		Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok	Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill.	Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK melalui upaya digitalisasi di sektor agribisnis dan pariwisata dengan teknologi terkini.	Peningkatan standar kualitas dan kinerja Pemanfaatan TIK diberbagai sektor secara menyeluruh, mudah dan murah dengan teknologi termutakhir.
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Pemantapan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025 – 2029 (Penguatan Modal Dasar/ Perkuatan Pondasi Transformasi)	**2030 – 2034 (Akselerasi Pembangunan/ Akselerasi Transformasi)**	**2035 – 2039 (Ekspansi dan Transformasi Global/ Ekspansi Global)**	**2040 – 2045 (Pemantapan Capaian Pembangunan/ Perwujudan Indonesia Emas)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
			pemerintah, dunia akademik, DUDI, dan kelompok masyarakat baik yang ada di dalam maupun luar negeri		
		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green and grey infrastukture*) pada kawasan perkotaan	Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan	Penguatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan	Pengendalian dan pengawasan pertumbuhan kawasan
		Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi rumah	Peningkatan efisiensi penyediaan lahan perumahan yang selaras dengan perencanaan tata ruang	Pengoptimalan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara menyeluruh sebagai upaya peningkatan kesejahteraan tempat tinggal	Pengendalian dan pengawasan pertumbuhan kawasan permukiman
		Penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)	Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025 – 2029 (Penguatan Modal Dasar/ Perkuatan Pondasi Transformasi)	**2030 – 2034 (Akselerasi Pembangunan/ Akselerasi Transformasi)**	**2035 – 2039 (Ekspansi dan Transformasi Global/ Ekspansi Global)**	**2040 – 2045 (Pemantapan Capaian Pembangunan/ Perwujudan Indonesia Emas)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
	3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan adaptif (*dynamic governance*)	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi	Pemantapan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi	Perwujudan tata kelola pemerintah daerah yang berkualitas
	4. Terciptanya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung peningkatan perekonomian daerah	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas; Penguatan integritas partai politik	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat	Pengembangan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah	Memaksimalkan keamanan dan pelayanan publik yang prima
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)	Pemantapan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)	Penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.); penguatan pengendalian inflasi daerah	Sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya	Percepatan implementasi kerjasama regional maupun kerjasama internasional	Penciptaan inovasi dalam mendorong bentuk kerjasama regional maupun internasional	Peningkatan standar kualitas terhadap bentuk kerjasama daerah
	5. Terciptanya masyarakat yang berbudaya luhur, berakhlak mulia dan	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila	Pemantapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat	Pengoptimal upaya pembangunan manusia melalui penguatan nilai luhur	Pemerataan dan pemantapan perlindungan sosial adaptif masyarakat

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025 – 2029 (Penguatan Modal Dasar/ Perkuatan Pondasi Transformasi)	**2030 – 2034 (Akselerasi Pembangunan/ Akselerasi Transformasi)**	**2035 – 2039 (Ekspansi dan Transformasi Global/ Ekspansi Global)**	**2040 – 2045 (Pemantapan Capaian Pembangunan/ Perwujudan Indonesia Emas)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
	menjaga kelestarian lingkungan			kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat	
		Peningkatan pemahaman nilai-nilai kehidupan antar umat beragama serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama	Penguatan interaksi antar umat beragama dalam bermasyarakat	Pengembangan nilai-nilai akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama	Perwujudan kerukunan umat beragama melalui kolaborasi, toleransi, kesetaraan, kondusifitas dan kebijakan
		Peningkatan kualitas keluarga agar timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin	akselerasi Penguatan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera	Pengembangan kualitas keluarga untuk menciptakan ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan	Pemantapan pembangunan kualitas keluarga dalam mewujudkan keluarga berkualitas, mandiri, tentram, bahagia dan sejahtera
		Peningkatan akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan yang cukup kepada perempuan serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi perempuan Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	Perwujudan hak-hak perempuan dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan
		Penguatan kelembagaan kesetaraan gender	Peningkatan kapasitas perempuan dalam pekerjaan dan keterwakilan dalam pemerintahan	Peningkatan kerjasama mitra nasional dan internasional	Pemantapan perlindungan dan pemenuhan hak anak
		Peningkatan upaya pelestarian kawasan konservasi	Peningkatan efisiensi dalam upaya pelestarian kawasan konservasi	Pengoptimalan dan penerapan teknologi sebagai upaya pelestarian kawasan konservasi	Pengendalian kawasan konservasi

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025 – 2029 (Penguatan Modal Dasar/ Perkuatan Pondasi Transformasi)	**2030 – 2034 (Akselerasi Pembangunan/ Akselerasi Transformasi)**	**2035 – 2039 (Ekspansi dan Transformasi Global/ Ekspansi Global)**	**2040 – 2045 (Pemantapan Capaian Pembangunan/ Perwujudan Indonesia Emas)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
		Perbaikan dan peningkatan kondisi infrastruktur perumahan dan permukiman	Perluasan jangkauan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman ke area yang sulit mendapatkan sumber air	Penerapan teknologi sebagai upaya pengoptimalan pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman	Pengawasan dan pemantapan kinerja infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman
		Pemenuhan layanan pengelolaan limbah dan persampahan serta pemberdayaan tingkat domestik	Pengembangan infrastruktur pengelolaan limbah dan persampahan melalui kerja sama layanan pengelolaan antar daerah atau *offtaker*	Pengembangan dan penerapan teknologi dalam pengelolaan limbah dan persampahan	Pemantapan manajemen pengelolaan limbah dan persampahan yang sirkuler
		Peningkatan kapasitas pembangkit listrik dan keandalan sistem kelistrikan	Peningkatan suplai listrik untuk kawasan permukiman dan kawasan kegiatan lainnya	Pengembangan dan penerapan teknologi hijau sebagai sumber listrik alternatif	Pengendalian kapasitas listrik yang merata dan menyeluruh
		Perlindungan, pengembangan, dan pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; peningkatan diversifikasi tanam; serta peningkatan layanan irigasi masyarakat	Pengembangan diversifikasi dan konservasi energi, pengembangan corporate farming, optimalisasi layanan infrastruktur pertanian, pengembangan diversifikasi pangan dan keterjangkauan pangan	Penerapan teknologi tepat guna dalam mendorong produktivitas sektor pertanian, penerapan efisiensi energi dan pengoptimalan EBT; penerapan manajemen air sirkular dan efisiensi penggunaan air	Pemantapan ketahanan energi, air, dan pangan dengan mendorong konservasi dan efisiensi penggunaan sumber daya alam
		Pengembangan dan pemanfaatan sumber air dalam meningkatkan pasokan air baku dan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air	Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan air dalam menjaga supply dan demand yang sesuai	Penerapan teknologi dalam peningkatan kinerja layanan infrastruktur sumber air	Pengendalian pemanfaatan sumber daya air dengan menjaga dan mengawasi kuantitas serta kualitas air baku
		Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana serta pembangunan rendah karbon	Penerapan upaya dekarbonisasi sumber energi, pengembangan sistem peringatan dini kebencanaan; serta memperkuat fungsi konservasi hutan mangrove yang berada di pesisir selatan	Penerapan teknologi sistem peringatan dini yang andal dan terintegrasi serta pengoptimalan kapasitas masyarakat dan daerah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya mitigasi bencana dan pengendalian dampak perubahan iklim

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025 – 2029 (Penguatan Modal Dasar/ Perkuatan Pondasi Transformasi)	**2030 – 2034 (Akselerasi Pembangunan/ Akselerasi Transformasi)**	**2035 – 2039 (Ekspansi dan Transformasi Global/ Ekspansi Global)**	**2040 – 2045 (Pemantapan Capaian Pembangunan/ Perwujudan Indonesia Emas)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
			sekaligus sebagai daya tarik wisata *eco-tourism*		
	6. Mewujudkan pemerataan infrastruktur andal dan berkualitas	Rehabilitasi lahan hijau perkotaan dan pengadaan resapan/tampungan air larian/*runoff* serta perbaikan jalur-jalur drainase perkotaan (sekunder)	Pengoptimalan fungsi drainase perkotaan dan RTH sebagai pengendali banjir	Pengembangan ruang terbuka hijau yang sekaligus berperan sebagai ruang kegiatan publik	Perawatan vegetasi dan kualitas ruang terbuka hijau yang berkelanjutan
		Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi	Percepatan penyediaan infrastruktur	Pemantapan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa	Perwujudan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik di kawasan perkotaan
		Pengembangan Jaringan jalur kereta api, revitalisasi dan reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Pengembangan Jaringan jalur kereta api, revitalisasi dan reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Pengembangan Jaringan jalur kereta api, revitalisasi dan reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Pengembangan Jaringan jalur kereta api, revitalisasi dan reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
		Pembangunan jalan tol	Pembangunan jalan tol	Pembangunan jalan tol	Pembangunan jalan tol
	7. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya	Percepatan pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan	Pemantapan fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak; dan Pusat layanan jasa	Pengawasan dan pemantapan kinerja infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman
		Perlindungan, pengembangan, dan pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Pengembangan optimalisasi layanan infrastruktur pertanian dan pengembangan diversifikasi pangan dan keterjangkauan pangan	Penerapan teknologi tepat guna dalam mendorong produktivitas komoditas sektor ekonomi	Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan komoditas dengan mendorong konservasi

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025 – 2029 (Penguatan Modal Dasar/ Perkuatan Pondasi Transformasi)	**2030 – 2034 (Akselerasi Pembangunan/ Akselerasi Transformasi)**	**2035 – 2039 (Ekspansi dan Transformasi Global/ Ekspansi Global)**	**2040 – 2045 (Pemantapan Capaian Pembangunan/ Perwujudan Indonesia Emas)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
					dan efisiensi penggunaan sumber daya alam
		Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan/atau kawasan strategis komoditas pertanian, perikanan, dan perkebunan	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah serta efisiensi rantai distribusi komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan	pengarusutamaan digitalisasi dan inovasi teknologi dalam mendorong produktivitas, efisiensi, dan diversifikasi produk	Pemantapan inovasi berteknologi tinggi yang mendorong efisiensi untuk menghasilkan produk komoditas yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi
	8. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).	Pemantapan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.	Perwujudan penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.

Sumber: Tim Penyusun dan Tim Teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi Kabupaten Cianjur. Sasaran Pokok Kabupaten Cianjur dirumuskan dari arah pembangunan hasil penyelarasan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045. Penyelarasan Arah Pembangunan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jwa Barat Tahun 2025-2045, serta perumusan Sasaran Pokok Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 2. Penyelarasan Arah Pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD PROVINSI 2025-2045		RPJPD KAB/KOTA 2025-2045	
	Transformasi	**Arah Pembangunan**	**Transformasi**	**Arah Pembangunan**	**Transformasi**	**Arah Pembangunan**
1	Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Transformasi Sosial	Pelayanan Kesehatan prima untuk semua	Transformasi Sosial	Pelayanan Kesehatan prima untuk semua
		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		Pendidikan berkualitas yang merata		Pendidikan berkualitas, bermutu, dan merata
		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju		Perlindungan sosial dengan standar hidup layak
2	Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas ekonomi daerah.	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas perekonomian daerah melalui ekonomi kreatif
		IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau		Penerapan ekonomi hijau, biru dan digital.		Penerapan Ekonomi Hijau
		IE 6. Transformasi Digital		Pembangunan SDM berdaya saing		Transformasi Digital
		IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global		Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global
		IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan		Pembentukan pusat kegiatan wilayah sebagai penunjang perekonomian di wilayah pengembangan
3	Transformasi Tata Kelola	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Transformasi Tata Kelola	Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Transformasi Tata Kelola	Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, adaptif, dan inovatif
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas
		IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro		Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah		Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah
		IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		Peningkatan kerjasama regional maupun internasional		Peningkatan kerjasama regional maupun internasional
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan kerukunan umat beragama	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan kerukunan umat beragama dan berkebudayaan maju
		IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender		Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender
		IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas		Peningkatan kualitas lingkungan hidup		Peningkatan kualitas lingkungan hidup
		IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi		Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi
		IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim		Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim

Sumber: Tim Penyusun dan Tim Teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten CianjurTahun 2025-2045

Tabel 5. 3. Perumusan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	SASARAN 2045	SASARAN POKOK	KETERANGAN
1	Mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berdaya saing	IE.1 Pelayanan Kesehatan prima untuk semua	- Peningkatan sarana prasarana penunjang perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan - Perluasan upaya promotif preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan - Pengembangan kualitas sumber daya dan layanan kesehatan primer secara merata - Perwujudan perilaku hidup bersih dan sehat yang berkualitas - Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan - Pengembangan kualitas pelayanan kesehatan dan akses pelayanan dan ketahanan kesehatan - Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal - Perwujudan pelayanan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan yang berkualias - Percepatan penuntasan stunting melalui pendampingan calon pengantin serta peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pola asuh dan kesehatan lingkungan	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	74,85	77,26	Terwujudnya masyarakat yang sehat melalui integrasi layanan kesehatan secara merata	
				Jumlah kasus kematian ibu per tahun (jumlah)	61	8		
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	10,01	2,63		
				Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) (%)	91	98		
				Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) (%)	91	98		
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	89,86	99		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	SASARAN 2045	SASARAN POKOK	KETERANGAN
			- Pengembangan pendampingan calon pengantin serta pelayanan kesehatan ibu dan anak, pola asuh dan kesehatan lingkungan - Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting - Perwujudan zero new stunting - Peningkatan pengobatan lengkap bagi penderita tuberkolosis serta penyediaan layanan kesehatan khusus tuberkolosis - Akselerasi pengobatan lengkap bagi penderita tuberkolosis serta penyediaan layanan kesehatan khusus tuberkolosi - Pengembangan pengobatan lengkap bagi penderita tuberkolosis serta penyediaan layanan kesehatan khusus tuberkolosis - Pemantapan pengobatan lengkap bagi penderita tuberkolosis serta penyediaan layanan kesehatan khusus tuberkolosis - Pemenuhan jaminan kesehatan nasional untuk semua kelompok masyarakat - Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat - Penguatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan melalui pemerataan dan akses layanan kesehatan - Perwujudan kepesertaan jaminan kesehatan yang merata dan menyeluruh (UHC)					

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	SASARAN 2045	SASARAN POKOK	KETERANGAN
		IE.2 Pendidikan berkualitas, bermutu, dan merata	- Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah - Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital iterasi, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah) - Pengembangan mutu dan tata kelola pendidikan serta akses pendidikan diseluruh jenjang pendidikan dari SD sampai SMP - Perwujudan mutu dan tata kelola pendidikan serta akses pendidikan pada jenjang pendidikan dari SD sampai SMP yang berkualitas - Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan - Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas - Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas - Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan serta Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	Persentase Literasi Membaca SD	63,71	100	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, bermutu dan merata disetiap jenjang pendidikan	
				Persentase Literasi Membaca SMP	51,76	100		
				Persentase Numerasi SD	53,38	100		
				Persentase Numerasi SMP	38,71	100		
				Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,37	8,87		
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,05	12,25		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	SASARAN 2045	SASARAN POKOK	KETERANGAN
		IE.3 Perlindungan sosial dengan standar hidup layak	- Peningkatan dan penguatan bantuan sosial - Perluasan penyediaan bantuan sosial - Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan - Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat - Peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar sektor melalui peningkatan SDM dan optimalisasi sistem pendataan PMKS - Peningkatan kapabilitas dan kapasitas PMKS melalui pemberdayaan berbasis kewirausahaan - Peningkatan kolaborasi pentahelix dalam penanggulangan masalah sosial - Pemerataan dan pemantapan perlindungan sosial adaptif masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	10,07 - 9,12	0,92 - 0,14	Terwujudnya masyarakat mandiri, sejahtera, mampu dan sesuai standar hidup yang layak	
				Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	8,64	11,71		
2	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan sektor unggulan agrobisnis dan pariwisata berbasis kekayaan alam, kearifan dan budaya lokal	IE.4 Peningkatan produktivitas perekonomian daerah melalui ekonomi kreatif	- Pengembangan dan penguatan komoditas (jenis usaha pariwisata dan ekonomi kreatif) dengan penyediaan supply dan demand; optimalisasi kemudahan investasi - Pengembangan infrastuktur pendukung dalam meningkatkan distribusi dan skala pasar - Pertumbuhan sektor ekonomi yang stabil, produktivitas kuat, berdaya saing, dan nilai tambah tinggi - Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas,	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	7,31	7,62	Meningkatnya produktivitas perekonomian melalui agroindustry dan pariwisata yang berkelanjutan berbasis kekayaan alam dan budaya local dengan ditunjang oleh	
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	6,48	7,8		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	SASARAN 2045	SASARAN POKOK	KETERANGAN
			ancilliary service, aktivitas, available packages); optimalisasi kemudahan investasi - Pengembangan pariwisata berbasis inovasi dan realisasi investasi khususnya pada bidang kepariwisataan - Pengembangan dan penguatan infrastktur pendukung pariwisata dan promosi destinasi secara digital - Peningkatan intensitas pelatihan tenaga kerja untuk memiliki kapasitas enterpreneur; optimalisasi jaminan kesejahteraan tenaga kerja - Peningkatan up-skil dan re-skil tenaga kerja melalui pengembangan Balai latihan kerja dan kerja sama sekolah vokasi/kejuruan - Peningkatan kapasitas tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan peluang lapangan kerja digital - Pemantapan kapasitas tenaga kerja terhadap transformasi digital dan SDM digital	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (ke akomodasi) (Orang)	45.000	400.000	teknologi informasi	
				Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4,40	12,00		
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,45 - 6,79	5,53 - 4,45		
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,2	62,44		
				Indeks Inovasi Daerah	44,35	60		
		IE.5 Penerapan Ekonomi Hijau	- Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity - Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,42	70,80	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	SASARAN 2045	SASARAN POKOK	KETERANGAN
			- Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global - Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis - Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform - Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian - Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian - Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian					

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	SASARAN 2045	SASARAN POKOK	KETERANGAN
		IE.6 Transformasi Digital	- Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok - Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran) - Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar - Peningkatan standar kualitas dan kinerja	Indeks Masyarakat digital	50,06	98,66	Terwujudnya transformasi digital melalui inklusivitas dalam ekonomi digital	
		IE.7 Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global	- Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha - Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	25,58	25,95	Meningkatnya investasi untuk menciptakan rantai pasok produksi yang efektif efisien dan berdaya saing	

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	SASARAN 2045	SASARAN POKOK	KETERANGAN
			kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif - Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. - Pemantapan industrialiasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.					
		IE.8 Pembentukan pusat kegiatan wilayah sebagai penunjang perekonomian di wilayah pengembangan	- Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green and grey infrastucture) pada kawasan perkotaan - Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan - Penguatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan - Pengendalian dan pengawasan pertumbuhan kawasan - Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi rumah dan reformasi subsidi perumahan dari pemerintah daerah - Peningkatan efisiensi penyediaan lahan perumahan yang selaras dengan perencanaan tata ruang - Pengoptimalan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara	Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	33,61	100	Terwujudnya pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dalam menunjang perekonomian	
				Persentase Desa Mandiri (%)	9,89	35,59		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	SASARAN 2045	SASARAN POKOK	KETERANGAN
			menyeluruh sebagai upaya peningkatan kesejahteraan tempat tinggal - Pengendalian dan pengawasan pertumbuhan kawasan permukiman - Penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan - Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya - Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.) - Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah					
		IE.9 Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, adaptif, dan inovatif	- Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja - Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas	Indeks Reformasi Hukum	64,86	71,5	Terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif	
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,25	5		
				Indeks pelayanan publik	4,06	4,26		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	SASARAN 2045	SASARAN POKOK	KETERANGAN
			ASN pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi - Pemantapan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi - Perwujudan tata kelola pemerintah daerah yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	66,21	81,47		
3	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, Akuntabel dan adaptif (dynamic governance);	IE.10 Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	- Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas - Penguatan integritas partai politik - Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat - Pengembangan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayaan publik oleh pemerintah daerah - Memaksimalkan keamanan dan pelayanan publik yang prima	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	62	100	Terwujudnya stabilitas politik dan keamanan yang berkualitas	
4	Terciptanya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung peningkatan perekonomian daerah	IE.11 Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah	- Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) - Pemantapan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) - Penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.); penguatan pengendalian inflasi daerah - Sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	0,62	4,59	Terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah	
				Tingkat Inflasi	3	3		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	SASARAN 2045	SASARAN POKOK	KETERANGAN
		IE.12 Peningkatan kerjasama regional maupun internasional	- Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya - Percepatan implementasi kerjasama regional maupun kerjasama internasional - Penciptaan inovasi dalam mendorong bentuk kerjasama regional maupun internasional - Peningkatan standar kulitas terhadap bentuk kerjasama daerah	Persentasi Efektivitas Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	Terwujudnya kerjasama baik nasional maupun dunia internasional	
5	Terciptanya masyarakat yang berbudaya luhur, berakhlak mulia dan menjaga kelestarian lingkungan;	IE.13 Peningkatan kerukunan umat beragama dan berkebudayaan maju	- Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila - Pemantapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan mayarakat - Pengoptimal upaya pembangunan manusia melalui penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyaraka - Pemerataan dan pemantapan perlindungan sosial adaptif masyarakat - Peningkatan pemahaman nilai-nilai kehidupan antar umat beragama serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama - Penguatan interaksi antar umat beragama dalam bermasyarakat - Pengembangan nilai-nilai akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama - Perwujudan kerukunan umat beragama melalui kolaborasi,	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan (%)	24,67	78	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai dan sejahtera	
				Indeks Kesalehan Sosial	79,45	81,34		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	SASARAN 2045	SASARAN POKOK	KETERANGAN
			toleransi, kesetaraan, kondusifitas dan kebijakan					
		IE.14 Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender	- Peningkatan kualitas keluarga agar timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin - Akselerasi penguatan keluarga berkulitas, berketahanan dan sejahtera - Pengembangan kualitas keluarga untuk menciptakan ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan pendidikan talenta digital perempuan - Pemantapan pembangunan kualitas keluarga dalam mewujudkan keluarga berkualitas, mandiri, tentram, bahagia dan sejahtera - Peningkatan akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan yang cukup kepada perempuan serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi perempuan - Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia - Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia - Perwujudan hak-hak perempuan dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan - Penguatan kelembagaan kesetaraan gender - Peningkatan kapasitas perempuan dalam pekerjaan dan keterwakilan dalam pemerintahan	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	56,61	72,61	Tewujudnya Kesetaraan Antara Laki-laki dan Perempuan dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban	
				Indeks Pemberdayaan Gender	62,62	72,28		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	SASARAN 2045	SASARAN POKOK	KETERANGAN
			- Peningkatan kerjasama mitra nasional dan internasional - Pemantapan perlindungan dan pemenuhan hak anak					
		IE.15 Peningkatan kualitas lingkungan hidup	- Peningkatan upaya pelestarian kawasan konservasi - Peningkatan efisiensi dalam upaya pelestarian kawasan konservas - Pengoptimalan dan penerapan teknologi sebagai upaya pelestarian kawasan konservasi - Pengendalian kawasan konservasi - Perbaikan dan peningkatan kondisi infrastuktur perumahan dan permukiman - Perluasan jangakauan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman ke area yang sulit mendapatkan sumber air - Penerapan teknologi sebagai upaya pengoptimalan pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman - Pengawasan dan pemantapan kinerja infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman - Pemenuhan layanan pengelolaan limbah dan persampahan serta pemberdayaan tingkat domestik - Pengembangan infrastuktur pengelolaan limbah dan persampahan melalui kerja sama layanan pengelolaan antar daerah (kerjasama antar regional) atau offtaker - Pengembangan dan penerapan teknologi dalam pengelolaan limbah dan persampahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	67,54	69,02	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	
				Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	13,65	85,15		
				Timbulan Sampah Terolah Difasilitasi Pengolahan Sampah (%)	56,35	100		
				Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	93,28	100		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	SASARAN 2045	SASARAN POKOK	KETERANGAN
			- Pemantapan manajemen pengelolaan limbah dan persampahan yang sirkuler					
		IE.16 Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi	- Peningkatan kapasitas pembangkit listrik dan keandalan sistem kelistrikan - Peningkatan suplai listrik untuk kawasan permukiman dan kawasan kegiatan lainnya - Pengembangan dan penerapan teknologi hijau sebagai sumber listrik alternatif - Pengendalian kapasitas listrik yang merata dan menyeluruh - Perlindungan, pengembangan, dan pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; peningkatan diversifikasi tanam; serta peningkatan layanan irigasi masyarakat - Pengembangan diversifikasi dan konservasi energi, pengembangan corporate farming, optimalisasi layanan infrastruktur pertanian, pengembangan diversifikasi pangan dan keterjangkauan pangan - Penerapan teknologi tepat guna dalam mendorong produktivitas sektor pertanian, penerapan efisiensi energi dan pengoptimalan EBT; penerapan manajemen air sirkular dan efisiensi penggunaan air - Pemantapan ketahanan energi, air, dan pangan dengan mendorong konservasi dan efisiensi penggunaan sumber daya alam - Pengembangan dan pemanfaatan sumber air dalam meningkatkan	Rasio Elektrifikasi	99	100	Terwujudnya ketahanan pangan, energi dan air daerah yang kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	
				Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	6,09	0,42		
				Kapasitas air baku (meter^3/detik	3,95 m^3/dt	13,41 m^3/dt		
				Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	30,98	100		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	SASARAN 2045	SASARAN POKOK	KETERANGAN
			pasokan air baku dan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air - Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan air dalam menjaga supply dan demand yang sesuai - Penerapan teknologi dalam peningkatan kinerja layanan infrastruktur sumber air - Pengendalian pemanfaatan sumber daya air dengan menjaga dan mengawasi kuantitas serta kualitas air baku					
		IE.17 Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	- Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana serta pembangunan rendah karbo - Penerapan upaya dekarbonisasi sumber energi, pengembangan sistem peringatan dini kebencanaan; serta memperkuat fungsi konservasi hutan mangrove yang berada di pesisir selatan sekaligus sebagai daya tarik wisata eco-tourism - Penerapan teknologi sistem peringatan dini yang andal dan terintegrasi serta pengoptimalan kapasitas masyarakat dan daerah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim - Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya mitigasi bencana dan pengendalian dampak perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	0,102	0,082	Terwujudnya ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	
				Penurunan Jumlah Emisi GRK (Kumulatif) (Ton Co2eq)	966.896,37	5.624.341,38		

Sumber: Tim Penyusun dan Tim Teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

Tabel 5. 4. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target		Ket.
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya masyarakat yang sehat melalui integrasi layanan kesehatan secara merata	Pelayanan Kesehatan prima untuk semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	74,85	77,26	
			2	Kesehatan Ibu dan Anak:			
				• Jumlah Kematian Ibu Per Tahun (Jumlah)	61	8	
				• Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (%)	10,01	2,63	
			3	Penanganan Tuberkolosis:			
				• Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkuosis (*Treatment Coverage*) (%)	91	98	
				• Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) (%)	91	98	
			4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	89,86	99	
2	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, bermutu dan merata disetiap jenjang pendidikan	Pendidikan berkualitas, bermutu, dan merata	5	Hasil pembelajaran:			
				• Persentase satuan Pendidikan mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca:			
				1. Literasi Membaca SD	63,71	100	
				2. Literasi Membaca SMP	51,76	100	
				3. Numerasi SD	53,38	100	
				4. Numerasi SMP	38,71	100	
				• Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) (RLS)	7,37	8,87	
				• Harapan Lama Sekolah (Tahun) (HLS)	12,05	12,25	
3	Terwujudnya masyarakat mandiri, sejahtera, mampu dan sesuai standar hidup yang layak	Ketahanan Sosial Masyarakat yang Berbudaya Maju	6	Tingkat Kemiskinan (%)	10,07 - 9,12	0,92 - 0,14	
			7	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	8,64	11,71	
4	Meningkatnya produktivitas perekonomian melalui agroindustry dan pariwisata yang berkelanjutan berbasis kekayaan alam dan budaya local dengan ditunjang oleh teknologi informasi	Peningkatan produktivitas perekonomian daerah melalui ekonomi kreatif	8	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	7,31	7,62	
			9	Pengembangan Pariwisata:			
				• Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan dan Minum	6,48	7,8	
				• Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (ke akomodasi) (Orang)	45.000	400.000	
			10	Produktivitas UMKM			
				• Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4,40	12,00	

			11	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,45 - 6,79	5,53 - 4,45	
			12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,2	62,44	
			13	Indeks Inovasi Daerah	44,35	60	
5	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Penerapan Ekonomi Hijau	14	Indeks Ekonomi Hijau daerah	51,42	70,80	
6	Terwujudnya transformasi digital melalui inklusivitas dalam ekonomi digital	Transformasi Digital	15	Indeks Masyarakat Digital	50,06	98,66	
7	Meningkatnya investasi untuk menciptakan rantai pasok produksi yang efektif efisien dan berdaya saing	Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global	16	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) (PDRB)	25,58	25,95	
8	Terwujudnya pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dalam menunjang perekonomian	Pembentukan pusat kegiatan wilayah sebagai penunjang perekonomian di wilayah pengembangan	17	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan:			
				• Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	33,61	100	
				• Persentase Desa Mandiri (%)	9,89	35,59	
9	Terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, adaptif dan inovatif	Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, adaptif, dan inovatif	18	Indeks Reformasi Hukum	64,86	71,5	
			19	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,25	5	
			20	Indeks Pelayanan Publik	4,06	4,26	
			21	Indeks Reformasi Birokrasi	66,21	81,47	
10	Terwujudnya stabilitas politik dan keamanan yang berkualitas	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	22	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	62	100	
11	Terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah	23	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,62	4,59	
			24	Tingkat Inflasi	3	3	
12	Terwujudnya kerjasama baik nasional maupun dunia internasional	Peningkatan kerjasama regional maupun internasional	25	Persentasi Efektivitas Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	
13	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai dan sejahtera	Peningkatan kerukunan umat beragama dan berkebudayaan maju	26	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan (%)	24,67	78	
			27	Indeks Kesalehan Sosial	79,45	81,34	
14	Terwujudnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban	Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender	28	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	56,61	72,61	
			29	Indeks Pemberdayaan Gender	62,62	72,28	
15	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	30	Kualitas lingkungan hidup			
				• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	67,54	69,02	

				• Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	13,65	85,15	
				• Pengelolaan Sampah			
				1. Timbulan Sampah Terolah Difasilitasi Pengolahan Sampah (%)	56,35	100	
				2. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	93,28	100	
16	Terwujudnya ketahanan pangan, energi dan air daerah yang kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi	31	Ketahanan energi, air dan pangan			
				• Ketahanan energi			
				1. Rasio Elektrifikasi (%)	99	100	
				• Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	6,09	0,42	
				• Ketahanan air:			
				1. Kapasitas air baku (m^3/dt)	3,95 m^3/dt	13,41 m^3/dt	
				2. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	30,98	100	
17	Terwujudnya ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	32	Indeks Risiko Bencana (IRB)	0,102	0,082	
			33	Penurunan Jumlah Emisi GRK (Kumulatif)Ton Co2eq)	966.896,37	5.624.341,38	

Sumber: Tim Penyusun dan Tim Teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045

BAB VI
PENUTUP

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN CIANJUR 2025-2045

6.1. Pedoman Transisi

Penyusunan penyeragaman periodesasi RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan upaya untuk menyelaraskan pembangunan antara pusat dan daerah, serta sebagai pedoman penyusunan visi dan misi bakal calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah (pilkada). RPJPD ini diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan dengan 17 (tujuh belas) arah pembangunan yaitu: (1) Pelayanan kesehatan prima untuk semua; (2) Pendidikan berkualitas, bermutu dan merata; (3) Perlindungan sosial dengan standar hidup layak; (4) Peningkatan produktivitas perekonomian daerah melalui ekonomi kreatif; (5) Penerapan ekonomi hijau dan biru; (6) Transformasi digital; (7) Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestic dan global; (8) Pembentukan pusat kegiatan wilayah sebagai penunjang perekonomian di wilayah pengembangan; (9) Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif; (10) Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas; (11) Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah; (12) Peningkatan kerjasama regional maupun internasional; (13) Peningkatan kerukunan umat beragama dan berkebudayaan maju; (14) Peningkatan kualitas keluarga, pemuda dan kesetaraan gender; (15) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (16)

Peningkatan ketahanan pangan, air, dan energi; (17) Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim.

6.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman pembangunan di wilayah administrasi Kabupaten Cianjur selama 20 (dua puluh) tahun dan menjadi perdoman dalam:

1. Penyusunan visi, misi dan program calon bupati;
2. Penyusunan RTRW, RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan lainnya dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kabupaten Cianjur;
3. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah pusat, provinsi maupun Kabupaten Cianjur;
4. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi nasional, provinsi maupun Kabupaten Cianjur; dan
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 adalah:

"DENGAN IMAN DAN TAKWA MEWUJUDKAN CIANJUR MANDIRI, MAJU DAN BERKELANJUTAN BERBASIS BUDAYA"

Adapun Misi RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 adalah: (1) Mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berdaya saing; (2) Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan sektor unggulan agrobisnis dan pariwisata berbasis kekayaan alam, kearifan dan budaya lokal; (3) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan adaptif (*dynamic governance)*; (4) Terciptanya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung peningkatan perekonomian daerah; (5) Terciptanya masyarakat yang berbudaya luhur, berakhlak mulia dan menjaga kelestarian; (6) Mewujudkan pemerataan infrastruktur andal dan berkualitas; (7) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan; (8) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

6.3. Pembiayaan

Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Cianjur diharapkan mendapatkan dukungan sumber pembiayaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber pembiayaan yang dapat digunakan antara lain Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur. Selain ketiga sumber pembiayaan tersebut, dimungkinkan untuk pembiayaan pembangunan dilakukan dengan menggunakan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 tentunya akan sangat tergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur. Sinergitas, solidaritas dan kerjasama tentunya perlu terus ditingkatkan guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Cianjur Tahun 2045.

6.4. Proses Pelaksanaan Manajemen Risiko

Pengimplementasian setiap visi, misi dan sasaran pokok pada RPJPD Kabupaten Cianjur tentunya mendapatkan beberapa hambatan dalam mencegah ketercapaian setiap keberhasilan. Keberlangsungan dan keberhasilan rencana pembangunan dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu dengan membangun kerangka manajemen risiko sehingga dapat mengidentifikasi, mengantisipasi dan mengelola setiap ketidakpastian yang akan terjadi dimasa mendatang.

Manajemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung oleh budaya sadar risiko dalam mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah dan mengidentifikasi, menganalisa dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Manajemen risiko dilaksanakan dengan cara memonitor sumber risiko, melacak dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi. Selanjutnya untuk meminimalisir risiko atas pencapaian visi dan misi RPJPD Tahun 2025-2045 perlu disusun dokumen manajemen risiko secara tersendiri.

6.5. Ketentuan Insentif

Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa meteri, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja. Pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi daerah. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari pemerintah

daerah kepada masyarakat untuj meningkatkan investasi di daerah terutama usaha mikro, kecil dan menengah.

Kriteria pemberian insentif dan kemudahan investasi diantaranya:

a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
b. menyerap tenaga kerja lokal;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan infrastruktur;
h. melakukan alih teknologi;
i. melakukan industri pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
l. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;
m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
n. berada di daerah terpencil, atau daerah tertinggal.

Jenis Usaha atau Kegiatan Tertentu yang dapat Diberikan Insentif dan Kemudahan Investasi, diantaranya:

a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
e. usaha yang dipersyaratkan dengan peitzinan khusus;
f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

LAMPIRAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN CIANJUR 2025-2045

MATRIKS PENELAAHAN INTEGRASI KLHS RPJPD KE RPJPD

KABUPATEN CIANJUR

INTEGRASI KEBIJAKAN UMUM

	Laporan KLHS RPJPD	-			
	Dokumen RPJPD	Latar Belakang (Muatan tentang komitmen pembangunan berkelanjutan)	Hal	Dasar Hukum (Permendagri 7 Tahun 2018)	Hal
		Pembangunan dilaksanakan untuk memanfaatkan potensi, memecahkan permasalahan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat menuju kesejahteraan yang lebih baik. Guna mencapai tujuan pembangunan yang baik dan berkesinambungan, perencanaan jangka panjang yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan adalah suatu keniscayaan.	Bab 1 (hal 1)	Untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Bab 1 (hal 1)

INTEGRASI GAMBARAN UMUM

	Laporan KLHS RPJPD	Daya Dukung Air	Hal	Daya Dukung Pangan	Hal	Data terkait LH	Hal
		Dengan didasarkan pada rumus perhitungan, terindentifikasi umumnya status daya dukung air di Kabupaten Cianjur Belum Terlampaui, dimana luas wilayah yang Belum Terlampaui sebesar 332.320,77 Ha atau 91,45% dari total luas wilayah sedangkan luas wilayah yang sudah Terlampaui sebesar 31.088,29 Ha atau 8,55% dari total luas wilayah	Bab 3 (Hal 3-57)	Secara Akumulatif sebesar 314.271,74 Ha (86,53%) wilayah di Kabupaten Cianjur Belum Terlampaui ambang batas lingkungan dan sebesar 48.914,58 Ha (13,47%) wilayah Kabupaten Cianjur Sudah Terlampaui ambang batas lingkungan dalam hal penyediaan pangan (DD Pangan)	Bab 3 (Hal 3-50)	Meliputi : (1) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (2) Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup (3) Kinerja dan/atau Layanan Ekosistem (4) Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam (5) Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Iklim (6) Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati	Bab 3 (Hal 3-48 s/d 3-125)
	Dokumen RPJPD	Gambaran Umum	Hal	Gambaran Umum	Hal	Gambaran Umum	Hal
		Kebutuhan air bersih sesuai standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah 60 liter/orang/hari atau 0,06 m3/orang/hari dan dalam setahun dibutuhkan sebanyak 21,9 m3/orang/tahun. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum/air bersih sampai dengan tahun 2023 sebanyak 742.626 KK atau 88 persen dari target 843.864 KK.	Bab 2 (Hal 89)	Kabupaten Cianjur akan fokus pada penguatan ketahanan pangan dengan konsep: 1. Ketersediaan Pangan, Ketersediaan pangan mengacu pada jumlah pangan yang tersedia di pasar dan dalam sistem distribusi. Ketersediaan Pangan melibatkan produksi pangan, impor, ekspor,serta stok pangan. Ketersediaan pangan yang mencukupi di pasarlokal dan nasional adalah komponen penting dalam ketahananpangan. 2. Akses Pangan, Akses pangan adalah kemampuan individu atau rumah tangga untuk memperoleh atau membeli pangan yang dibutuhkan. Akses Pangan berkaitan dengan masalah ekonomi dan sosial, termasuk pendapatan, harga pangan, dan jaringan distribusi. Masalah seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi akses pangan. 3. Pemanfaatan Pangan, Pemanfaatan pangan berkaitan dengan cara individu atau keluarga memproses, memasak, dan mengonsumsi pangan. Pemanfaatan Pangan mencakup aspek gizi, kebersihan, dan pemenuhan kebutuhan gizi yang tepat. Cara pemanfaatan pangan juga mencerminkan kualitas gizi yang diterima oleh individu. 4. Sumber Daya Alam (SDA), Meskipun tidak selalu dianggap sebagai komponen utama, kelestarian sumber daya alam adalah faktor kunci dalam ketahanan pangan jangka panjang. Kelestarian SDA termasuk pengelolaan yang berkelanjutan dari lahan pertanian, air, hutan, dan keanekaragaman hayati yang mendukung produksi pangan.	Bab 2 (Hal 82)	Keberlanjutan pembangunan didukung dengan terjaganya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Gambaran kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Cianjur ditunjukan dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Cianjur mencapai 67,67 – 67,86, nilain tersebut berada di atas nilai IKLH di Provinsi Jawa Barat yang mencapai 64,06.	Bab 2 (Hal 43)

INTEGRASI ISU

1	**Laporan KLHS RPJPD**	Isu Strategis			
		Masalah Infrastruktur Dasar Perkotaan			
		(1) Belum tercapainya akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh (2) Belum tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau (3) Belum tercapainya akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai			
	Dokumen RPJPD	Isu dan Permasalahan			Hal.
		Ketersediaan Infrastruktur dasar dan Konektivitas Wilayah	Bab 3 (Hal 29)	(1) Masih kurangnya infrastruktur mitigasi bencana; (2) Infrastruktur yang kurang tangguh, inklusif dan berkelanjutan (3) Layanan infrastruktur permukiman yang belum memadai (4) Lambatnya penanganan kondisi infrastruktur jalan maupun jembatan untuk menunjang aktivitas	Bab 3 (Hal 8, Hal 9, Hal 10)
2	**Laporan KLHS RPJPD**	Isu Strategis			
		Pengelolaan Kawasan, Ekosistem, dan Keanekaragaman Hayati			
		(1) Kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam belum optimal (2) Belum optimalnya pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya (3) Belum optimalnya secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak bencana			
	Dokumen RPJPD	Isu dan Permasalahan			Hal.
		Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Bab 3 (Hal 28)	(1) Adanya alih fungsi lahan (2) Adanya perubahan pola tanam (3) Adanya penurunan kuantitas dan kualitas air bersih	Bab 3 (Hal 15)
3	**Laporan KLHS RPJPD**	Isu Strategis			
		Menurunnya Kualitas Lingkungan			
		(1) Belum optimalnya perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota (2) Belum optimalnya peningkatan kualitas air bersih (3) Belum optimalnya penerapan pengelolaan sumber daya air terpadu			
	Dokumen RPJPD	Isu dan Permasalahan			Hal.
		Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Bab 3 (Hal 28)	(1) Penyediaan air bersih dan sanitasi aman yang belum optimal (2) Lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan air baku (3) Rendahnya kualitas air minum (4) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah (5) Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpadu	Bab 3 (Hal 5, Hal 6, Hal 7)
4	**Laporan KLHS RPJPD**	Isu Strategis			
		Masalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial			
		(1) Masih tingginya angka kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah (2) Masih tingginya angka penyakit menular (3) Rendahnya kesehatan mental dan kesejahteraan masyarakat (4) Masih terdapat penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol (5) Belum tercapainya cakupan kesehatan universal (6) Rendahnya penyediaan akses obat bagi semua masyarakat			

	Dokumen RPJPD	Isu dan Permasalahan			Hal.
		Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Bab 3 (Hal 28)	(1) Jumlah Rumah sakit yang masih kurang (2) Sarana dan prasarana penunjang di layanan kesehatan yang belum sesuai standar (3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat (4) Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (KN) yang belum maksimal	Bab 3 (Hal 4)
5	**Laporan KLHS RPJPD**	Isu Strategis			
		Transformasi Pertumbuhan Ekonomi			
		(1) Rendahnya pertumbuhan ekonomi per kapita (2) Belum tercapainya tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi			
	Dokumen RPJPD	Isu dan Permasalahan			Hal.
		Percepatan transformasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Bab 3 (Hal 28)	(1) Masih rendahnya akses terhadap permodalan usaha mikro (2) Masih rendahnya pemasaran produk usaha mikro (3) Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana usaha mikro	Bab 3 (Hal 19)
6	**Laporan KLHS RPJPD**	Isu Strategis			
		Masalah Pendidikan dan Bertambahnya Jumlah Pengangguran			
		(1) Masih rendahnya capaian pembelajaran yang relevan dan efektif bagi anak (2) Belum tercapainya akses bagi semua anak terhadap pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas (3) Belum tercapainya akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas (4) Minimnya peluang pekerjaan yang layak bagi semua (5) Masih rendahnya layanan kesehatan seksual dan reproduksi			
	Dokumen RPJPD	Isu dan Permasalahan			Hal.
		Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Bab 3 (Hal 28)	(1) masih banyaknya lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan yang belum terakreditasi (2) ketidak jelasan sistem insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan kesetaraan (3) Belum optimalnya data sasaran didik (warga belajar) (4) masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti dan mengenal secara jelas tentang keberadaan dan peran pendidikan nonformal	Bab 3 (Hal 4)

INTEGRASI REKOMENDASI

<table>
<tr><th></th><th></th><th colspan="2">Rekomendasi</th><th>Isu Strategis</th><th>Hal.</th><th>Data Gambaran Umum</th></tr>
<tr><td rowspan="6">1</td><td rowspan="6">Laporan KLHS RPJPD</td><td colspan="2">Pembangunan Kabupaten Cianjur masa depan perlu ditopang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pembangunan tersebut harus mampu mewujudkan sistem perkotaan dan permukiman yang berkelanjutan sehingga tercipta kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Hal tersebut didukung oleh tata kelola, sosial ekonomi yang kuat, infrastruktur, penguatan SDM dan masyarakat yang berbudaya serta kolaborasi dengan pihak swasta disertai dengan kebijakan, penggunaan teknologi dan inovasiinovasi kreatif sehingga mampu menjawab tantangan di masa depan.</td><td rowspan="2">• Isu Nomor3 Menurunnya Kualitas Lingkungan

• Isu Nomor 1 Masalah infrastruktur dasar perkotaan

• Isu Nomor 2 Pengelolaan Kawasan, Ekosistem, dan Keanekaragaman Hayati</td><td rowspan="2">Bab 6 (Hal 6-60)</td><td rowspan="2">• Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau sebesar 39,45%
• Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak sebesar 87,3%
• Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak sebesar 85,79%
• Sebesar 31,02 rasio dari jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
• Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan sebesar 25,86%
• Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebesar 207,62
• Persentase sampah perkotaan yang tertangani sebesar 50%
• Menurunnya kualitas air sungai sebagai sumber air baku dengan indeks pencemar sebesar 1,22
• Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk hanya terdapat 1 WS</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rekomendasi Misi 1 : Mewujudkan infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam perwujudan pembangunan</td></tr>
<tr><td>Rekomendasi Sasaran Pokok</td><td>Rekomendasi Arah Kebijakan</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>(a) Meningkatnya perwujudan infrastruktur kebencanaan yang tangguh
(b) Meningkatnya perwujudan infrastruktur jaringan irigasi yang merata dan terpadu untuk penyediaan pangan
(c) Mempertahankan lahan pertanian agar tidak terjadi alih fungsi lahan;
(d) Menjaga kelestarian sumber-sumber air;
(e) Menjaga kelestarian sumber-sumber pangan;</td><td>Peningkatan Pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia</td></tr>
<tr><td>(a) Menurunnya emisi gas rumah kaca sektor industri
(b) Meningkatnya penggunaan bahan baku local dan penggunaan industri ramah lingkungan</td><td>Peningkatan infrastruktur dan industri berkelanjutan dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan ramah lingkungan</td></tr>
<tr><td>(a) Meningkatnya proporsi pendanaan riset terhadap PDB
(b) Meningkatnya diversifikasi industri dan nilai tambah komoditas</td><td>Peningkatan pengembangan riset serta inovasi dan peningkatan kapabilitas teknologi sektor industri</td></tr>
</table>

		(a) Meningkatnya ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim (b) Meningkatnya koordinasi dan kerja sama untuk rehabilitasi ekosistem darat, laut, dan lahan kritis (c) Menjaga kelestarian berbagai flora dan fauna yang ada; (d) Menggunakan sumberdaya alam secara bijak; (e) Menerapkan perilaku ramah lingkungan;		Peningkatan kapasitas ketahanan dan adaptasi					
		Sasaran Pokok Daerah	Hal.	Arah Kebijakan Daerah	Hal.	Isu dan Permasalahan	Hal.	Data Gambaran Umum	Hal.
	Dokumen RPJPD	Terwujudnya pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dalam menunjang perekonomian	Bab 5 (hal 32)	1) Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green and grey infrastucture) pada kawasan perkotaan 2) Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan 3) Penguatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan 4) Pengendalian dan pengawasan pertumbuhan kawasan 5) Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi rumah dan reformasi subsidi perumahan dari pemerintah daerah 6) Peningkatan efisiensi penyediaan lahan perumahan yang selaras dengan perencanaan tata ruang 7) Pengoptimalan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara menyeluruh sebagai upaya peningkatan kesejahteraan tempat tinggal 8) Pengendalian dan pengawasan pertumbuhan kawasan permukiman 9) Penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan 10) Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan	Bab 5 (hal 32)	• Isu Nomor 3 Percepatan transformasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif • Isu Nomor 4 Ketersediaan Infrastuktur dasar dan konektivitas wilayahsar dan konektivitas wilayah	Bab 3 (Hal 34)	• Berkurangnya Kawasan Kumuh mempunyai 3 indikator kinerja yaitu Persentase Penanganan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan dengan realisasi 13,92 persen dari target 11,79 persen; • Capaian desa mandiri di Kabupaten Cianjur sebesari 9,89%.	Bab 2 (Hal 38, Hal 83)

				perkotaan dan kawasan strategis lainnya 11) Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.) 12) Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah					
		Terwujudnya ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	Bab 5 (hal 39)	• Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana serta pembangunan rendah karbo • Penerapan upaya dekarbonisasi sumber energi, pengembangan sistem peringatan dini kebencanaan; serta memperkuat fungsi konservasi hutan mangrove yang berada di pesisir selatan sekaligus sebagai daya tarik wisata eco-tourism • Penerapan teknologi sistem peringatan dini yang andal dan terintegrasi serta pengoptimalan kapasitas masyarakat dan daerah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim • Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya mitigasi bencana dan pengendalian dampak perubahan iklim	Bab 5 (hal 39)			• Berdasarkan nilai indeks resiko bencana di Kabupaten Cianjur diketahui sebesar 0,102 yang artinya Kabupaten Cianjur memiliki 6 jenis bencana yang berada pada kelas kerentanan rendah bila di rata-ratakan; • penurunan emisi GRK menuju pencapaian Net Zero Emission	Bab 2 (Hal 36, Hal 195)

		Meningkatnya produktivitas perekonomian melalui agroindustry dan pariwisata yang berkelanjutan berbasis kekayaan alam dan budaya local dengan ditunjang oleh teknologi informasi	Bab 5 (Hal 28)	• Pengembangan dan penguatan komoditas (jenis usaha pariwisata dan ekonomi kreatif) dengan penyediaan supply dan demand; optimalisasi kemudahan investasi • Pengembangan infrastuktur pendukung dalam meningkatkan distribusi dan skala pasar • Pertumbuhan sektor ekonomi yang stabil, produktivitas kuat, berdaya saing, dan nilai tambah tinggi • Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancilliary service, aktivitas, available packages); optimalisasi kemudahan investasi • Pengembangan pariwisata berbasis inovasi dan realisasi investasi khususnya pada bidang kepariwisataan • Pengembangan dan penguatan infrastktur pendukung pariwisata dan promosi destinasi secara digital • Peningkatan intensitas pelatihan tenaga kerja untuk memiliki kapasitas enterpreneur; optimalisasi jaminan kesejahteraan tenaga kerja • Peningkatan up-skil dan re-skil tenaga kerja melalui pengembangan Balai latihan kerja dan kerja sama sekolah vokasi/kejuruan • Peningkatan kapasitas tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan peluang lapangan kerja digital • Pemantapan kapasitas tenaga kerja terhadap transformasi digital dan SDM digital	Bab 5 (hal 28)			• jenis usaha Industri Pengolahan pada tahun 2023 mencapai 7,31 persen; • pada sektor akomodasi dan makan minum atau pengembangan pariwisata mencapai 6,36 persen; • jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 45.000 jiwa; • TPT di Kabupaten Cianjur pada Tahun 2023 sebesar 7,36 persen atau sebanyak 107.215 jiwa; • tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapi 140.720 jiwa; • Kabupaten Cianjur berada di peringkat 204 dari 415 Kabupaten di Indonesia dengan skor indeks sebesar 44,35 poin dengan predikat “Inovatif”	Bab 2 (hal 105, hal 49, hal 50, hal 97)

		Rekomendasi	Isu Strategis	Hal.	Data Gambaran Umum
2	**Laporan KLHS RPJPD**	Pembangunan Kabupaten Cianjur masa depan perlu ditopang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pembangunan tersebut harus mampu mewujudkan sistem perkotaan dan permukiman yang berkelanjutan sehingga tercipta kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Hal tersebut didukung oleh tata kelola, sosial ekonomi yang kuat, infrastruktur, penguatan SDM dan masyarakat yang berbudaya serta kolaborasi dengan pihak swasta disertai dengan kebijakan, penggunaan teknologi dan inovasiinovasi kreatif sehingga mampu menjawab tantangan di masa depan. **Rekomendasi Misi 2** : Mewujudkan masyarakat cerdas, sehat, dan sejahtera	• Isu Nomor 6 Masalah Pendidikan dan Bertambahnya Jumlah Pengangguran • Isu Nomor 1 Masalah infrastruktur dasar perkotaan • Isu Nomor 4 Masalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial	Bab 6 (Hal 6-61)	• Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup sebanyak 3 kasus • Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) sebesar 15% • Sebanyak 47 puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa • Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir sebesar 360 • Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 88,31% • Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90% • Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika sebesar 99,91% • Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 56,40% • Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) sebesar 13,91% • Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur sebesar 8,96% • Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern sebesar 23,78% • Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau sebesar 39,45% • Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak sebesar 87,3% • Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak sebesar 85,79%

		Rekomendasi Sasaran Pokok		**Rekomendasi Arah Kebijakan**				
		(a) Menurunnya unmet need pelayanan kesehatan (b) Meratanya akses dan infrastruktur pelayanan dasar Kesehatan (c) Meningkatnya perwujudan Kabupaten Cianjur sebagai daerah dengan zero stunting		Peningkatan Perwujudan cakupan kesehatan universal				
		(a) Meningkatnya perwujudan percepatan implementasi kebijakan penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga (b) Meningkatnya upaya pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat (c) Meningkatnya inventarisasi capaian kabupaten dalam pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP)		Peningkatan Penjaminan akses bagi seluruh masyarakat untuk pemenuhan perumahan layak dalam penataan kawasan kumuh yang memenuhi standar pelayanan				
		(a) Meningkatnya perwujudan industri dengan pengelolaan limbah berkelanjutan (b) Meningkatnya perwujudan pembangunan sistem pengelolaan sampah terpadu regional (c) Meningkatnya perwujudan pengelolaan sanitasi dan persampahan perkotaan terpadu		Penurunan dampak lingkungan perkotaan				
		(a) Meningkatnya kesempatan belajar 12 tahun (b) Meningkatnya kualitas guru (c) Meningkatnya sarana dan prasarana belajar		Peningkatan Pendidikan berkualitas yang ditunjang dengan pengenalan IPTEK				
		Sasaran Pokok Daerah	Hal.	Arah Kebijakan Daerah	Hal.	Isu dan Permasalahan	Hal.	Data Gambaran Umum	Hal.
	Dokumen RPJPD	Terwujudnya masyarakat yang sehat melalui integrasi layanan kesehatan secara merata	Bab 5 (hal 25)	• Peningkatan sarana prasarana penunjang perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan • Perluasan upaya promotif preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan • Pengembangan kualitas sumber daya dan layanan kesehatan primer secara merata • Perwujudan perilaku hidup bersih dan sehat yang berkualitas	Bab 5 (hal 25)	• Isu Nomor 1 Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Bab 3 (hal 34)	• Diketahui usia harapan hidup di Kabupaten Cianjur adalah 74,85 tahun, kondisi ini dapat menggambarkan bahwa Kabupaten Cianjur ke depan harus mulai mempersiapkan diri untuk memasuki masa transisi ageing population; • jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2023 sebanyak 51 kasus mengalami peningkatan dari tahun 2022; • Kabupaten Cianjur	Bab 2 (hal 54, hal 56, hal 78)

				• Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan • Pengembangan kualitas pelayanan kesehatan dan akses pelayanan dan ketahanan kesehatan • Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal • Perwujudan pelayanan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan yang berkualias • Percepatan penuntasan stunting melalui pendampingan calon pengantin serta peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pola asuh dan kesehatan lingkungan • Pengembangan pendampingan calon pengantin serta pelayanan kesehatan ibu dan anak, pola asuh dan kesehatan lingkungan • Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting • Perwujudan zero new stunting • Peningkatan pengobatan lengkap bagi penderita tuberkolosis serta penyediaan layanan kesehatan khusus tuberkolosis • Akselerasi pengobatan lengkap bagi penderita tuberkolosis serta penyediaan layanan kesehatan khusus tuberkolosi • Pengembangan pengobatan lengkap bagi penderita tuberkolosis serta penyediaan layanan kesehatan khusus tuberkolosi • Pemantapan pengobatan lengkap bagi penderita tuberkolosis serta penyediaan layanan kesehatan khusus tuberkolosis • Pemenuhan jaminan kesehatan nasional untuk semua kelompok masyarakat • Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat				masih menghadapi beberapa permasalahan sekaligus tantangan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, yaitu masih tingginya penemuan penyakit menular dan tidak menular, masih ditemukan kasus angka kematian ibu yang berkaitan dengan masih rendahnya kualitas kesehatan reproduksi, masih tingginya angka stunting dan gizi buruk; • Cakupan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Cianjur sudah tinggi melayani masyarakat yaitu berada pada angka 98 persen dari jumlah penduduk total di tahun 2023.	

				• Penguatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan melalui pemerataan dan akses layanan kesehatan • Perwujudan kepesertaan jaminan kesehatan yang merata dan menyeluruh (UHC)					
		Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, bermutu dan merata disetiap jenjang pendidikan	Bab 5 (hal 27)	• Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah • Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital iterasi, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah) • Pengembangan mutu dan tata kelola pendidikan serta akses pendidikan diseluruh jenjang pendidikan dari SD sampai SMP • Perwujudan mutu dan tata kelola pendidikan serta akses pendidikan pada jenjang pendidikan dari SD sampai SMP yang berkualitas • Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan • Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas • Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas • Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan serta Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	Bab 5 (gal 27)				

		Terwujudnya masyarakat mandiri, sejahtera, mampu dan sesuai standar hidup yang layak	Bab 5 (hal 28)	• bantuan sosial • Perluasan penyediaan bantuan sosial • Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan • Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat • Peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar sektor melalui peningkatan SDM dan optimalisasi sistem pendataan PMKS • Peningkatan kapabilitas dan kapasitas PMKS melalui pemberdayaan berbasis kewirausahaan • Peningkatan kolaborasi pentahelix dalam penanggulangan masalah sosial • Pemerataan dan pemantapan perlindungan sosial adaptif masyarakat	Bab 5 (hal 28)				
3	**Laporan KLHS RPJPD**	**Rekomendasi**				**Isu Strategis**	**Hal.**	**Data Gambaran Umum**	
		Pembangunan Kabupaten Cianjur masa depan perlu ditopang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pembangunan tersebut harus mampu mewujudkan sistem perkotaan dan permukiman yang berkelanjutan sehingga tercipta kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Hal tersebut didukung oleh tata kelola, sosial ekonomi yang kuat, infrastruktur, penguatan SDM dan masyarakat yang berbudaya serta kolaborasi dengan pihak swasta disertai dengan kebijakan, penggunaan teknologi dan inovasiinovasi kreatif sehingga mampu menjawab tantangan di masa depan. **Rekomendasi Misi 3** : Kehidupan yang layak dan berkualitas didukung dengan lingkungan yang nyaman				• Isu Nomor 3 Menurunnya Kualitas Lingkungan • Isu Nomor 1 Masalah infrastruktur dasar perkotaan • Isu Nomor 2 Pengelolaan Kawasan, Ekosistem, dan Keanekaragaman Hayati	Bab 6 (Hal 6-62)	• Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau sebesar 39,45% • Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak sebesar 87,3% • Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak sebesar 85,79% • Sebesar 31,02 rasio dari jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang • Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan sebesar 25,86% • Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebesar 207,62 • Persentase sampah perkotaan yang tertangani sebesar 50% • Menurunnya kualitas air sungai sebagai sumber air baku dengan indeks pencemar sebesar 1,22 • Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk hanya terdapat 1 WS	

		Rekomendasi Sasaran Pokok		**Rekomendasi Arah Kebijakan**					
		(a) Meningkatnya pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan dan sesuai dengan DDDTLH; (b) Sinkronnya Rencana Pembagunan dan Rencana Tata Ruang dengan RPPLH; (c) Meningkatnya penyediaan mekanisme pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui berbagai instrument; (d) Meningkatnya kerjasama antar wilayah admnistrasi dalam pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup; (e) Meningkatnya ketersediaan system dan dan instrumen pemantauan dan pelestarian lingkungan hidup dengan indikator yang terukur		Peningkatan Lingkungan Hidup Berkualitas					
	Dokumen RPJPD	Sasaran Pokok Daerah	Hal.	Arah Kebijakan Daerah	Hal.	Isu dan Permasalahan	Hal.	Data Gambaran Umum	Hal.
		Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Bab 5 (hal 37)	• Peningkatan upaya pelestarian kawasan konservasi • Peningkatan efisiensi dalam upaya pelestarian kawasan konservas • Pengoptimalan dan penerapan teknologi sebagai upaya pelestarian kawasan konservasi • Pengendalian kawasan konservasi • Perbaikan dan peningkatan kondisi infrastuktur perumahan dan permukiman • Perluasan jangakauan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman ke area yang sulit mendapatkan sumber air • Penerapan teknologi sebagai upaya pengoptimalan pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman • Pengawasan dan pemantapan kinerja infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman • Pemenuhan layanan pengelolaan limbah dan persampahan serta pemberdayaan tingkat domestik • Pengembangan infrastuktur pengelolaan limbah dan	Bab 5 (hal 37)	• Isu Nomor 1 Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Bab 3 (hal 34)	• Indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Cianjur mencapai 67,67 – 67,86, nilai tersebut berada di atas nilai IKLH di Provinsi Jawa Barat yang mencapai 64,06; • Cakupan air Limbah yang memadai dapat diasumsikan menjadi Rumah Tangga bersanitasi yang sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi berupa fasilitas air bersih, air limbah domestik, drainase, dan persampahan.	Bab 2 (hal 36, hal 81,

				persampahan melalui kerja sama layanan pengelolaan antar daerah (kerjasama antar regional) atau offtaker • Pengembangan dan penerapan teknologi dalam pengelolaan limbah dan persampahan • Pemantapan manajemen pengelolaan limbah dan persampahan yang sirkuler					
4	**Laporan KLHS RPJPD**	**Rekomendasi**				**Isu Strategis**	**Hal.**	**Data Gambaran Umum**	
		Pembangunan Kabupaten Cianjur masa depan perlu ditopang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pembangunan tersebut harus mampu mewujudkan sistem perkotaan dan permukiman yang berkelanjutan sehingga tercipta kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Hal tersebut didukung oleh tata kelola, sosial ekonomi yang kuat, infrastruktur, penguatan SDM dan masyarakat yang berbudaya serta kolaborasi dengan pihak swasta disertai dengan kebijakan, penggunaan teknologi dan inovasiinovasi kreatif sehingga mampu menjawab tantangan di masa depan. **Rekomendasi Misi 4** : Mewujudkan kota yang bertransformasi di bidang sosial dan ekonomi berlandaskan budaya dan kearifan lokal masyarakat Cianjur serta Ekonomi kreatif berbasis teknologi				• Isu Nomor 5 Transformasi Pertumbuhan Ekonomi • Isu Nomor 6 Masalah Pendidikan dan Bertambahnya Jumlah Pengangguran • Isu Nomor 3 Menurunnya Kualitas Lingkungan • Isu Nomor 1 Masalah infrastruktur dasar perkotaan	Bab 6 (Hal 6-63)	• Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau sebesar 39,45% • Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak sebesar 87,3% • Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak sebesar 85,79% • Persentase sampah perkotaan yang tertangani sebesar 50% • Menurunnya kualitas air sungai sebagai sumber air baku dengan indeks pencemar sebesar 1,22 • Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk hanya terdapat 1 WS • Laju pertumbuhan PDB per kapita sebesar 7,51% • Laju pertumbuh an PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun sebesar 1,95% • Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika sebesar 99,91% • Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 56,40% • Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) sebesar 13,91% • Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur sebesar 8,96%	

					• Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern sebesar 23,78%
		Rekomendasi Sasaran Pokok	**Rekomendasi Arah Kebijakan**		
		(a) Meningkatnya pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua (b) Meningkatnya pengembangan teknologi domestic, riset dan inovasi dan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industry dan peningkatan nilai tambah komoditas. (c) Membangun sistem Ekonomi kreatif berbasis teknologi (d) Meningkatnya pengembangan industri pertanian/ agroindustri, berbasiskan pada kekuatan daerah	Peningkatan Pengembangan perekonomian daerah melalui teknologi ramah lingkungan yang disertai riset serta inovasi			
		(a) Meningkatnya karakter masyarakat melalui pendidikan formal, informal, dan non formal (b) Meningkatnya penguatan budaya dan kearifan local masyarakat (c) Meningkatnya peran serta orang tua, guru, dan tokoh masyarakat dalam penguatan karakter masyarakat.	Peningkatan Penguatan karakter masyarakat		
		(a) Meningkatnya penguatan ekosistem industrialisasi (Pembiayaan, Riset, Inovasi, Standarisasi, Skema Insentif) (b) Meningkatnya produktivitas sector pertanian dan kesejahteraan petani dan nelayan. (c) Meningkatnya nilai tambah pada sector eksisting/ tradisional (pertanian, perikanan, industri, perdagangan, dan parwisata) dan mendorong pengembangan sector baru (energi terbarukan, bioteknologi, manajemen lingkungan). (d) Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis sumberdaya alam lokal. (e) Meningkatnya penguatan ketahanan pangan daerah.	Peningkatan Pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat		

		Sasaran Pokok Daerah	Hal.	Arah Kebijakan Daerah	Hal.	Isu dan Permasalahan	Hal.	Data Gambaran Umum	Hal.
	Dokumen RPJPD	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Bab 5 (hal 29)	• Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity • Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya) • Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global • Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis • Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform • Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian • Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian • Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	Bab 5 (hal 29)	• Isu Nomor 3 Percepatan transformasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Bab 3 (hal 34)	Mewujudkan Transformasi Ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif termasuk industri manufaktur, blue economy, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta Pembangunan perkotaan berkelanjutan.	Bab 2 (hal 190)

		Meningkatnya investasi untuk menciptakan rantai pasok produksi yang efektif efisien dan berdaya saing	Bab 5 (hal 31)	• Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha • Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif • Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. • Pemantapan industrialiasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Bab 5 (hal 31)				

Cianjur, 30 Agustus 2024

BUPATI CIANJUR

ttd/cap.

H. HERMAN SUHERMAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR